



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JAKARTA 2017



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 - 2017



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JAKARTA 2017

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 - 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2013 - 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
25. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kota administrasi dan kabupaten administrasi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan atas:
 - a. demokrasi;
 - b. berkeadilan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. transparansi;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. visi, misi, dan program Gubernur;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. strategi pembangunan daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program SKPD;

- f. program lintas SKPD;
 - g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - h. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Visi, misi dan program Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Gubernur terpilih.
- (3) Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (4) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (5) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai tahapan dan jadwal pelaksanaan program prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (6) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program Lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
- (10) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD/UKPD.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
- (5) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.
- (2) Gubernur pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2013
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

NIP 195803121986101001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013 – 2017

I. UMUM

Jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat keuangan dan jasa, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional dan gerbang utama wisatawan manca Negara. Selain itu, Jakarta juga sebagai Provinsi Daerah Khusus Ibukota yang terbagi dalam lima wilayah Kota Administratif dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang bukan merupakan Daerah Otonom.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk, yang semakin bertambah dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi perembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2017. RPJMD Provinsi DKI Jakarta memuat visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung. RPJMD Provinsi DKI Jakarta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Provinsi DKI Jakarta. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Jakarta secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017 merupakan kelanjutan dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007–2012 untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPJD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Untuk itu periode 5 (lima) tahun mendatang merupakan periode peningkatan pembangunan kota Jakarta yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Jakarta untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (a) mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, (b) menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain, (c) menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota, (d) membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota, (d) membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini terdiri dari 6 bab dan 12 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-satuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijewai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2013-2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



DAFTAR ISI

| | | | |
|--|----|---|----|
| PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2017 | 7 | 2.3 Aspek Pelayanan Umum | 64 |
| PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2017 | 19 | 2.3.1 Pendidikan | 64 |
| BAB I PENDAHULUAN | 34 | 2.3.2 Kesehatan | 66 |
| 1.1 Latar Belakang | 36 | 2.3.3 Pekerjaan Umum | 68 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | 38 | 2.3.4 Perumahan Rakyat | 72 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya | 40 | 2.3.5 Penataan Ruang | 72 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 42 | 2.3.6 Perhubungan | 73 |
| 1.5 Maksud dan Tujuan | 44 | 2.3.7 Lingkungan Hidup | 74 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | 46 | 2.3.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 76 |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi | 48 | 2.3.9 Ketenagakerjaan | 76 |
| 2.1.1 Kondisi Geografis | 48 | 2.3.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | 78 |
| 2.1.2 Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi | 49 | 2.3.11 Penanaman Modal | 78 |
| 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana | 51 | 2.3.12 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | 79 |
| 2.1.4 Kondisi Demografi | 54 | 2.3.13 Komunikasi dan Informatika | 80 |
| 2.1.5 Penggunaan Lahan | 55 | 2.3.14 Perdagangan | 81 |
| 2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah | 56 | 2.4 Aspek Daya Saing Daerah | 81 |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | 57 | 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Makro | 81 |
| 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | 57 | 2.4.2 Kemampuan Keuangan Daerah | 82 |
| 2.2.2 Kesejahteraan Sosial | 60 | 2.4.4 Fasilitas Infrastruktur | 82 |
| 2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga | 62 | 2.4.3 Iklim Investasi | 83 |
| BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN | 86 | 2.4.5 Lingkungan Strategis Nasional, Regional, dan Global | 84 |
| 3.1 Kinerja Keuangan Daerah | 88 | 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2007-2012 | 91 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------|---------------|---|------------|
| 3.1.2 | Neraca Daerah | 102 | 4.2.4 | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH | 130 |
| 3.2 | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2007-2012 | 105 | 4.2.5 | Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja | 130 |
| 3.2.1 | Proporsi Penggunaan Anggaran | 105 | 4.2.6 | Pembangunan Budaya Multi-Kultur | 131 |
| 3.2.2 | Analisis Pembiayaan | 107 | 4.2.7 | Peningkatan Pelayanan Publik | 131 |
| 3.3 | Kerangka Pendanaan | 109 | 4.2.8 | Peningkatan Kualitas Pendidikan | 131 |
| 3.3.1 | Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 109 | 4.2.9 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | 131 |
| 3.3.2 | Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2013-2017 | 110 | 4.3. | Isu-isu Lain yang Patut Dipertimbangkan | 132 |
| 3.3.3 | Penghitungan Kerangka Pendanaan | 113 | 4.3.1 | Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota | 132 |
| BAB IV | ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | 116 | 4.3.2 | Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat | 132 |
| 4.1. | Permasalahan Pembangunan Daerah | 118 | 4.3.3 | Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim | 132 |
| 4.1.1 | Sistem Transportasi | 118 | 4.3.4 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 133 |
| 4.1.2 | Banjir dan Genangan | 119 | 4.3.5 | Penguatan Ketahanan Pangan | 133 |
| 4.1.3 | Perumahan dan Permukiman | 120 | 4.3.6 | Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas | 134 |
| 4.1.4 | Ruang Terbuka Hijau | 120 | 4.3.7 | Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi | 134 |
| 4.1.5 | Kemiskinan Kota | 121 | 4.3.8 | Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan | 134 |
| 4.1.6 | Reformasi Birokrasi | 121 | 4.3.9 | Jakarta sebagai Ibukota NKRI | 135 |
| 4.1.7 | Pembangunan Pendidikan | 122 | 4.3.10 | Peningkatan Daya Saing Global | 135 |
| 4.1.8 | Kesehatan Masyarakat | 122 | 4.3.11 | Pembangunan Telematika Jakarta | 136 |
| 4.1.9 | Penataan Ruang | 123 | BAB V | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | 138 |
| 4.1.10 | Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat | 123 | 5.1 | Visi | 140 |
| 4.1.11 | Perubahan Iklim | 124 | 5.2 | Misi | 141 |
| 4.1.12 | Pencemaran Lingkungan | 124 | 5.3 | Tujuan dan Sasaran Per Misi | 146 |
| 4.1.13 | Pengelolaan Air Bersih | 125 | BAB VI | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 160 |
| 4.1.14 | Ketahanan Pangan | 125 | 6.1. | Strategi | 162 |
| 4.1.15 | Ketahanan Energi Listrik dan Gas | 126 | 6.2. | Arah Kebijakan | 167 |
| 4.1.16 | Stabilitas Ekonomi | 126 | 6.2.1 | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013) | 167 |
| 4.1.17 | Iklim Investasi | 127 | 6.2.2 | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014) | 167 |
| 4.1.18 | Perdagangan dan Jasa | 127 | 6.2.3 | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015) | 168 |
| 4.1.19 | Keuangan Daerah | 128 | 6.2.4 | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016) | 168 |
| 4.1.20 | Kerjasama Antar Daerah di Jabodetabekjur | 128 | | | |
| 4.2. | Isu-isu Strategis | 128 | | | |
| 4.2.1 | Pengembangan Sistem Transportasi | 129 | | | |
| 4.2.2 | Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan | 129 | | | |
| 4.2.3 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota | 129 | | | |

| | | |
|--|---|------------|
| 6.2.5 | Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017) | 169 |
| BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | 192 |
| 7.1 | Kebijakan Umum Pembangunan | 194 |
| 7.2 | Program Prioritas Pembangunan Daerah | 196 |
| 7.3 | Program Unggulan | 200 |
| BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN | | 204 |
| BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | | 240 |
| BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN | | 252 |
| 10.1 | Pedoman Transisi | 254 |
| 10.2 | Kaidah Pelaksanaan | 254 |
| BAB XI PENUTUP | | 256 |



DAFTAR TABEL

| | | | | | |
|------------|---|-----|------------|--|-----|
| Tabel 2.1 | Percentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2007 – 2011 | 64 | Tabel 3.14 | Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Belanja Dedicated Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 | 109 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2007 – 2010 | 68 | Tabel 3.15 | Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 110 |
| Tabel 2.3 | Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Jalan Tahun 2011 | 69 | Tabel 3.16 | Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | 111 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Indikator Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 91 | Tabel 3.17 | Proyeksi Belanja Mengikat dan Prioritas I Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | 112 |
| Tabel 3.2 | Percentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 93 | Tabel 3.18 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | 113 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 94 | Tabel 3.19 | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | 113 |
| Tabel 3.4 | Rencana dan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 101 | Tabel 3.20 | Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | 114 |
| Tabel 3.5 | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 101 | Tabel 3.21 | Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 | 114 |
| Tabel 3.6 | Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 102 | Tabel 3.22 | Proyeksi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | 115 |
| Tabel 3.7 | Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 103 | Tabel 5.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | 151 |
| Tabel 3.8 | Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011 | 104 | Tabel 6.1 | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi | 170 |
| Tabel 3.9 | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 | 106 | Tabel 6.2 | Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta | 171 |
| Tabel 3.10 | Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 | 106 | Tabel 7.1 | Program Prioritas Pembangunan Daerah Serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan | 260 |
| Tabel 3.11 | Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 107 | Tabel 8.1 | Indikasi Rencana Program Provinsi DKI Jakarta | 304 |
| Tabel 3.12 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 108 | Tabel 9.1 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta | 242 |
| Tabel 3.13 | Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkalaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011 | 108 | | | |



DAFTAR GAMBAR



| | | | |
|---|----|---|----|
| Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 41 | Gambar 2.23 Total Pelayanan Kasus yang Ditangani Melalui Gakin, SKTM, dan Korban Bencana Tahun 2007-2011 | 67 |
| Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta | 49 | Gambar 2.24 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 | 70 |
| Gambar 2.2 Peta Tematik 13 Sungai di Provinsi DKI Jakarta | 50 | Gambar 2.25 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 | 70 |
| Gambar 2.3 Penurunan Tanah Jakarta dari Tahun ke Tahun | 52 | Gambar 2.26 Beban Puncak Listrik Jakarta Pada Tahun 2011 dan Proyeksinya (MW) pada Tahun 2020 | 71 |
| Gambar 2.4 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam | 53 | Gambar 2.27 Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi DKI Jakarta | 77 |
| Gambar 2.5 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 | 54 | Gambar 2.28 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta | 77 |
| Gambar 2.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Provinsi DKI Jakarta | 54 | Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing Tahun 2008-2011 | 84 |
| Gambar 2.7 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2007-2011 | 55 | Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah | 89 |
| Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Bodetabek Tahun 2010 | 55 | Gambar 3.2 Analisis Proyeksi Belanja Daerah | 90 |
| Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan Eksisting di Provinsi DKI Jakarta | 56 | Gambar 3.3 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah | 90 |
| Gambar 2.10 Peta Pusat Kegiatan Provinsi DKI Jakarta | 57 | Gambar 3.4 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012 | 95 |
| Gambar 2.11 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta | 57 | Gambar 3.5 Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 96 |
| Gambar 2.12 Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 58 | Gambar 3.6 Pertumbuhan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012 | 97 |
| Gambar 2.13 Grafik Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta | 58 | Gambar 3.7 Pertumbuhan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012 | 98 |
| Gambar 2.14 PDRB per Kapita DKI Jakarta atas Dasar Harga Berlaku | 59 | | |
| Gambar 2.15 Gambaran Kemiskinan di DKI Jakarta Tahun 2007-2012 | 60 | | |
| Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 | 60 | | |
| Gambar 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007-2011 | 61 | | |
| Gambar 2.18 Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2007-2010 | 62 | | |
| Gambar 2.19 Jumlah Kegiatan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 | 63 | | |
| Gambar 2.20 Angka Kelulusan SMA di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 | 64 | | |
| Gambar 2.21 Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOP) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 | 65 | | |
| Gambar 2.22 Pemberian Kartu Gratis/Beasiswa Rawan Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2011 | 66 | | |



BAB 1

PENDAHULUAN

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sewajarnya mendorong filosofi pembangunannya sebagaimana tujuan nasional dengan tetap memperhatikan serta memahami peran dan posisi Jakarta.

Adapun peran yang sudah dilaksanakan Provinsi DKI Jakarta selama ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ibukota NKRI berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan sehingga menjadi pusat pemerintahan;
2. Pusat kegiatan ekonomi regional, nasional dan internasional, dimana hampir 80% kegiatan ekonomi global yang ada di Indonesia berada di Jakarta;
3. Pusat kegiatan politik ASEAN dan salah satu sentra politik Asia-Pasifik tempat beradanya Kedutaan Besar negara sahabat;
4. Pusat kegiatan budaya;
5. Pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan intelektual; dan
6. Pintu gerbang utama menuju dunia Internasional.

Sementara posisi Provinsi DKI Jakarta dalam koridor pembangunan nasional maupun daya saing global dapat dilihat sebagai berikut :

1. Posisi Jakarta dalam MP3EI berada pada Koridor Ekonomi Jawa dengan tema pembangunan "Pendorong Industri dan Jasa Nasional", dimana Jakarta merupakan salah satu dari 5 (lima) pusat kegiatan ekonomi selain Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya dengan fokus kegiatan ekonomi utama yaitu makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, alutsista dan Jabodetabek area;
2. Posisi Jakarta dalam daya saing global berada pada peringkat 81 dengan skor 44,1 dari 120 kota dunia (menurut *Economist Intelligence Unit*, tahun 2012). Sedangkan *Global City Index* pada tahun 2012 menempatkan Jakarta pada posisi 54 dari 66 kota dunia berdasarkan tolak ukur aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, kekayaan budaya dan kondisi politik.

Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sewajarnya mendorong filosofi pembangunannya sebagaimana tujuan nasional dengan tetap memperhatikan serta memahami peran dan posisi Jakarta.

Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain disamping menyimpan potensi yang sangat besar. Untuk menangani tantangan dan permasalahan serta mengembangkan potensi-potensi tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dapat dicapai, ada target yang akan dicapai dan ada jangka waktu pencapaian target yang jelas (*SMART = Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely*) dengan memperhatikan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup yang didukung oleh pilar Aparatur atau Birokrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi serta menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Gubernur terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan tersebut sehingga mampu meningkatkan peran dan posisi Jakarta. Sebagaimana diketahui, Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 telah dilantik pada tanggal 15 Oktober 2012.

Dalam menyusun RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, telah dilakukan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politik, Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan para pakar dan tenaga ahli yang sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD;
2. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini;
3. Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh Gubernur terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan oleh daerah dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur serta inventarisasi masukan dari Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja daerah (Renstra SKPD) yang harus diakomodir dalam RPJMD.

Dengan dilakukannya 5 (lima) pendekatan tersebut, maka secara substansi RPJMD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan posisi Jakarta, serta tugas dan fungsi Jakarta.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

25. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33).

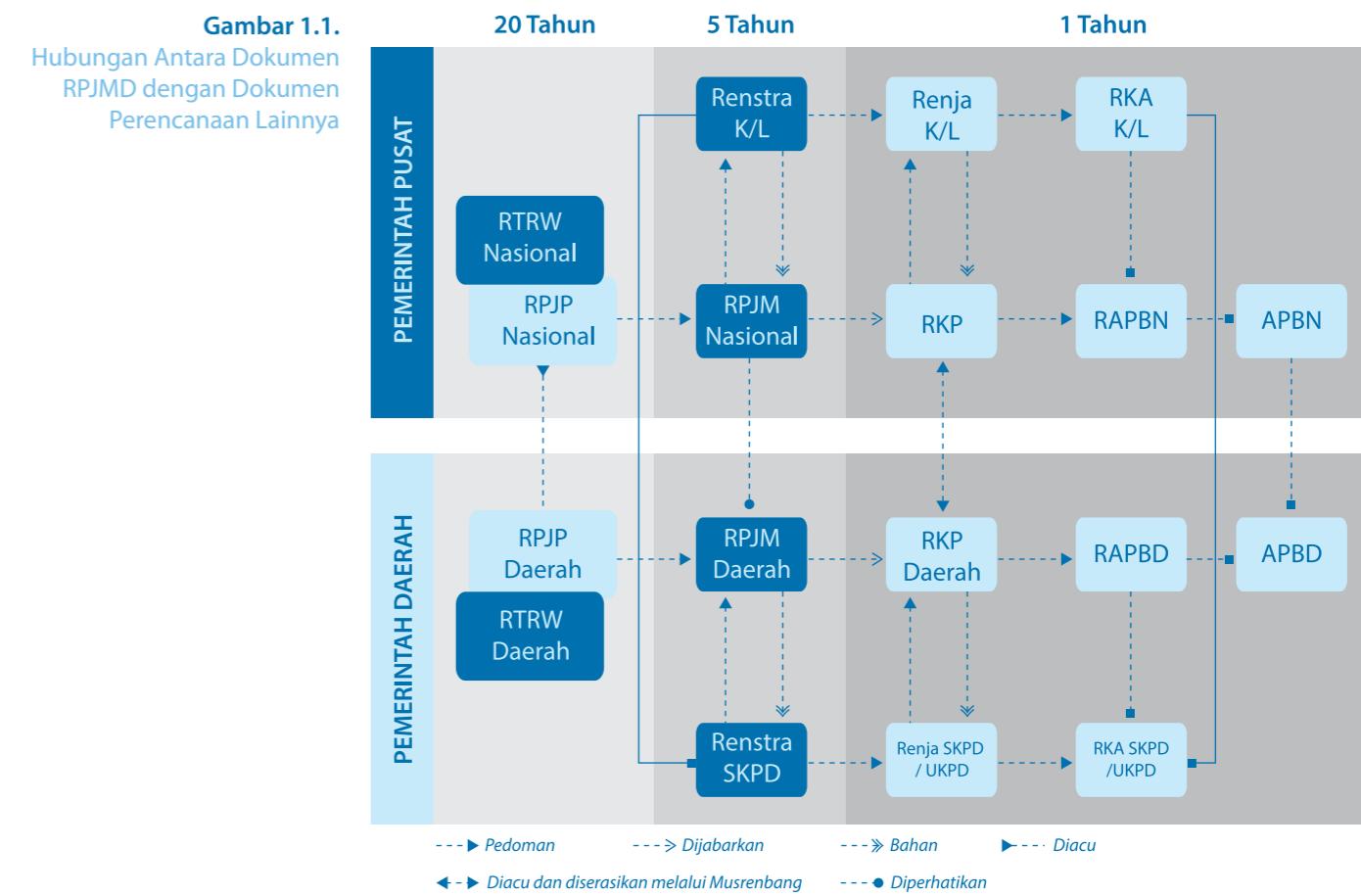
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 sebagai dokumen perencanaan pembangunan

disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Provinsi DKI 2030, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta.

Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Metropolitan Priority Area (MPA), target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



*... untuk mencapai
target sasaran
tersebut dirumuskan
strategi dan arah
kebijakan
pembangunan serta
program prioritas
dan indikator
outcome dari
masing-masing
program
beserta kerangka
pendanaannya ...*

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 pada intinya adalah skema penjabaran visi misi Gubernur terpilih yang dijabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan yang merupakan *goals* dari visi misi tersebut yang selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran pembangunan beserta target-target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas dan indikator *outcome* dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun format penulisan penjabaran visi misi tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan posisi dan peran kota Jakarta, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini memaparkan gambaran umum kondisi DKI Jakarta yang selaras dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, serta mendukung visi misi Gubernur yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan tahun 2007-2012 meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2007-2012 meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2013-2017, serta penghitungan kerangka pendanaannya.

Bab IV Analisis Isu-isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan kota Jakarta yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan kota Jakarta di masa yang akan datang.

Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013 – 2017 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada

bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.

Bab VI

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Karena strategi dan arah kebijakan adalah rumusan kebijakan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi misi maka hanya mengcover beberapa urusan pemerintahan yang sangat terkait dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Untuk urusan pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan visi dan misi, maka yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakannya adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan oleh 15 Kementerian/Lembaga.

Bab VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan secara umum dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja *outcome* yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun program yang disajikan dalam bab ini hanya program yang bersifat prioritas karena terkait dengan penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sementara itu untuk program-program yang tidak terkait secara langsung dengan visi misi diarahkan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal yang akan disajikan dalam Bab VIII.

Dari program-program prioritas tersebut, selanjutnya akan ditentukan program-program unggulan yang merupakan prioritas utama Gubernur yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab VIII

Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program unggulan, program prioritas, maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

Selain itu juga akan disajikan program teknis bersama dan program bersama penunjang organisasi sebagai dasar operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (*impact*) pada tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian indikator hasil (*outcome*) pada masing-masing program sebagaimana disajikan dalam Bab VII.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bagian ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD 2018, pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan peraturan lainnya (Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur) agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Bab XI Penutup

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2013-2017;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Gubernur terpilih;
6. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah DKI Jakarta;
7. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
6. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
7. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan di Jakarta selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Pembangunan di Jakarta selama ini telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disampaikan gambaran umum sebagai berikut :

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi geografis antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan dengan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km², meliputi 662,33 km² daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km² lautan.

Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13 km²; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 146,66 km²; Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 km²; Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km²; dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km².

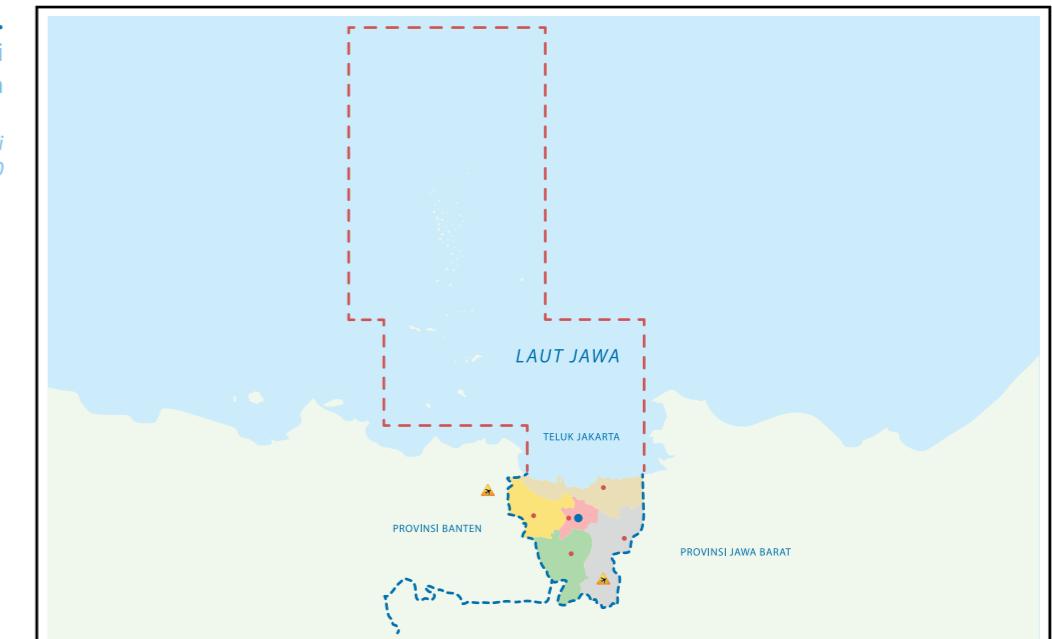
Secara administrasi kewilayahan, masing-masing Kota dan Kabupaten Administratif dibagi menjadi beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut dibagi menjadi beberapa kelurahan. Kota Administratif Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 44 Kelurahan, 394 RW, dan 4.668 RT. Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 31 Kelurahan, 431 RW, dan 5.072 RT. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 56 Kelurahan, 580 RW, dan 6.409 RT. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 Kelurahan, 576 RW, dan 6.128 RT. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 Kelurahan, 700 RW, dan 7.886 RT. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu hanya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan, 24 RW, dan 116 RT.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan

Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Provinsi
DKI Jakarta

Sumber : RTRW Provinsi
DKI Jakarta 2030



2.1.2 Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut. Namun, sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1 - 1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Secara geologis, seluruh wilayah Jakarta merupakan dataran aluvial, yang materi tanahnya merupakan endapan hasil pengangkutan aliran permukaan dan air sungai yang mengalir pada wilayah tersebut. Di samping itu, wilayah Jakarta terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan tanah dimana bagian selatan terdiri atas lapisan aluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 kilometer. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun oleh endapan *alluvium*.

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, yaitu sekitar 155 km². Wilayah ini membentang dari timur sampai barat sepanjang kurang lebih 35 kilometer, dan menjorok ke dalam antara 4 - 10 kilometer. Wilayah pesisir Jakarta merupakan pantai beriklim panas dengan rata-rata suhu 28,50C dan rata-rata kelembaban 72 persen.

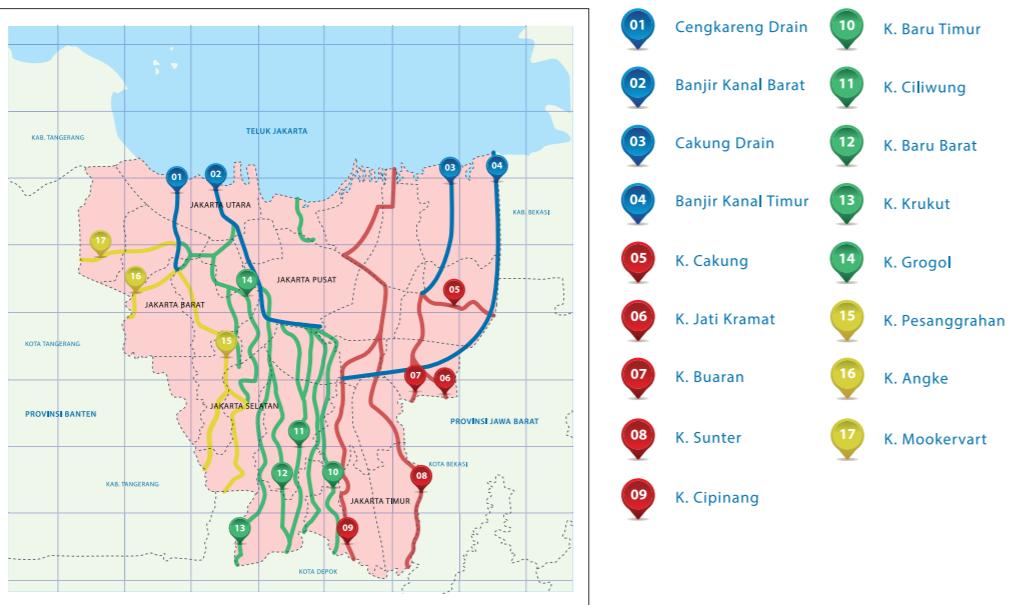
Di samping wilayah pesisir, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pulau-pulau kecil yang terletak di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah ini memiliki luas beragam, sebanyak 45 persen berukuran kurang dari 5 (lima) hektar, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5-10 hektar, dan hanya 30 persen yang luasnya lebih dari 10 hektar. Pulau-pulau memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong

karang, iklim tropis panas dan kelembaban berkisar antara 75-99 persen. Dari pulau-pulau kecil tersebut, pulau yang dihuni oleh penduduk hanya berjumlah 11 pulau.

Berdasarkan letaknya Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Kota delta Jakarta dialiri oleh 13 aliran sungai dan dipengaruhi oleh air pasang surut.

Tiga belas sungai yang melewati Jakarta sebagian besar berhulu di daerah Jawa Barat dan bermuara di Teluk Jakarta. Tiga belas sungai tersebut yaitu Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Disamping itu, sebagai sarana pengendali banjir, telah dibangun 2 (dua) kanal besar yaitu Kanal Banjir Barat yang memotong Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur yang memotong Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter dan Kali Cipinang. Peta sungai dan kanal yang melewati wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2.
Peta Tematik Tiga Belas Sungai di Provinsi DKI Jakarta



Keadaan iklim di wilayah Jakarta menurut stasiun pengamatan Jakarta tahun 2011 memiliki suhu udara rata-rata 28,4°C dengan kelembaban udara 74 persen, tekanan udara 1009,6 mbs, arah angin 270 point, kecepatan angin 2 (dua) mill/h, penyinaran matahari 45 persen dan curah hujan rata-rata 2.395 mm².

Secara umum, DKI Jakarta tidak lepas dari dampak fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pola kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir kiriman, dan Rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu, terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.

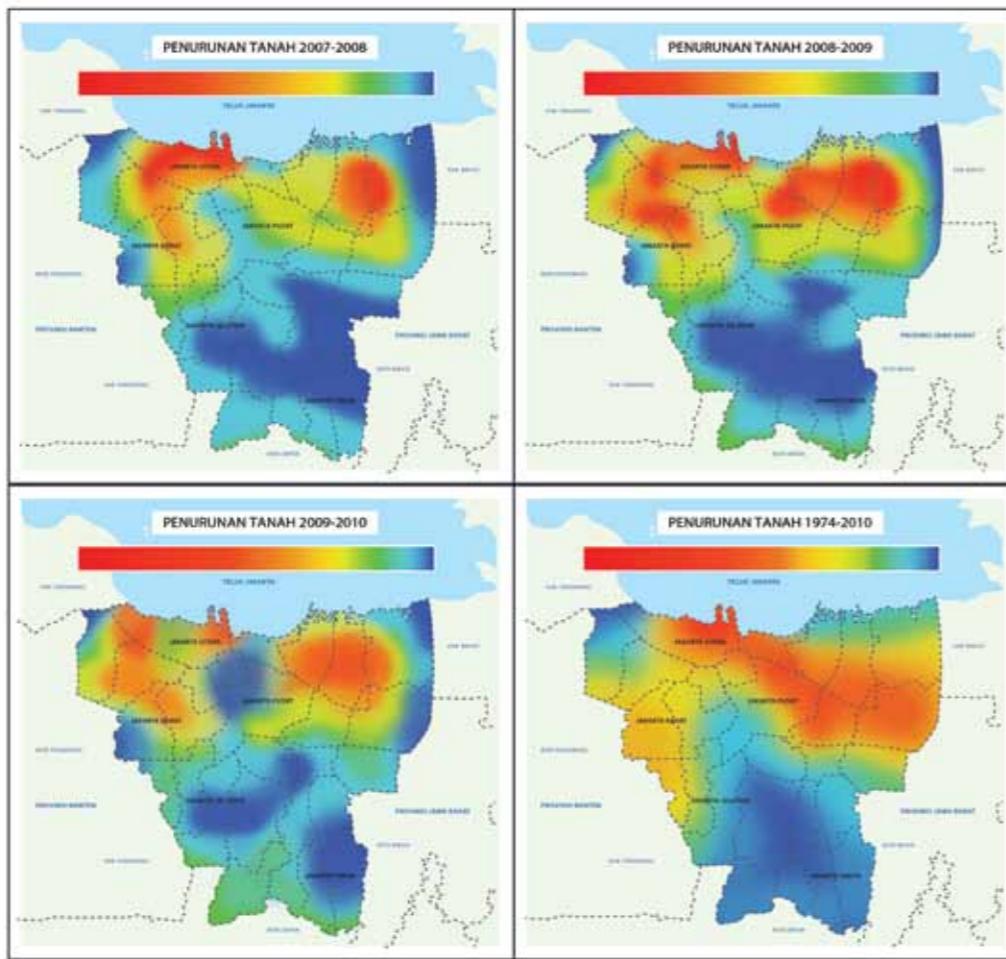
Jika dilihat historis peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta cenderung meningkat luasannya, pada tahun 1980 daerah genangan Jakarta adalah seluas 7,7 km², pada tahun 1996 seluas 22,59 km², pada tahun 2002 adalah seluas 167,88 km², dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 238,32 km². Pada tahun 2002 daerah genangan diperkirakan mencapai sekitar 13 persen dari wilayah DKI Jakarta sedangkan pada banjir tahun 2007 sekitar 37 persen dari wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak akibat banjir, telah dipasang 34 unit *early warning* khususnya untuk sungai yang sering menjadi tempungan air hujan yaitu di Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Pesanggrahan dan Sungai Angke.

Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). Secara umum laju penurunan tanah yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 centimeter per tahun, bervariasi secara spasial maupun temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (*settlement*), penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik.

Beberapa daerah yang mengalami *subsidence* cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai *subsidence* paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai *subsidence* relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Penurunan Tanah Jakarta
dari Tahun ke Tahun.

Sumber: Naskah Akademis RTRW
Provinsi DKI Jakarta 2030



Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan. Di wilayah DKI Jakarta terdapat 53 kelurahan yang rawan bencana kebakaran.

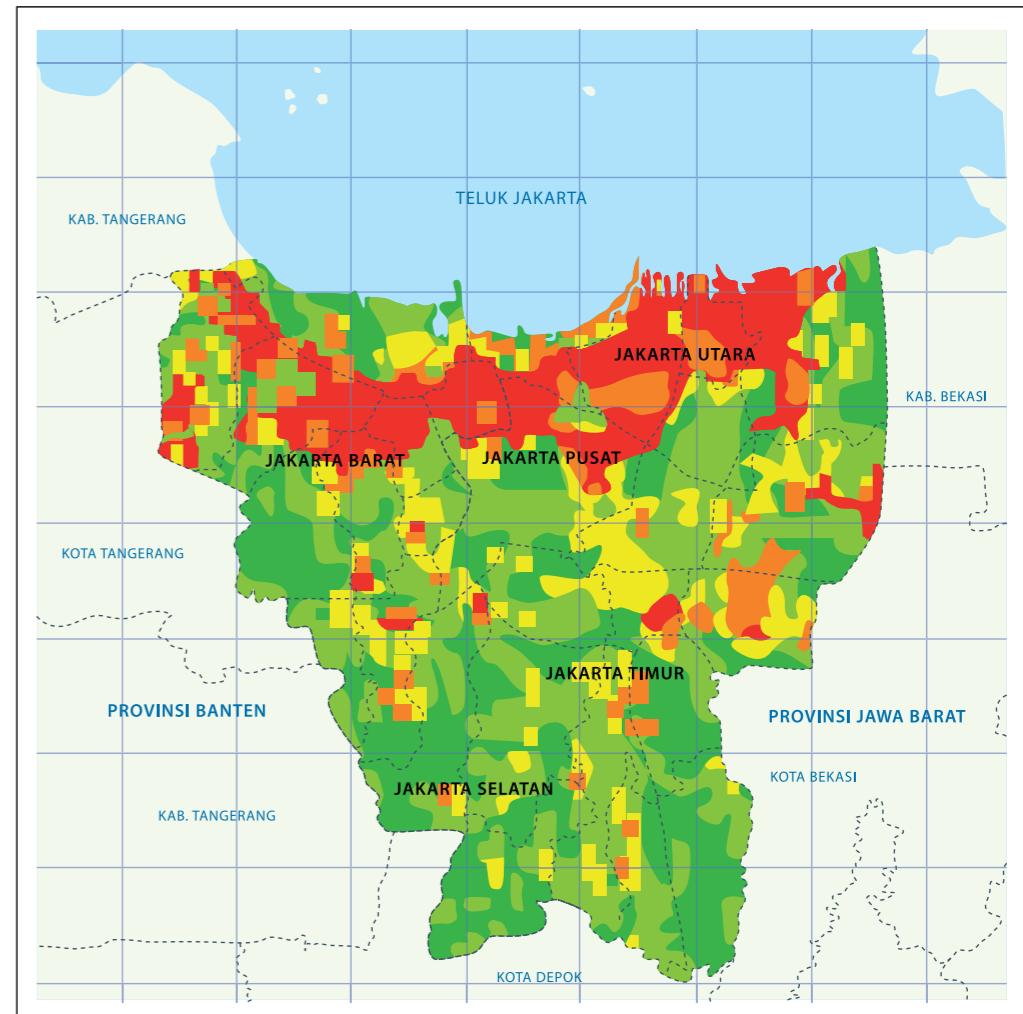
Secara ekonomi, kebakaran mengakibatkan kerugian materi yang tidak sedikit. Pada tahun 2011, kebakaran yang terjadi di Jakarta telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp.219 Miliar dengan total area kebakaran mencapai 444 hektar.

Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10 sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif dan berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan seluruh Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat *seismic gap* (daerah jalur gempa dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian Utara yang merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa berdasarkan data sekunder.

Gambar 2.4.
Peta Kawasan Rawan
Bencana Alam

Sumber: RTRW Provinsi
DKI Jakarta 2030



KETERANGAN

- SUNGAI KANAL
- - - BATAS PROVINSI
- - - BATAS KOTA ADMINISTRASI
- - - - BATAS KECAMATAN
- LOKASI TERGENANG BANJIR TAHUN 2007
- LOKASI TERGENANG BANJIR TAHUN 2002

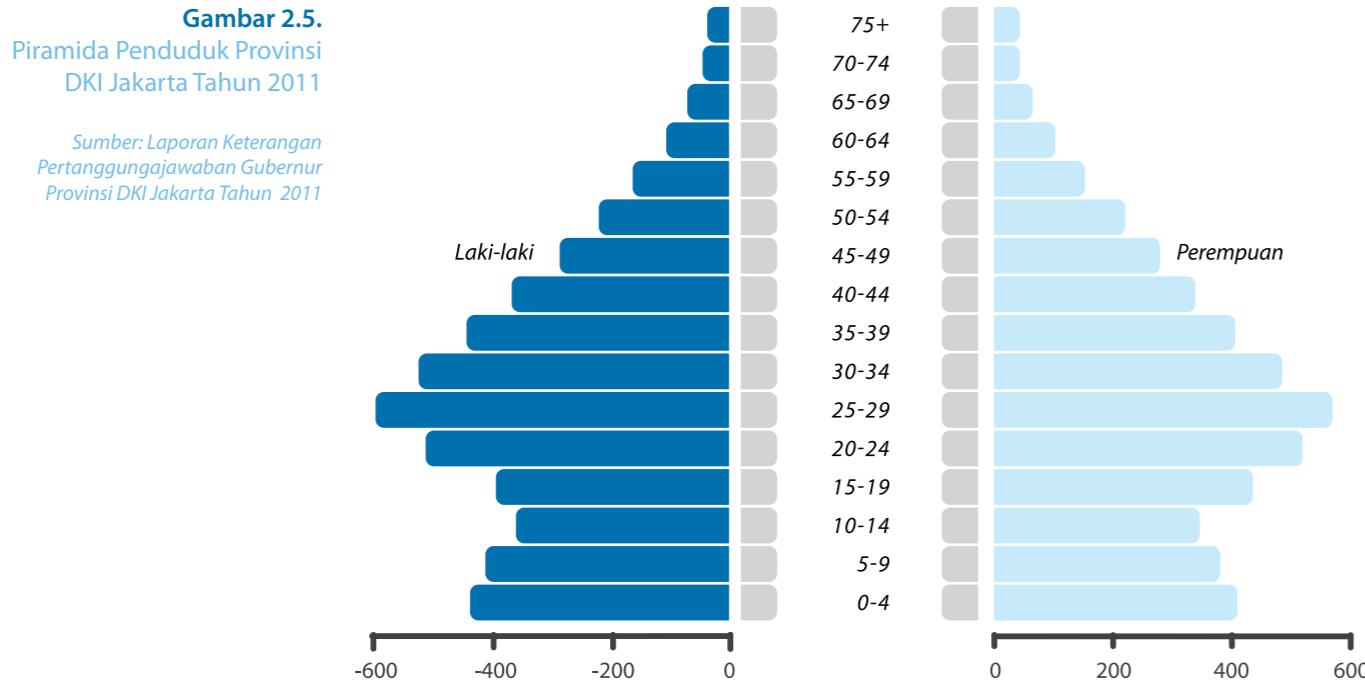
TINGKAT KERAWANAN BENCANA

- | | |
|---|---------------|
| ■ | SANGAT RENDAH |
| ■ | RENDAH |
| ■ | SEDANG |
| ■ | TINGGI |
| ■ | SANGAT TINGGI |

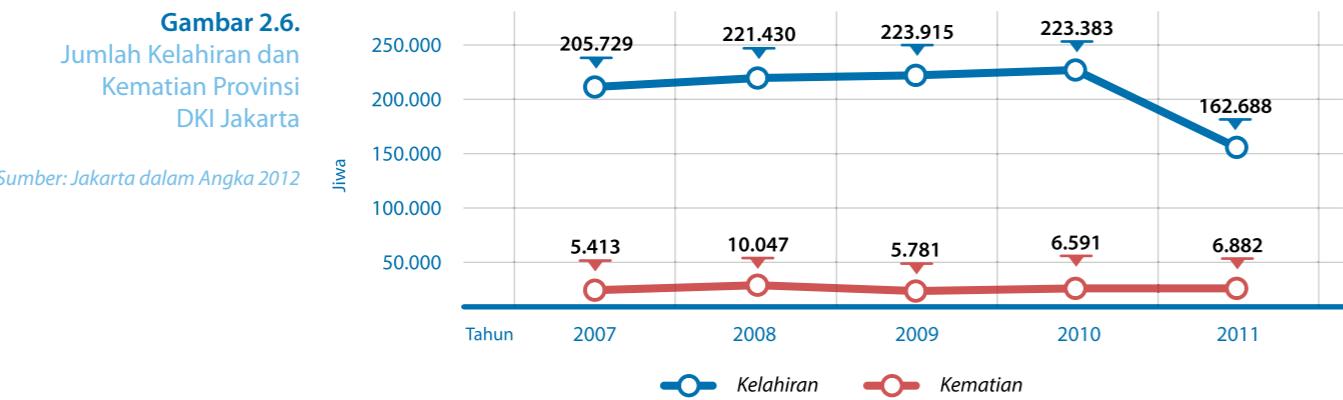
2.1.4 Kondisi Demografi

Pada tahun 2006, penduduk DKI Jakarta berjumlah 8.961.680 jiwa, sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk bertambah menjadi 10.187.595 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, penduduk laki-laki adalah sebanyak 5.252.767 jiwa dan perempuan sebanyak 4.934.828 jiwa, dengan seks rasio 106.

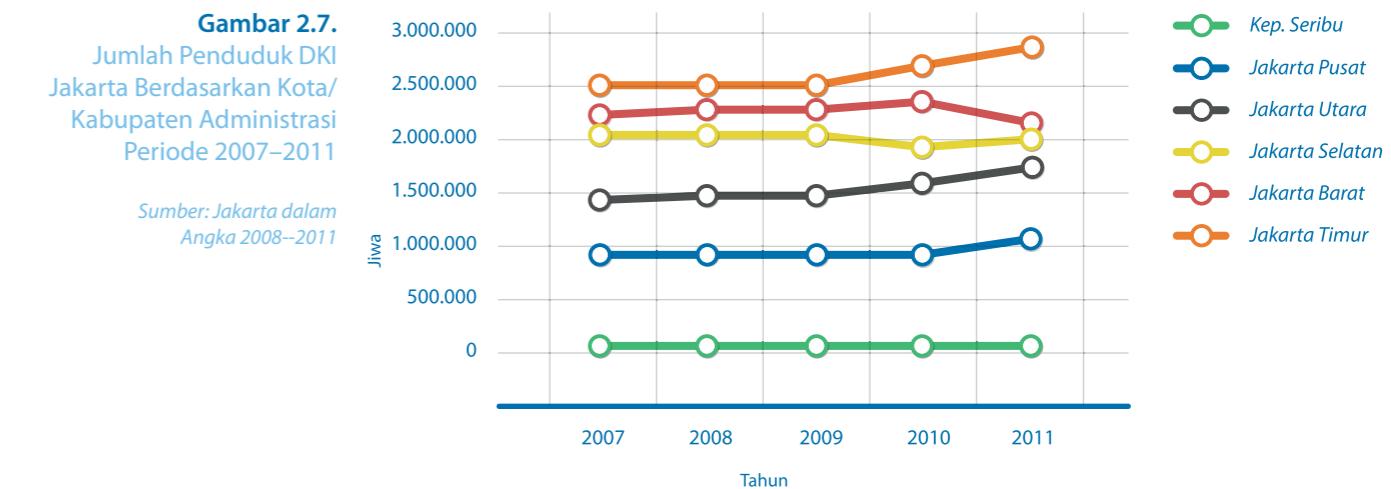
Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada periode 2000 - 2010 sebesar 1,42 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1990 – 2000 hanya sebesar 0,78 persen per tahun. Struktur penduduk di Jakarta dapat dilihat pada gambar piramida penduduk berikut.



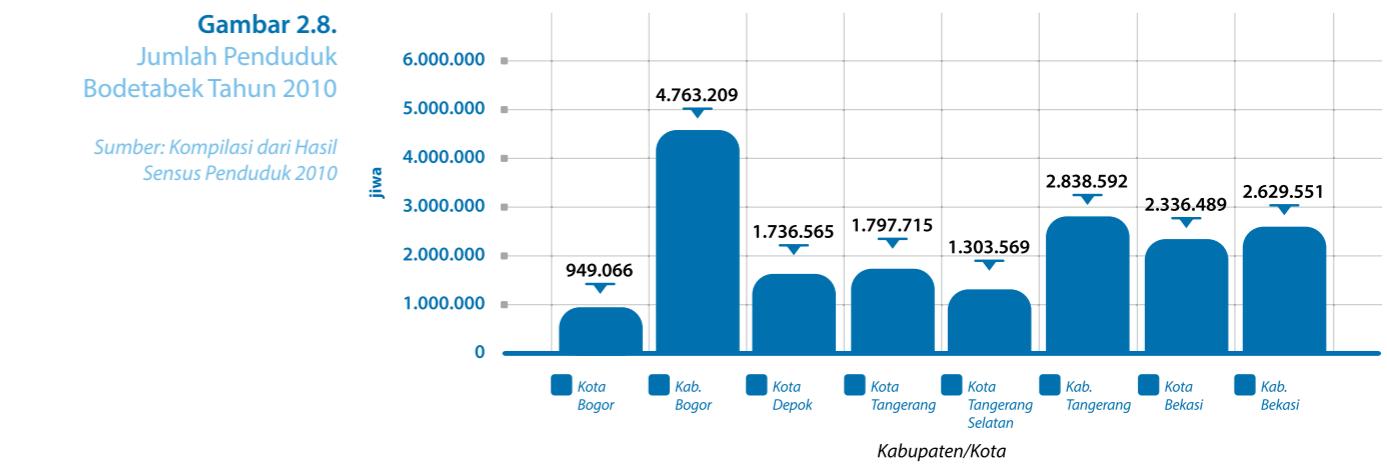
Jumlah penduduk Jakarta dipengaruhi oleh angka kelahiran yang lebih besar daripada jumlah kematian. Angka kelahiran dan kematian yang terregistrasi ditunjukkan oleh gambar berikut.



Penduduk di Jakarta tersebar di lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perkembangan jumlah penduduk di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terlihat pada Gambar 2.7. Distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari terendah sebesar 0,22 persen di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga yang tertinggi sebesar 28,02 persen di Kota Administrasi Jakarta Timur. Sementara menurut strukturnya, penduduk DKI Jakarta untuk tahun 2010 adalah masuk dalam kategori struktur penduduk produktif sebanyak 7.016.229 jiwa penduduk berusia antara 15-64 tahun.



Pada tahun 2010, jumlah komuter dari Bodetabek menuju Jakarta mencapai 1,5 juta komuter per hari (Gambar 2.8). Pada siang hari, jumlah penduduk Jakarta mencapai 12,1 juta jiwa (9,6 juta penduduk DKI Jakarta dan 2,5 juta warga komuter). Secara keseluruhan jumlah penduduk di sekitar Jakarta, kawasan Bodetabek, menurut Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 18.354.756 Jiwa.



2.1.5 Penggunaan Lahan

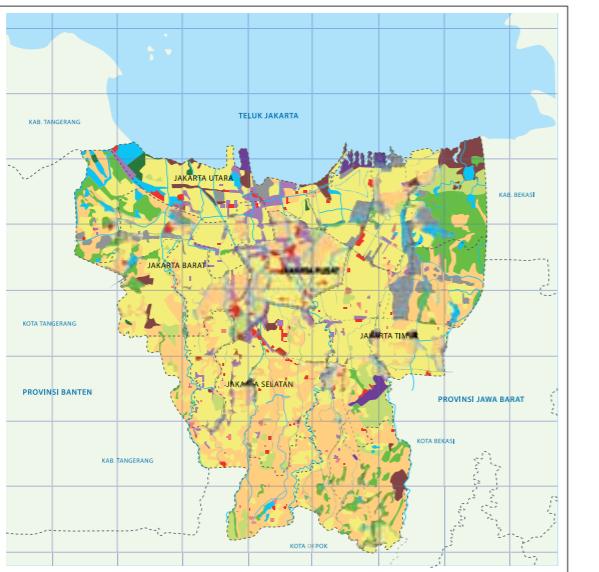
Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan

pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9.
Peta Penggunaan Lahan Eksisting di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030



JENIS PENGGUNAAN LAHAN
 ■ INDUSTRI/PERDAGANGAN
 ■ PERKANTORAN/PERDAGANGAN JASA
 ■ PERUMAHAN TERATUR
 ■ PERMUKIMAN TIDAK TERATUR
 ■ FASILITAS SOSIAL
 ■ KAWASAN/GEDUNG PEMERINTAHAN
 ■ PERTANIAN/PETERNAKAN
 ■ PRASARANA TRANSPORTASI (PELABUHAN/BANDARA)
 ■ RUANG TERBUKA/TAMAN/PEBAKAMAN
 ■ TANAH KOSONG SUDAH DIPERUNTUKAN
 ■ SITU/WADUK/RAWA/TAMBAK
 ■ HUTAN BAKAU/HUTAN SUAKA ALAM

Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itulah, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan.

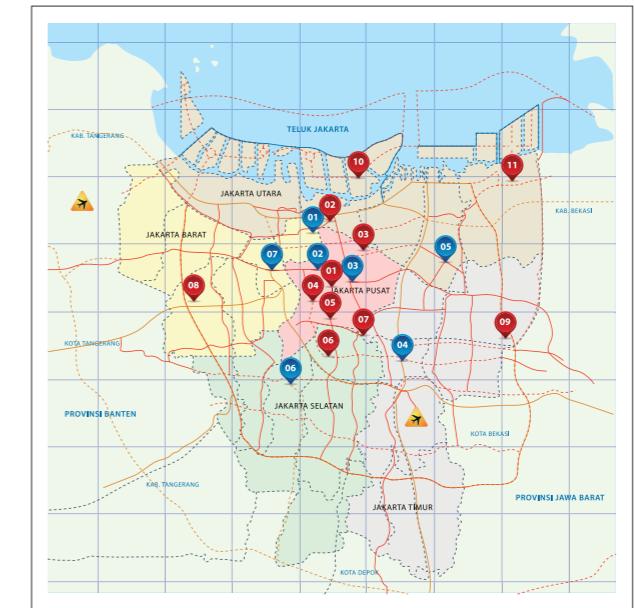
Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan jaringan trasportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi

udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air.

Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi. Pusat kegiatan di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada peta berikut.

Gambar 2.10.
Peta Pusat Kegiatan Provinsi DKI Jakarta

Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030



PUSAT KEGIATAN PRIMER

1. KAWASAN MEDAN MERDEKA
2. KAWASAN MANGGA DUA
3. KAWASAN BANDAR KEMAYORAN
4. KAWASAN SENTRA PRIMER TANAH ABANG
5. KAWASAN DUKUH ATAS
6. KAWASAN SEGITA EMAS SETIABUDI
7. KAWASAN MANGGARAI
8. KAWASAN SENTRA PRIMER BARAT
9. KAWASAN SENTRA PRIMER TIMUR
10. KAWASAN TENGAH PANTURA
11. KAWASAN EKONOMI STRATEGIS MARUNDA

PUSAT KEGIATAN SEKUNDER

1. KAWASAN GLODOK
2. KAWASAN HARMONI
3. KAWASAN SENEN
4. KAWASAN JATINEGARA
5. KAWASAN KELAPA GADING
6. KAWASAN BLOK M
7. KAWASAN GROGOL

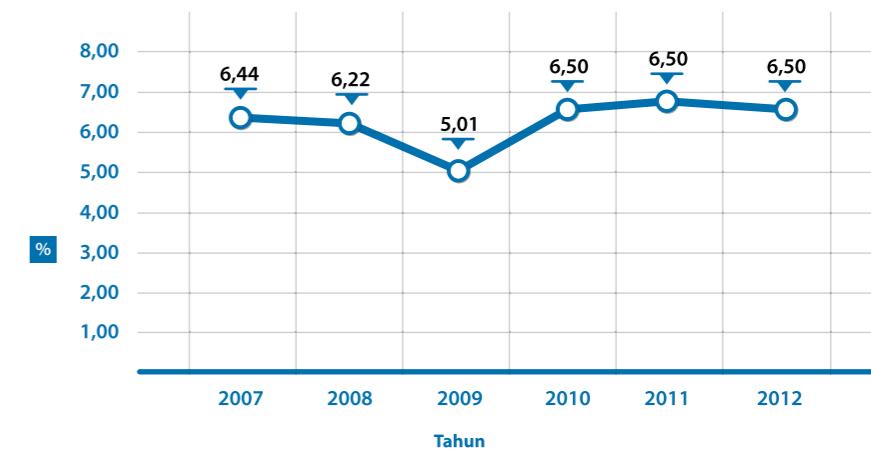
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Jakarta beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Perekonomian DKI Jakarta tumbuh sebesar 6,44 persen pada tahun 2007 dan 6,22 persen pada tahun 2008, sementara pada tahun 2009 pertumbuhan menurun jika dibandingkan tahun 2008 tetapi masih relatif tinggi, yaitu mencapai 5,01 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2010 meningkat menjadi 6,50 persen, tahun 2011 mencapai 6,77 persen, dan mencapai 6,50 persen pada tahun 2012.

Gambar 2.11.
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Jakarta Dalam Angka 2011 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2007–2012



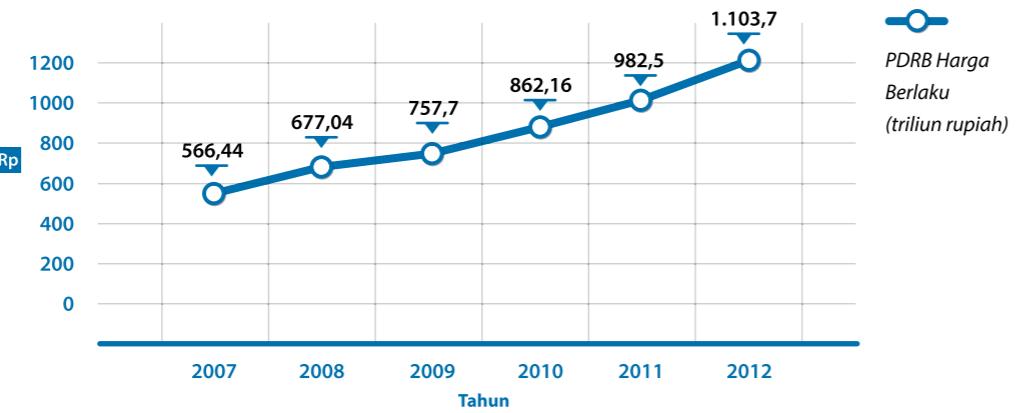
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta

Perkembangan ekonomi Jakarta pada tahun 2011 relatif lebih baik dari tahun 2010 dimana pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir, meskipun masih terbuka adanya resiko krisis keuangan di beberapa negara di Eropa. Meningkatnya perkembangan ekonomi ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 PDRB atas harga berlaku sebesar Rp.566,44 Triliun, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.982,5 Triliun dan mencapai Rp.1.103 Triliun pada tahun 2012.

Gambar 2.12.

Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012

Sumber: Kompilasi Jakarta dalam Angka 2012 dan Berita Resmi Statistik 2013



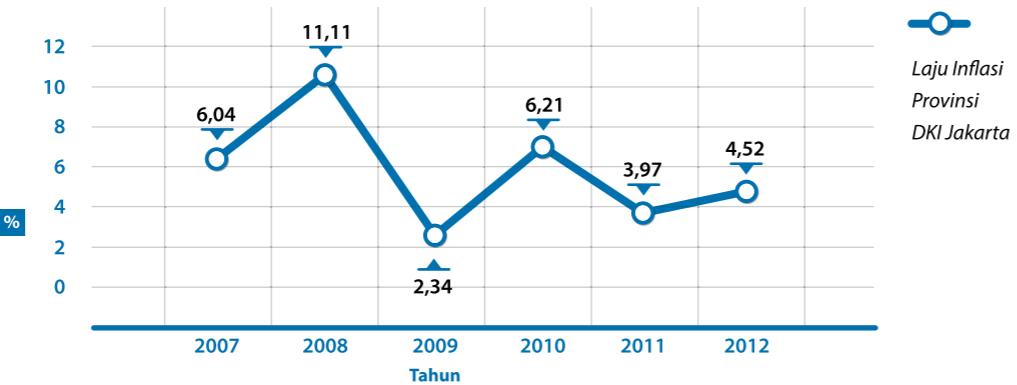
Laju inflasi Jakarta 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2006 inflasi DKI Jakarta sebesar 6,03 persen, pada tahun 2007 inflasi meningkat menjadi 6,04 persen sementara tahun 2008 laju inflasi meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 11,11 persen. Inflasi tahun 2008 merupakan inflasi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2009 inflasi kembali menurun dan hanya 2,34 persen, tahun 2010 inflasi meningkat lagi mencapai 6,21 persen dan tahun 2011 inflasi menurun menjadi 3,97 persen dan meningkat kembali menjadi 4,52 persen pada tahun 2012.

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi Jakarta setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri.

Gambar 2.13.

Grafik Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Jakarta Dalam Angka 2012 dan Berita Resmi Statistik 2013



Struktur perekonomian dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor yang didasarkan pada nilai nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Provinsi DKI Jakarta. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

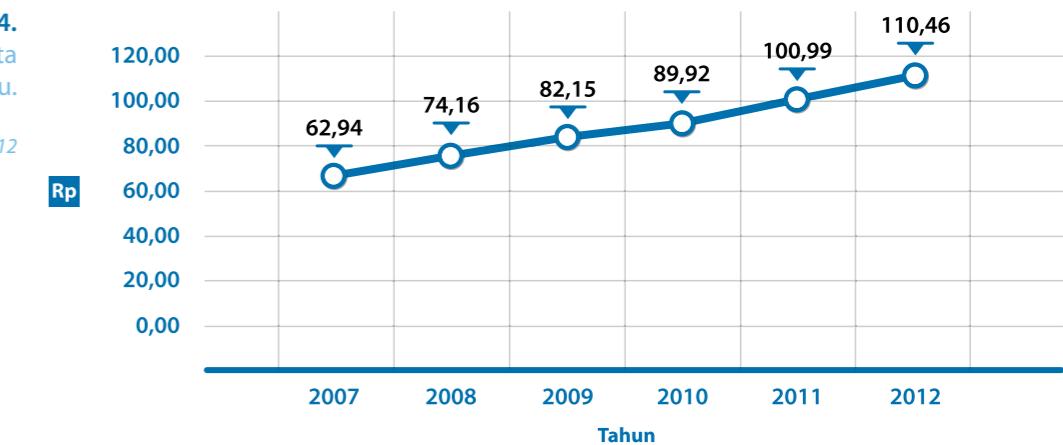
Struktur perekonomian Jakarta pada tahun 2012, bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB (atas dasar harga berlaku), didominasi oleh sektor jasa (tersier) yang memiliki peranan sebesar 71,50 persen. Pembentuk sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 20,70 persen; Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan sekitar 27,7 persen; dan kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,30 persen, serta Sektor Jasa-jasa sebesar 12,80 persen. Ini menunjukkan struktur perekonomian Jakarta sudah mengarah kepada struktur jasa (service city).

Penyumbang perekonomian Jakarta lainnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 15,6 persen, sedangkan sektor konstruksi sebesar 11,4 persen. Sementara sumbangan sektor primer di Jakarta hanya sebesar 0,6 persen yang terdiri dari sektor pertanian sebesar 0,1 persen dan sektor pertambangan sebesar 0,5 persen.

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp.110,46 juta atau meningkat 9,4 persen dibanding tahun 2011 (Rp.100,99 juta).

Gambar 2.14.
PDRB per Kapita DKI Jakarta atas Dasar Harga Berlaku.

Sumber: Jakarta dalam Angka 2012



Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Gini ratio DKI Jakarta pada periode 2007-2011 yang relatif tetap, mengindikasikan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,336 pada tahun 2007 dan 0,385 pada tahun 2010. Ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan dengan 40 persen penduduk berpendapatan rendah di DKI Jakarta menikmati lebih dari 17 persen total pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan di DKI Jakarta juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Dilihat dari indikator kemiskinan, angka kemiskinan Jakarta pada posisi bulan Maret 2007 tercatat 405,7 ribu jiwa (4,61 persen), bulan Maret tahun 2008 hanya tercatat 298.237.379,6 jiwa (4,29 persen), bulan Maret tahun 2009 mencapai 320.333.323,20 jiwa (3,48 persen), bulan Maret tahun 2010 mencapai 338.783.312,20 jiwa (3,48 persen) dan pada Maret tahun 2011 mencapai 338.783.363,40 jiwa (3,75 persen). Lalu tercatat bahwa sampai dengan bulan Maret 2012, secara makro penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta menjadi 363,2 ribu jiwa atau sebesar 3,69 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Namun, Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.15.
Gambaran Kemiskinan di DKI Jakarta Tahun 2007–2012

Sumber: *Jakarta dalam Angka 2011* dan *Berita Resmi Statistik 2011*

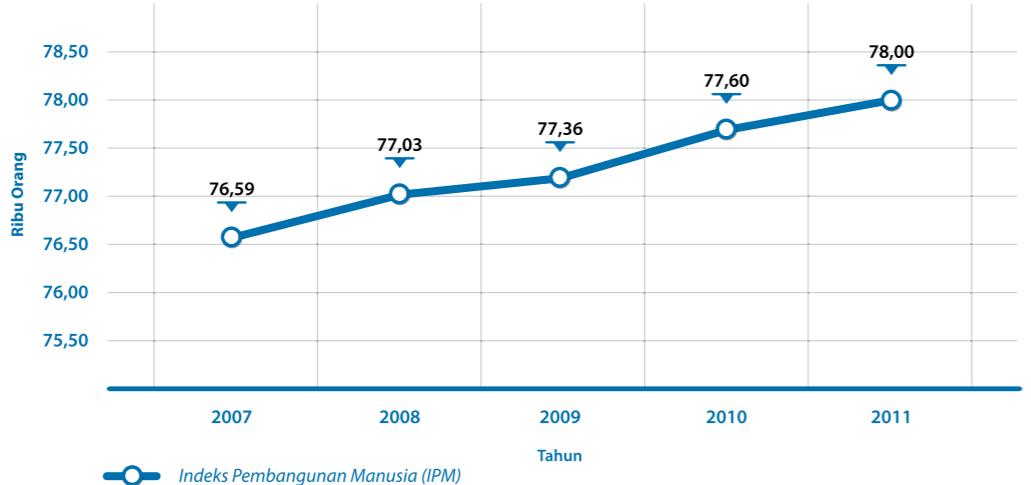


2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, IPM DKI Jakarta menunjukkan peningkatan, yakni dari 76,59 pada tahun 2007 meningkat menjadi 77,03 pada tahun 2008, 77,36 pada 2009, dan 77,60 pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 IPM DKI Jakarta mencapai 77,97 yang merupakan tertinggi di Indonesia (Gambar 2.16). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

Gambar 2.16.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2011

Sumber: *Jakarta Dalam Angka 2012, Berita Resmi Statistik 2013 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2011*



Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu komponen IPM juga menunjukkan angka yang cukup baik dan meningkat dari tahun ke tahun. AHH, pada tahun 2007 tercatat 75,80 tahun, tahun 2008 mencapai 75,90 tahun, tahun 2009 mencapai 76,00 tahun, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 76,20 tahun (Gambar 2.17).

Sementara ini, Angka Melek Huruf juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP dipertahankan di atas 100 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat dari 81,65 persen pada tahun 2007 menjadi 89,59 persen pada tahun 2011. Angka Partisipasi Murni (APM) juga meningkat dari tahun ke tahun. APM SD/MI/Paket A meningkat dari 93,27 persen pada tahun 2007 menjadi 97,73 persen pada tahun 2011, APM SMP/MTs/Paket B meningkat dari 71,36 persen pada 2007 menjadi 77,49 persen pada tahun 2011. Demikian juga untuk tingkat SMA/MA/Paket C, meskipun partisipasinya tidak terlalu tinggi, APM meningkat dari 49,76 persen pada 2007 menjadi 58,79 persen pada tahun 2011 (Gambar 2.17).

Gambar 2.17.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007–2011

Sumber: *Kompilasi dari Data Dinas Pendidikan Provinsi DKI dan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta*



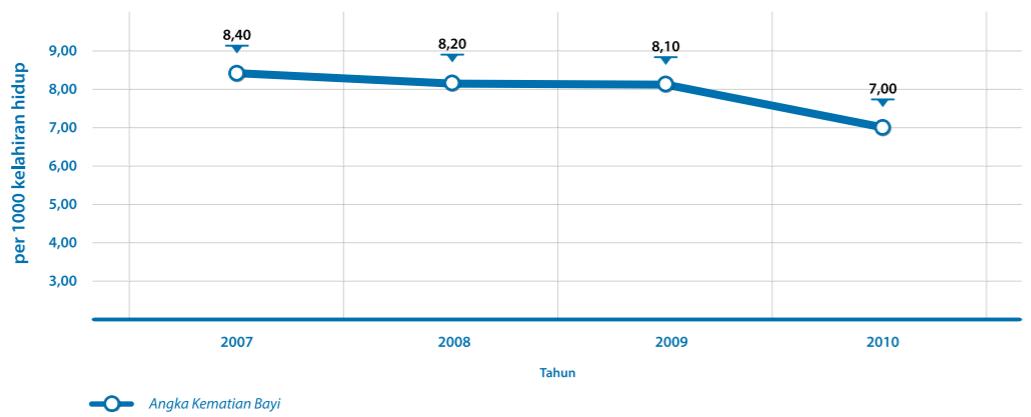
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2006 sebesar 98,46 persen, meningkat menjadi 99,16 persen pada tahun 2010. APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2006 sebesar 90,16 persen, meningkat menjadi 91,45 persen pada tahun 2010. Sedangkan APS penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2006 sebesar 60,26 persen menjadi 61,99 persen pada tahun 2010.

Sedangkan peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Ratio (IMR) dari 8,4 per 1.000

kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 7 (tujuh) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Gambar 2.18). Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami hal yang sama, yaitu cenderung menurun. Jika pada tahun 2009 AKI mencapai 24 kasus sementara pada tahun 2010 AKI tersebut hanya 22 kasus. Selain itu, Angka Kesakitan (*Incident Rate*) DBD juga mengalami penurunan dari 356/100.000 penduduk pada tahun 2007 menjadi 50/100.000 penduduk pada tahun 2011. Di sisi lain, *Case Detection Rate* TB mengalami peningkatan cakupan dari 82 persen pada tahun 2007 menjadi 84 persen pada tahun 2011.

Gambar 2.18.
Perkembangan Angka
Kematian Bayi Tahun
2007–2010

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta 2011



Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan penduduk, dihadapkan pada beberapa hambatan, diantaranya adalah wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang pada tahun 2006 terjadi 24.932 kasus dan bertambah menjadi 28.214 kasus pada tahun 2010. Selain DBD, terdapat penyakit HIV/AIDS yang pada tahun 2010 terjadi 139 kasus dengan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta Tuberculosis (TBC) yang pada tahun 2008 terdapat 22.506 penderita baru.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Jakarta mempunyai karakter multikultural, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah terselenggara di DKI Jakarta antara lain Jakarta Binalle oleh 200 komunitas, Pesta Seni Pelajar (PSP) Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 625 kelompok seni dan sekolah, Lomba Perkusi Betawi, Nasyid, Marawis dan Qassidah Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 255 kelompok seni, Jakarta *International Literary Festival* (Jilfest) yang diikuti oleh 158 pembicara dan 300 peserta workshop pementasan puisi, cerpen dan musikalisisasi puisi, serta Jakarta Berlin Art Festival.

Dari segi jumlah pengunjung dan penonton seni budaya, telah terjadi peningkatan yang signifikan. Pada periode 2007-2011 pengunjung museum di Kawasan Kota Tua telah meningkat dari 827.239 orang menjadi 2.468.507 orang per tahun. Selain itu, terjadi peningkatan pula jumlah penonton pertunjukan seni budaya di Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, Pertunjukan Seni di Ruang Publik/Hotel, Gedung Wayang Orang

Bharata, Pusat Perkampungan Budaya Betawi dan Balai Latihan Kesenian dari 1.050.000 orang per tahun menjadi 4.650.000 orang per tahun.

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan mengembangkan sarana olahraga. Fasilitas olahraga tersebut tersebar di 5 (lima) wilayah dengan jumlah 5 (lima) Gelanggang Remaja Kota Administratif, 35 Gelanggang Remaja Kecamatan, 8 (delapan) Gelanggang Olahraga dan 27 fasilitas lepas.

Tahun 2011 merupakan waktu paling banyak diselenggarakannya kegiatan olahraga di Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 68 kegiatan olahraga diadakan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun tersebut. Frekuensi ini meningkat tajam dari tahun 2010 yang hanya 43 kegiatan (Gambar 2.19). Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2011 adalah sebanyak 53 organisasi.

Gambar 2.19.
Jumlah Kegiatan Olahraga
di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2007-2011

Sumber: Dinas Olahraga
dan Pemuda Provinsi
DKI Jakarta 2012



Beberapa penyelenggaraan olahraga tahunan berskala internasional yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 di antaranya Jakarta Internasional 10 K, *Enjoy Jakarta Basketball Tournament*, dan *Jakarta World Junior Golf Championship*. Pada tahun 2011, Jakarta juga menjadi salah satu tuan rumah bersama penyelenggaraan SEA Games XXVI/2011. Dalam pembinaan olahraga, Provinsi DKI Jakarta juga telah melahirkan beberapa prestasi di antaranya: Peringkat Kedua pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII/2008 di Kalimantan Timur dan Juara Umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 di Riau, Juara Umum pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) X/2007 di Kalimantan Selatan, POMNAS XI/2009 di Palembang dan POMNAS XII/2012 di Batam, Kepulauan Riau, serta memperoleh 3 (tiga) medali emas, 2 (dua) medali perak dan 3 (tiga) medali perunggu pada *Special Olympics World Summer Games* (SOWG) ke 13 di Athena, Yunani, dan Juara II ASEAN Paragames Tahun 2011 di Solo Jawa Tengah. Pada event itu, 19 Atlet asal DKI Jakarta berhasil memperoleh medali dengan perolehan medali 19 emas, 16 perak dan 11 perunggu.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

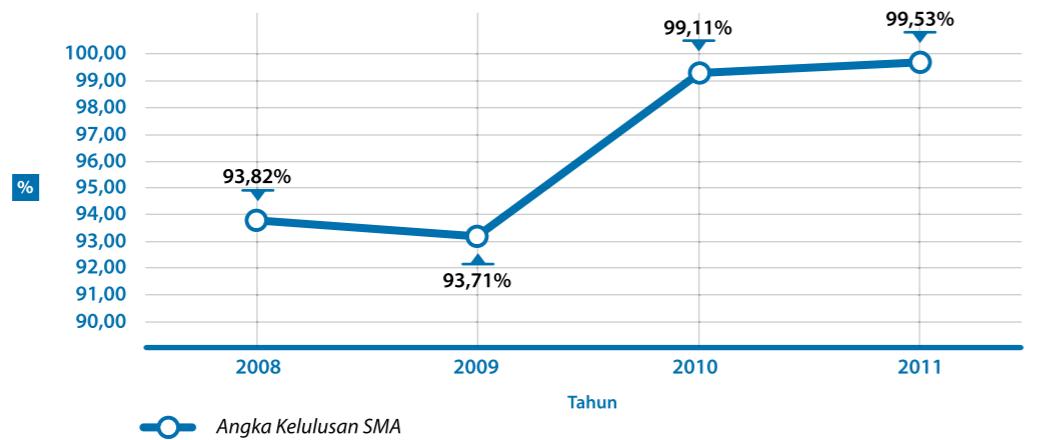
2.3.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Provinsi DKI Jakarta salah satunya ditunjukkan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Angka kelulusan siswa tingkat SD di DKI Jakarta meningkat dari 99,7 persen pada tahun 2008 menjadi 99,98 persen pada tahun 2010 dan 100 persen pada 2011. Persentase kelulusan siswa tingkat SMP meningkat dari 99,83 persen pada tahun 2009, menjadi 99,80 persen pada tahun 2010 dan 99,99 persen pada tahun 2011. Persentase kelulusan siswa yang meningkat cukup tajam adalah angka kelulusan tingkat SMA, yaitu dari 93,71 persen pada tahun 2009 menjadi 99,11 persen pada tahun 2010 dan 99,53 persen pada tahun 2011 (Gambar 2.20).

Gambar 2.20.

Angka Kelulusan SMA di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007–2011

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2012



Tingkat pendidikan yang ditamatkan juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan Akademi/Universitas meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang tidak sekolah dan belum tamat SD berkurang dari 12,55 persen pada tahun 2007 menjadi 10,36 persen pada tahun 2011.

Tabel 2.1.

Percentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007 – 2010

Sumber: Jakarta dalam Angka 2012

| No | Jenis Pendidikan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Tidak Sekolah dan Belum Tamat Sekolah Dasar | 12,55 | 13,40 | 10,53 | 9,15 | 10,36 |
| 2 | Sekolah Dasar | 20,50 | 19,85 | 20,25 | 21,62 | 18,75 |
| 3 | Sekolah Lanjutan Pertama | 20,29 | 19,61 | 19,79 | 20,37 | 19,38 |
| 4 | Sekolah Lanjutan Atas | 33,71 | 30,52 | 35,78 | 35,96 | 37,27 |
| 5 | Akademi/Universitas | 12,95 | 16,61 | 13,65 | 13,90 | 14,24 |
| Jumlah | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

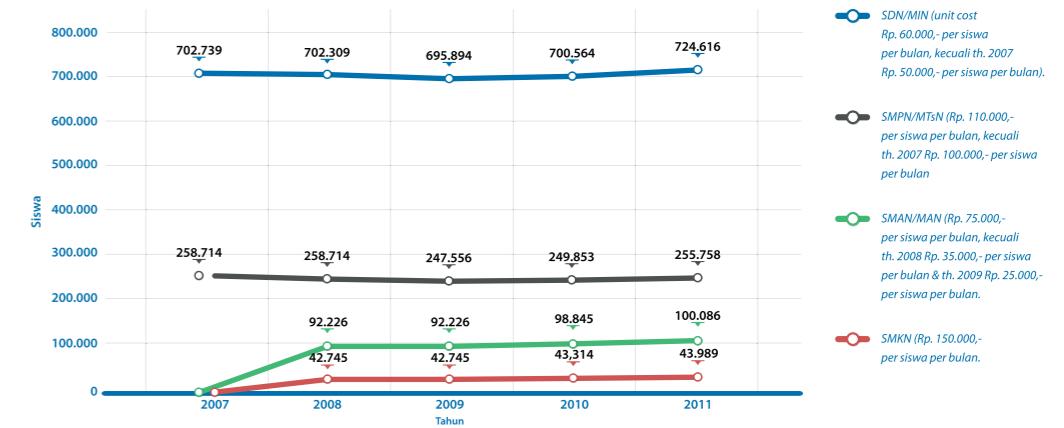
Sampai tahun 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 2.224 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 319 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 117 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 62 unit. Total perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Jakarta sampai tahun 2010 berjumlah 330 unit. Sedangkan untuk lembaga pendidikan informal lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1.258 unit.

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. BOP dan BOB merupakan program yang menunjang pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah Pusat. Pemberian dana BOP dan BOB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

Pemberian BOP meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, BOP telah diberikan kepada 724.616 siswa SDN/MIN, 255.758 siswa SMPN/MTsN, dan 100.086 siswa SMAN/MAN, serta 43.989 siswa SMKN. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan BOB, pada tahun 2010 untuk 91.886 siswa SMA/MA Negeri dan 41.848 siswa SMK Negeri, pada tahun 2011 untuk SMA/MA Swasta sebanyak 82.113 siswa dan SMK Swasta 160.558 siswa, serta pada tahun 2012 untuk SMP/MTs Negeri sebanyak 227.611 siswa. Perkembangan pemberian BOP di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.21.
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOP) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011

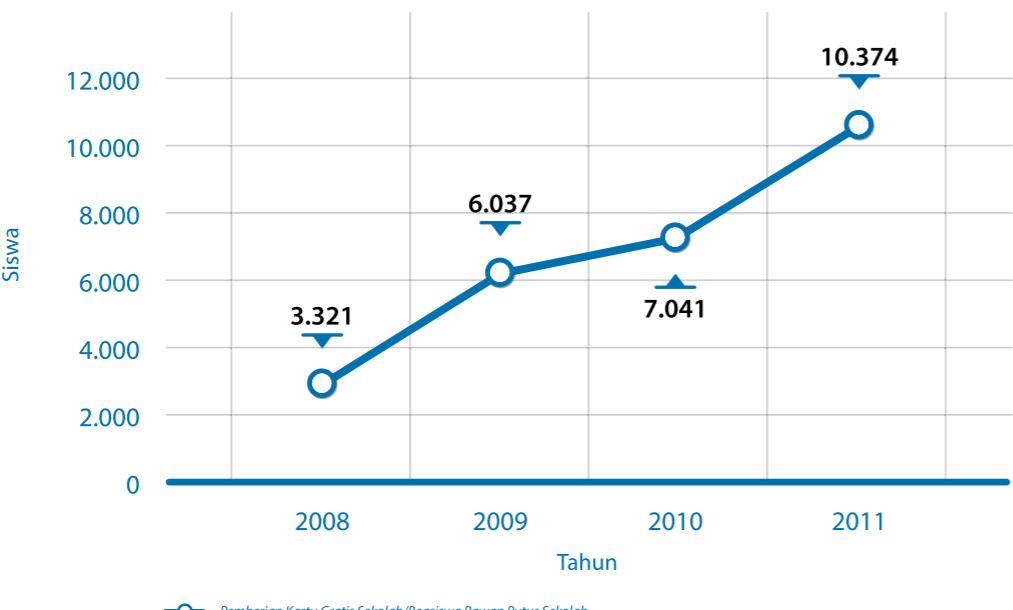
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2012



Dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan Kartu Gratis Sekolah atau Beasiswa Rawan Putus Sekolah jenjang pendidikan menengah untuk 3.321 siswa miskin (2008), 6.037 siswa miskin (2009), 7.041 siswa miskin (2010), dan meningkat menjadi 10.374 siswa miskin (2011) (Gambar 2.22). Melalui pemberian beasiswa ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menurunkan Angka Putus Sekolah pada tingkat SD dari 535 siswa pada tahun 2007 menjadi 347 siswa pada tahun 2011 serta tingkat SMP dari 1.875 siswa pada tahun 2007 menjadi 1.176 siswa pada tahun 2011.

Gambar 2.22.
Pemberian Kartu Gratis/
Beasiswa Rawan Putus
Sekolah di Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2008-2011

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta 2012



Peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui tugas belajar yaitu pendidikan strata satu dan sertifikasi bagi guru SD dan SMP sebanyak 340 orang (2008), 1.294 orang (2009), 799 orang (2010), dan 12.915 orang (2011), serta strata satu dan sertifikasi bagi guru SMA/SMK sebanyak 3.187 orang (2008). Selain itu, strata dua bagi guru SMA/SMK sebanyak 28 orang (2008).

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan antara lain berkaitan dengan upaya peningkatan prasarana dan sarana pendidikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan optimal. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan pembangunan 1 (satu) gedung baru SDN, 1 (satu) gedung baru SMPN, 1 (satu) gedung baru SMAN, 1 (satu) gedung baru SMKN, rehabilitasi total sebanyak 53 gedung SDN, 35 gedung SMPN, 33 gedung SMAN/SMKN, serta rehabilitasi berat dan rehabilitasi sedang 815 gedung sekolah untuk tingkat SDN hingga SMAN.

2.3.2 Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Jakarta telah menunjukkan pencapaian yang positif.

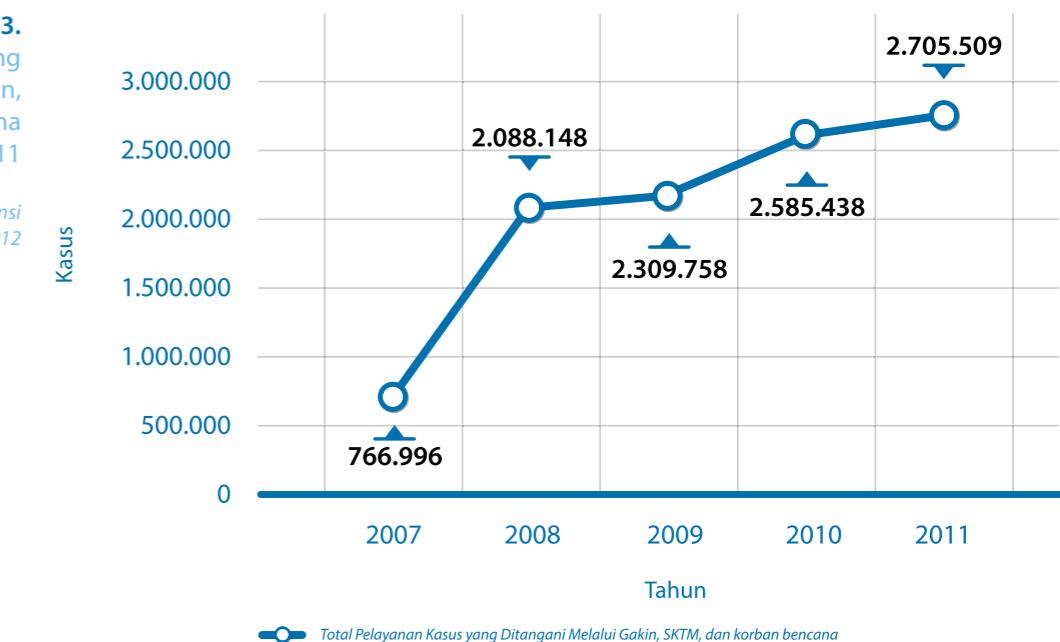
Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, apotek, dan posyandu. Berdasarkan data tahun 2011, jumlah Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta sebanyak 7 (tujuh) unit, Rumah Sakit Pemerintah berjumlah 29 unit dan Rumah Sakit Swasta berjumlah 124 unit dengan kapasitas 19.200 tempat tidur. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai tahun 2009 mencapai 44 unit Puskesmas Kecamatan dan 295 unit Puskesmas Kelurahan. Hingga tahun 2011,

terdapat 11 Puskesmas Kecamatan yang telah dilengkapi oleh fasilitas rawat inap selain rawat bersalin (RB). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menambah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapat Sertifikat ISO 9001:2008 yaitu 4 (empat) RSUD dan 4 (empat) UPT, 44 Puskesmas Kecamatan, serta 98 Puskemas Kelurahan. Selain itu, kapasitas rawat inap pada seluruh RSUD/RSKD juga ditingkatkan dari 1.115 tempat tidur menjadi 1.654 tempat tidur. Dalam pencegahan gizi buruk juga telah disediakan fasilitas pelayanan pemulihian untuk balita penderita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding Center* (TFC) di 4 (empat) Puskesmas Kecamatan.

Dalam melayani warga tidak mampu, sampai tahun 2011 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di Provinsi DKI Jakarta melalui kartu Keluarga Miskin (Gakin), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan korban bencana sudah dapat diselenggarakan di 88 RS dan 339 Puskesmas. Total pelayanan kasus yang ditangani melalui Gakin, SKTM dan korban bencana meningkat dari 766.996 kasus pada tahun 2007, menjadi 2.705.509 kasus pada tahun 2011 (Gambar 2.23).

Gambar 2.23.
Total Pelayanan Kasus yang
Ditangani Melalui Gakin,
SKTM, dan Korban Bencana
Tahun 2007-2011

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta 2012



Terkait dengan penanggulangan penyakit menular, cakupan layanan pasien HIV/AIDS telah ditingkatkan dimana pasien yang masuk perawatan HIV sebesar 12.953 orang (Sep 2008), 17.280 orang (Sep 2009), 22.234 orang (Sep 2010), dan 25.011 orang (Juni 2011). Sementara itu, jumlah RW siaga aktif telah ditingkatkan dari 68 persen pada 2007 menjadi 100 persen pada 2011. Cakupan penanganan kasus diare dan pneumonia (ISPA) juga meningkat dari tahun ke tahun yaitu non pneumonia sebanyak 324.852 kasus (2008), 534.129 kasus (2009), 731.026 kasus (2010), dan 756.715 kasus (2011) serta pneumonia sebanyak 1.768 kasus (2008), 1.472 kasus (2009), 2.891 kasus (2010) dan 2.569 kasus (2011). Dalam rangka meningkatkan cakupan deteksi penyakit ISPA ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan

kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi penyakit ISPA sehingga kasus ISPA usia lebih dari 5 (lima) tahun yang ditemukan tidak banyak yang berlanjut menjadi pneumonia.

Sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 50.284 orang yang terdiri dari kader pusat posyandu, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, dan bidan.

Tabel 2.2.
Jumlah Tenaga Kesehatan
Tahun 2007—2010 (orang)

Sumber: *Jakarta dalam Angka 2011*

| No | Tenaga Kesehatan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Kader Pusat Posyandu | 29.718 | 29.718 | 29.718 | 31.057 |
| 2 | Dokter Umum | 1.865 | 6.848 | 8.201 | 2.873 |
| 3 | Dokter Spesialis | 5.396 | 4.259 | 9.595 | 1.386 |
| 4 | Dokter Gigi | 959 | 2.977 | 3.049 | 586 |
| 5 | Apoteker | 158 | 751 | 751 | 2.699 |
| 6 | Asisten Apoteker | 1.135 | 2.999 | 2.999 | 4.401 |
| 7 | Bidan | 2.088 | 4.695 | 4.695 | 7.282 |

Pembinaan kesehatan juga dilakukan melalui Puskesmas yang meliputi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), penyuluhan kesehatan, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk, penelitian epidemiologi, fogging, penanggulangan TBC, pembinaan usaha kesehatan masyarakat, dan pembinaan dukun bayi. Disamping itu juga dilakukan pelayanan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, pasien berobat jalan, pasien rawat inap penyakit DBD, dan poliklinik gawat darurat 24 jam.

2.3.3 Pekerjaan Umum

Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem tata air, jaringan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pelayanan penyediaan energi.

Pengembangan sistem tata air terbagi menjadi sistem drainase dan pengendali banjir yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan pengendalian banjir. Untuk sistem drainase antara lain dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan waduk/situ, sungai dan saluran serta polder. Untuk pengendali banjir dilakukan dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pengendali banjir seperti Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menambahkan badan air seluas 8.288.308 m², normalisasi kali/sungai sepanjang 4.600 m² di 10 sungai, dan pengeringan saluran drainase kota sepanjang 24.197 m². Selain itu, juga dibangun prasarana sarana pengendali banjir di antaranya penyediaan pompa pengendali banjir sebanyak 65 unit

dengan kapasitas 60,8 m³/dt, saringan sampah yang terbangun di 19 lokasi, pembangunan 32 pintu air, dan pembangunan 36 polder (alat pengendali banjir yang dapat memompa air yang tergenang di dataran rendah ke kanal) untuk mengurangi titik genangan.

Pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) juga telah diselesaikan sehingga diperkirakan sudah dapat membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 hektar daerah rawan banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta dari ancaman banjir. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah berhasil menangani 110 titik genangan dari 123 titik rawan genangan di jalan arteri kolektor.

Dalam peningkatan jaringan jalan sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan peningkatan jalan seluas 8.739 m² dan pelebaran jalan seluas 22.798 m², jalan tembus seluas 22.519 m², pembangunan dan peningkatan 14 buah jembatan. Selain itu, dalam mendukung operasional Kanal Banjir Timur (KBT), telah dilakukan pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar KBT seluas 130.231 m².

Tabel 2.3.
Panjang Jalan Menurut
Kota Administrasi dan Jenis
Status Jalan Tahun 2011

Sumber: *Jakarta dalam Angka 2012*

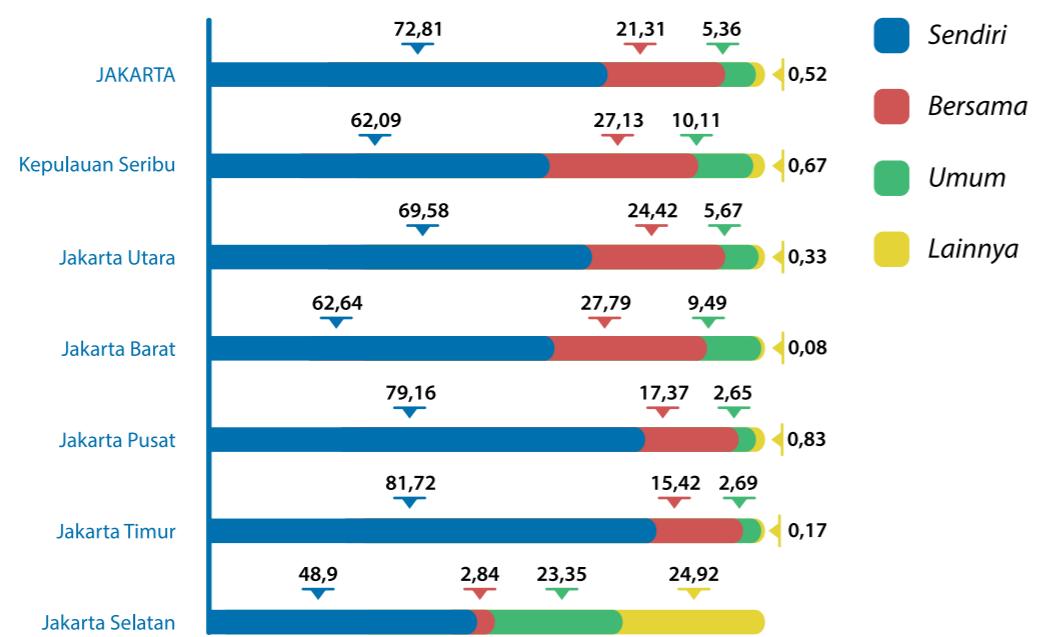
| Uraian | Jenis Satuan Jalan | | Jumlah | |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| | Jalan Nasional | | | |
| | Tol | Negara | | |
| A. Panjang Jalan (m) | 123.481,00 | 142.647,00 | 6.666.164,84 | |
| B. Luas Jalan (m ²) | 3.040.746,00 | 2.743.886,00 | 42.526.727,97 | |
| | | | 48.311.359,97 | |

Produksi sampah Jakarta pada tahun 2010 mencapai 6.139,33 ton per hari atau 2.396.746 ton per tahun dengan tingkat pengangkutan baru mencapai 84,92 persen per hari, yang berarti masih ada 15,08 persen sampah yang belum terangkut. Dalam menangani persoalan persampahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoperasikan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sunter untuk mengepak sampah sebanyak ±1.460.000 ton selama 5 (lima) tahun dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk mengolah sampah sebanyak rata-rata 5.300 ton/hari. Sampai dengan tahun 2009 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang rata-rata dapat mengolah 1.858.458 ton sampah per tahun, sedangkan sejak tahun 2010 TPST Bantargebang rata-rata dapat mengolah sebanyak 1.867.880 ton per tahun dengan produksi listrik sebesar 10,5 MW dan 43.800 ton kompos. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selama 5 (lima) tahun mempu menangani ± 85.729,8 ton sampah.

Selanjutnya dalam hal penyediaan air bersih, sekitar 72,81 persen rumah tangga di DKI Jakarta memiliki fasilitas air minum milik sendiri (termasuk sumur). Sekitar 21,31 persen rumah tangga masih menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama dengan rumah tangga lain, 5,36 persen rumah tangga mempergunakan fasilitas air minum umum dan sisanya sekitar 0,52 persen tidak memiliki fasilitas air minum (Gambar 2.24).

Gambar 2.24.
Persentase Rumah Tangga
Menurut Fasilitas Air Minum
di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2011

Sumber: Laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta 2011

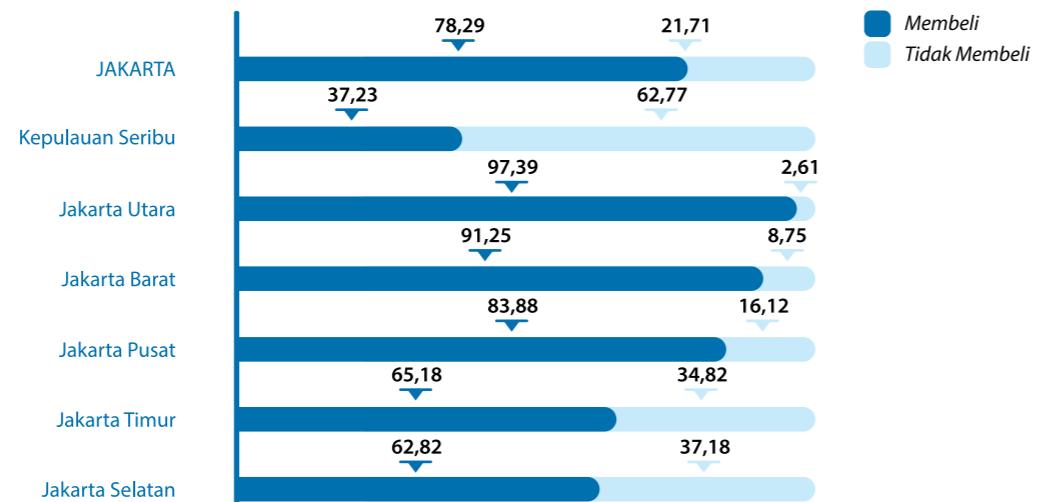


Berdasarkan cara memperolehnya, konsumen air minum dikelompokkan menjadi dua, yakni membeli dan tidak membeli. Dikategorikan membeli apabila rumah tangga menggunakan air minum dengan berlangganan PAM, membeli air kemasan, atau pedagang air keliling.

Rumah tangga yang memperoleh air bersih dengan cara tidak membeli umumnya berasal dari air tanah, yakni sumur dan pompa. Hal ini dapat diartikan bahwa masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan air tanah. Jika dibandingkan dengan tahun 2000, tampak adanya peningkatan rumah tangga yang memperoleh air minum dengan cara membeli, yaitu dari 54,44 persen menjadi 78,29 persen pada tahun 2011, atau naik sekitar 23,85 persen (Gambar 2.25). Artinya selama 10 tahun terakhir, jumlah penduduk yang mengkonsumsi air bersih semakin meningkat karena pada umumnya air yang diperoleh dengan cara membeli identik dengan air bersih. Dari kebutuhan air domestik di DKI Jakarta sekitar 494.831.212 m³, 60 persen dipenuhi melalui sumur air tanah dangkal (1 - 40 mbmt).

Gambar 2.25.
Persentase Rumah Tangga
Menurut Cara Memperoleh
Air Minum di Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2011

Sumber: Laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta 2011

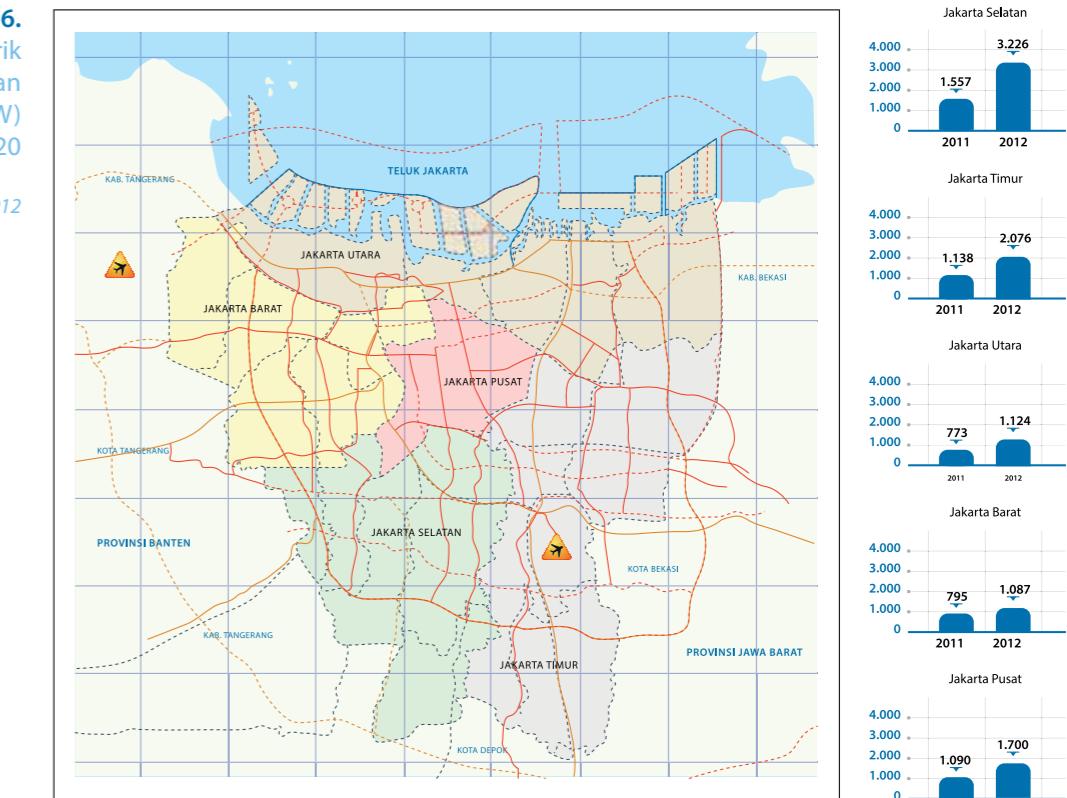


Kebutuhan energi Jakarta dipenuhi oleh energi yang berasal dari energi listrik dan gas. Di wilayah DKI Jakarta kebutuhan tenaga listrik terus meningkat. Berdasarkan data, jumlah pelanggan listrik di DKI Jakarta sebanyak 1.062.774 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Diperlukan penambahan pasokan baru terhadap sistem energi listrik Jakarta untuk meningkatkan keandalan ketenagalistrikan dibarengi dengan pengurangan ketergantungan pasokan terhadap Pembangkit di Muara Karang.

Diperkirakan beban puncak listrik di DKI Jakarta naik dari 5.360 Mega Watt (MW) pada 2011 menjadi 9.220 MW pada 2020, atau tumbuh rata-rata 6,2 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan tahunan beban listrik di Jakarta Selatan mencapai 8,4 persen, Jakarta Timur 6,9 persen, Jakarta Pusat 5,1 persen, Jakarta Utara 4,3 persen, dan Jakarta Barat 3,5 persen. Persebaran beban puncak listrik dan proyeksinya pada tahun 2020 di DKI Jakarta dapat terlihat pada Gambar 2.26.

Gambar 2.26.
Beban Puncak Listrik
Jakarta Tahun 2011 dan
Proyeksinya (MW)
Tahun 2020

Sumber: PT PLN, 2012



Sedangkan penggunaan gas sebagai bahan bakar di DKI Jakarta juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2008 telah didistribusikan sejumlah 2.102.233 buah tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk keperluan rumah tangga dan 100.104 unit untuk industri kecil. Pada tahun 2009, penggunaan gas terbanyak adalah untuk rumah tangga, yaitu sebanyak 3.245.987 unit dan diikuti oleh penggunaan untuk bisnis sebanyak 254.212 unit. Sedangkan penggunaan untuk traksi (train traffic) hanya sebanyak 20 unit.

Dalam hal kebutuhan energi listrik untuk Kepulauan Seribu, sampai saat ini telah dibangun kabel bawah laut untuk menyalurkan listrik ke Pulau Untung Jawa, serta sedang

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Jakarta secara optimal.

dikembangkan sumber energi alternatif berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Karya, Pulau Onrust, Pulau Rambut, Pulau Payung, dan Pulau Sebira; Pembangkit Listrik Tenaga Hidro di Pulau Karya; dan Pembangkit Listrik Gabungan Gas dan Uap di Pulau Damar. Data jumlah produksi bruto dan penjualan gas menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 hingga 2010 produksi terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 produksi mengalami kenaikan sebesar 203.988.889 m³ dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan penjualan tahun 2010 yang mengalami kenaikan sebesar 259.452.934 m³.

2.3.4 Perumahan Rakyat

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Jakarta secara optimal. Jumlah total Rumah Susun Sederhana yang berada di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 518 Blok dengan 40.544 unit rumah dan luas 227,15 Hektar.

Rumah susun sewa di Jakarta, selain disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga diadakan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 19 Tower Block (TB) atau 1.519 unit, Kementerian Pekerjaan Umum 20 TB atau 1.959 unit dan Perumnas 34 TB atau 3.328 unit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai tahun 2012 telah membangun Rusun sebanyak 133 Blok (12.337 unit), terdiri dari Rusunami 3.366 unit dan Rusunawa 8.971 unit. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga telah memfungsikan 10.087 Unit Hunian Rusun, melakukan pemeliharaan rusunawa di 5 (lima) wilayah kota, serta meningkatkan kesiapan warga calon penghuni rusun.

Dalam melaksanakan pembangunan perumahan di lingkungan pemukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meremajakan penataan kawasan kumuh melalui program Mohammad Husni Thamrin Plus (MHT Plus) dengan pendekatan tribina (ekonomi, sosial, fisik prasarana dan sarana). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menangani jumlah RW Kumuh dari 416 RW (direktori kumuh tahun 2008) sebanyak 274 RW sampai dengan tahun 2011.

2.3.5 Penataan Ruang

Pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai tahun 2030 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Perda ini merupakan arahan pengaturan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 6 (enam) wilayah kabupaten/kota administrasi. Untuk pelayanan kepada masyarakat, RTRW ini masih perlu dijabarkan dalam bentuk rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dan Peraturan Zonasi untuk 44 kecamatan di DKI Jakarta.

Pelayanan ketataruan kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui penerapan standar sertifikasi ISO pelayanan tata ruang dan ISO perijinan pembangunan. Untuk pelayanan tata ruang telah diterapkan standar sertifikasi ISO 9001:2000 di 5 (lima) Suku Dinas Tata

Ruang (DTR) dan 15 Seksi Kecamatan DTR serta ISO 9001:2008 di 18 Seksi Kecamatan DTR. Sedangkan untuk pelayanan perijinan pembangunan telah diterapkan standar sertifikasi ISO 9001:2000 di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), 5 (lima) Suku Dinas P2B, dan 20 Seksi Kecamatan P2B.

Untuk meningkatkan informasi penataan ruang DKI Jakarta kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai media antara lain melalui pameran-pameran, *Jakarta City Planning Gallery* dan *website*. *Website* disediakan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi penataan ruang secara *online* yang mencangkap berbagai produk rencana tata ruang, peraturan-peraturan ketataruan, mekanisme dan prosedur pelayanan. Produk rencana berupa Lembar Rencana Kota (LRK) dapat diakses secara *online*. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang bahkan sampai pada persil lahan yang mereka miliki.

2.3.6 Perhubungan

Dalam hal urusan Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat.

Dalam hal urusan Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat. Sistem transportasi yang handal, berkapasitas massal, efisien dan menjawab kebutuhan terus dikembangkan, sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kota Jakarta.

Pada tahun 2010, kebutuhan perjalanan mencapai 21,9 juta perjalanan/hari yang dilayani dengan moda kendaraan bermotor sebanyak 7,3 juta unit yang terdiri dari kendaraan pribadi sebanyak 7,25 juta (98,8 persen) dan angkutan umum sebanyak 89.270 (1,2 persen). Pertumbuhan kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir (2006-2010) rata-rata sekitar 8 (delapan) persen per tahun. Pertambahan kendaraan sebanyak 1.284 kendaraan, terdiri dari 216 mobil dan 1.068 motor per hari. Sedangkan, road ratio Jakarta tahun 2010 sebesar 6,25 persen.

Dalam upaya peningkatan pelayanan perhubungan, sejak tahun 2007 s.d tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan 6 (enam) Flyover (FO), sehingga total FO yang sudah terbangun sebanyak 30 Flyover; dan 5 (lima) Underpass (UP), sehingga total UP yang sudah terbangun sebanyak 13 Underpass. Selain itu, dilakukan juga penambahan ruas jalan, yang terdiri atas jalan baru seluas 57.503 m², dan 2 (dua) ruas jalan layang non tol seluas 156.100 m².

Dari segi kebijakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki Kebijakan Transportasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Penerapan dari kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum Massal

Kebijakan ini meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Bus Rapid Transit/Busway, dan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Sampai dengan tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 11 koridor jalur busway dengan armada berjumlah 568 unit. Angkutan umum massal busway ini sangat diminati masyarakat, dimana hal ini terlihat dari setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan

Untuk pelayanan masyarakat Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam meningkatkan kelancaran dan pemenuhan sarana penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu.

jumlah penumpang, yaitu dari 86.937.488 penumpang di tahun 2010 menjadi 114.783.774 di tahun 2011. Sedangkan untuk angkutan massal kereta api (*Mass Rapid Transit*) direncanakan akan dibangun dalam 2 tahap dan 2 Koridor (*North-South* dan *East-West*).

b. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Kebijakan ini meliputi pengembangan dan peningkatkan kapasitas ruas jalan, peningkatan kapasitas simpang (dengan pembangunan *flyover* dan *underpass*), penyelesaian jalan tol lingkar luar, jalan layang, pembangunan beberapa ruas missing link serta pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) dan *Intelligence Transportation System* (ITS) yang merupakan integrasi antara sistem informasi, teknologi komunikasi dan pengguna jalan yang membantu sistem transportasi secara keseluruhan untuk bekerja secara efektif dan efisien.

c. Pengembangan Kebijakan Pendukung

Kebijakan ini meliputi penerapan Manajemen Permintaan Lalulintas (*Transportation Demand Management*), Pengembangan Sistem Informasi, dan Kendali Lalu lintas (pembatasan lalu lintas) seperti pelarangan sepeda motor untuk melintasi jalur cepat di ruas jalan tertentu, pengaturan waktu kegiatan sekolah, pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di jalan tol dalam kota, penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) yang rencananya akan menggantikan kebijakan *Three In One* (3 in 1), Pembatasan parkir *on street*, peningkatan fasilitas *park and ride* dan pengembangan fasilitas pejalan kaki (pedestrian).

Untuk pelayanan masyarakat Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam meningkatkan kelancaran dan pemenuhan sarana penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu diantaranya dengan mengoperasikan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu di Muara Angke yang berkapasitas labuh dan tambat mencapai 40 Unit kapal (≤ 50 GT) dan penyediaan angkutan penyeberangan yang saat ini berjumlah 8 (delapan) Unit Kapal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang setiap harinya melakukan perjalanan pulang dan pergi menuju Kepulauan Seribu, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang dari 64.375 orang pada tahun 2010 menjadi 64.375 orang pada tahun 2011. Pemerintah juga selalu mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

2.3.7 Lingkungan Hidup

Dalam hal pelestarian lingkungan, telah dilakukan upaya pelestarian melalui pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sejak tahun 2007 sampai tahun 2011, telah dilaksanakan pengadaan lahan untuk RTH taman, makam, hutan kota dan pertanian seluas 1.081.166 m² atau 108 Hektar yang terdiri dari taman kota di 50 lokasi seluas 575.619,65 m², taman interaktif di 8 (delapan) lokasi seluas 19.062,85 m², RTH jalur hijau (eks SPBU) di 3 (tiga) lokasi seluas 5.249 m², RTH makam seluas 229.336 m² di 9 (sembilan) lokasi, hutan kota seluas 166.500 m², dan RTH pertanian seluas 85.400 m².

Selain itu, dilakukan juga pembangunan taman, jalur hijau, hutan kota dan RTH pertanian seluas 358.084,78 m² yang terdiri dari taman kota di 20 lokasi seluas 157.649,85 m², taman interaktif di 12 lokasi seluas 115.749,93 m², taman jalur hijau (eks SPBU) di 14 lokasi seluas 29.585 m², RTH hutan kota di 3 (tiga) lokasi seluas 52.200 m², dan RTH pertanian seluas 2.900 m². Sejak tahun 2007 sampai 2011 juga telah dilakukan penataan jalur hijau di 71 lokasi seluas 304.072 m² dan penataan lahan ex-SPBU seluas 36.885 m² di 26 lokasi.

Dalam hal pencemaran udara, telah dilakukan pemantauan pencemaran udara. Pada tahun 2012 telah tersedia 5 (lima) unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dan 1 (satu) *Mobile Station*. Berdasarkan uji laboratorium, kualitas udara ambien dan roadside pada tahun 2010 yang ditandai dengan Parameter Sulfur Dioksida (SO₂) masih memenuhi baku mutu dan memiliki kecenderungan meningkat. Sedangkan untuk parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan TSP memiliki pola kecenderungan menurun. Parameter Debu (TSP) di beberapa lokasi seperti di Pulogadung dan Cilincing konsentrasiya telah melebihi baku mutu. Selanjutnya, parameter PM-10 cenderung stabil, SO₂ dan O₃ memiliki pola yang meningkat, sedangkan untuk parameter O₃, parameter CO, PM-10, SO₂ dan NO₂ konsentrasiya masih di bawah baku mutu.

Kontribusi NOx dalam pencemaran udara Jakarta sebesar 21.000 ton/tahun dimana 15.000 ton diantaranya berasal dari sektor transportasi. Begitu juga dengan kontribusi CO sebesar 378.000 ton dimana 373.000 ton berasal dari sektor transportasi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan yang hanya 2,5 persen per tahun.

Pencemaran air juga telah diusahakan agar dampak negatif yang ditimbulkan seminimal mungkin terhadap kehidupan masyarakat Jakarta. Untuk itu telah dilakukan pengolahan limbah cair pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Duri Kosambi sebanyak 300 m³/hari, IPAL Pulo Gebang 300 m³/hari, Waduk Setiabudi Barat 7.730.624 m³/tahun dan Waduk Setiabudi Timur 11.895.222 m³/tahun.

Pada umumnya kondisi air sungai di DKI Jakarta dari hulu menuju hilir semakin kurang baik kualitasnya baik kualitas fisik, kualitas kimia maupun kualitas biologi.

Kondisi air sungai di Jakarta memerlukan perhatian khusus menyangkut kualitasnya. Pada umumnya kondisi air sungai di DKI Jakarta dari hulu menuju hilir semakin kurang baik kualitasnya baik kualitas fisik, kualitas kimia maupun kualitas biologi. Berdasarkan Indeks Pencemar sungai, sungai-sungai di DKI Jakarta termasuk dalam kategori cemar sedang dan cemar berat. Selain kualitas air permukaan, degradasi kualitas air tanah juga mengalami penurunan beberapa tahun belakangan ini, terutama terjadi di daerah-daerah yang semakin dekat dengan batas pantai.

Sama dengan pencemaran air sungai, kondisi air tanah Jakarta pada tahun 2009 juga memerlukan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan pembangunan. Kondisi air tanah yang ditandai dengan parameter fisik air tanah yang berupa Total Padatan Terlarut (TDS) dan kekeruhan, rata-rata masih baik, namun untuk wilayah Timur kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain dimana untuk parameter TDS terdapat 3 (tiga) titik yang telah melebihi baku mutu.

Sedangkan parameter kimia air tanah kecenderungannya sangat bervariasi. Dalam hal parameter Besi (Fe), secara umum kondisi besi masih dalam kondisi yang relatif baik. Persentase wilayah yang melebihi baku mutu yaitu sebesar 9 persen, dimana kondisi ini memburuk dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5 persen. Parameter Mangan (Mn) yang melebihi baku mutu cukup banyak, dan rata-rata di semua wilayah. Persentase konsentrasi Mn yang telah melebihi baku mutu adalah sebesar 27 persen. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, maka kondisi ini membaik dimana pada periode 2007-2008 persentase titik pantau yang telah melebihi baku mutu adalah 33 persen.

2.3.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Jakarta secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hasil dari kebijakan tersebut cukup menggembirakan dan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti mempertahankan *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,1 dan meningkatnya kelangsungan pemakaian obat dan alat kontrasepsi pasangan usia subur dari 60 persen pada tahun 2007 menjadi 83,50 persen pada tahun 2011. Namun berdasarkan SDKI tahun 2012, angka TFR DKI Jakarta mencapai 2,3 dimana angka tersebut walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sebesar 2,6 perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan program KB.

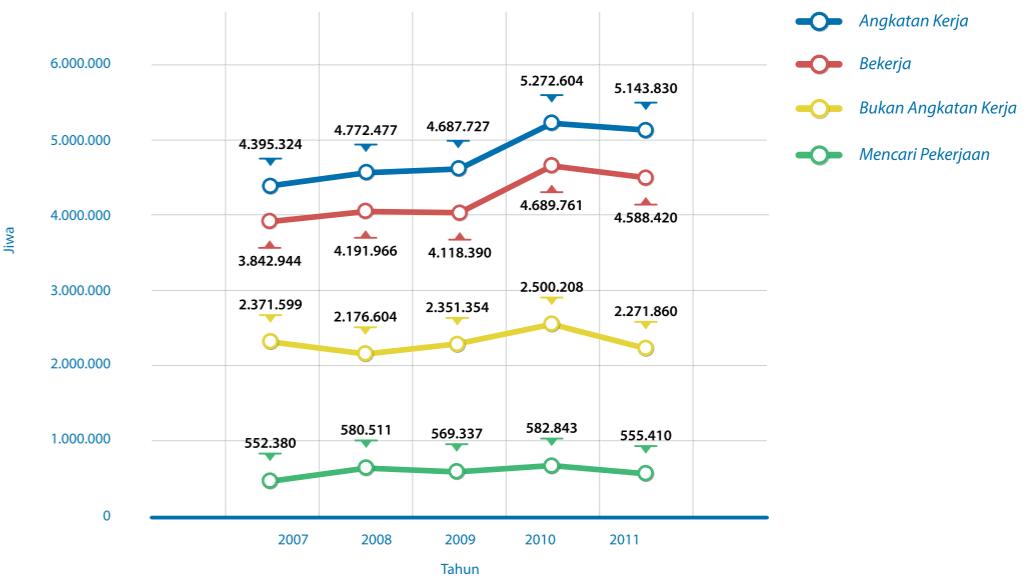
Jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) juga meningkat dari 581.352 peserta pada tahun 2007 menjadi 684.789 peserta pada tahun 2011 dan jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) dari 301.081 peserta pada tahun 2007 menjadi 349.332 peserta pada tahun 2011. Selain itu, jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan BKB dan Posyandu dari 26.176 keluarga pada tahun 2007 menjadi 45.048 keluarga pada tahun 2011.

2.3.9 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta, dari tahun 2007 sampai tahun 2011 cenderung terus meningkat. Selama periode tersebut jumlah angkatan kerja tumbuh sebesar 4,7 persen per tahun. Angkatan kerja tahun 2007 mencapai 4.395.324 jiwa dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 5.143.830 jiwa. Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.27.
Perkembangan Tingkat
Angkatan Kerja dan
Pengangguran Provinsi DKI
Jakarta

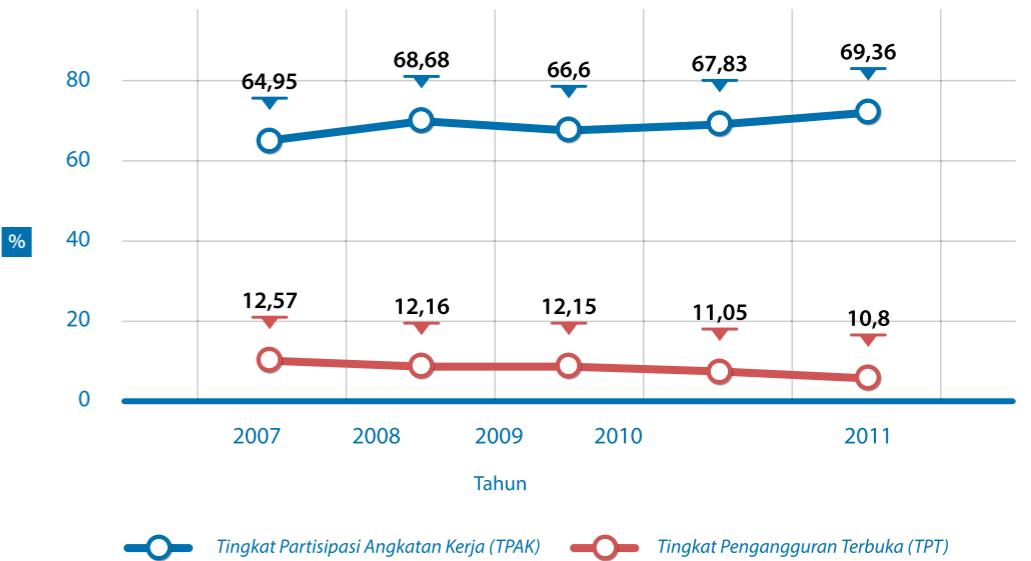
Sumber: Kompilasi Jakarta dalam
Angka 2011 dan Statistik Daerah
Provinsi DKI Jakarta, 2011



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 TPAK mencapai 69,36 persen. Persentase ini meningkat sebesar 4,41 poin dari tahun 2007.4,6 juta Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta mengalami penurunan rata-rata 1,07 poin atau 33.074 jiwa per tahun. Jika pada tahun 2007 TPT mencapai 12,57 persen, sehingga pada tahun 2011 TPT tercatat tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,80 persen (Gambar 2.28).

Gambar 2.28.
Perkembangan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja
dan Pengangguran Terbuka
Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Kompilasi Jakarta dalam
Angka 2011 dan dari Statistik
Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2011



Sektor perekonomian yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Sektor Perdagangan, Jasa-jasa dan Sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2010 tenaga kerja Jakarta mayoritas bekerja di Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel sebanyak 36,97 persen, diikuti oleh Sektor Jasa sebanyak 25,73 persen, dan Sektor Industri Pengolahan 16,10 persen.

*Peningkatan
pelayanan
penanaman modal
telah berhasil
meningkatkan
investasi di Provinsi
DKI Jakarta dari Rp
47,28 triliun pada
tahun 2007 menjadi
Rp 52,67 triliun di
tahun 2011.*

2.3.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Jakarta.

Pada tahun 2009, sudah ada 7326 koperasi yang terdaftar secara resmi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat pada tahun 2011 menjadi 7612. Selain itu, kegiatan koperasi dapat menyerap 19.112 orang tenaga kerja di Koperasi dan 2.549.513 orang tenaga kerja di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, telah dilakukan peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja UMKM kepada para pengurus, pengelola dan pengawas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di 267 Kelurahan.

2.3.11 Penanaman Modal

Penanaman modal di Jakarta mempunyai fungsi yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah peningkatan usaha kemitraan bisnis melalui peningkatan promosi investasi, peningkatan kualitas pelayanan investasi melalui penyederhanaan prosedur layanan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal.

Untuk urusan peningkatan penanaman modal, dalam hal meningkatkan arus investasi modal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan perizinan satu pintu (*one gate service*) sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mampu mempercepat proses perijinan yaitu untuk paket perizinan tanpa lahan, maksimal waktu penyelesaian perizinan 3 - 10 hari kerja, untuk paket perizinan dengan lahan kurang dari 5.000 m², maksimal waktu penyelesaian perizinan 25 hari kerja, dan untuk paket perizinan dengan lahan 5.000 m² atau lebih, maksimal waktu penyelesaian perizinan 38 hari kerja.

Peningkatan pelayanan penanaman modal telah berhasil meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta dari Rp. 47,28 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 52,67 triliun di tahun 2011. Jumlah nilai Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi DKI Jakarta dari US\$ 4.680 juta pada tahun 2007 menjadi US\$ 4.824 di tahun 2011, meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta dari Rp. 4.218 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp. 9.257 miliar di tahun 2011, serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dari Rp. 142,21 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp. 276 miliar di tahun 2011. Dan untuk lebih mempercepat layanan penanaman modal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

2.3.12 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pada urusan ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna terwujudnya pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip *Good Governance*. Kebijakan pada urusan ini antara lain telah dilakukan pendeklegasian sebagian wewenang pemerintahan pada tingkat Kota Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam perkembangannya, 5 (lima) wilayah Kota Administrasi telah melakukan layanan satu pintu.

Peningkatan pelayanan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian telah menghasilkan beberapa prestasi. Hasil yang dicapai antara lain telah terlaksananya administrasi keuangan daerah, sehingga pada tahun 2011, Jakarta mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tersusunnya konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat kota administrasi, dipertahankannya *response time* pemadam kebakaran 15 menit, terlaksananya *e-Recruitment* pegawai Pemprov DKI Jakarta sesuai formasi jabatan, diterapkannya sistem remunerasi (TKD), dan terbentuknya polisi komunitas tingkat RW di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu prioritas untuk terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah reformasi birokrasi. Dari 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah yang signifikan, yaitu :

- 1) Area organisasi, pada area ini telah dilakukan restrukturisasi organisasi, penataan jabatan struktural, termasuk penataan organisasi yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat;
- 2) Area tata laksana, pada area ini telah dilakukan pengembangan *e-government* antara lain mencakup *e-planning*, *e-budgetting*, *e-monev* (SIPKD), *e-procurement*, *e-recruitment*, *e-PSB* (Penerimaan Siswa Baru), *e-KTP*, dan *e-Akta Kelahiran*;
- 3) Area peraturan perundang-undangan, pada area ini telah dilakukan pemetaan produk perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundangan;
- 4) Area sumber daya manusia, telah dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi SDM melalui *assessment center*, penyusunan *man power planning*, penerapan sistem penilaian kinerja, peningkatan kompetensi SDM;
- 5) Area pengawasan, pada area ini telah dilakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), monitoring dan evaluasi APBD dengan *e-monev* dan *mobile government* (m-govt);
- 6) Area akuntabilitas kinerja, pada area ini telah dilakukan penandatanganan pakta integritas, penetapan indikator kinerja utama (*key performance indicator*), layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

- 7) Area pelayanan publik, pada area ini telah dilakukan penataan dan pembangunan:
- Infrastruktur seperti Kanal Banjir Barat, sungai, waduk, situ dan drainase, pelaksanaan program MHT plus, *Intermediate Treatment Facilities*, kabel listrik bawah laut Kepulauan Seribu;
 - Transportasi seperti busway, *feeder* dan angkutan perbatasan, operasional bus sekolah gratis, Dermaga Muara Angke dan angkutan penyeberangan dari/ke Pulau Seribu, *flyover*, *underpass* dan jalan layang non tol;
 - Pendidikan seperti sertifikasi ISO 9001:2000 pada sekolah, pemberian beasiswa, bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa, penerimaan siswa baru secara online, bantuan operasional buku dan pendidikan, inklusif, dan SMP terbuka;
 - Kesehatan seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin) dan rentan (SKTM), sertifikasi ISO 9001:2008 pada 44 Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap;
 - Kependudukan seperti pelayanan terpadu malam hari, pelayanan KTP mobile, pelayanan e-KTP dan e-Akta, *drive thru* pajak, gerai pajak, pelayanan terpadu satu pintu, penanggulangan/tanggap bencana, serta pengembangan Lurah dan Camat sebagai *Urban Manager*;
- 8) Area pola pikir – budaya kerja, pada area ini telah dilakukan pembentukan tim dan kelompok kerja reformasi birokrasi, pembangunan *mindset* bagi *change master* dan *change agent*, *workshop* dan *team building* bagi pejabat eselon I dan II, *workshop* bagi Lurah dan Camat.

2.3.13 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting dalam proses pembangunan di Jakarta. Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain adalah penerapan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan yang dimulai dengan *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*. Selain itu juga telah dilakukan penyediaan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet, serta pelayanan perijinan berbasis internet.

Hasil yang telah diperoleh dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain penyediaan jaringan komunikasi berbasis *internet protocol* dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat kelurahan, pembangunan sistem aplikasi seperti sistem keuangan, pajak kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, kepegawaian, pengujian kendaraan bermotor, aset manajemen, aplikasi pelelangan elektronik (*e-procurement*), dan sistem informasi kependudukan.

Untuk meningkatkan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika, telah dilakukan peningkatan jumlah kegiatan pemantauan, pendataan, pengawasan dan penerapan

e-Announcement dari 487 SKPD/UKPD pada tahun 2009 menjadi 587 SKPD/UKPD pada tahun 2010. Hasil lain adalah bahwa penerapan *e-Regular Tender* dari 100 SKPD pada tahun 2009 menjadi 193 SKPD/UKPD pada tahun 2010 untuk 3.409 kegiatan.

2.3.14 Perdagangan

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional. Jumlah pasar pada tahun 2010 sebanyak 153 unit.

Selain urusan perdagangan, urusan perindustrian juga mendapat perhatian khusus guna mendukung kegiatan perekonomian Jakarta. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah fasilitasi pengembangan industri kecil ramah lingkungan dan perbaikan mutu produk industri yang dihasilkan oleh perusahaan Jakarta.

Berkaitan dengan jumlah industri yang beroperasi di Jakarta, jumlahnya cenderung menurun, tetapi nilai produksinya cenderung meningkat. Pada tahun 2007 jumlah industri besar dan sedang mencapai 2.566 perusahaan dengan nilai produksi mencapai Rp.177,83 triliun, sedangkan pada tahun 2008 jumlah perusahaan mencapai 1.866 perusahaan dengan nilai produksi sebesar Rp.215,65 triliun, dan pada tahun 2009 jumlah perusahaan mencapai 1.699 perusahaan dengan nilai produksi sebesar Rp.230,09 triliun.

Selain urusan perdagangan, urusan perindustrian juga mendapat perhatian khusus guna mendukung kegiatan perekonomian Jakarta.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Provinsi DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang dinilai cukup kompetitif dalam memimpin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan kota yang paling berkembang diantara kota-kota lain di Indonesia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Makro

Perekonomian makro Jakarta tumbuh cukup baik. Jumlah total PDRB Jakarta berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.757,70 triliun pada tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp.1.103,7 triliun pada tahun 2012. PDRB perkapita pada tahun 2009 mencapai Rp.82,15 juta, sementara tahun 2012 telah mencapai peningkatan yang cukup tinggi, yaitu Rp.110,46 juta.

Dari sisi pengeluaran, PDRB Jakarta didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2009 mencapai 55,32 persen dari total PDRB, sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 56,2 persen. Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 34,77 persen pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 39,4 persen. Sementara itu proporsi konsumsi pemerintah meningkat dari 8,27 persen pada tahun 2009 menjadi 11 persen pada tahun 2012.

Nilai pengeluaran per kapita terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 dengan harga konstan, konsumsi rumah tangga per kapita Jakarta mencapai Rp.43,7 juta dan meningkat menjadi Rp.49,37 juta pada tahun 2010. Uraian di atas menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Jakarta.

2.4.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pengembangan *online system*; menindaklanjuti pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah; melakukan evaluasi terhadap besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk penetapan PBB; melakukan optimalisasi retribusi daerah; meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta Bagi Hasil Pengelolaan Aset Pusat di daerah.

Dalam pembiayaan pembangunan, selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan dan mulai mengimplementasikan beberapa skema pembiayaan lain seperti pinjaman luar negeri, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) maupun obligasi daerah yang diperlukan untuk membiayai infrastruktur publik.

2.4.3 Fasilitas Infrastruktur

Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakin ketat. Jakarta sebagai kota yang multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota Jakarta yang berdaya saing global.

Secara keseluruhan, transportasi merupakan infrastruktur perekonomian yang sangat penting. Dengan ketersediaan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, untuk mewujudkan peningkatan

daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi yang maju, handal, modern, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda.

Selain itu, infrastruktur energi juga dibutuhkan untuk aktivitas produksi. Dengan ketersediaan energi yang mencukupi didukung dengan efisiensi dalam penggunaanya akan mendorong tingkat produktivitas daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kemampuan daya saing. Salah satu infrastruktur energi yang krusial bagi kota Jakarta adalah infrastruktur listrik guna memenuhi kebutuhan Jakarta sebagai Ibukota.

Perekonomian daerah sangat tergantung dari jasa perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini menandakan bahwa iklim perekonomian Jakarta cukup kondusif. Jumlah kantor bank yang beroperasi di Jakarta baik bank pemerintah, pembangunan daerah, swasta, maupun bank asing dan campuran pada tahun 2010 mencapai 3.394 unit. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah bank hanya 2.401 unit. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Jakarta merupakan tempat yang menarik untuk melakukan usaha jasa keuangan.

2.4.4 Iklim Investasi

Fungsi Investasi di Jakarta sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi sangat dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Jakarta antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah kecepatan perijinan, kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2007 sampai dengan 2010 mengalami fluktiasi yang cukup besar. Jika pada tahun 2007 jumlah angkatan kerja hanya 4,39 juta, pada tahun 2010 jumlahnya sudah mencapai 5,27 juta. Selain jumlah angkatan kerja, faktor penentu investasi yang berkaitan dengan tenaga kerja adalah kebijakan penentuan upah minimum provinsi (UMP) untuk pekerja. UMP ini di Jakarta terus diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan iklim investasi agar menjadi lebih kondusif. Nilai UMP Jakarta tahun 2011 mencapai Rp.1.290.000 per pekerja per bulan. Sementara UMP tahun 2009 dan 2010 berturut turut adalah sebesar Rp. 1.069.865 dan Rp. 1.188.010 per pekerja per bulan.

Demonstrasi mahasiswa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi di Jakarta. Jumlah aksi demo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun. Hal ini menandakan bahwa stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban mendapat perhatian serius. Pada tahun 2008 jumlah demonstrasi mencapai 329 kali, pada tahun 2009 meningkat menjadi 472 kali dan selanjutnya pada tahun 2010 jumlah demonstrasi menurun menjadi 397 kali.

Tingkat kriminalitas di Jakarta juga semakin menurun baik tipe maupun jenisnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya dan politik yang

Tingkat kriminalitas di Jakarta juga semakin menurun baik tipe maupun jenisnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi pada masyarakat Jakarta.

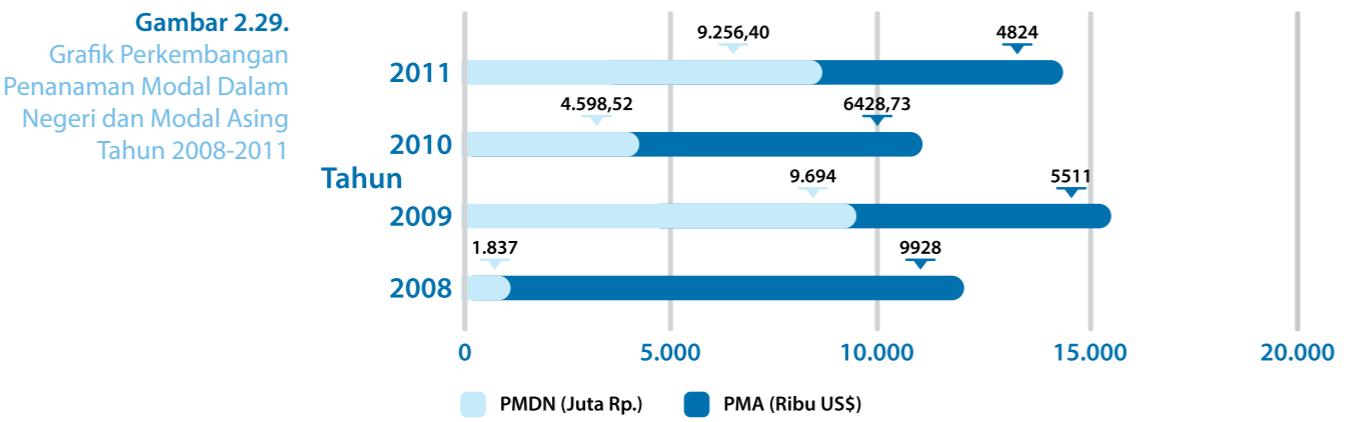
terjadi pada masyarakat Jakarta. Angka kriminalitas pencurian dengan kekerasan mencapai 1.289 kejadian pada tahun 2008, sementara pada tahun 2010 jumlah tersebut menurun menjadi 6.046 kejadian. Sementara penganiayaan berat mengalami penurunan dari 2.053 kejadian pada tahun 2008 menjadi 1.937 kejadian pada tahun 2010.

Dengan kondisi tersebut, sepanjang tahun 2009 pertumbuhan penanaman modal atau investasi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil yang positif, dan terbesar dalam tiga tahun terakhir. Target investasi pada tahun 2009 sebesar Rp.46 triliun, sedangkan realisasi investasi mencapai Rp.64,79 triliun atau mencapai 120 persen dari target semula. Hal ini menandakan, DKI Jakarta tetap menarik bagi investor domestik dan mancanegara untuk menanamkan modalnya.

Pencapaian investasi pada tahun 2009 tersebut terdiri atas sektor Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp.55,1 triliun dan sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.64,79 triliun. Sedangkan sumber investasi asing didominasi dari 4 (empat) negara yakni Singapura sebesar US\$3,36 miliar, Belanda US\$1,12 miliar, Korea Selatan US\$0,27 miliar, dan Inggris US\$0,18 miliar.

Sepanjang tahun 2008, sektor PMA mendominasi iklim investasi di Jakarta. Namun pada tahun 2009, PMA mengalami penurunan cukup tajam karena diakibatkan krisis finansial global yang masih memengaruhi beberapa negara, sehingga para investor asing membatasi investasinya ke luar negeri, termasuk ke Kota Jakarta.

Di sisi lain, realisasi PMDN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.4,59 triliun turun hampir 50 persen dari tahun 2009 yang mencapai melayani Rp.9,69 triliun. Sebaliknya penanaman modal asing meningkat 16,7 persen dari US\$5,51 Miliar pada tahun 2009 menjadi US\$6,42 Miliar pada tahun 2010 (Gambar 2.29).



2.4.5 Lingkungan Strategis Nasional, Regional, dan Global

Perkembangan nasional, regional, dan global merupakan tantangan yang harus dihadapi kota Jakarta. Untuk itu diperlukan persiapan dan perencanaan komprehensif dari berbagai aspek termasuk penguatan kapasitas inovasi sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Perubahan lingkungan nasional secara langsung akan mempengaruhi kondisi dan kinerja kota Jakarta. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, perubahan lingkungan dunia usaha, dan perubahan praktik bisnis. Dalam pengelolaan keuangan, lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (PERFINDO), telah memberikan peringkat AA Plus dengan *stable outlook* kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang relatif.

Pada lingkup regional, perubahan tatanan ekonomi, sosial, dan budaya ditandai dengan rencana terbentuknya masyarakat ASEAN pada tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Sementara itu, di tingkat global perubahan tatanan ekonomi sosial dan budaya ditandai oleh semakin berperannya *multi national corporation*, terintegrasi sistem keuangan global, perdagangan bebas, serta munculnya regionalisasi perekonomian. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, maju dan modern akan berdampak pada tinggi dan kompleksnya dinamika pasar dan perubahan sosial budaya masyarakat.

Dari segi daya saing global, pada tahun 2012 *Global City Competitiveness Index* versi *Economist Intelligence Unit* menempatkan daya saing kota Jakarta ke dalam peringkat 81 dengan skor 44,1 dari 120 kota dunia. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan untuk menarik modal atau investasi, bisnis, dan pengunjung. Kondisi Jakarta terkait dengan daya saing kota dapat digambarkan melalui beberapa indikator di antaranya kemampuan ekonomi makro dan keuangan daerah, infrastruktur, iklim investasi, kapasitas dan kualitas SDM, serta posisi Jakarta di lingkungan nasional, regional, dan global.



BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Secara ringkas, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Analisis Proyeksi
Pendapatan Daerah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010



Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, Pendapatan Daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan Negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi Pendapatan Daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah. Dari formulasi tersebut diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek Pendapatan Daerah yang secara kumulatif mencerminkan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Angka pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

Setelah dilakukan analisis Pendapatan Daerah, perlu dilakukan analisis Belanja Daerah dengan kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2.
Analisis Proyeksi
Belanja Daerah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010



Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Analisis mengenai Belanja Daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada Kebijakan Pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan Pembiayaan Daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk memperhitungkan bagian dari Belanja Daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang.

Selain analisis Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dilakukan analisis berkaitan dengan Pembiayaan Daerah yang rumusan pemikiran digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 3.3.
Analisis Proyeksi
Pembiayaan Daerah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010



Pembiayaan Daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam menganalisis Pembiayaan Daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi Belanja Daerah dan peningkatan Pendapatan Daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2007-2012

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, terlebih dahulu dilihat asumsi indikator makro ekonomi sebagai gambaran kondisi perekonomian di lapangan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Realisasi Indikator Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2012 (Dalam Persen)

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,23 | 5,02 | 6,6 | 6,7 | 6,5 |
| a | Pertanian | 0,77 | 0,34 | 0,84 | 0,78 | 0,8 |
| b | Pertambangan dan Penggalian | 0,07 | -0,21 | 1,47 | 4,35 | -0,9 |
| c | Industri Pengolahan | 3,87 | 0,14 | 3,61 | 2,55 | 2,4 |
| d | Listrik, Gas dan Air Bersih | 7,32 | 4,58 | 4,33 | 4,7 | 4,5 |
| e | Konstruksi | 7,67 | 6,2 | 7,08 | 7,2 | 6,8 |
| f | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 6,66 | 4,01 | 7,27 | 7,4 | 7,2 |
| g | Pengangkutan dan Komunikasi | 14,86 | 15,63 | 14,73 | 13,8 | 11,8 |
| h | Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan | 4,21 | 3,97 | 4,24 | 5,28 | 5,4 |
| i | Jasa-jasa | 6,05 | 6,49 | 6,58 | 7,05 | 7,6 |
| 2 | Inflasi | 11,11 | 2,34 | 6,21 | 3,97 | 4,52 |

Pergerakan output sektor-sektor produksi utama tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pendapatan Daerah.

Selama tahun 2007 hingga 2012, realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada kisaran diatas 6 (enam) persen per tahun. Namun pada tahun 2009 mengalami perlambatan diakibatkan pengaruh krisis keuangan di Eropa yang berimbas pada perekonomian global, sehingga pertumbuhan DKI Jakarta hanya mencapai 5,02 persen.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi tahun 2007 hingga tahun 2012 terus meningkat, sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan sektoral khususnya sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, *real estate* dan jasa keuangan; serta sektor jasa, yang merupakan sektor-sektor produksi utama penopang perekonomian DKI Jakarta.

Dengan pendekatan tersebut, dapat dilihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor produksi utama perekonomian di DKI Jakarta, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi menandai peningkatan output pada sektor-sektor produksi utama, juga sebaliknya.

Pergerakan output sektor-sektor produksi utama tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pendapatan Daerah. Untuk dapat melihat bagaimana pengaruh tersebut, terlebih dahulu perlu dilihat kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2007-2012 sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2007-2012, yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
2. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi, yakni :
 - a. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada;
 - b. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi atau elektronisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - c. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - f. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi;
3. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (*netral*) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan;

4. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, pembentukan *subholding* baru dan kemungkinan penciptaan *Holding Company* dan peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

Pengaruh dari pergerakan output sektor-sektor produksi utama dalam hal ini diindikasikan melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan Pendapatan Daerah, selama tahun 2007-2012 tergambar dalam rencana dan realisasi Pendapatan Daerah pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Percentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2011 (Audited BPK)

**) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 (Unaudited)*

| Tahun | Rencana Pendapatan APBD-P (Miliar Rupiah) | Realisasi Pendapatan (Miliar Rupiah) | % Realisasi Pendapatan Terhadap APBD-P |
|-------|---|--------------------------------------|--|
| 2008 | 19.031,85 | 19.221,76 | 101.00 |
| 2009 | 19.371,84 | 19.262,68 | 99.44 |
| 2010 | 22.963,35 | 23.025,99 | 100.27 |
| 2011 | 26.845,69 | 28.297,36 | 105.41 |
| 2012* | 33.650,01 | 35.610,96 | 105.43 |

Pendapatan Daerah tahun 2012 telah melampaui rencana Pendapatan Daerah sebagaimana RPJMD Tahun 2007-2012, yaitu sebesar Rp.28.933,89 Miliar. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2007 hingga tahun 2012 terus meningkat nilainya baik dari rencana maupun realisasi, hal tersebut sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang relatif meningkat dari 2007 hingga 2012.

Pada tahun 2009, dilakukan revisi terhadap rencana Pendapatan Daerah, dimana pada APBD direncanakan sebesar Rp.20.213,39 menjadi sebesar Rp.18.963,84 pada APBD-P. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I tahun 2009 yang jauh lebih rendah dari rencana, sejalan dengan rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi periode yang sama yaitu hanya -1,09 persen, sebagai imbas dari kelesuan perekonomian akibat pengaruh krisis keuangan global. Meskipun demikian, kondisi perekonomian berangsur pulih sehingga realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009 tetap dapat melampaui rencana.

Lebih rinci, berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah tahun 2007-2012 yang diklasifikasikan menurut sumbernya.

Tabel 3.3.
Realisasi Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2007 - 2012
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-
2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | |
| 1 | Pendapatan | 19.221,76 | 19.262,68 | 23.052,99 | 28.297,35 | 35.610,96 | 16,76 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 10.455,57 | 10.601,06 | 12.891,99 | 17.825,98 | 22.273,30 | 21,19 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 8.751,27 | 8.560,13 | 10.751,75 | 15.221,25 | 17.722,38 | 20,58 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 395,64 | 416,90 | 439,21 | 609,35 | 1.822,37 | 41,40 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 163,15 | 181,13 | 223,01 | 278,79 | 353,72 | 19,84 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 1.145,50 | 1.442,90 | 1.478,03 | 1.716,60 | 2.374,83 | 28,94 |
| 1.2 | Dana Pertimbangan | 8.702,81 | 8.650,84 | 9.573,61 | 9.149,71 | 11.554,96 | 10,37 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 8.580,18 | 9.398,61 | 8.747,64 | 10.984,79 | 5,64 |
| 1.2.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 8.702,81 | 70,65 | 139,00 | 192,16 | 294,85 | 22,25 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Umum | - | - | - | 209,91 | 275,33 | 6,23 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 63,38 | 10,79 | 596,39 | 1.321,67 | 1.782,69 | 1.1082,25 |
| 1.3.1 | Hibah | - | 10,79 | 596,39 | 8,41 | 3,01 | 1.033,14 |
| 1.3.2 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 63,68 | - | - | 1.313,25 | 1.779,68 | (12,90) |

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,76 persen per tahun, dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah terbesar bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1.1082,25 persen per tahun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,19 persen per tahun, dan Dana Perimbangan sebesar 10,37 persen per tahun.

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

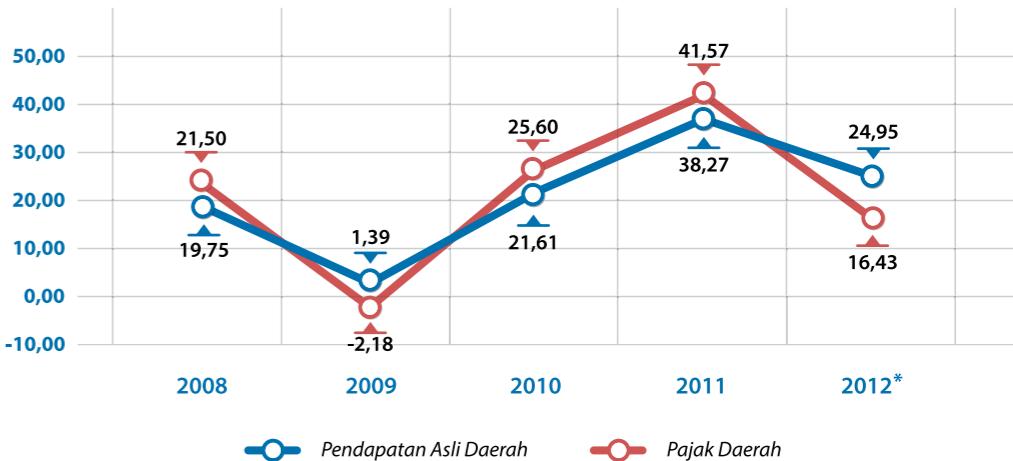
Selama periode tahun 2007–2012, PAD rata-rata tumbuh sebesar 60,13 persen per tahun, dimana pertumbuhan PAD relatif sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Pajak Daerah, selama tahun 2007 hingga tahun 2012 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 21,19% per tahun, dengan pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4.
Pertumbuhan Realisasi
Pajak Daerah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2007 - 2012

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun
2007-2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)



Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis Pajak Daerah yang ditentukan yaitu:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Permukaan;
- Pajak Rokok;
- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Parkir;

- I. Pajak Air Tanah;
- m. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; serta
- n. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pertumbuhan Pajak Daerah memiliki kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan PAD secara total. Tren pertumbuhan Pajak Daerah, terutama jenis Pajak Daerah yang bersifat konsumtif, sangat dipengaruhi oleh gejolak perekonomian. Melemahnya aktivitas perekonomian berpengaruh cukup signifikan pada Pajak Daerah, meskipun pertumbuhannya positif, namun menurun drastis dari semula tumbuh 21,50 persen pada tahun 2008 tumbuh negatif sebesar 2,18 persen pada tahun 2009.

Pemberlakuan kebijakan baru baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulus pada Pajak Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pada tahun 2010, memungkinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan intensifikasi dan ektenifikasi Pajak Daerah lebih luas lagi, terlebih dengan adanya pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan yang semula Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah, berlaku mulai tahun 2012. Stimulus tersebut dapat terlihat dari peningkatan pertumbuhan Pendapatan dari Pajak Daerah hingga mencapai 25,6 persen pada 2010 dan meningkat lagi menjadi 41,57 persen pada 2011.

Faktor lain yang juga mempengaruhi Pendapatan dari Pajak Daerah yaitu stabilitas keamanan dan akses perijinan, terutama Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Retribusi Daerah selama tahun 2007 hingga tahun 2012 rata-rata tumbuh sebesar 41,40% per tahun dengan rincian pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5.
Pertumbuhan Realisasi
Retribusi Daerah Provinsi
DKI Jakarta Tahun
2007 - 2012

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun
2007-2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)



Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

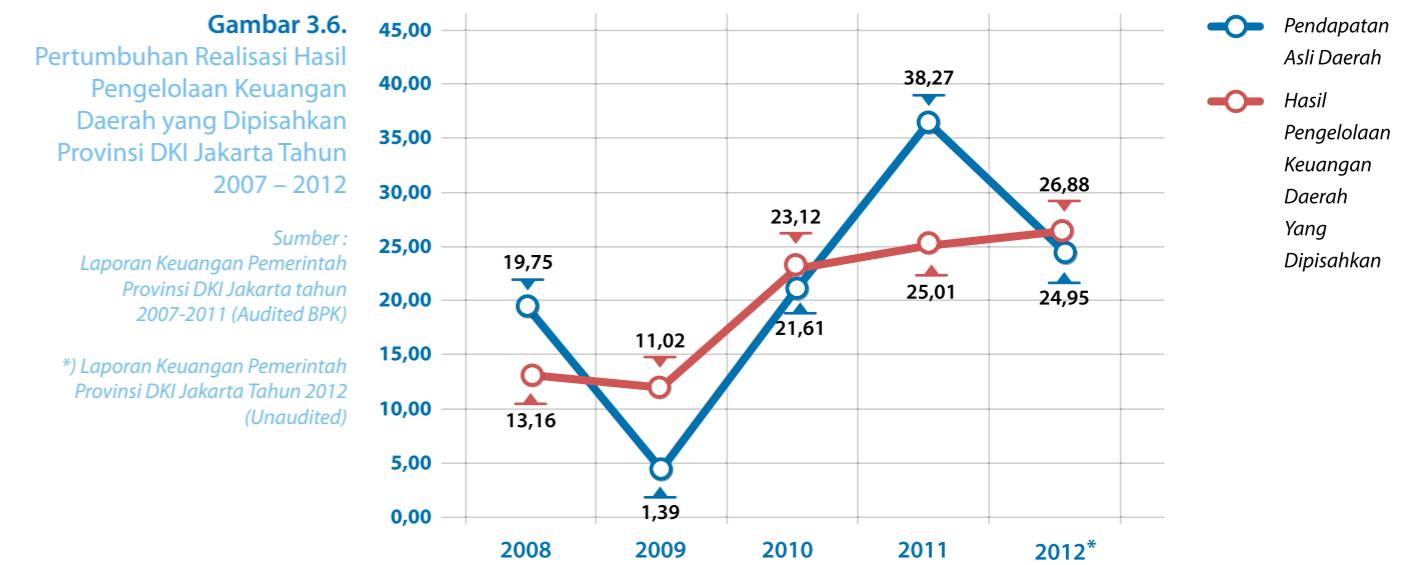
Jenis Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu :

- a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

- b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dikarenakan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aturan pemungutan Retribusi Daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar Retribusi Daerah.

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan selama tahun 2007 hingga tahun 2012 tumbuh rata-rata sebesar 18,08 persen per tahun, dengan rincian per tahun sebagai berikut:



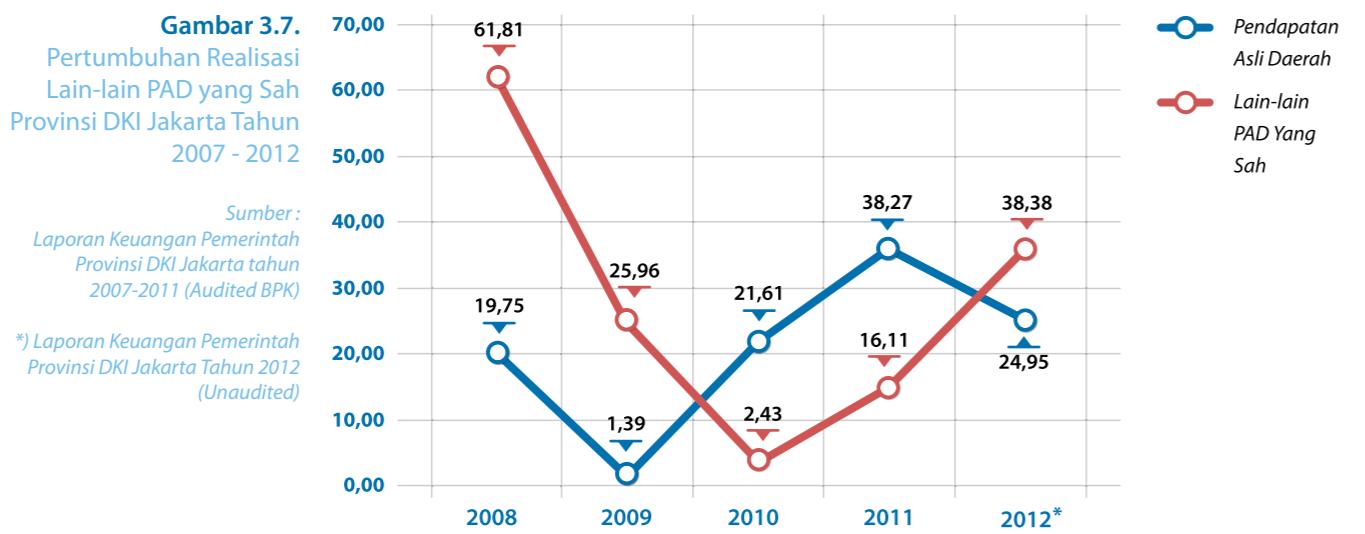
Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan, yaitu :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sedangkan untuk tahun 2007 hingga tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memperoleh Bagian laba atas penyetoran modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Pertumbuhan realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan relatif sejalan dengan pertumbuhan PAD. Hal tersebut terjadi karena laba yang diperoleh BUMD, sama halnya dengan perusahaan pada umumnya, sangat risikan terhadap kondisi perekonomian baik lokal, regional, nasional, maupun global. Seperti dapat dilihat pada gambar tersebut diatas, pada tahun 2009 terjadi perlambatan pertumbuhan realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan sebagai akibat dari krisis keuangan global, sehingga meskipun laba yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat nilainya, namun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena kondisi perekonomian segera pulih sehingga dapat dilihat pada tahun 2010, terjadi peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Lain-lain PAD yang Sah selama tahun 2007 hingga tahun 2012 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 26,58 persen per tahun, dengan rincian per tahun sebagai berikut.



Jenis Pendapatan Daerah yang diklasifikasikan dalam Lain-lain PAD Yang Sah yang mencakup:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Pendapatan denda pajak;
- Pendapatan denda retribusi;

- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dari gambar tersebut diatas, dapat dilihat pertumbuhan realisasi Lain-lain PAD yang Sah memiliki tren yang tidak sama dengan pertumbuhan PAD. Pada tahun 2008 hingga 2010, pertumbuhan realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami perlambatan, namun meningkat lagi pada tahun 2010 hingga tahun 2012, dikarenakan Pemprov DKI Jakarta memperoleh Hibah untuk MRT yang jumlahnya semakin besar, mengikuti rencana pembangunan sarana dan prasarana MRT yaitu pada akhir tahun 2012.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2007 hingga tahun 2012 tumbuh rata-rata sebesar 6,39 persen, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,25 persen per tahun, Dana Alokasi Umum sebesar 6,25 persen per tahun, dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 5,64 persen per tahun. Besarnya Dana Perimbangan yang diterima, ditentukan oleh Pemerintah setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objek pendapatan yang belum tergali.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, Lain-lain Pendapatan yang Sah cukup besar dikarenakan ada dana hibah untuk bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat yang pada tahun 2011 dialokasikan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2007-2012 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Sedangkan kebijakan Belanja Daerah tahun 2007-2012 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012, yaitu sebagai berikut :

- Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;

3. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
 - b. Melakukan proper budgeting melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program;
 - c. Melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*);
5. Melakukan analisis khusus untuk permasalahan gender, anak, ibu hamil, pendidikan, ekonomi kerakyatan, birokrasi, asuransi sosial pensiun, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
6. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:
 - a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai *seed money* yang berperan mendorong perangkat kelurahan berperan sebagai *urban manager*;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan incentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah;
7. Membangun *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) terutama untuk menyelesaikan program-program yang harus dirampungkan dalam lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
8. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
9. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan UPT; serta
10. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan Belanja Daerah, diperoleh nilai realisasi Belanja Daerah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 3.4.
Rencana dan Realisasi
Belanja Terhadap Anggaran
Belanja
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2007-2012

Sumber:
*Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-
2011 (Audited BPK)*

**) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)*

| Tahun | Rencana Pendapatan APBD-P (Miliar Rupiah) | Realisasi Pendapatan (Miliar Rupiah) | % Realisasi Pendapatan Terhadap APBD-P |
|-------|---|--------------------------------------|--|
| 2007 | 20.636,07 | 17.280,82 | 83,74 |
| 2008 | 20.117,36 | 15.956,53 | 79,32 |
| 2009 | 23.594,86 | 19.511,10 | 82,69 |
| 2010 | 26.230,18 | 21.552,90 | 82,17 |
| 2011 | 30.922,36 | 26.423,60 | 85,45 |
| 2012* | 38.366,68 | 31.533,55 | 82,19 |

Secara lebih rinci, tabel berikut menyajikan proporsi realisasi Belanja terhadap rencana Belanja Daerah menurut kategori tahun 2007 hingga tahun 2012.

Tabel 3.5.
Proporsi Realisasi Belanja
Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2007-2012
(Dalam Persen)

Sumber:
*Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-
2011 (Audited BPK)*

**) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)*

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata |
|----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 2008 | 2009 | 2009 | 2011 | 2012* | |
| A | Belanja Tidak langsung | 92.03 | 91.47 | 91.45 | 93.98 | 93.39 | 92.64 |
| 1 | Belanja Pegawai | 93.14 | 92.45 | 92.48 | 94.75 | 94.19 | 93.44 |
| 2 | Belanja Bunga | 97.83 | 99.97 | 74.61 | 99.99 | 72.88 | 74.48 |
| 3 | Belanja Hibah | 99.97 | 90.05 | 97.65 | 93.54 | 94.91 | 76.24 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 89.32 | 82.11 | 58.94 | 66.22 | 54.27 | 59.32 |
| 5 | Belanja Bantuan Keuangan | 0.00 | 88.32 | 99.15 | 99.15 | 65.13 | 76.59 |
| 6 | Belanja Tidak Terduga | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 1.71 |
| B | Belanja Langsung | 72.92 | 79.12 | 77.58 | 81.23 | 76.74 | 77.94 |
| 1 | Belanja Pegawai | 82.59 | 82.91 | 76.71 | 86.54 | 86.28 | 84.20 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.86 | 83.99 | 85.66 | 86.39 | 85.16 | 84.30 |
| 3 | Belanja Modal | 56.65 | 72.09 | 68.70 | 75.37 | 68.07 | 68.44 |

Dari rincian realisasi Belanja Daerah tersebut diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 92,64 persen, sedangkan rata-rata realisasi Belanja Langsung sebesar 77,94 persen. Realisasi Belanja Daerah dari tahun ke tahun relatif semakin meningkat, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Meskipun demikian, dari tahun ke tahun realisasi Belanja Langsung relatif lebih rendah dibandingkan realisasi Belanja Tak Langsung, hal tersebut karena Belanja Langsung tidak dapat sepenuhnya diserap karena berbagai faktor, baik faktor internal diantaranya adalah

faktor teknis misalnya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, juga faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian baik lokal maupun global, sehingga terakumulasi menjadi sisa anggaran.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2007 hingga tahun 2012.

Tabel 3.6.
Realisasi Pembiayaan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2007-2012
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-
2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
| | Pembiayaan Netto | 1.181,14 | 4.005,14 | 3.438,10 | 4.581,97 | 5.615,46 |
| 1 | penerimaan Pembiayaan | 1.364,26 | 4.446,37 | 3.748,51 | 4.911,20 | 6.470,62 |
| 1.1 | Penggunaan SiLPA | 1.364,36 | 4.446,37 | 3.748,51 | 4.911,20 | 6.470,62 |
| 1.2 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | 14,88 | 4,93 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 183,12 | 441,24 | 310,41 | 329,22 | 855,16 |
| 2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | 70,15 | 50,04 | 54,56 | 73,96 |
| 2.2 | Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | 133,33 | 238,46 | 80,91 | 136,78 | 618,48 |
| 2.3 | Pembayaran Utang Pokok | 49,79 | 24,68 | 24,68 | 11,23 | 109,32 |
| 2.4 | Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga | - | 28,22 | 24,30 | 120,99 | - |
| 2.5 | Pembayaran Utang Kepada Pegawai | - | 18,97 | 3,48 | 1,35 | - |
| 2.6 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | 60,75 | 127,00 | 4,32 | 53,40 |

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Berikut digambarkan perkembangan Neraca Daerah.

Tabel 3.7.
Rata-rata Pertumbuhan
Neraca Daerah Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2007-2012
(Dalam Persen)

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun
2007-2011

| No | Uraian | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Aset | 0,65 |
| 1.1 | Aset Lancar | 17,47 |
| 1.1.1 | Kas | 16,60 |
| 1.1.2 | Piutang | 39,87 |
| 1.1.3 | Persediaan | 21,37 |
| 1.2 | Investasi Jangka Panjang | 13,25 |
| 1.2.1 | Investasi Non Permanen | 9,28 |
| 1.2.2 | Investasi Permanen | 13,98 |
| 1.3 | Aset Tetap | 2,54 |
| 1.3.1 | Tanah | 4,61 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 29,08 |
| 1.3.3 | Gedung dan bangunan | 19,61 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2,23 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 21,80 |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 44,13 |
| 1.4 | Dana Cadangan | 8,49 |
| 1.5 | Aset Lainnya | 34,94 |
| 1.5.1 | Tagihan Penjualan Angsuran | 166,76 |
| 1.5.2 | Piutang Tuntutan Ganti Rugi | 34,75 |
| 1.5.3 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 119,08 |
| 1.5.4 | Aset Tidak Berwujud | 16,73 |
| 1.5.5 | Aset di BP THR Lokasari | 2,59 |
| 1.5.6 | Aset Lain-lain | 31,09 |
| 2 | Kewajiban | 36,27 |
| 2.1 | Kewajiban Jangka Pendek | 50,20 |
| 2.2 | Kewajiban Jangka Panjang | 33,97 |
| 3 | Ekuitas Dana | 0,68 |
| 3.1 | Ekuitas Dana Lancar | 16,24 |
| 3.2 | Ekuitas Dana Investasi | 0,94 |
| 3.3 | Ekuitas Dana Cadangan | 8,49 |
| | Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 0,65 |

Berdasarkan tabel 3.7, berikut dijabarkan beberapa rasio keuangan tahun selama 2009 hingga 2011.

Tabel 3.8.
Analisis Rasio Keuangan
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta
Tahun 2009-2011

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun
2009-2011

| No | Uraian | Tahun | | |
|----|--|----------|----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>) % | 1.083,14 | 1.226,08 | 1.224,05 |
| 2 | Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>) (%) | 1.026,22 | 1.161,91 | 1.147,73 |
| 3 | Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (%) | 0,14 | 0,14 | 0,19 |
| 4 | Rasio Hutang Terhadap Modal (%) | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
| 5 | Rata-rata Umur Piutang (Hari) | 23 | 28 | 22 |
| 6 | Rata-rata Umur Persediaan (Hari) | 22 | 26 | 19 |

Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*Leverage*), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio*, yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai *Current Ratio* artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009, setiap Rp.100 hutang lancar dijamin oleh Aktiva Lancar sebesar Rp.1.083,14; tahun 2010 sebesar Rp.1.226,08; dan tahun 2011 sebesar Rp.1.224,05;
2. *Quick Ratio*, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel diatas, *Quick Ratio* tahun 2009 sebesar 20,26, artinya bahwa hutang lancar sebesar Rp.100 dijamin dengan Aktiva sebesar Rp.1.026,22; tahun 2010 sebesar Rp.1.161,91; dan tahun 2011 sebesar Rp.1.147,73. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2009 sebesar 0,14 persen, tahun 2010 sebesar 0,14 persen, dan tahun 2011 sebesar 0,19 persen.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2009 sebesar 0,13 persen, tahun 2010 sebesar 0,15 persen, dan tahun 2011 sebesar 0,19 persen.

Rasio Aktivitas digunakan untuk mengetahui aktivitas aktiva pada kegiatan tertentu. Rasio Aktivitas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. Rata-rata umur piutang berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Angka rata-rata umur piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat;
2. Rata-rata umur persediaan menandakan berapa lama waktu perputaran persediaan. Semakin besar rata-rata umur persediaan menandakan efektifitas manajemen persediaan. Sebaliknya, rata-rata umur persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mis-manajemen seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2007-2012

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Realisasi Belanja
Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Provinsi
DKI Jakarta
Tahun 2009-2012
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-
2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)

| No | Uraian | Tahun | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
| A | Belanja Tidak Langsung | 5.874,59 | 7.476,93 | 8.757,47 | 9.688,22 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.005,82 | 3.161,76 | 3.514,43 | 8.061,71 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 2.609,98 | 3.485,65 | 3.992,83 | 78,82 |
| 3 | Belanja Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD | 23,66 | 25,07 | 27,70 | 26,94 |
| 4 | Belanja Intensif Pemungutan Pajak Daerah | 235,14 | 161,43 | 413,83 | 446,91 |
| 5 | Biaya Kematian Pegawai | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 16,19 |
| 6 | Biaya Guru NIP 15 | 0,00 | 37,68 | 37,58 | 37,78 |
| 7 | Belanja Penghasilan Lainnya | 0,00 | 590,36 | 771,10 | 1.019,86 |
| B | Belanja Langsung | 1.672,83 | 1.060,92 | 1.138,09 | 1.371,40 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 719,50 | 258,10 | 216,57 | 357,02 |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 952,40 | 802,64 | 836,10 | 1.002,49 |
| 3 | Belanja Uang Lembur | 0,93 | 0,18 | 5,43 | 11,90 |
| 4 | Biaya Pegawai BOS | 0,00 | 0,00 | 79,98 | 0,00 |

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Proporsi Belanja
Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Provinsi
DKI Jakarta
Tahun 2009-2012

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-
2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)

| No | Tahun | Belanja Kebutuhan Aparatur (Miliar Rupiah) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Miliar Rupiah) | Presentase (%) |
|----|-------|---|--|-------------------|
| 1 | 2009 | 7.547,42 | 19.952,34 | 37,83 |
| 2 | 2010 | 8.537,85 | 21.863,30 | 39,05 |
| 3 | 2011 | 9.895,56 | 26.752,82 | 36,99 |
| 4 | 2012* | 11.069,62 | 32.388,71 | 34,15 |

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2009 sebesar 37,83 persen; tahun 2010 sebesar 39,05 persen, tahun 2011 sebesar 36,99 persen, dan tahun 2012 sebesar 34,15 persen.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Penutup Defisit Riil
Anggaran Provinsi DKI
Jakarta
Tahun 2007-2012
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-
2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
(Unaudited)

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
| 1 | Pendapatan Daerah | 19.221,76 | 19.262,68 | 23.025,99 | 28.297,36 | 35.610,96 |
| Dikurangi Realisasi | | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 15.956,53 | 19.511,10 | 21.552,90 | 26.423,60 | 31.533,55 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 183,12 | 441,24 | 310,41 | 329,22 | 855,16 |
| A | Defisit Riil | 3.082,12 | 689,66 | 1.162,68 | 1.544,54 | 3.222,25 |
| B | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 1.364,26 | 4.446,37 | 3.748,51 | 4.926,08 | 6.475,55 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | 1.717,86 | 5.136,03 | 2.585,83 | 3.381,54 | 3.253,30 |

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2007 hingga 2012.

Tabel 3.12.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 (Unaudited)

| No | Uraian | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012* | |
|----|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | | Rp | % thd SiLPA |
| 1 | Jumlah SiLPA | 4.446,37 | 100,00 | 3.756,72 | 100,00 | 4.911,20 | 100,00 | 6.470,62 | 100,00 | 9.697,80 | 100,00 |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | 74,02 | 1,66 | 237,66 | 6,33 | 576,59 | 11,74 | 1.546,61 | 23,90 | 1.749,87 | 18,04 |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | 178,88 | 4,02 | 357,56 | 9,52 | 468,48 | 9,54 | 490,93 | 7,59 | 1.778,09 | 18,33 |
| 4 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 63,00 | 1,42 | 10,79 | 0,29 | 45,48 | 0,93 | 94,19 | 1,46 | 1.567,01 | 16,16 |
| 5 | Belanja Daerah Yang Tidak terserap | 4.160,83 | 93,58 | 4.083,76 | 108,71 | 4.677,28 | 95,24 | 4.499,20 | 69,53 | 6.833,13 | 70,46 |
| 6 | Pembayaran | 95,63 | 2,15 | 217,89 | 5,80 | 171,28 | 3,49 | 520,18 | 8,04 | 903,72 | 9,32 |

Perolehan SiLPA selama tahun 2007 hingga 2012 sebagian besar diperoleh dari Belanja Daerah yang tidak terserap, kemudian juga dari pelampauan Pendapatan Daerah baik dari PAD, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkala bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.13.
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkala Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2011 (Audited BPK)

| No | Uraian | Tahun | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Saldo Kas Neraca Daerah | 4.307,24 | 5.556,59 | 7.138,64 |
| Dikurangi: | | | | |
| 2 | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan | 0,22 | 11,78 | 6,01 |
| Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran | | 4.307,02 | 5.544,81 | 7.132,63 |

Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Belanja Dedicated Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2012 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2011 (Audited BPK)

*) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 (Unaudited)

| No | Uraian | Tahun | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* | |
| A | Belanja Mengikat | 7.557,37 | 8.545,27 | 9.899,91 | 9.691,39 | 20,57 |
| B | Belanja Langsung | 2.606,38 | 4.783,08 | 5.491,40 | 5.628,43 | 15,97 |
| 1 | Belanja Dedicated | 2.606,38 | 4.783,08 | 5.491,40 | 5.628,43 | 32,77 |
| C | Pembayaran Pengeluaran | 71,87 | 24,86 | 11,23 | 109,32 | 25,27 |
| 1 | Pembayaran Utang Pokok | 71,87 | 24,86 | 11,23 | 109,32 | 25,27 |
| Total (A+B+C) | | 10.235,62 | 13.353,03 | 15.402,54 | 15.429,14 | 12,96 |

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2013-2017

A. Kebijakan Dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2013-2017

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2007-2012, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.

Tabel 3.15.
Proyeksi Indikator Makro
Ekonomi Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2007 - 2012
(Dalam Persen)

Sumber:
Bappeda dan BPS Provinsi
DKI Jakarta

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (&) | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,30 |
| 2 | Inflasi | 5,0 - 6,0 | 5,5 - 6,0 | 6,5 - 7,5 | 5,5 - 6,5 | 6,0 - 7,0 |

Tahun 2013-2017, dirumuskan beberapa kebijakan pendapatan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

- Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah;
- Penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu
- Perluasan basis pajak yang masih dapat dilakukan dengan *Online System Pajak Daerah* yang telah dilakukan sejak 2010 dengan 800 Wajib Pajak dan terus dikembangkan hingga ditargetkan 14.000 Wajib Pajak pada tahun 2017;
- Pemberlakuan Pajak Rokok Tahun 2014, dimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diamanatkan bahwa Pajak Rokok merupakan Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi;
- Penyesuaian sewa parkir secara periodik;
- Penambahan jenis retribusi baru (Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing);
- Peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi; dan
- Optimalisasi laba BUMD.

Kebijakan tersebut diatas diformulasikan sedemikian rupa sehingga diperoleh proyeksi pendapatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16.
Proyeksi Pendapatan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2013-2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
BPKD dan DPP Provinsi DKI Jakarta

| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Pendapatan | | 41.525,34 | 53.197,03 | 63.955,60 | 83.707,89 | 103.982,01 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 26.670,45 | 34.258,57 | 40.100,47 | 47.902,04 | 57.376,73 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 21.918,00 | 28.457,00 | 33.883,82 | 41.228,78 | 50.200,37 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 1.500,00 | 2.207,50 | 2.369,63 | 2.547,83 | 2.743,72 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Keuangan daerah Yang Dipisahkan | 415,24 | 615,00 | 719,00 | 841,00 | 984,00 |
| 1.4 | lain-lain PAD Yang Sah | 2.837,21 | 2.979,07 | 3.128,02 | 3.284,42 | 3.448,64 |
| 2 | Dana Perimbangan | 9.248,95 | 15.130,98 | 21.783,63 | 33.590,78 | 44.244,45 |
| 2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 8.692,21 | 14.492,00 | 21.094,81 | 32.793,71 | 43.336,68 |
| 2.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 255,56 | 281,12 | 295,17 | 324,69 | 340,92 |
| 2.3 | Dana Alokasi Umum | 301,18 | 357,86 | 393,65 | 472,38 | 566,85 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 5.605,93 | 3.807,48 | 2.071,50 | 2.215,08 | 2.360,83 |

B. Kebijakan Dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013-2017

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2013-2017 secara umum sebagai berikut:

- Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
- Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's* dan *MP3EI*), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), pendampingan program-program pemerintah pusat, serta pendampingan program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional;

7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi;
8. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi belanja yang bersifat mengikat dan Belanja Prioritas. Belanja Prioritas diklasifikasikan lagi dengan mempertimbangkan urgensi menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Program Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program prioritas yang menunjang pencapaian visi dan misi Gubernur. Program Prioritas II merupakan program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan SPM. Program Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Alokasi Belanja terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang bersifat mengikat dan Belanja Prioritas I, serta untuk memenuhi Pengeluaran Pembiayaan yang bersifat Wajib.

Berikut digambarkan Proyeksi Alokasi Belanja Daerah tahun 2013-2017 khusus untuk pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Prioritas I.

Tabel 3.17.

Proyeksi Belanja Mengikat dan Prioritas I Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Bappeda dan BPKD Provinsi DKI Jakarta

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| A | Belanja Mengikat | 10.853,15 | 12.236,92 | 13.797,13 | 15.556,26 | 17.539,69 |
| B | Belanja Langsung (Prioritas I) | 24.622,21 | 36.209,82 | 35.211,75 | 33.854,32 | 25.580,02 |
| C | Pengeluaran Pembiayaan | 4.403,56 | 5.105,98 | 3.900,79 | 3.301,50 | 922,69 |
| 1 | Penyertaan Modal Pemerintah | 4.403,56 | 5.105,98 | 3.900,79 | 3.301,50 | 922,69 |
| 2 | Pembayaran Utang Pokok | 58,19 | - | - | - | - |
| Total (A+B) | | 39.878,91 | 53.552,72 | 52.909,67 | 52.712,08 | 44.042,40 |

C. Kebijakan Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2013-2017

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, dari sisi Penerimaan yaitu dengan menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan penerimaan dari Pinjaman Daerah, yaitu untuk pembiayaan *Mass Rapid Transit* (MRT)

dan *Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JEDI). Dari sisi Pengeluaran, difokuskan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan pembayaran utang pokok. Gambaran rencana Pembiayaan Daerah tahun 2013-2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18.
Proyeksi Pembiayaan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2013-2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
BPKD Provinsi DKI Jakarta

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Pembiayaan Netto | 4.050,99 | 4.632,36 | 8.534,71 | 10.723,65 | 15.480,89 |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 8.454,55 | 9.738,34 | 12.435,50 | 14.025,15 | 16.403,58 |
| 1.1 | Penggunaan SiLPA | 8.344,55 | 6.836,45 | 8.674,41 | 10.873,55 | 15.642,69 |
| 1.2 | Penerusan Pinjaman JEDI | 110,00 | 159,40 | 160,30 | 150,10 | 138,20 |
| 1.3 | Penerusan Pinjaman MRT | - | 2.742,49 | 3.600,79 | 3.001,50 | 622,69 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 4.403,56 | 5.105,98 | 3.900,79 | 3.301,50 | 922,69 |
| 2.1 | Penyertaan Modal Pemerintah | 4.403,56 | 5.105,98 | 3.900,79 | 3.301,50 | 922,69 |
| 2.1 | Pembayaran Utang Pokok | 58,19 | - | - | - | - |

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2013-2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Bappeda dan BPKD Provinsi DKI Jakarta

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 41.525,34 | 53.197,03 | 63.955,60 | 83.707,89 | 103.982,01 |
| 2 | Penggunaan SiLPA | 8.344,55 | 6.836,45 | 8.674,41 | 10.873,55 | 15.642,69 |
| 3 | Penerusan Pinjaman JEDI | 110,00 | 159,40 | 160,30 | 150,10 | 138,20 |
| 4 | Penerusan Pinjaman MRT | - | 2.742,49 | 3.600,79 | 3.001,50 | 622,69 |
| Total Penerimaan | | 49.979,89 | 62.935,37 | 76.391,10 | 97.733,04 | 120.385,59 |
| 5 | Belanja Mengikat | 10.853,15 | 12.848,40 | 15.210,50 | 18.006,89 | 21.317,42 |
| 6 | Belanja Prioritas | 24.622,21 | 36.209,82 | 35.211,75 | 33.854,32 | 25.580,02 |
| 7 | Pengeluaran Pembiayaan | 4.403,56 | 5.105,98 | 3.900,79 | 3.301,50 | 922,69 |
| Kapasitas Riil Kemampuan | | 10.100,98 | 8.771,17 | 22.068,06 | 42.570,33 | 72.565,46 |

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah, yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan, dengan proyeksi seperti digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.20.
Proyeksi Penggunaan
Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun
2013-2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Bappeda DKI Jakarta

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah | 10.100,98 | 8.771,17 | 22.068,06 | 42.570,33 | 72.565,46 |
| 2 | Proyeksi Belanja Prioritas I | 6.371,26 | 4.482,00 | 17.135,50 | 36.897,89 | 66.042,15 |
| 3 | Proyeksi Belanja Prioritas II | 3.729,72 | 4.289,18 | 4.932,56 | 5.672,44 | 6.523,30 |
| Surplus / Berimbang | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dengan demikian, Kapasitas Riil Keuangan Daerah telah digunakan untuk memenuhi Belanja Prioritas II dan III, secaradapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21.
Kerangka Pendanaan
Alokasi Prioritas I, II, dan III
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2013 – 2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Bappeda Provinsi DKI Jakarta

| No | Prioritas Belanja | Tahun | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp |
| 1 | Prioritas I | 70,91 | 24.622,21 | 80,50 | 36.209,82 | 78,28 | 35.211,75 | 75,26 | 33.854,32 | 56,87 | 25.580,02 |
| 2 | Prioritas II | 18,35 | 6.371,26 | 9,96 | 4.482,00 | 38,09 | 17.135,50 | 82,03 | 36.897,89 | 146,82 | 66.042,15 |
| 3 | Prioritas III | 10,74 | 3.729,72 | 9,54 | 4.289,18 | 10,97 | 4.932,56 | 12,61 | 5.872,44 | 14,50 | 6.523,30 |
| Total | | 34.723,18 | 44.980,99 | 57.279,81 | 76.424,65 | 98.145,48 | | | | | |

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan.

Kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.22.
Proyeksi APBD Provinsi
DKI Jakarta Tahun
2013-2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber:
Bappeda, BPKD, dan
DPP Provinsi DKI Jakarta

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Pendapatan | 41.525,34 | 53.197,03 | 63.955,60 | 83.707,89 | 103.982,01 |
| a | Pendapatan Asli Daerah | 26.670,45 | 34.258,57 | 40.100,47 | 47.902,04 | 57.376,73 |
| - | Pajak Daerah | 21.918,00 | 28.457,00 | 33.883,82 | 41.228,78 | 50.200,37 |
| - | Retribusi Daerah | 1.500,00 | 2.207,50 | 2.369,62 | 2.547,83 | 2.743,72 |
| - | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 415,24 | 615,00 | 719,00 | 841,00 | 984,00 |
| - | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 2.837,21 | 2.979,07 | 3.128,02 | 3.284,42 | 3.448,64 |
| b | Dana Perimbangan | 9.248,95 | 15.130,98 | 21.783,63 | 33.590,78 | 44.244,45 |
| - | Bagi Hasil Pajak | 8.692,21 | 14.492,00 | 21.094,81 | 32.793,71 | 43.336,68 |
| - | Bagi Hasil Bukan Pajak | 255,56 | 281,12 | 295,17 | 324,69 | 340,92 |
| - | Dana Alokasi Umum | 301,18 | 357,86 | 393,65 | 472,38 | 566,85 |
| c | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 5.605,93 | 3.807,48 | 2.071,50 | 2.215,08 | 2.360,83 |
| 2 | Belanja | 45.576,33 | 57.829,39 | 72.490,31 | 94.431,54 | 119.462,90 |
| a | Belanja Tidak Langsung | 14.582,87 | 17.137,58 | 20.143,06 | 23.679,33 | 27.840,72 |
| - | Belanja Mengikat | 10.853,15 | 12.848,40 | 15.210,50 | 18.006,89 | 21.317,42 |
| - | Prioritas III | 3.729,72 | 4.289,18 | 4.932,56 | 5.672,44 | 6.523,30 |
| b | Belanja Langsung | 30.993,46 | 40.691,81 | 52.347,25 | 70.752,21 | 91.622,17 |
| - | Prioritas I | 24.622,21 | 36.209,82 | 35.211,75 | 33.854,32 | 25.580,02 |
| - | Prioritas II | 6.371,26 | 4.482,00 | 17.135,50 | 36.897,89 | 66.042,15 |
| Surplus / Defisit | | 4.050,99 | 4.632,36 | 8.534,71 | 10.723,65 | 15.480,89 |
| 3 | Pembiayaan | 4.050,99 | 4.632,36 | 8.534,71 | 10.723,65 | 15.480,89 |
| a | Penerimaan | 8.454,55 | 9.738,34 | 12.435,50 | 14.025,15 | 16.403,58 |
| b | Pengeluaran | 4.403,56 | 5.105,98 | 3.900,79 | 3.301,50 | 922,69 |
| Total APBD | | 49.979,89 | 62.935,37 | 76.391,10 | 97.733,04 | 120.385,59 |



BAB 4

ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Jakarta tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

4.1.1 Sistem Transportasi

Pembangunan transportasi di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasi sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan bandara udara, transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kapasitas jalan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Jakarta. Penambahan ruas jalan yang hanya sekitar 1 (satu) persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 11 persen per tahun. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Jakarta sudah mengalami kemacetan.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Kapasitas angkutan umum hanya mampu melayani sekitar 19 persen dari jumlah permintaan perjalanan. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu. Data tahun 2011 menunjukkan bahwa penambahan jumlah kendaraan roda empat setiap hari mencapai 550 unit dan kendaraan roda dua 1600 unit.

Sistem dan jaringan transportasi multimoda belum terintegrasi dengan baik menyebabkan tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan transportasi berbasis rel. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus massal (busway) belum terintegrasi dengan sistem angkutan feeder yang melayani permukiman masyarakat.

*Kapasitas jalan
sudah tidak
mencukupi
untuk memenuhi
pergerakan orang
dan barang yang
terus meningkat dari
dalam kota maupun
dari luar kota
Jakarta.*

Ketersediaan prasarana jalan dan akses untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno-Hatta tidak memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses aliran barang yang akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Akses jalan menuju dan dari pelabuhan dan bandara menggunakan jaringan jalan yang juga digunakan untuk menunjang kegiatan perkotaan lainnya. Padahal kendaraan barang yang melintas termasuk kendaraan dengan beban berat. Selain merusak daya tahan jalan yang ada juga meningkatkan beban jalan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang dilewatinya.

Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi aksesibilitas dan koneksi dengan Kota Jakarta.

Kemacetan di Jakarta disebabkan juga oleh rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidakdisiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas.

4.1.2 Banjir dan Genangan

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya, banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: i) banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman; ii) banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah; iii) banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). Bencana banjir luar biasa terjadi apabila ketiga faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan, seperti pada tahun 2002 dan 2007 yang mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga kota.

*Di samping
berkurangnya
daerah resapan,
pendangkalan dan
penyempitan sungai
di sepanjang daerah
aliran Sungai
Ciliwung
meningkatkan
potensi banjir karena
meluapnya air
sungai.*

Banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu terutama di Bogor dan Depok meningkatkan volume dan tinggi air pada sungai Ciliwung yang mengalir ke Kota Jakarta. Peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Air hujan yang masuk melebihi kapasitas dan daya tampung sungai yang makin dangkal dan menyempit. Meningkatnya volume air sungai pada waktu terjadinya hujan deras di wilayah hulu dapat dimonitor dari ketinggian pintu air di Katulampa Bogor. Di samping berkurangnya daerah resapan, pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung meningkatkan potensi banjir karena meluapnya air sungai. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di selokan dan sungai dapat menghambat aliran air serta terjadinya sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran.

Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di Jakarta terjadi pada satu waktu ketika peningkatan volume air hujan tidak dapat ditampung sungai dan saluran drainase kota yang ada. Selain itu, Jakarta juga merupakan muara dari 13 sungai yang mengalir dari wilayah

hulu dengan 40 persen topografi wilayah Jakarta merupakan dataran rendah (1-1,5 meter dpl). Beberapa bagian wilayah Jakarta menjadi lokasi langganan banjir dan genangan karena terletak pada dataran rendah dan daerah aliran sungai.

Banjir dan genangan terjadi juga akibat pasang air laut atau dikenal dengan banjir rob yang terjadi di pantai utara Jakarta. Gelombang tinggi disertai banjir rob yang terjadi di perairan utara Jakarta disebabkan karena perubahan angin barat yang terjadi di musim penghujan. Dampak banjir rob di pesisir pantai utara Jakarta semakin parah dengan terjadinya penurunan tanah yang mencapai 10 centimeter setiap tahunnya.

4.1.3 Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Perhitungan kekurangan kebutuhan rumah (*backlog*) mencapai 700.000 rumah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir atau sekitar 70.000 rumah setiap tahunnya.

Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada keterbatasan lahan di wilayah Jakarta. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta lebih banyak dibangun secara vertikal dibandingkan dengan rumah horizontal yang membutuhkan lahan besar. Namun, penyediaan hunian secara vertikal masih dihadapkan pada adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa tinggal di hunian vertikal.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun dan menjadi 5.050 hektar pada tahun 2008, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.

*Peningkatan
penyediaan RTH
publik menghadapi
masalah terbatasnya
jumlah lahan yang
dapat dimanfaatkan
untuk ruang terbuka
hijau.*

4.1.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Ketersediaan RTH di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di DKI Jakarta meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.

Peningkatan penyediaan RTH publik menghadapi masalah terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan adalah melalui pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau, dan mendorong masyarakat/privat untuk meningkatkan luas RTH di lahan milik

mereka. Peran serta masyarakat dalam peningkatan RTH diwujudkan dalam pengembangan tajuk hijau terutama melalui penghijauan lingkungan dan bangunan. Permasalahan lain dalam adalah belum meratanya penyebaran RTH secara proporsional di wilayah DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk waktu ke depan pemangku kepentingan pembangunan daerah di Jakarta harus dapat mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai serta jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, danau, waduk dan situ, gedung-gedung bertingkat seperti mal, gedung perkantoran, apartemen, hotel, dan fasilitas publik. Di samping itu, diperlukan upaya identifikasi ruang dan kawasan yang dapat difungsikan kembali dan berpotensi sebagai RTH serta upaya membebaskan lahan milik publik secara bertahap untuk dimanfaatkan sebagai RTH.

4.1.5 Kemiskinan Kota

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan DKI Jakarta. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

*Selain menimbulkan
masalah ekonomi,
kemiskinan
kota juga dapat
menimbulkan
pengaruh terhadap
ketentraman dan
ketertiban umum.*

4.1.6 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pemberian struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*e-Government*), penyederhanaan sistem perizinan dan non perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan “merit system”.

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pemberian birokrasi yang menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (*mindset*) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi yang

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Jakarta di tingkat global.

efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

4.1.7 Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Jakarta di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat serta masih terjadi tawuran antar pelajar.

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

4.1.8 Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Penyelenggaraan kesehatan di DKI Jakarta dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.

4.1.9 Penataan Ruang

RTRW 2030 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disincentif serta pengenaan sanksi yang tegas.

4.1.10 Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Jakarta merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unruk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat DKI Jakarta menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tentram dan tertib.

Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah.

4.1.11 Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi secara global memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan kelompok masyarakat miskin perkotaan. Kawasan pesisir pantai Jakarta termasuk area yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terkena dampak dan resiko perubahan iklim. Faktor lain yang menyebabkan tingginya tingkat kerentanan Kota Jakarta adalah jumlah dan kepadatan penduduk serta persentase masyarakat miskin kota yang tinggal di pesisir pantai.

Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Jakarta antara lain banjir, rob, dan kekeringan. Dampak lainnya adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumber daya lahan, serta terganggunya ketahanan pangan dan pada gilirannya akan berimplikasi kepada peningkatan jumlah kemiskinan. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

4.1.12 Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta, yaitu persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari pertambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma "membuang sampah" belum pada "mengolah sampah dari sumbernya". Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*). Penyediaan tempat proses akhir sampah dihadapkan pada keterbatasan lahan sehingga masih bergantung pada kerjasama dengan wilayah sekitarnya dalam pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di wilayah sekitar.

Pengelolaan kualitas air permukaan masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana. Pencemaran air tanah disebabkan terutama oleh penggunaan *septic tank* yang belum memenuhi standar lingkungan. Saat ini pada kawasan perumahan baru terencana penggunaan *septic tank* sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan, meski masih perlu disosialisasikan tentang

penggunaan *septic tank* yang memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit.

Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

4.1.13 Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih; ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah; iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan dampak terhadap penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang sampai saat ini berkisar antara 1-15 centimeter per tahun terutama di wilayah pantai utara Jakarta. Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh adanya beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah dan gaya-gaya tektonik.

Meskipun penyediaan air bersih sudah mencakup lebih dari 75 persen rumah tangga di Jakarta, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber air tanah (sumur) dan cakupan pelayanan dari sistem perpipaan masih rendah. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan, karena selama ini sumber air baku masih mengandalkan pengolahan air sungai dan pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan.

4.1.14 Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas pangan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan mengingat Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan daerah

lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di DKI Jakarta yang berkelanjutan.

4.1.15 Ketahanan Energi Listrik dan Gas

Kebutuhan energi listrik di DKI Jakarta masih sangat bergantung pasokan pembangkit di Muara Karang dan belum ada penambahan pasokan dari sistem pembangkit baru.

Kebutuhan energi listrik setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kegiatan rumah tangga dan usaha. Peningkatan beban listrik di seluruh wilayah Jakarta, termasuk kebutuhan energi listrik di wilayah Kepulauan Seribu masih bergantung pasokan dari pembangkit listrik yang ada. Kebutuhan energi listrik di DKI Jakarta masih sangat bergantung pasokan pembangkit di Muara Karang dan belum ada penambahan pasokan dari sistem pembangkit baru. Pembangkit tenaga listrik di Provinsi DKI Jakarta seluruhnya dibangkitkan mesin pembangkit (*power generator*) diesel dan air. Untuk itulah perlu dipikirkan upaya untuk meningkatkan penyediaan energi listrik dan sumber energi lainnya yang memadai dan mencukupi.

Dalam konteks sumber energi gas, penggunaan gas sebagai bahan bakar terus meningkat terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan bisnis. Untuk itu penyediaan energi dari gas perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta.

4.1.16 Stabilitas Ekonomi

Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Jakarta) seperti: sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di DKI Jakarta hampir selalu berada di bawah nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir hingga tahun 2010. Sedangkan untuk nilai tukar dalam peranannya terhadap stabilitas ekonomi cenderung mengikuti dinamisasi dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif.

4.1.17 Iklim Investasi

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di DKI Jakarta diantaranya adalah kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukkan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketenagakerjaan dan sistem ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

4.1.18 Perdagangan dan Jasa

DKI Jakarta sebagai kota jasa memerlukan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan kota-kota internasional lain.

DKI Jakarta sebagai kota jasa memerlukan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan kota-kota internasional lain. Untuk mewujudkan fungsi kota jasa tersebut permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah persiapan infrastruktur guna menghadapi aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar negeri terutama dalam menghadapi regionalisasi ekonomi. Hal ini penting karena regionalisasi ekonomi baik di lingkungan ASEAN maupun di luar ASEAN diperkirakan akan mempengaruhi perdagangan di DKI Jakarta. Dengan persiapan yang mantap maka kinerja DKI Jakarta dapat berkompetisi dalam konteks menghadapi AFTA (*Asean Free Trade Area*), ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*), dan kelompok perdagangan internasional lainnya. Untuk itu diperlukan persiapan secara terencana dan sistematis agar produk DKI Jakarta dapat berkompetisi dengan produk internasional, sehingga membanjirnya produk yang berasal dari luar negeri di DKI Jakarta dapat diantisipasi secara profesional.

Posisi strategis DKI Jakarta terhadap perekonomian nasional dan internasional membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan instrumen pembangunan untuk melangsungkan kegiatan perekonomian regional dan aktivitas jasa keuangan dan jasa lainnya berskala nasional dan internasional. Di masa yang akan datang, DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan SDA dan infrastruktur publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi secara berkelanjutan.

4.1.19 Keuangan Daerah

Pembangunan Jakarta perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.

Selain itu, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan daerah lain. Sejalan dengan hal ini, DKI Jakarta harus mampu menyediakan prasarana dan sarana khusus yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kaitannya dengan hal ini maka permasalahannya adalah meningkatkan dukungan pendanaan untuk pembiayaan pembangunan dalam kerangka Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkat pemerintah, mulai dari kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan provinsi. Selain itu, peningkatan profesionalitas seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta sesuai standar yang ditentukan.

4.1.20 Kerjasama Antar Daerah di Jabodetabekjur

Pembangunan DKI Jakarta sangat terkait pemanfaatan sumber daya dengan wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan kerjasama antar daerah untuk menangani masalah yang bersifat regional seperti pengelolaan sampah, transportasi, polusi dan banjir. Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air bersih masih perlu perhatian dari para pemangku kepentingan.

Dalam rangka kerjasama antar daerah di wilayah Jabodetabekjur telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program kerjasama antar provinsi dan kota/kabupaten di dalamnya. Untuk koordinasi BKSP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus ditingkatkan berpedoman pada peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi dengan pemerintah daerah sekitar.

4.2. Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah isu-isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

4.2.1 Pengembangan Sistem Transportasi

Sebagai salah satu kota megapolitan di dunia, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan transportasi akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Pengembangan sistem transportasi merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Sebagai salah satu kota megapolitan di dunia, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi dengan angkutan darat, sungai dan udara diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di DKI Jakarta. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di DKI Jakarta harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah Bodetabek yang juga semakin meningkat.

4.2.2 Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan

Banjir, rob, dan genangan merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi dan diprioritaskan penanganannya. Bencana tersebut diakibatkan oleh banjir kiriman, hujan lokal, dan kenaikan muka air laut. Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi. Dalam implementasinya, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengefektifkan Masterplan Pengendalian Banjir yang meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, polder, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah daerah sekitar dan masyarakat.

4.2.3 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota harus dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Dalam memenuhi kebutuhan akan rumah perlu diupayakan pembangunan rumah secara vertikal baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Sedangkan pada kawasan kumuh sedang perlu diupayakan peningkatan kualitas huniannya serta prasarana sarana lingkungannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management* sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

4.2.4 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan kota serta diprioritaskan pada peningkatan kualitas RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW 2030.

Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH ini, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

4.2.5 Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Jakarta, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

4.2.6 Pembangunan Budaya Multi-Kultur

Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Jakarta yang harmonis dalam keragaman budaya, agama, suku dan ras. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Jakarta yang semakin modern, budaya Betawi harus tetap dipelihara dan dikembangkan dengan mengaplikasikannya ke dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pembangunan arsitektur kota.

4.2.7 Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

4.2.8 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Mengingat kemajemukan warga DKI Jakarta, terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

4.2.9 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, serta perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Jakarta termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Mengingat kemajemukan warga Jakarta terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jakarta.

4.3. Isu-isu Lain Yang Patut Dipertimbangkan

4.3.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalisasikan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan.

Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

4.3.2 Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Dalam rangka mendukung kinerja DKI Jakarta diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Jakarta aman, tenram, tertib dan teratur. Selain itu, diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana termasuk potensi terjadinya kebakaran.

Kondisi yang tenram dan tertib dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

4.3.3 Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang memberikan dampak pada peningkatan kerentanan wilayah Jakarta yang merupakan kota delta dengan kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir. Selain itu, perubahan iklim akan meningkatkan potensi dan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian iklim ekstrim dan bencana hidrometeorologis seperti banjir rob. Dampak lain dari perubahan iklim juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan terutama yang tinggal di kawasan pesisir.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam mewujudkan hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi iklim dan rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim.

4.3.4 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan DKI Jakarta harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam jangka menengah, pembangunan harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi.

Isu penanganan sampah di DKI Jakarta meliputi: 1) Tingginya timbunan sampah sehingga menuntut ketersediaan prasarana dan sarana serta biaya manajemen operasional yang tinggi; 2) Sulitnya mencari lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah (TPS, ITF, TPST) di wilayah Jakarta dikarenakan resistensi masyarakat, serta; 3) Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih rendah sehingga sampah dibuang ke saluran drainase, sungai, jalan dan sebagainya.

Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan sampah di DKI Jakarta antara lain : 1) Pemberlakuan kewajiban 3R dan pemilahan sampah di semua sumber sampah; 2) Penguatan kelembagaan sampah di tingkat RT/RW dengan meningkatkan peran Lurah dan Camat; 3) Penerapan sistem pengangkutan sampah secara terpisah; 4) Pemberlakuan jadwal dan titik pengumpulan sampah di sumber (sebelum dibawa ke TPS atau TPST); 5) Penambahan ruang lingkup pekerjaan "Swastanisasi Kebersihan"; 6) Pemilihan teknologi ITF agar semaksimal mungkin mengakomodasi 'recovery' sumber daya sampah; 7) Pemberlakuan kewajiban bagi produsen untuk mengambil dan mengolah sampah produksinya dan kewajiban bagi penjual (toko) untuk menyediakan tempat pengumpulan sampah produk yang dijualnya, serta; 8) Pengenaan tarif/retribusi bagi semua penghasil sampah (produsen dan konsumen) berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan/dibuang.

Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional.

4.3.5 Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau

keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

4.3.6 Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas

Pengendalian kependudukan di DKI Jakarta harus dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dan memperhatikan aspek struktur, jumlah, kualitas, serta distribusi penduduk. Dinamika kependudukan di DKI Jakarta diakibatkan oleh faktor alami dan mobilitas penduduk terutama dari urbanisasi. Untuk mewujudkan pengendalian kependudukan dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia, dan tata laksana, serta peningkatan sistem informasi dan penegakan hukum dalam menurunkan pertumbuhan alami dan urbanisasi.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada kerjasama antar daerah dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan terutama di tingkat kelurahan.

4.3.7 Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembentahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam skala nasional, regional, dan global yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan prinsip kemitraan. Untuk memastikan bahwa investasi yang dikelola memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat, perlu dilakukan integrasi serta kajian mendalam pada investasi yang telah dan akan dilakukan, baik investasi yang bersifat fisik maupun non fisik.

4.3.8 Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

Untuk mendukung kinerja DKI Jakarta, diperlukan pembiayaan pembangunan yang signifikan. Walaupun dari tahun ke tahun APBD Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat, namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, kondisi akuntabilitas keuangan daerah semakin baik sehingga dimungkinkan untuk menggali potensi pembiayaan non-konvensional.

Pembiayaan pembangunan non-konvensional dilakukan melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha yang proporsional untuk mendukung pembiayaan pembangunan

melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema *Public Private Partnership* (PPP), maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta skema lainnya dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.

4.3.9 Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Berkaitan dengan peran sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sebagai daerah otonom, kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Kewenangan khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri dan perdagangan, dan pariwisata. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar. Koordinasi tersebut utamanya bersifat administrasi yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.

4.3.10 Peningkatan Daya Saing Global

Jakarta sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Jakarta dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi ASEAN Free Trade Area (AFTA), AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), dan Asian Pacific Economic Cooperation (APEC).

Jakarta sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional harus memiliki daya saing yang handal.

4.3.11 Pembangunan Telematika Jakarta

Jakarta ke depan dituntut untuk menjadi kota internasional yang kompetitif. Untuk mewujudkan rencana ini, diperlukan pembangunan infrastuktur telematika yang maju, modern dan handal. Dalam pembangunan telematika diperlukan prasarana dan sarana, kelembagaan, sumber daya manusia, dan aturan hukum/tata laksana yang memadai.

Kempar unsur ini harus ditata kembali secara sistematis sehingga akan terwujud sinergi komponen-komponen telematika yang serasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing Kota Jakarta baik di tingkat regional ASEAN maupun tingkat global. Penggunaan telematika sebagai tulang punggung pembangunan Jakarta menjadi kota pintar yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan. Hal ini akan sangat mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi kota, terutama pada sektor transportasi, logistik, dan juga sektor lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan telematika harus dilaksanakan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisiensi dan tingkat pemanfaatan yang optimal untuk lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan mendukung kualitas ruang kota.



BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula, Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, visi misi dalam RPJMD harus mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD yaitu "Jakarta : Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global" dengan misi :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;
3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; dan
6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2017 sebagai berikut.

5.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah:

"Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik".

Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah:

- Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
- Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
- Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

5.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pilar Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup dan Aparatur

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pilar Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup dan Aparatur yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

Misi Pertama: Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bahwa untuk misi kesatu, pada kalimat "Jakarta kota modern yang tertata rapi", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada penataan ruang ekonomi, infrastruktur ekonomi dan sistem distribusi logistik yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota dengan penjelasan :

1. Lingkup penataan ruang ekonomi meliputi penataan ruang dengan memperbesar lahan untuk kawasan ekonomi perdagangan dan jasa serta meminimalisir kawasan industri yang tidak bersifat industri teknologi tinggi (*hi-tech*);
2. Lingkup infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan jalan, jembatan, angkutan umum, bandara, pelabuhan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), *Transit Oriented Development* (TOD), pengembangan sistem pengendalian banjir dan drainase, pengembangan sistem air minum beserta sumber air bakunya, pengelolaan air limbah, pemanfaatan air tanah, permukiman dan energi;
3. Lingkup sistem distribusi logistik meliputi pengembangan Terminal Agro, terminal beras dan bahan pokok lainnya.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula, Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan

pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya kota Jakarta harus berorientasi pada kota pintar (*smart city*) yang memperhatikan 3 (tiga) hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi; pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif serta; penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan.

Pengembangan kota Jakarta sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya. Membangun kota Jakarta dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan positioning kota, diferensiasi dan *branding* atas produk-produk yang dimiliki kota Jakarta. Selain itu pembangunan kota Jakarta harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan melalui perwujudan tata ruang kota yang rapi dan konsisten.

Sementara untuk kalimat "konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah", pada hakikatnya merupakan pelaksanaan penataan ruang yang merupakan penguatan Pilar Aparatur yang difokuskan pada bersih dan transparannya aparat dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan ruang serta *enforcement* terhadap pelanggaran peraturan tata ruang dan bangunan mengingat pengembangan wilayah kota yang harus mengacu pada rencana pola dan struktur ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas.

Pengendalian pemanfaatan ruang kota terus ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembangunan ruang kota yang tidak sesuai rencana tata ruang. Upaya perwujudan kota Jakarta sebagai kota yang kompak (*compact city*) akan terus didorong melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi yang terpadu dan pengembangan kawasan-kawasan *transit oriented development* di sepanjang jalur transportasi massal.

Misi Kedua: **Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain**

Bahwa untuk misi kedua, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Lingkungan Hidup yang berarti akan difokuskan pada infrastruktur dan manajemen transportasi, infrastruktur banjir, peningkatan kualitas rumah rakyat dan infrastruktur pengelolaan sampah dan air.

Meskipun kota Jakarta telah berkembang pesat sebagai pusat perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai masalah dan ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan kota di masa depan. Berbagai masalah menahun yang masih sering terjadi antara lain banjir, kemacetan, permukiman kumuh, dan sampah. Kegagalan mengatasi masalah diatas dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan daya tarik kota yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kota.

Banjir dan genangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi secara tepat oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jakarta karena hal ini dapat mengakibatkan

dampak besar dan merugikan masyarakat. Banjir yang terjadi di Kota Jakarta selain disebabkan karena faktor alam juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di sungai dan selokan dan membangun hunian di bantaran sungai. Selain itu pemeliharaan saluran drainase juga dirasakan masih kurang optimal sehingga menyebabkan tidak lancarnya aliran air di sungai dan saluran.

Kemacetan yang terjadi di Kota Jakarta semakin lama semakin parah. Hal ini disebabkan kapasitas jalan yang tidak mencukupi, keterbatasan ketersediaan angkutan umum, tidak terintegrasi sistem dan jaringan transportasi, serta ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Pesatnya pertumbuhan kendaraan tidak dapat diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai sehingga kelancaran lalu lintas menurun. Titik-titik kemacetan baru, muncul dihampir seluruh wilayah Jakarta setiap tahunnya. Disisi lain, pengembangan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal dirasakan masih sangat terbatas, sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Kemacetan yang terjadi di Jakarta telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian kota.

Penanganan permukiman kumuh merupakan masalah prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus.

Kota Jakarta juga masih dihadapkan pada masalah permukiman kumuh dan kualitas lingkungan permukiman kota yang semakin menurun. Penanganan permukiman kumuh merupakan masalah prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi saat ini menunjukkan masih rendahnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang sehat dan tertata. Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak saja menjadi tugas dari pemerintah daerah, tapi juga merupakan tugas dari seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan Sampah saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara terpadu dan berkelanjutan. Selama ini pengelolaan sampah masih difokuskan pada pengelolaan konvensional, sehingga kedepan perlu diupayakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan canggih, agar sampah yang ada dapat pula dimanfaatkan untuk didaur ulang, digunakan kembali serta sebagai alternatif untuk menghasilkan sumber energi.

Kebutuhan sumber air baku yang masih tergantung dari Waduk Jatiluhur dan dari Tangerang dalam jangka panjang perlu diantisipasi dengan mencari sumber-sumber air baku yang terbarukan.

Pemerintah Kota Jakarta telah berkomitmen untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang selalu terjadi dan merugikan masyarakat melalui pembangunan kota yang berketahanan, antara lain dengan membangun tanggul raksasa dalam konsep Jakarta *Coastal Development Strategy* (JCDS), dukungan anggaran tahunan yang signifikan, serta menggali sumber-sumber pendanaan potensial lainnya.

Beberapa gambaran kualitatif pencapaian misi kedua untuk lima tahun yang akan datang, antara lain :

1. Masalah kemacetan sudah tertangani dengan beroperasinya: MRT Lebak Bulus-Bundaran HI, *Light Rapid Transit*, 15 koridor busway serta berfungsi sistem pembatasan kendaraan pribadi, penataan trayek angkutan umum dan peremajaan armada bus.

Pemenuhan hunian dan ruang publik yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh semua warga kota.

2. Masalah Banjir, Rob, dan Genangan sudah berkurang dengan berfungsinya; 12 situ/waduk dan 17 embung, sumur resapan di 21 lokasi, 44 unit polder, dan selesainya normalisasi dan pengeringan sungai dan saluran. Sementara proyek JCDS dan Terowongan multifungsi bawah tanah dalam proses pembangunan.
3. Masalah kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota sudah semakin baik dengan berfungsinya Rusunawa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga, meningkatnya ruang publik dengan bertambahnya luas RTH menjadi 11 persen serta tertatanya lokasi kampung dan lingkungan kumuh.

Misi Ketiga: *Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota*

Bahwa untuk misi ketiga, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas sosial lainnya dan peningkatan ruang publik berupa taman, taman interaktif dan hutan kota.

Pemenuhan hunian dan ruang publik yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh semua warga kota. Ketersediaan hunian dan lingkungan permukiman yang baik merupakan prasyarat penting dalam membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Masalah utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat di Jakarta adalah keterbatasan lahan, sehingga penyediannya belum dapat sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu, kemauan masyarakat untuk tinggal di rumah susun juga masih rendah.

Pembangunan kota Jakarta kedepan harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hunian dan ruang publik yang terjangkau bagi warga kotanya. Pemerintah Kota harus mengembangkan skema-skema penyediaan rumah yang layak dan terjangkau baik dengan dukungan program dan kegiatan daerah maupun kerjasama dengan pemerintah pusat dan perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta penyediaan ruang publik yang memadai.

Misi Keempat: *Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota*

Bahwa untuk misi keempat, pada hakikatnya juga merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya kota Jakarta seperti penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, revitalisasi kota tua dan kawasan budaya, serta pengembangan area-area untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat. Karakter budaya betawi juga terus diperkuat melalui penerapan dalam arsitektur bangunan

dan karakter kota, pengembangan pusat-pusat dan kawasan budaya betawi.

Kota Jakarta selain mempunyai fungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat kegiatan politik, sosial dan budaya. Dengan fungsinya yang beragam, kota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datang mencari pekerjaan dan tinggal di Jakarta, sehingga pertambahan penduduk kota Jakarta akibat migrasi terus meningkat.

Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Jakarta menjadi kota dengan multi etnis dan budaya. Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat, serta menambah tingginya persaingan antar individu.

Heterogenitas masyarakat Jakarta selain dapat menjadi potensi pembangunan, dapat pula dipandang sebagai pemicu terjadinya konflik yang bersifat primordial atau antar kelompok dan golongan. Sebagian dari mereka sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan atau musuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang dapat berkembang menjadi perkelahian masal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Pemberdayaan kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernalih positif menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat daya saing wilayahnya, pembangunan Provinsi DKI Jakarta akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan perkuatan daya saing wilayah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Misi Kelima: *Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik*

Bahwa untuk misi kelima, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/kabupaten dan Provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan

Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Jakarta menjadi kota dengan multi etnis dan budaya.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan kota Jakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan.

publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan kota Jakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen) secara *online*, peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pelayanan Terpadu Satu Atap yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa, dan pelayanan administrasi kependudukan telah dikembangkan dan dapat diakses secara *online* melalui sistem informasi.

5.3 Tujuan Dan Sasaran Per Misi

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Bahwa tujuan umum pembangunan Jakarta untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat kota yang lebih baik, yaitu:

1. Kota yang mampu meningkatkan posisi daya saing globalnya yang diukur berdasarkan tolok ukur aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, kekayaan budaya dan kondisi politik dari posisi 54 dari 66 kota dunia menurut *Global City Index* pada tahun 2012 menjadi posisi 40-45 dari 66 kota dunia;
2. Kota yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa;
3. Kota yang PDRB per kapita nya tumbuh pesat dan merata yang antara lain direpresentasikan oleh :

- a. Produk per kapita yang meningkat dari Rp.110,46 juta pada tahun 2012 menjadi Rp.160,00 juta;
 - b. Gini ratio yang berkurang dari 0,385 pada tahun 2011 menjadi 0,360; dan
 - c. Persentase penduduk miskin yang berkurang dari 3,69 persen pada tahun 2012 menjadi 3,40-3,50 persen.
4. Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali yang dapat dilihat dari :
 - a. Tingkat pertumbuhan ekonomi dari 6,50 persen pada tahun 2012 menjadi 7,3 persen;
 - b. Tingkat inflasi dari 4,52 persen pada tahun 2012 menjadi sekitar 6,0 – 7,0 persen;
 5. Kota yang pembangunannya berimbang antara kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) dengan kebutuhan ruang ekonomi;
 6. Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bertambah baik yang dilihat dari IPM Jakarta dari 77,97 pada tahun 2012 menjadi 79,60;
 7. Kota yang semakin layak sebagai tempat tinggal dengan meningkatkan rasio ketersediaan dan kebutuhan rusun dan juga mengentaskan RW kumuh;
 8. Kota yang memperhatikan penanganan permasalahan sosial khususnya anak jalanan dan lansia terlantar yang dapat dilihat dari indikasi jumlah titik lokasi rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pusat Santunan Keluarga (Pusaka);
 9. Kota yang tingkat toleransi warganya semakin baik dilihat dari indikasi berkurangnya jumlah konflik sosial, berkurangnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum dan meningkatnya indeks demokrasi.

Untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik sebagaimana di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan:

1. Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
2. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran:

1. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW;
2. Berkembangnya kawasan-kawasan TOD (*Transit Oriented Development*) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah;
3. Tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota;
4. Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal;
5. Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota;
6. Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik;
7. Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota;
8. Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi seluruh pemangku kepentingan;
9. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten.

Misi Kedua: **Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain**

Tujuan:

1. Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun;
2. Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan bertahan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Sasaran:

1. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang;
2. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota;
3. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya;
4. Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal;
5. Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota;

6. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman;
7. Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta;
8. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Misi Ketiga: **Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota**

Tujuan:

1. Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran:

1. Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat;
2. Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan kampung);
3. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta.

Misi Keempat: **Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota**

Tujuan:

1. Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal;
2. Menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota.

Sasaran:

1. Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas;
2. Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta;
3. Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota;
4. Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota;
5. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan;
6. Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat;

7. Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan;
8. Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA);
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota.

Misi Kelima: Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan:

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan;
2. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat;
4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami.

Sasaran:

1. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih;
2. Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya;
3. Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat;
6. Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
7. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat;
8. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat;
9. Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target pada pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran

| VISI: | | Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik | | | |
|---------|--|--|---|--------------|---------------|
| MISI 1: | | Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
| 1 | Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya didukung sarana dan prasarana yang memadai | 1. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW | 1. Proporsi PDRB sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estate dan jasa keuangan, serta sektor jasa-jasa atas dasar harga berlaku (%) | 72,48% | 73,23% |
| | | 2. Prosentase prasarana KEK : Jalan Tol, pembangkit listrik, pengolahan air limbah, ITF, mess karyawan, akses masuk, angkutan umum. | 2. Prosentase prasarana KEK : Jalan Tol, pembangkit listrik, pengolahan air limbah, ITF, mess karyawan, akses masuk, angkutan umum. | 0% | 25% |
| | | 3. Prosentase sarana KEK : Pelabuhan, container yard, pegudangan, industri Hi-Tech, bea cukai dan imigrasi terpadu. | 3. Prosentase sarana KEK : Pelabuhan, container yard, pegudangan, industri Hi-Tech, bea cukai dan imigrasi terpadu. | 0% | 25% |
| | 2. Berkembangnya kawasan-kawasan TOD (<i>transit oriented development</i>) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah | 2. Jumlah Lokasi kawasan TOD | - | 4 TOD | |
| | | 2. Jumlah stasiun kereta api yang sudah mempunyai Rencana pengembangan kawasan | 1/60 | 15/60 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|-------------------|
| | | 3. Tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota | 1. Jumlah gedung kantor/komersial/apartemen yang menyediakan ruang untuk pedagang informal (tidak permanen) | - | 20% |
| | | 4. Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal | | | |
| | | 1. Nilai investasi (PMDN/PMA) | - Realisasi PMDN | Rp. 9,84 Triliun | Rp. 13,97 Triliun |
| | | | - Realisasi PMA | Rp. 45 Triliun | Rp. 63,94 Triliun |
| | | 2. Jumlah investor (PMDN/PMA) | | | |
| | | | - Jumlah investasi PMDN | 89 Proyek | 100 Proyek |
| | | | - Jumlah investasi PMA | 1148 Proyek | 1500 Proyek |
| | | 3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) | | 10,80 % | 9,30% |
| | | 5. Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota | | | |
| | | | 1. Persentase Pasokan Beras | 88,50% | 100% |
| | | | 2. Persentase Pasokan Daging | 98,15% | 100% |
| | | | 3. Persentase Pusat Distribusi Ikan | 95,55% | 100% |
| | | | 4. Persentase Pusat Distribusi Ayam | 96,37% | 100% |
| | | | 5. Persentase Pusat Distribusi Telor dan Susu | 98,15% | 100% |
| | | | 6. Persentase Pusat Distribusi Sayur Mayur | 85,53% | 100% |
| | | | 7. Persentase Pusat Distribusi Buah-buahan | 119,60% | 120% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|
| | | 6. Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik | 1. Jumlah titik jaringan wi-fi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun | 42 Titik | 125 Titik |
| | | 7. Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota | 1. Fasilitasi pembangkit listrik baru oleh swasta/BUMD | 0 | 1 Unit Pembangkit Listrik |
| | | | 2. Jumlah SPBG | 11 | 18 |
| 2 | Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan | 1. Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan | 1. Tingkat perlakuan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang mulai dari pengumpulan data, perumusan masalah sampai perencanaan | Level Kota/Kab Administratif dan Sektor | Level Kecamatan dan Sektor |
| | | 2. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | 1. Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli | 100% | 100% |
| | | | 2. Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai | 25% | 70% |
| | | 3. Persentase pengembangan Pantura Jakarta (Reklamasi dan Revitalisasi) yang sesuai rencana tata ruang | 0% | 20% | |

| MISI 2: Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
| 1 | Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun | 1. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | 1. Panjang ruas jalan yang dilintasi - Panjang lintasan Busway - Panjang lintasan MRT - Panjang lintasan LRT | 1. Panjang ruas jalan yang dilintasi - Panjang lintasan Busway 203,5 km - Panjang lintasan MRT 0 km - Panjang lintasan LRT 0 km | 1. Panjang ruas jalan yang dilintasi - Panjang lintasan Busway 313,15 km - Panjang lintasan MRT 15,7 km - Panjang lintasan LRT 24,8 km |
| | | 2. Jumlah penumpang | | | |
| | | | - Busway | 304.799 pnp/hari | 1.000.000 pnp/hari |
| | | | - MRT | 0 | 62.424.000 org/thn |
| | | | - LRT | 0 | 40.000.000 org/thn |
| | 2. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota | 1. Luas jalan yang terbangun 2. Jumlah jembatan yang terbangun 3. Persentase luas jalan dalam kondisi baik | 1. Luas jalan yang terbangun 2. Jumlah jembatan yang terbangun 3. Persentase luas jalan dalam kondisi baik | 1. Luas jalan yang terbangun 48.311.359,97 m ² 2. Jumlah jembatan yang terbangun 287 3. Persentase luas jalan dalam kondisi baik 98,78% | 1. Luas jalan yang terbangun 50.050.809,97 m ² 2. Jumlah jembatan yang terbangun 296 3. Persentase luas jalan dalam kondisi baik 98% |
| | 3. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya | 1. Jumlah lokasi rawan banjir 2. Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor | 1. Jumlah lokasi rawan banjir 2. Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor | 1. Jumlah lokasi rawan banjir 62 Lokasi 2. Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor 13 Titik | 1. Jumlah lokasi rawan banjir 42 Lokasi 2. Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor 0 |
| | 4. Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal | 1. Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat Zona 0 (4% dari seluruh DKI) | 1. Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat | Fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat Zona 0 (4% dari seluruh DKI) | Fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat sebesar 8% dari seluruh DKI (Zona 0, Zona 1, dan Zona 6) |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|-------------|
| | | 5. Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota | 1. Cakupan pelayanan air minum perpipaan | 50% | 75% |
| | | 6. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman | 1. Cakupan pelayanan persampahan | 88% | 100% |
| | | 2. Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber | 2. Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber | 7% | 15% |
| 2 | Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketeraan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim | 1. Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta | 1. Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari <i>business as usual</i> (BAU) dengan baseline emisi GRK tahun 2005 | 3% | 8% |
| | | 2. Persentase status mutu air tercemar berat | | | |
| | | - sungai | - sungai | 65% | 60% |
| | | - situ/waduk | - situ/waduk | 37,50% | 32,50% |
| | | - air tanah | - air tanah | 12% | 7% |
| | | - laut/teluk | - laut/teluk | 18% | 13% |
| | 2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim | 1. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) | 1. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) | 1.863 Orang | 2.798 Orang |
| | | 2. Jumlah organisasi masyarakat peduli bencana | 2. Jumlah organisasi masyarakat peduli bencana | 5 SKKL | 30 SKKL |

| MISI 3: Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
| 1 | Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | 1. Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat 2. Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan kampung) 3. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta | 1. Persentase jumlah kebutuhan tempat tinggal yang terpenuhi 1. Lokasi kawasan permukiman kumuh yang ditata 1. Rasio ruang terbuka hijau 2. Jumlah taman yang digunakan sebagai taman kreativitas publik 3. Rasio ruang terbuka biru | 13 % dari 8.000 Unit 100 Lokasi 9,90% 10 3% | 50 % dari 8.000 Unit 100 Lokasi daiatas 11 % 60 3,40% |
| MISI 4: Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. | | | | | |
| 1 | Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal | 1. Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas 2. Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta 3. Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota | 1. Penyelenggaraan event budaya berbasis komunitas 1. Jumlah pusat kebudayaan di wilayah kota Jakarta dan kawasan revitalisasi bersejarah 1. Jumlah Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya melalui Konservasi | 15 Event - 12 Pusat Seni - 12 Museum - 12 Bangunan - 3 Lingkungan Cagar Budaya | 110 Event - 60 Pusat Seni - 14 Museum - 17 Bangunan - 5 Lingkungan Cagar Budaya |

| | | 4. Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota | 1. Jumlah Pelaku Seni dan Budaya | 600 Pelaku seni | 4.500 Pelaku Budaya |
|---|---|--|---|-----------------|---------------------|
| 2 | Menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota | 1. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan 2. Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan 3. Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat 4. Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota | 1. Persentase perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja 1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan 1. Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar 1. Jumlah konflik sosial 2. Indeks demokrasi | 55% | 75% |
| | | 1. Jumlah lokasi rawan ketertiban umum | 6 | 23 | |
| | | 1. Jumlah konflik sosial | 25 Kasus | 10 Kasus | |
| | | 2. Indeks demokrasi | 77,44 | 85 | |
| | | 1. Jumlah lokasi rawan ketertiban umum | 24 Lokasi | 15 Lokasi | |

| MISI 5: Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
| 1 | Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan | 1. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih | 1. Indeks efektifitas pemerintahan | 0 | 0,5 |
| | | 2. Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya | 1. Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 0,25 | 0,85 |
| | | 3. Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif | 1. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub | Pemilu Gub/Wagub 66,71% | Pemilu Gub/Wagub 71,71% |
| 2 | Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan | 1. Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir. | 17,91% | 50% |
| | | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat | 1. Integritas pelayanan publik | 7,6 | 9 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 3. Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi | 1. Sistem pelayanan perijinan terpadu secara on-line | 1. Sistem Jaringan Lokal | 1. Sistem Jaringan Online |
| | | | 2. Masih bersifat "kantor pos" | 2. Badan Perijinan Terpadu | 2. Badan Perijinan Terpadu |
| | | | 3. 3.017 Pemohon | 3. > 10.000 pemohon perizinan | 3. > 10.000 pemohon perizinan |
| | | | 4. Tingkat kepuasan masyarakat 79,73%" | 4. Tingkat kepuasan masyarakat 100%" | 4. Tingkat kepuasan masyarakat 100%" |
| | | 2. Sistem pelayanan pajak on-line (non kendaraan bermotor) | 800 Wajib Pajak | 14.355 Wajib Pajak | |
| 3 | Meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. | 1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat | 1. Angka Melek Huruf | 99,35% | 99,99% |
| | | | 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 10,93 Tahun | 12,00 Tahun |
| | | 2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat | 1. Angka Kematian Ibu | 64,33/100.000 kelahiran hidup | 30/100.000 kelahiran hidup |
| 4 | Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami | | 2. Angka Kematian Bayi | 7,53 bayi per 1.000 kelahiran hidup) | 7,1 bayi per 1.000 kelahiran hidup) |
| | | 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk | 3. Angka Usia Harapan Hidup | 76,20 tahun | 76,80 tahun |
| | | 1. Total Fertility Rate | 2.3 | 2.1 | |



BAB 6

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.

6.1 Strategi

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota, termasuk didalamnya pusat kegiatan primer dan sekunder serta Kawasan TOD**

Strategi ini merupakan perwujudan dari strategi pengembangan wilayah yang dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Strategi operasionalnya meliputi; i) Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder, ii) Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis, dan iii) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal.

2. **Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan**

Strategi ini merupakan komitmen untuk mewujudkan Jakarta Baru yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat termasuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi informal sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kota. Strategi operasional meliputi: i) Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan, ii) Pembangunan mall khusus bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), iii) Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL; dan iv) Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal.

3. **Peningkatan ketahanan pangan kota**

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan kota sebagai kebutuhan pokok yang menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat kota. Strategi operasional meliputi: i) Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar dan ii) Peningkatan fungsi lumbung pangan di tingkat kelurahan secara efektif.

4. **Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota**

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya tarik investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, kelistrikan dan energi yang memadai. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum, ii) Peningkatan pasokan suplai listrik dan iii) Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien.

5. **Optimalisasi penataan ruang**

Strategi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penataan ruang mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Strategi operasional meliputi: i) Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam penataan ruang, ii) Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, iii) Pengembangan sistem informasi spasial, iv) Peningkatan penataan lingkungan hidup.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal**

Strategi ini dimaksudkan untuk mengatasai permasalahan kemacetan yang sudah semakin parah dengan memfokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan angkutan umum dan pengembangan sistem angkutan umum massal untuk melayani pergerakan orang dan barang. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung, ii) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, iii) Penataan Pelayanan Angkutan Umum, iv) Restrukturisasi Pelayanan Angkutan Umum, v) Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, vi) Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas dan vii) Penataan sistem perparkiran.

2. **Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan**

Strategi ini dilaksanakan untuk memastikan pelayanan sarana dan prasarana jalan yang mantap dalam menunjang aktivitas perkotaan. Strategi operasionalnya meliputi: i) Pengembangan simpang tak sebidang dan ii) Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan.

3. **Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu**

Strategi ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan perkotaan dari ancaman bahaya banjir, genangan dan banjir rob yang semakin parah sehingga dapat melumpuhkan kegiatan sosial-ekonomi kota. Strategi operasional

meliputi: i) Pengembangan sistem tata air yang terpadu, ii) Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase, iii) Pemeliharaan sarana prasarana drainase, iv) Konservasi sumberdaya air, dan v) Pengendalian banjir akibat air laut pasang.

4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman dalam upaya mewujudkan kota yang layak huni. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat, ii) Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat, iii) Pengembangan sistem air minum perpipaan, iv) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan v) Penerapan Konsep 3R.

5. Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara

Strategi ini bertujuan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan perkotaan akibat tingginya pencemaran terhadap air, tanah dan udara kota Jakarta. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air, ii) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran tanah dan iii) Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara.

6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketahanan kota dalam mengurangi dampak perubahan iklim

Strategi ini adalah integrasi antara upaya pengurangan resiko bencana serta mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Strategi operasional dilakukan melalui: i) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, ii) Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana, iii) Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana, iv) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana dan v) Penguatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi semua warga masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi warganya melalui skema penyediaan rusunawa dan rusunami serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa, ii) Pengembangan rumah susun sewa, iii) Pengembangan rusunami dan apartemen bersubsidi, iv) Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, v) Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota dan vi) Pemberian keamanan bermukim (*security of tenure*).

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau

Strategi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat RTRW sebesar 30 persen. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat, ii) Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik dan iii) Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang publik.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama

Strategi dilakukan dalam rangka menjamin kerukunan kehidupan antar umat beragama, mencegah terjadinya konflik budaya dan agama serta terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Pencegahan dini potensi konflik, ii) Pengembangan forum dialogis antar komponen masyarakat, iii) Penyelenggaraan pembinaan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) dan iv) Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketertiban umum.

2. Pengembangan budaya dalam pembangunan perkotaan

Strategi ini menekankan pentingnya memperhatikan dan mengembangkan budaya dalam pembangunan kota sehingga nilai-nilai budaya lokal dapat tercermin dan mewarnai kehidupan masyarakat. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya, ii) Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional, iii) Pengembangan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kotamadya dan Kepulauan Seribu, iv) Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta, v) Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi, vi) Penyelenggaraan event-event kebudayaan, dan vii) Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian.

3. Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagai wadah pembinaan mental sekaligus wahana penyaluran minat dan kemampuan pemuda. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah, ii) Pembinaan olahraga secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, dan iii) Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan, organisasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan

Strategi ini dimaksudkan untuk terus menata kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta kapasitas

aparatur pemerintahan yang profesional. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif, ii) Pengembangan tata laksana pemerintahan yang transparan dan akuntabel, iii) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, iv) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan, dan v) Pengembangan sistem *reward and punishment* dalam pengembangan sumberdaya manusia.

2. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel**

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan adanya mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Strategi operasional dilakukan melalui: i) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan ii) Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang *real-time*.

3. **Peningkatan pelayanan publik**

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui perbaikan di segala lini. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas), ii) Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda depan pelayanan, iii) Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik, dan iv) Penyelenggaraan Program Teknis urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

4. **Peningkatan pelayanan pendidikan**

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat dan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi DKI Jakarta. Strategi operasionalnya meliputi: i) Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR, ii) Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan iii) Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja.

5. **Peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat**

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat serta adanya perlindungan sosial untuk mewujudkan kehidupan kota yang berkeadilan. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta menuju Jakarta SEHAT, ii) Pengembangan skema jaminan dan perlindungan sosial bagi masyarakat, iii) Pemberian pelayanan KB gratis dan iv) Peningkatan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: banjir, genangan, banjir rob, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Jakarta memerlukan upaya yang menerus dan berkesinambungan didukung sumberdaya yang memadai. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur banjir, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas. Disisi lain, upaya untuk mengefisienkan belanja pemerintahan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan kota. Upaya penanganan banjir, genangan dan banjir rob serta pembenahan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal akan dilaksanakan secara menerus dan menjadi prioritas dalam periode pembangunan lima tahun kedepan (2013-2017).

Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur banjir, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti banjir, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh warga kota terlihat dari maraknya penyelenggaraan even budaya dan karakter budaya yang mulai terlihat dalam kehidupan kota Jakarta.

Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.

Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti banjir, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya harus menunjukkan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah menahun. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh warga kota terlihat dari maraknya penyelenggaraan even budaya dan karakter budaya yang mulai terlihat dalam kehidupan kota Jakarta.

Pembangunan tahun ketiga juga harus terus mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah serta pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor

agar terwujud pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan kota Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi.

Selain terus melaksanakan upaya-upaya penanganan masalah menahun (banjir, kemacetan, prasarana kota), penyediaan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan budaya kota, arah kebijakan pembangunan kota ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan secara terpadu melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi kota di tingkat global dan regional. Perbaikan terhadap berbagai masalah menahun kota diharapkan turut meningkatkan daya tarik kota untuk menarik investasi yang lebih banyak.

6.2.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya.

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan tahapan tahun pelaksanaan RPJMD sebagaimana diatas dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 6.1.
Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Berdasarkan Pilihan Strategi

| No | Pilihan Strategi Pembangunan Daerah | Arah Kebijakan | | | | |
|----|---|----------------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Peningkatan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang berperan dalam menggerakkan ekonomi kota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Penguatan dukungan terhadap keberadaan ekonomi informal perkotaan | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Peningkatan ketahanan pangan kota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 5 | Optimalisasi penataan ruang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi Kota Berbasis Angkutan Umum Massal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Pengembangan dan peningkatan infrastruktur permukiman yang berkualitas | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10 | Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 11 | Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketahanan kota dalam mengurangi dampak perubahan iklim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Penyediaan rumah layak huni bagi semua warga masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Peningkatan ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 15 | Pengembangan budaya dalam pembangunan perkotaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 17 | Penataan kelembagaan, organisasi, dan kapasitas aparatur pemerintahan | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 18 | Pembinaan kehidupan politik dan demokrasi | ✓ | ✓ | | | |
| 19 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 20 | Peningkatan pelayanan publik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21 | Peningkatan pelayanan pendidikan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | Peningkatan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2.
Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan Provinsi
DKI Jakarta

| No | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|--|---|---|
| 1 | Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW | 1. Peningkatan dan pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder | 1. Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, dan Urusan Otomasi Daerah : Mengembangkan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder, yang berwawasan lingkungan antara lain melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus Marunda |
| | | 2. Pengembangan baru Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis | 1. Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perdagangan : Memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai antara lain melalui Pengembangan Kawasan Tanah Abang, Pengembangan kawasan Segitiga Emas Setiabudi, Pengembangan kawasan Manggarai, Pengembangan kawasan Jatinegara, Pengembangan kawasan Bandar Kemayoran, Pengembangan kawasan Dukuh Atas, Pengembangan kawasan Mangga Dua, Pengembangan kawasan Sentra Primer Barat, Pengembangan kawasan Sentra Primer Timur, Pengembangan kawasan Pulau Tidung |
| | | 3. Urusan Penataan Ruang, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan dan Urusan Lingkungan Hidup : Memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai melalui Persiapan pembangunan <i>Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS)</i> / <i>National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i> | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | |
| 2 | Berkembangnya kawasan-kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah | 1. Pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal | 1. Urusan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : mengembangkan kawasan terpadu (superblok) multifungsi dan multi strata masyarakat melalui pembangunan TOD di sepanjang koridor MRT 2. Urusan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong kawasan peremajaan kota yang vertikal, kompak dan terkait jaringan transportasi massal | |
| 3 | Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota | 1. Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan 2. Pembangunan mall khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) 3. Revitalisasi pasar tradisional dengan tidak menggusur PKL | 1. Urusan Penataan Ruang dan Urusan Koperasi dan UKM : Mengefektifkan aturan penyediaan ruang bagi ekonomi informal pada kawasan perkantoran dan perdagangan serta memberikan pinjaman modal bergulir 1. Urusan Koperasi dan UKM : Membangun mall khusus bagi pedagang kaki lima pada lokasi tanah milik pemerintah 1. Urusan Perdagangan : Memperbaiki pasar-pasar tradisional dan menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima | |
| 4 | Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal | 1. Pengembangan kelembagaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal | 1. Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Otonomi Daerah : membantu pembentukan asosiasi/kelembagaan pedagang informal 2. Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Otonomi Daerah : mengadakan pelatihan untuk manajemen usaha kecil | |
| 5 | Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota | 1. Optimalisasi distribusi komoditas dan kebutuhan pokok menghadapi ketatnya persaingan pasar 2. Peningkatan fungsi lumbung pangan di tingkat kelurahan secara efektif | 1. Urusan Penataan Ruang, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perdagangan dan Urusan Penanaman Modal : Menyediakan stok komoditas dan kebutuhan pokok 1. Urusan Penataan Ruang, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Perdagangan dan Urusan Penanaman Modal : Menyediakan distribusi dan stok pangan di tingkat kelurahan | |
| 6 | Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik | 1. Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum | 1. Urusan Penataan Ruang, Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengintegrasikan jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerintahan serta Penataan dan pengelolaan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) | |
| 7 | Tersedianya infrastruktur energi dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota | 1. Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien | 1. Urusan Penataan Ruang dan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral : Melakukan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, permukiman, Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa 2. Urusan Energi dan Sumberdaya mineral : Membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) | |
| 8 | Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan | 1. Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam penataan ruang | 1. Urusan Penataan Ruang dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat : Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Urusan Penataan Ruang dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat : Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Urusan Penataan Ruang : Meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar untuk penyusunan masterplan penanganan permasalahan tata ruang. | |

Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

| | | | |
|---|--|---|--|
| 9 | Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten | 1. Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif | <p>1. Urusan Penataan Ruang : Mengendalikan pembangunan sesuai dengan aturan tata bangunan dan lingkungan yang telah ditentukan melalui Pelaksanaan pemberian saran teknis terhadap rencana pembangunan gedung dan bangunan lainnya, dan Pelaksanaan Pembongkaran bangunan yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>2. Urusan Penataan Ruang : Melakukan kajian dan peninjauan kembali terkait mekanisme dan tata cara perijinan pemanfaatan ruang</p> <p>3. Urusan Penataan Ruang : menerapkan pendekatan <i>zoning regulation</i> pada kawasan-kawasan cepat berkembang</p> <p>4. Urusan Penataan Ruang : Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang</p> |
| | | 2. Pengembangan sistem informasi spasial | <p>1. Urusan Penataan Ruang : menerapkan sistem informasi spasial berbasis web</p> |

Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.

| MISI 2: Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain | | | |
|--|---|--|---|
| 1 | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | 1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi | <p>1. Urusan Perhubungan : Melakukan Pengembangan terminal antara lain melalui Revitalisasi Terminal Bus Dalam Kota</p> <p>2. Urusan Perhubungan : Melakukan Pengembangan pelabuhan melalui Pengembangan angkutan penyeberangan kepulauan seribu</p> |
| | 2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal | | <p>1. Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal berbasis Rel melalui Pembangunan MRT koridor Utara-Selatan tahap I (Lb Bulus - Bunderan HI), Pembangunan sebagian MRT koridor Selatan-Utara tahap II (Bunderan HI - Kampung Bandan), dan Persiapan pembangunan MRT koridor Barat-Timur</p> <p>2. Urusan Perhubungan : Mengembangkan <i>Light Rapid Transit</i> (LRT) melalui Pembangunan Koridor <i>Green Line</i> dan <i>Blue Line</i>, sesuai RTRW</p> |
| | | | <p>3. Urusan Perhubungan : Membangun Sistem Angkutan Umum Massal Laut dan sungai melalui Pembangunan dermaga penyeberangan dari dan ke kepulauan seribu, Pengadaan armada kapal penyeberangan, Standarisasi keamanan dan keselamatan kapal penyeberangan tradisional, pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal laut dan sungai</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | <p>4. Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan angkutan massal Berbasis Jalan atau BRT(Bus Rapid Transit) melalui pembangunan Korridor Busway baru yaitu Koridor 13 (Ciledug-Blok M), Koridor 14 (UI-Manggarai), dan Koridor 15 (Pondok Kelapa – Blok M), Pembangunan Busway koridor Integrasi Jabodetabek; Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi, dan Jakarta-Depok/Bogor, Pengembangan layanan <i>Feeder</i> Busway, Penambahan armada Bus Busway dan Bus <i>Feeder</i> Busway serta Peningkatan profesionalisme lembaga pengelola Busway</p> <p>5. Urusan Perhubungan : Meningkatkan kelembagaan pengelolaan Busway</p> <p>6. Urusan Perhubungan : Melakukan Restrukturasi Trayek Angkutan Umum</p> | | | <p>4. Urusan Perhubungan : Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kampanye sadar tertib lalu lintas</p> <p>5. Pembangunan Sarana perpindahan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas</p> <p>6. Penataan sistem perparkiran</p> | <p>1. Urusan Perhubungan : Membangun fasilitas / sarana pejalan kaki dan jalur sepeda terutama pada koridor angkutan umum, jalan utama dan kawasan pemukiman</p> <p>1. Urusan Perhubungan : Mengembangkan sistem perparkiran yang tertib dan aman, dengan kapasitas pelayanan memadai melalui Pengembangan sistem parkir <i>online</i></p> <p>2. Urusan Perhubungan : Menerapkan sewa parkir tinggi dan <i>progressive</i></p> <p>3. Urusan Perhubungan : Menata parkir <i>off street</i> dan <i>on street</i></p> <p>4. Urusan Perhubungan : Mengembangkan fasilitas <i>park and ride</i> di stasiun dan terminal</p> <p>5. Urusan Perhubungan : Mengembangkan taman dan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan</p> |
| | | | <p>3. Penataan Angkutan Umum Reguler</p> <p>1. Urusan Perhubungan : Melakukan peremajaan bus angkutan umum reguler melalui pengadaan bus baru untuk menggantikan bus lama / bus yang tidak layak jalan</p> <p>2. Urusan Perhubungan : Mendorong percepatan transformasi bentuk kepengusahaan angkutan umum dari perorangan menjadi Bahan Usaha</p> | | | <p>2. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota</p> | <p>1. Pengembangan simpang tak sebidang</p> <p>2. Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan</p> <p>3. Urusan Pekerjaan Umum : Menunjang pengembangan ruas jalan tol dalam kota</p> |
| | | | <p>4. Pengendalian dan Keselamatan Transportasi</p> <p>1. Urusan Perhubungan : Mengembangkan ITS (<i>Intelligent Transport System</i>) melalui Pengembangan ITS di koridor ekonomi strategis serta mengkaji opsi-opsi pengendalian arus kendaraan pribadi, angkutan kota dan truk di dalam kota</p> <p>2. Urusan Perhubungan : Melakukan kajian menyeluruh penyebab kemacetan untuk pemberahan titik-titik rawan kemacetan</p> <p>3. Urusan Perhubungan : Menerapkan manajemen / pembatasan lalu lintas antara lain melalui Penerapan <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP), teknik-teknik <i>traffic restraint</i> lainnya, dan Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi</p> | | | <p><i>Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan melalui Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta memperlebar lahan badan jalan di titik bottleneck.</i></p> | <p>1. Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan Pembangunan <i>flyover</i> dan <i>underpass</i></p> <p>1. Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan melalui Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta memperlebar lahan badan jalan di titik <i>bottleneck</i></p> <p>2. Urusan Pekerjaan Umum : Pengembangan Jalan Arteri antara lain melalui Pembangunan jalan <i>missing link</i>, dan Pengembangan jalur khusus untuk angkutan massal pada jaringan jalan arteri layang</p> <p>3. Urusan Pekerjaan Umum : Menunjang pengembangan ruas jalan tol dalam kota</p> |

*Mengembangkan
dan meningkatkan
kapasitas sungai dan
saluran melalui
Normalisasi dan
penataan sempadan
sungai dan saluran.*

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 3 | Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya | 1. Pengembangan sistem tata air yang terpadu | <p>1. Urusan Pekerjaan Umum : Menyelesaikan Kanal Banjir Timur melalui Pembebasan Lahan dan pembangunan jalan inspeksi KBT</p> <p>2. Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pembebasan Lahan untuk mendukung program Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS)</p> <p>3. Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pembebasan lahan untuk mendukung Penataan Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain</p> <p>4. Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pembebasan lahan dan penyiapan LARAP untuk mendukung Penataan kapasitas Kali Ciliwung</p> <p>5. Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan penataan dan peningkatan kapasitas Cakung Drain, Kali Sunter dan Kanal Banjir Timur di kawasan aliran timur serta penataan Kali Cideng</p> <p>6. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Membangun sarana dan prasarana sumberdaya air serta melakukan persiapan pembangunan Giant Sea Wall dalam konteks Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS) / National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</p> | 4. Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung sistem drainase kota antara lain melalui Peningkatan drainase terutama di pusat kota dan Pengadaan alat berat serta alat angkut. |
| | | 2. Pengembangan sarana dan prasarana sistem drainase | <p>1. Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran melalui Normalisasi dan penataan sempadan sungai dan saluran</p> <p>2. Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembuatan sodetan sepanjang sungai ciliwung sampai kanal barat / timur</p> <p>3. Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas situ, waduk dan embung melalui Pembebasan,pembangunan dan pemeliharaan situ,waduk dan embung</p> | |
| 4 | Tersedianya pengelolaan air limbah domestik secara optimal | 1. Pengembangan pengelolaan air limbah domestik secara optimal | 1. Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat | |

*Penyediaan lahan
untuk fasilitas
persampahan dan
Peningkatan TPS
sesuai standar
lingkungan Hidup.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2. Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat | 1. Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman antara lain melalui Pembangunan IPAL Komunal, Sosialisasi penggunaan <i>septic tank</i> standar lingkungan hidup, dan Pembangunan/Peningkatan IPAL sistem setempat |
| 5 | Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani semua wilayah kota | 1. Pengembangan sistem air minum perpipaan | 1. Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem penyediaan air minum perpipaan di seluruh DKI Jakarta melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian ke Jakarta, Pengembangan sumber air baku alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih perpipaan, Pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih perpipaan yang dapat langsung diminum di kawasan tertentu dan pembangunan pipa transmisi air minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang |
| 6 | Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman | 1. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan | <p>1. Urusan Pekerjaan Umum : Menyediakan prasarana sarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan antara lain melalui Penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan Peningkatan TPS sesuai standar lingkungan Hidup, peningkatan pembersihan sampah di kali/sungai dengan pemasangan sistem saringan sampah otomatis pada batas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lain dan pada setiap batas wilayah kota administrasi serta peremajaan truk angkutan sampah</p> <p>2. Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pelayanan persampahan melalui swastanisasi kebersihan, dan kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan ITF dan TPST</p> <p>3. Urusan Pekerjaan Umum : Memperluas tanggung jawab stakeholder antara lain melalui Penggalangan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJS) untuk pengelolaan persampahan</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2. Penerapan Konsep 3R | 1. Urusan pekerjaan Umum : Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya mulai dari sumber/hulu melalui Pembangunan sentra 3R / Pusat Daur Ulang, Pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan, dan Pengembangan jejaring kerja bank sampah |
| 7 | Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta | 1. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara | 1. Urusan Lingkungan Hidup : Mengendalikan pencemaran udara melalui Pemantauan Kualitas Udara, Pembinaan stakeholder melalui program PROPER dan SUPER, Penegakan hukum terhadap pencemaran udara, Peningkatan penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Kawasan Dilarang Merokok dan Uji Emisi |
| | | 2. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air | 2. Urusan Lingkungan Hidup : Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca antara lain melalui Penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Industri, Transportasi, dan Pemantauan dan pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca |
| | | 3. Menurunkan beban pencemaran tanah | 1. Urusan Lingkungan Hidup : Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. |
| 8 | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim | 1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana | 1. Urusan Otonomi Daerah : Mengembangkan sistem peringatan dini bencana |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <p>2. Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan lokasi evakuasi korban bencana di kawasan rawan bencana</p> <p>3. Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan kerjasama dengan swasta untuk penyediaan gudang <i>buffer stock</i></p> <p>4. Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan pelatihan dan <i>evacuation drill</i></p> |
| | | 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahanaya dan ancaman bencana | <p>1. Urusan Otonomi Daerah: Pembangunan sarana dan prasarana pemadam kebakaran</p> <p>2. Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan Pembangunan instalasi <i>hydrant</i> di kawasan permukiman padat/rawan kebakaran</p> |
| MISI 3: Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. | | | |
| 1 | Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat | 1. Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa | <p>1. Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Pembangunan superblok rumah susun sewa murah yang dilengkapi pasar, sarana kesehatan dan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat</p> |
| | | 2. Pengembangan rumah susun sewa | <p>1. Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Pembangunan rumah susun sewa pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik Pemda atau konsolidasi lahan dan bangunan</p> <p>2. Melaksanakan pendampingan masyarakat calon penghuni rumah susun</p> |
| | | 3. Pengembangan rusunami dan apartemen bersubsidi | <p>1. Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Pembangunan rumah susun sewa pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik Pemda atau konsolidasi lahan dan bangunan</p> <p>2. Melaksanakan pendampingan masyarakat calon penghuni rumah susun</p> |

Menambah RTH Publik melalui penyediaan dan pembelian lahan baru dan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH Publik

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 4. Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewa yang dikelola Pemprov DKI Jakarta | <p>1. Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan Perbaikan rumah susun sewa yang dibangun pemerintah pusat untuk diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta</p> |
| 2 | Tertatinya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan Kampung) | 1. Penataan kawasan permukiman kumuh skala kota | <p>1. Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung sepanjang daerah aliran sungai</p> <p>2. Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung tematik</p> |
| | | | <p>3. Urusan Perumahan Rakyat : Menata RW-RW Kumuh</p> |
| | | | <p>1. Urusan Lingkungan Hidup : Menambah RTH Publik melalui penyediaan dan pembelian lahan baru dan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH Publik</p> <p>2. Urusan Lingkungan Hidup : Pengembangan RTH privat antara lain melalui Penerapan regulasi untuk penambahan RTH Privat, penyediaan lahan minimal untuk hutan kota dan sentra pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan konservasi flora dan fauna</p> |
| MISI 4: Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. | | | |
| 1 | Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas | 1. Pengembangan budaya Betawi yang bersinergi dengan budaya multikultur lainnya | <p>1. Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan budaya betawi dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi alkulturas budaya nusantara dan budaya betawi</p> |
| 2 | Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta | 1. Pengembangan Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional | <p>1. Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event budaya nasional dan daerah antara lain melalui kerjasama dengan daerah lain dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan budaya nusantara</p> |

*Menata fisik
lingkungan kawasan
Kota Tua Jakarta
melalui
pembangunan
sarana dan
prasarana ekonomi
kreatif.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | 2. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah kotamadya dan Kepulauan Seribu | 1. Urusan Kebudayaan : Melaksanakan pembangunan pusat-pusat kebudayaan di lima wilayah dan kepulauan Seribu dan peningkatan pemanfaatan balai kesenian daerah di lima wilayah 2. Urusan Kebudayaan : Mengembangkan kawasan strategis budaya provinsi di Kota Tua, Taman Ismail Marzuki, Jatinegara dan Situ Babakan 3. Urusan kebudayaan : Meningkatkan interaksi dan komunikasi budayawan dan seniman, dan antara budayawan dan seniman dengan masyarakat | | | | 2. Urusan Kebudayaan : Memfungsikan Balai rakyat di kecamatan sebagai pusat kegiatan sosial-budaya komunitas kecamatan |
| 3 | Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota | 1. Revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta | | 1. Urusan Kebudayaan : Menata fisik lingkungan kawasan Kota Tua Jakarta melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif 2. Urusan Kebudayaan : Melakukan kerjasama dengan pemilik bangunan/gedung dan memberdayakan masyarakat untuk pelestarian dan pengembangan kota tua sebagai destinasi wisata dan benda cagar budaya | | 5 | Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat kota terutama kaum marginal dan rentan | 1. Pengembangan skema jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja informal |
| | | 2. Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi | | 1. Urusan Perumahan : Menata gedung-gedung pemerintahan yang bernuansa budaya betawi 2. Urusan Perumahan : Membangun Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat 3. Urusan Perumahan Rakyat : Menerapkan aturan bangunan/gedung bernuansa budaya betawi | | 6 | Meningkatnya peran olahraga dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat | 1. Pengembangan sarana dan prasarana OR di seluruh wilayah |
| 4 | Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota | 1. Penyelenggaraan event-event kebudayaan | | 1. Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan karnaval dan festival budaya di lima wilayah 2. Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event-event budaya betawi secara reguler | | 7 | Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan | 1. Urusan Ketenagakerjaan : Meningkatkan kurikulum pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 2. Urusan Ketenaga Kerjaan : Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja |
| | | 2. Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian | | 1. Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan aktivitas dan eksistensi sanggar budaya | | 8 | Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) | 1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Meningkatkan harmonisasi masyarakat dalam kemajemukan antara lain melalui pembinaan masyarakat dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA) |
| | | | | | | 9 | Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban kota | 1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berperilaku budaya yang tertib, disiplin, ramah, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara ketentraman kota. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota</p> <p>3. Urusan Otonomi Daerah: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan</p> | | <p>3. Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kontribusi penerimaan BUMD antara lain melalui Pengelolaan BUMD dengan perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, dan penerapan <i>Reward and Punishment</i> terhadap Manajemen BUMD serta divestasi atau likuidasi terhadap perusahaan daerah yang belum membaik kesehatannya.</p> |
| MISI 5: Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. | | | | | |
| 1 | Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih | 1. Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif | <p>1. Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan penguatan kelembagaan Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)</p> <p>2. Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan Pemantauan langsung melalui CCTV di semua lokasi pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintahan</p> <p>3. Urusan Otonomi Daerah : Menata kelambagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien</p> | | <p>4 Urusan Penanaman Modal : Meningkatkan Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung perekonomian daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip <i>good governance</i></p> |
| | 2. Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel | | <p>1. Urusan Otonomi Daerah : Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi</p> | | <p>5. Urusan Perindustrian : Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk industri dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan dan peningkatan pelatihan SDM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri kreatif dan kompetitif</p> |
| | 3. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel | | <p>1. Urusan Otonomi Daerah : mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan melalui pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan</p> <p>2. Urusan Otonomi Daerah : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah melalui Penerapan online sistem pajak daerah</p> | | |
| <i>Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan politis dan demokrasi.</i> | | | | | |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya | | <p>1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang berkelanjutan</p> <p>2. Pengembangan sistem <i>reward and punishment</i> dalam pengembangan sumber daya manusia</p> <p>3. Proses pengisian jabatan secara terbuka</p> | <p>1. Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan</p> <p>1. Urusan Otonomi Daerah : menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> yang adil dan sesuai dengan karakteristik organisasi</p> <p>1. Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan Lelang Jabatan</p> | |
| 3 | Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politik yang kondusif | | <p>1. Peningkatan kepedulian masyarakat pada pembangunan politik dan demokrasi</p> <p>2. Peningkatan kapasitas dan peran partai politik dalam pembangunan politik dan demokrasi</p> | <p>1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan politis dan demokrasi</p> <p>1. Urusan Otonomi Daerah : melakukan pembinaan terhadap partai politik</p> | |

*Peningkatan
kapasitas aparatur
sebagai garda
tedepan pelayanan.*

| | | | |
|---|--|--|--|
| 4 | Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan | 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan | 1. Urusan Otonomi Daerah : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan amtara lain melalui proses musrenbang dan Pelaksanaan rembug warga. |
| | | | 2. Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat |
| | | 2. Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time | 1. Urusan Otonomi Daerah : penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media 2. Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan kemudahan akses informasi kepada masyarakat |
| 5 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat | 1. Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas) | 1. Urusan Otonomi Daerah : Menyelenggarakan pelayanan prima di Kelurahan dan Kecamatan |
| | | | 2. Urusan Otonomi Daerah : Melakukan perbaikan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan publik |
| | | 2. Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda tdepan pelayanan | 1. Urusan Otonomi Daerah : melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan untuk membentuk karakter pelayanan publik |
| 6 | Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi | 1. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik | 1. Urusan Penanaman Modal : Membangun jaringan komunikasi perjinian investasi secara online 2. Urusan Otonomi Daerah : Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Urusan Otonomi Daerah : Menerapkan sistem informasi pelayanan publik |

*Menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
Masyarakat di pasar-pasar
tradisional dan rumah susun*

| | | | |
|---|--|--|---|
| 7 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat | 1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat menuju JAKARTA PINTAR | 1. Urusan Pendidikan : Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) bagi peserta didik di sekolah negeri dan Swasta serta pemberian biaya personal Siswa Miskin (BPSM) dengan KARTU JAKARTA PINTAR |
| | | | 2. Urusan Pendidikan : Meningkatkan Pemenuhan Hak-hak Anak di Sekolah |
| | | | 3. Urusan Pendidikan : Memberikan bantuan/hibah untuk pembangunan gedung sekolah swasta ataupun hibah meubelair |
| | | | 4. Urusan Pendidikan : Meningkatkan daya tampung peserta didik |
| | | 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan | 5. Urusan Pendidikan : Meningkatkan sekolah yang berfungsi dengan baik |
| 8 | Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat | 1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta | 1. Urusan Kesehatan : Menerapkan sistem jaminan pembayaran menyeluruh (total coverage) bagi masyarakat melalui Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga miskin dan rentan Jakarta dengan KARTU JAKARTA SEHAT |
| | | 2. Urusan Kesehatan : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional dan rumah susun | 2. Urusan Kesehatan : Mengembangkan Puskesmas Rawat Inap |
| | | 3. Urusan Kesehatan : Mengembangkan Puskesmas Rawat Inap | 3. Urusan Kesehatan : Mengembangkan Puskesmas Rawat Inap |
| | | 4. Urusan Kesehatan : Menambah kapasitas tempat tidur Kelas Tiga pada RSUD | 4. Urusan Kesehatan : Menambah kapasitas tempat tidur Kelas Tiga pada RSUD |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| | | | <p>5. Urusan Kesehatan : Membentuk dan mengembangkan Kelurahan siaga aktif</p> <p>6. Urusan Kesehatan : menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di kelurahan</p> <p>7. Urusan Kesehatan : Meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)</p> |
| 9 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | 1. Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan urbanisasi | <p>1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : Meningkatkan Pelayanan KB Gratis</p> <p>2. Urusan Kependudukan : Membuat kajian pola mobilitas dan migrasi penduduk kedalam dan keluar Jakarta</p> <p>3. Urusan Sosial : Melakukan studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS (gelandangan, pengemis, dan tuna wisma)</p> |



BAB 7

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini, dari semua program prioritas yang telah ditentukan selanjutnya akan dipilih program yang akan menjadi program unggulan yang merupakan program prioritas utama Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, setelah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka proses penjabaran selanjutnya adalah dalam pelaksanaan kebijakan umum dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya. Kebijakan umum pada hakikatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD.

Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMD ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD yang dituangkan dalam Bab VIII Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan.

Dalam bab ini, dari semua program prioritas yang telah ditentukan selanjutnya akan dipilih program yang akan menjadi program unggulan yang merupakan program prioritas utama Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD.

Penjelasan kebijakan umum dan program prioritas berdasarkan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

7.1. Kebijakan Umum Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :

1. Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan

pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment*, MDG's dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), pendampingan program-program pemerintah pusat, serta pendampingan program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.

7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi.
8. Meningkatkan Kerjasama Jabodetabek yang meliputi :
 - a. Pengembangan transportasi antara lain melalui Pembangunan Busway Koridor Integrasi Jabodetabek, Pengembangan Kereta Komuter dan Pembangunan *Light Rapid Transit*;
 - b. pengendalian banjir, antara lain melalui Pengembangan Waduk tangkapan air di hulu (Waduk Ciawi, Waduk Cimanggis), pembangunan tanggul pengaman Rob;
 - c. Pengelolaan sampah, melalui Penyediaan fasilitas persampahan terpadu;
 - d. Penyediaan air bersih, antara lain melalui Penyediaan air bersih dan air baku dari waduk Jatiluhur;
 - e. Pengembangan industri dan perdagangan, melalui penataan industri *Hi-tech*. Industri berteknologi tinggi (*Hi-tech*) merupakan industri yang dioperasikan oleh Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi, serta mempunyai infrastruktur yang mendukung dan mempunyai lembaga/divisi riset;
 - f. Pengamanan ketersediaan pangan, melalui pengendalian akses, harga, promosi, serta distribusi / pemasaran stok komoditas dan kebutuhan pokok;
 - g. Pengendalian urbanisasi penduduk.
9. Meningkatkan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara yang meliputi :
 - a. Pengembangan Transportasi melalui Pembangunan MRT, Pengembangan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal serta Pembangunan ruas jalan tol dalam kota .
 - b. Penanganan Banjir melalui Penataan kawasan Kanal Banjir Timur (KBT); Penataan kapasitas Kali Ciliwung, Pembangunan sodetan Ciliwung – KBT; Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS), Penataan Kanal Banjir Barat, Cengkareng Drain II, Cengkareng Barat, Cakung Drain, Kali Sunter dan Kanal Banjir Timur; Pelaksanaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI); Perencanaan Pembangunan Terowongan bawah tanah multifungsi serta Pembangunan waduk tangkapan air di hulu.

Semua program prioritas yang telah ditentukan selanjutnya akan dipilih program yang akan menjadi program unggulan yang merupakan program prioritas utama Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD.

Penataan Air Bersih dan Air Limbah melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih dan air baku dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta serta pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat.

- c. Perumahan Rakyat melalui Penataan pembangunan rusunami dan apartemen bersubsidi serta Penyerahan rumah susun sewa yang dibangun pemerintah pusat untuk diperbaiki Pemprov DKI Jakarta.
- d. Penataan Air Bersih dan Air Limbah melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih dan air baku dari Waduk Jatiluhur ke Jakarta serta pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat.
- e. Penyediaan Energi melalui Pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa; Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) serta Peningkatan ketersediaan suplai listrik.
- f. Pengembangan Ekonomi Kota melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Marunda dan Tanjung Priok; Pengembangan kawasan Pelabuhan perikanan Muara Baru; serta Pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama dengan pemilik bangunan/gedung (milik Pemerintah Pusat) untuk pelestarian kawasan Kota Tua.
- g. Lain-Lain melalui Peningkatan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota serta penanganan bencana.

7.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas yang dikelompokkan berdasarkan Isu - Isu strategis menurut misi adalah sebagai berikut :

Misi1 :

- 1. Isue Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
 - a. Program perencanaan tata ruang
 - b. Program pemanfaatan ruang
 - c. Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
 - d. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - e. Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
 - f. Program Peningkatan Pelayanan Ketataruan
 - g. Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
- 2. Isue Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
 - c. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

- d. Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
- e. Program Pemberdayaan UMKM
- f. Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran
- g. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura
- h. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan
- i. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet)
- j. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- k. Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja
- l. Program peningkatan kesempatan Kerja dan peningkatan sistem pelayanan penempatan tenaga kerja

3. Isue Pembangunan Energi dan Telematika Jakarta

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Misi2 :

- 1. Isue Pengembangan Sistem Transportasi
 - a. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
 - b. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
 - c. Program Pembangunan Transportasi Perairan
 - d. Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
 - e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
 - f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - g. Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
 - h. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
- 2. Isue Antisipasi Banjir, Rob, Dan Genangan
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
 - b. Program Pengembangan Sistem Drainase
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

- d. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
- e. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Drainase
- 3. Isue Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
 - b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
 - c. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - d. Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber
 - e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - f. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - g. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - h. Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
 - i. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Misi 3 :

- 1. Isue Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota
 - a. Program Penyediaan Perumahan Rakyat
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat
 - c. Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun
 - d. Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
 - e. Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN
 - f. Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
- 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH
 - a. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
 - b. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
 - c. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
 - d. Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

Misi 4 :

- 1. Isue Pembangunan Budaya Multi-Kultur
 - a. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

- b. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- d. Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
- e. Program Pemeliharaan gedung Pemda
- f. Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
- h. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
- i. Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
- j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
- k. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Misi 5 :

- 1. Isue peningkatan kapasitas aparatur
 - a. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
 - b. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI Jakarta
 - d. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI Jakarta
- 2. Isue peningkatan pelayanan publik
 - a. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
 - c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - d. Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
 - e. Program Peningkatan Kinerja BUMD
 - f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
 - g. Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
 - h. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
 - i. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
 - j. Program Pendidikan dan Pelatihan

- k. Program Pelayanan Penanaman Modal
 l. Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten
 3. Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan
 a. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
 b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
 c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
 4. Isu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
 a. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
 b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 c. Program Keluarga Berencana
- Adapun hubungan antara kebijakan umum dan arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya diuraikan dan dapat dilihat dalam Tabel 7.1.
- Dari beberapa program prioritas, kemudian dipilih program unggulan sebagai berikut :
- ### 7.3. Program Unggulan
1. Isu Pengembangan Sistem Transportasi
 - a. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan, berupa
 - 1) Pengembangan koridor Busway
 - 2) Penambahan armada Busway
 - 3) Penataan trayek dan peremajaan armada bus sedang
 - b. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
 - 1) Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT)
 - 2) Pembangunan *Light Rapid Transit* (LRT)
 - c. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 1) Pembangunan *Flyover* dan *Underpass*
 - 2) Pembangunan jalan tembus
 2. Isu Antisipasi Banjir, Rob, Dan Genangan
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
 - 1) Pengembangan situ, waduk dan embung
 - 2) Penguatan tanggul
 - 3) Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori
 - 4) Pembangunan Terowongan bawah tanah multifungsi
 - b. Program Pengembangan Sistem Drainase
 - 1) Pengembangan sistem polder
 - 2) Normalisasi sungai dan saluran
 - 3) Pengeringan sungai dan saluran
 3. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota
 - a. Program Penyediaan Perumahan Rakyat
 - 1) Pembangunan rumah susun sewa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olah raga
 - b. Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
 - 1) Mendorong pembangunan hunian vertikal
 - c. Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung
 - 1) Penataan kampung dan lingkungan kumuh
 4. Isu Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
 - 1) Pembangunan Sarana Prasarana TPS Standar Ramah Lingkungan di 5 wilayah kota
 - 2) Pembangunan Tempat Transit Sampah Pesisir dan Pantai Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu
 - b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 1) Swastanasisasi Penanganan Kebersihan di 44 Kecamatan
 - 2) Penanganan Sampah Pesisir dan Pantai Pulau-pulau di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, Pesisir dan Pantai Utara Jakarta, serta Muara 13 (Tiga Belas) Sungai di Teluk Jakarta
 - 3) Penanganan Sampah Sungai
 - 4) Penanganan Sampah di Saluran Mikro, Penghubung dan Taman di 5 wilayah kota
 - c. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 1) Pembangunan Sistem Informasi dan Pengawasan Penanganan Sampah
 5. Isu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH
 - a. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman

- 1) Penambahan RTH melalui pembelian lahan dan kontribusi pengembang
- b. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
 - 1) Penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH Publik/penghijauan lingkungan
- 6. Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
 - 1) Penyediaan ruang bagi ekonomi informal/PKL pada kawasan perkantoran dan perdagangan
 - 2) Membangun mall khusus bagi PKL
 - 3) Memperbaiki pasar-pasar tradisional
- 7. Isu Pembangunan Budaya Multi-Kultur
 - a. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
 - 1) Pengembangan karakter kota berciri khas betawi
 - b. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
 - 1) Penyelenggaran event budaya bertaraf internasional
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
 - 1) Pengembangan pusat kebudayaan Betawi
 - 2) Revitalisasi kota tua
 - d. Program Pemeliharaan dan Pembangunan gedung Pemda
 - 1) Pembangunan Masjid Raya Jakarta
- 8. Isu peningkatan pelayanan publik
 - a. Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
 - 1) Pengembangan pelayanan pajak online
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
 - 1) Pelayanan prima di Kelurahan
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
 - 1) Pelayanan prima di Kecamatan
 - d. Program peningkatan Investasi
 - 1) Pengembangan layanan perijinan secara online
 - e. Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 9. Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - a. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
 - 1) Wajib Belajar 12 tahun
 - 2) Penerapan KARTU JAKARTA PINTAR
 - b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
 - 1) Peningkatan Daya Tampung Peserta Didik
 - 2) Peningkatan Kualitas Gedung Sekolah
 - c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
 - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas guru
- 10. Isu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
 - a. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
 - 1) Pemberlakuan KARTU JAKARTA SEHAT
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 1) Pengembangan Puskesmas Kecamatan menjadi Rawat inap selain RB
 - 2) Penambahan kapasitas Tempat Tidur kelas tiga pada RSUD
 - 3) Pelayanan kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional/rumah susun
 - c. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
 - 1) Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif
 - d. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - 1) Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kelurahan



BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB 8

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program prioritas maupun program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pendidikan antara lain :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD.

b. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK; menurunnya persentase angka putus sekolah; meningkatnya persentase peserta didik penerima BOP (Negeri dan Swasta); meningkatnya cakupan sekolah penerima bantuan buku; dan meningkatnya persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar.

c. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Indikator yang akan dicapai yaitu menurunnya persentase angka buta aksara dan mempertahankan persentase lembaga keterampilan non formal dan informal yang dibina.

d. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi; serta meningkatnya jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase kelulusan; meningkatnya nilai rata-rata Ujian Nasional (UN); meningkatnya persentase jumlah sekolah ramah anak; meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran; meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); menurunnya jumlah tawuran pelajar; meningkatnya jumlah sekolah

Menurunnya persentase angka buta aksara dan mempertahankan persentase lembaga keterampilan non formal dan informal yang dibina.

reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi sekolah unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan); meratanya perbandingan penerimaan peserta didik baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI; serta meningkatnya persentase Guru/pendidik yang memenuhi standar kompetensi S1 dan Sertifikasi.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah lembaga pendidikan swasta penerima hibah, meningkatnya jumlah sekolah yang dibangun dan meningkatnya persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik.

g. Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

2. URUSAN KESEHATAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kesehatan antara lain :

a. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH); dan meningkatnya persentase Kelurahan Siaga Aktif.

b. Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan; meningkatnya jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan; meningkatnya jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap selain rumah bersalin; dan meningkatnya persentase kapasitas tempat tidur kelas tiga di RSUD.

d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan rentan ber-KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan.

e. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Indikator yang akan dicapai antara lain menurunnya angka kesakitan akibat penyakit DBD; menurunnya persentase penemuan kasus-kasus baru TB paru BTA positif; meningkatnya persentase cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA; meningkatnya proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS; meningkatnya persentase

Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan rentan ber-KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan.

- cakupan *Universal Child Immunization* (UCI); meningkatnya jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan penyakit tidak menular (PTM); dan meningkatnya jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- f. Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase obat generik yang digunakan oleh Puskesmas; meningkatnya persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah; dan meningkatnya jumlah pengujian produk makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran.
- g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi; dan meningkatnya Rasio Tenaga Kesehatan di Puskesmas.
- h. Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya *respon time* penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana.
- 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM**
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pekerjaan Umum antara lain :
- a. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah *Flyover*, *Underpass* dan Jembatan yang dibangun; meningkatnya luas jalan, jalan tembus dan missing link, jalan arteri sejajar 6 (enam) ruas jalan tol dalam kota; serta meningkatnya panjang trotoar yang terbangun.
- b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikator yang akan dicapai antara lain dipertahankannya wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya drainase di pusat kota; meningkatnya jumlah alat berat dan alat penyedot lumpur yang tersedia; bertambahnya jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia; dan bertambahnya jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia.
- d. Program Pengembangan Sistem Drainase
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya panjang sungai/kali yang dinormalisasi; meningkatnya jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk; dan terlaksananya pengeringan sungai.
- e. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase cakupan pelayanan air minum perpipaan.
- f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah waduk dan situ yang dikeruk; meningkatnya jumlah waduk berjenjang di daerah hulu yang terbangun; dan terlaksananya konservasi air tanah.
- g. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT; meningkatnya luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kali PAS dan Luas lahan untuk pembangunan fisik kali Ciliwung; meningkatnya panjang sungai di aliran timur yang tertata; terselesaikannya *Masterplan* pembangunan *Giant Sea Wall*; meningkatnya jumlah sistem polder baru yang terbangun; meningkatnya jumlah sumur resapan (*Injection Well*) waduk yang terbangun; meningkatnya panjang pengaman pantai yang terbangun; meningkatnya jumlah waduk dan jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota Jakarta; serta tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terowongan Bawah Tanah Multifungsi.
- h. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara; terlaksananya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan kelengkapannya; terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak terprediksi; serta tertanganinya titik genangan jalan arteri/kolektor.
- i. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas
Indikator yang akan dicapai antara lain terlaksananya inventarisasi jaringan utilitas; terlaksanaanya pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan; dan Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas.
- j. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF; dan meningkatnya persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu.
- k. Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Air dan bidang Jalan; serta meningkatnya lokasi yang dibebaskan untuk TPS.

- | | |
|--|---|
| <p>I. Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase pengurangan timbunan sampah di sumber.</p> <p>m. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat, meningkatnya Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun, meningkatnya Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun, meningkatnya Volume penyedotan dan pengolahan limbah <i>septic tank</i>, dan bertambahnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam mengelola kinerja IPAL nya.</p> <p>n. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman serta meningkatnya Persentase timbunan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep <i>Business to Business</i>).</p> | <p>d. Program Penyediaan Perumahan Rakyat</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain terbangunnya super blok Rusunawa, meningkatnya jumlah unit Rusunawa yang terbangun melalui dana APBD dan APBN; terbangunnya unit Rusunawa di lokasi pasar; serta terlaksananya pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau.</p> <p>e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu terbangunnya sarana dan prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat.</p> <p>f. Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain terlaksananya sosialisasi hak dan kewajiban penghuni Rusun; serta termanfaatkannya studi dan kajian-kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak.</p> <p>g. Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN; terlaksananya perbaikan Rusun; terwujudnya ketertiban penghuni rusunawa; serta terwujudnya pengelolaan keamanan terpadu rusun.</p> <p>h. Program Koordinasi Serah Terima Rusun Yang dibangun Oleh APBN</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya perbaikan rumah susun.</p> <p>i. Program Pembangunan Gedung Pemda</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain tersedianya bangunan gedung layanan publik dan Pemerintah yang nyaman, handal dan berwawasan lingkungan; terbangunnya 1 (satu) Mesjid Raya bernuansa Betawi di Jakarta Barat; serta terlaksananya pembangunan gedung Pemda.</p> <p>j. Program Pemeliharaan Gedung Pemda</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan, terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta tertata dan terpeliharanya 3 (tiga) gedung Pemda.</p> <p>k. Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain tersusunnya standar teknis bangunan gedung; tersusunnya standar, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman; tersusunnya juknis teknis bangunan gedung bernuansa Betawi; meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni; meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU; tersusunnya pedoman teknis perumahan, permukiman dan gedung Pemda; serta terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun.</p> |
|--|---|
- Tersedianya
bangunan gedung
layanan publik dan
Pemerintah yang
nyaman.*

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Penataan Ruang antara lain :

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Indikator yang akan dicapai yaitu tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

b. Program Pemanfaatan Ruang

Indikator yang akan dicapai yaitu terbitnya kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan.

c. Program Peningkatan Pelayanan Ketatarungan

Indikator yang akan dicapai yaitu terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang.

d. Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase penertiban pelanggaran bangunan gedung, menurunnya persentase tingkat pelanggaran bangunan gedung dan meningkatnya jumlah bangunan gedung yang dibongkar karena melakukan pelanggaran.

e. program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang

Indikator yang akan dicapai antara lain terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang; dan meningkatnya jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

f. Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase kepuasan masyarakat pemohon pelayanan dan meningkatnya cakupan sistem aplikasi layanan ketatakotaan *online*.

g. Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang tim ahli.

h. Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

Indikator yang akan dicapai antara lain tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini serta meningkatnya sistem *online* pengawasan penertiban bangunan.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program untuk urusan Perencanaan Pembangunan antara lain :

a. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian.

b. Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Kesejahteraan Rakyat.

c. Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan penyelesaian dokumen rencana pembangunan; meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan; meningkatnya implementasi rencana pembangunan; meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD; terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan; dipertahankannya persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ); serta terwujudnya implementasi RPJPD, RTRW dan RPJMD dalam pembangunan daerah.

f. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup.

g. Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi

Indikator yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem inovasi daerah dan meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian.

Terwujudnya sistem inovasi daerah dan meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perhubungan antara lain :

a. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

Indikator yang akan dicapai antara lain tersedianya dokumen perencanaan revitalisasi terminal; meningkatnya jumlah terminal yang direvitalisasi dan jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT; meningkatnya jumlah penumpang busway per hari; meningkatnya persentase terbangunnya fisik koridor dan prasarana penunjang koridor busway 13, 14, dan 15; meningkatnya *headway* rata-rata busway; Bertambahnya armada busway; terbitnya Perda pembentukan BUMD PT. Transjakarta; meningkatnya jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturasi; bertambahnya angkutan umum yang diremajakan; bertambahnya rute baru bus sekolah; bertambahnya armada bus sekolah; bertambahnya jumlah penumpang bus sekolah; serta dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan.

b. Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan

Indikator yang akan dicapai antara lain berfungsinya ITS pada koridor busway; meningkatnya jumlah lokasi pemberlakuan parkir *online*; meningkatnya jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pengendalian lalu lintas dan jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil-genap, tersedianya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP; terbangunnya kawasan pelaksanaan ERP; Terwujudnya kawasan pengoperasian ERP; meningkatnya jumlah lokasi penertiban parkir *on street*, berkurangnya jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir *on street*; serta Meningkatnya lokasi yang menerapkan tarif parkir tinggi.

c. Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan.

d. Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan

Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya persentase Panjang Rute Jalur Sepeda.

e. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase panjang jalur MRT Lebak Bulus - Bunderan HI yang dapat diselesaikan; tersusunnya Dokumen perencanaan, pembiayaan, dan lelang konstruksi MRT Bunderan HI - Kampung Bandan; tersusunnya dokumen perencanaan MRT Koridor Barat – Timur; serta terbangunnya jaringan LRT.

f. Program Pembangunan Transportasi Perairan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah kapal penumpang; meningkatnya jumlah penumpang yang dapat diangkut per hari; serta meningkatnya jumlah dermaga yang terbangun.

g. Program Pembangunan Transportasi Udara

Indikator yang akan dicapai antara lain terbitnya regulasi terkait penertiban Sarana prasarana transportasi udara, serta tersedianya kajian pengembangan trasportasi udara di DKI Jakarta.

h. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah lokasi sarana perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas; meningkatnya jumlah lokasi *park and ride* di stasiun dan terminal yang terbangun; meningkatnya jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan; serta meningkatnya panjang trotoar yang terbangun di sepanjang jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan penggal Rasuna Said – Gatot Soebroto.

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya; meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti; terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang; terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan; berkurangnya tingkat pencemaran udara; terlaksananya penegakan hukum lingkungan hidup; meningkatnya jumlah lokasi titik pantau udara ambien; terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi; tersedianya informasi kualitas air tanah, kualitas perairan laut, kualitas muara teluk Jakarta, dan kualitas situs/waduk; terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak; terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB; Terwujudnya petaataan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3; terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha, Meningkatnya jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan; terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan; Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan; keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam mengeleola kinerja IPAL nya; dan tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah.

Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca

- b. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Indikator yang akan dicapai antara lain tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan; serta terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta.
- c. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup; Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK); serta Berkurangnya pencemaran air limbah domestik.
- d. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya luas lahan hutan kota yang dibebaskan dan dikembangkan; meningkatnya luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura; meningkatnya jumlah pohon yang ditanam pada kawasan hutan mangrove, hutan kota dan permukiman, meningkatnya jumlah RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata; serta meningkatnya lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai ekowisata/interaksi publik.
- e. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Indikator yang akan dicapai antara lain dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca; terlaksananya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor utama (industri, transportasi, komersil, rumah tangga, limbah padat, air limbah); tersusunnya Raperda RAD Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Terhitungnya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor terkait setiap tahunnya, serta Menurunnya tingkat kerentanan wilayah Jakarta terhadap perubahan iklim.
- f. Program Konservasi Flora dan Fauna
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi; meningkatnya jumlah keragaman flora dan fauna di taman margasatwa ragunan yang dapat dikonservasi; serta meningkatnya jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota.
- g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Kelautan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi serta tersedianya peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007.

- h. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup
Indikator yang akan dicapai antara lain terlaksananya konservasi air tanah dan meningkatnya sarana laboratorium lingkungan.
- i. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya luas lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan.
- j. Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya luas lahan RTH pertanaman dan pemakaman yang dikelola; serta meningkatnya Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik.
- k. Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah sarana keindahan kota yang dikelola.
- l. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah RTH yang dikembangkan oleh masyarakat; serta terlaksananya kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat.
- m. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan pertamanan dan pemakaman.

9. URUSAN PERTANAHAN

- Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan antara lain :
- a. Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Indikator yang akan dicapai yaitu terdatanya jumlah Kelurahan yang terdata P4T.
 - b. Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota
Indikator yang akan dicapai yaitu dipertahankannya persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan.

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain :

- a. Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan

Indikator yang akan dicapai antara lain terpenuhinya regulasi / kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.

- b. Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase penerbitan kartu keluarga, KTP, kutipan akta kelahiran, dan kutipan akta kematian.

- c. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator yang akan dicapai antara lain tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk serta termanfaatkannya database penduduk bagi instansi vertikal maupun horizontal.

- d. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan, meningkatnya pembinaan dan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* dibidang administrasi kependudukan, Meningkatnya pembinaan administrasi kependudukan di wilayah rentan Adminduk dan Menurunnya keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

- b. Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif.

- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah kelurahan yang dibina tentang peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera

meningkatnya
jumlah kelurahan
yang dibina tentang
peningkatan peran
perempuan menuju
keluarga sehat dan
sejahtera

sejahtera; meningkatnya jumlah Kelurahan Layak Anak; meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

- d. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase partisipasi angkatan kerja perempuan; dan meningkatnya jumlah *stakeholder* yang telah mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender.

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera antara lain :

- a. Program Keluarga Berencana

Indikator yang akan dicapai antara lain dipertahankannya *Total Fertility Rate*; meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB baru, meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif; menurunnya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi.

- b. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Indikator yang akan dicapai yaitu menurunnya cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun.

- c. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

Indikator yang akan dicapai antara lain terpenuhinya rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluhan keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan); dan terpenuhinya rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) per RW.

- d. Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE; meningkatnya persentase masyarakat yang memahami program KB dan Kependudukan; meningkatnya cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya; serta meningkatnya jumlah pengembangan dan pembentukan PIK Remaja.

- e. Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya rasio pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif; meningkatnya cakupan anggota Bina Keluarga yang ber-KB serta meningkatnya cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.

13. URUSAN SOSIAL

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sosial antara lain :

a. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan penuhan kebutuhan dasar; meningkatnya persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial; Menurunnya Persentase PMKS jalanan hasil penjangkauan, serta tersusunnya dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase jumlah gedung panti sosial yang layak dan gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan.

c. Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase lembaga sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial; meningkatnya jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial; serta meningkatnya persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta.

d. Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase keluarga miskin dan PMKS potensial yang dapat hidup mandiri.

e. Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya *respon time* penanggulangan bencana; dipertahankannya persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial; serta meningkatnya persentase PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial.

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi antara lain :

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja.

b. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase tingkat produktivitas tenaga kerja.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja.

d. Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan.

e. Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasi

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase jumlah transmigran yang ditempatkan.

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

a. Program Peningkatan Usaha Koperasi

Indikator yang akan dicapai antara lain Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan volume usaha koperasi.

b. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan koperasi PKL yang berfungsi; meningkatnya persentase jumlah koperasi baru; serta meningkatnya jumlah pengelola koperasi yang mengikuti Diklat dan Bintek.

c. Program Pemberdayaan UMKM

Indikator yang akan dicapai antara lain Meningkatnya Jumlah pengelola UMKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek; berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan; serta meningkatnya jumlah UMKM mandiri/dibina.

d. Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah dana bergulir yang disalurkan; dan meningkatnya jumlah pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK).

*meningkatnya
jumlah dana bergulir
yang disalurkan;
dan meningkatnya
jumlah pemanfaat
dana bergulir (Usaha
Mikro Kecil/UMK).*

- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
 Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya luas ruang untuk pedagang kaki lima (m^2) di lokasi binaan dan lokasi sementara; tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran; serta meningkatnya jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL.
- 16. URUSAN PENANAMAN MODAL**
 Program untuk urusan Penanaman Modal antara lain :
 a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah proyek (PMDN/PMA).
 b. Program Peningkatan Kinerja BUMD
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah setoran PAD dari BUMD.
 c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase pelayanan perijinan / non perijinan yang tepat waktu.
 d. Program Peningkatan Investasi
 Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
 e. Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perijinannya.
- 17. URUSAN KEBUDAYAAN**
 Program yang akan dilakukan untuk urusan Kebudayaan antara lain :
 a. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan.
 b. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
 Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif; serta meningkatnya jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu.

- c. Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
 Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan; meningkatnya jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan; meningkatnya Jumlah temu budaya; dan meningkatnya jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
 Indikator yang akan dicapai antara lain dipertahankannya jumlah kawasan yang dikembangkan ; meningkatnya jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya; meningkatnya persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1; serta meningkatnya jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan.
- e. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
 Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya penyelenggaraan / keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di Jakarta; meningkatnya jumlah penyelenggaraan event seni budaya; dan meningkatnya jumlah event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik.
- 18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
 Program yang akan dilakukan urusan Olahraga dan Pemuda antara lain :
 a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing, pemuda yang aktif dalam kepramukaan, dan gugus depan pramuka yang aktif.
 b. Program Pembinaan Olahraga Prestasi
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada *single event* dan *multi event*.
 c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
 Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah gelanggang gemaja yang memenuhi standar; meningkatnya Kecamatan yang memiliki gelanggang remaja; meningkatnya gelanggang olahraga yang memenuhi standar; meningkatnya stadion olahraga yang beroperasi, serta meningkatnya jumlah pengguna fasilitas olahraga dan pemuda.
 d. Program Pengembangan Olahraga
 Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya indeks pembangunan olahraga (IPO); dan meningkatnya frekuensi event olahraga Rekreasi.

Meningkatnya
cakupan Ormas etnis
dan keagamaan
serta sekolah
yang memperoleh
pengembangan
wawasan
kebangsaan.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program yang akan dilakukan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain :

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya cakupan Ormas etnis dan keagamaan serta sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan.

b. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub serta meningkatnya cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak pilih memperoleh informasi pemilu.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

Indikator yang akan dicapai antara lain berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat.

d. Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasayarakatan yang terdaftar dan mandiri; meningkatnya cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program yang akan dilakukan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain:

a. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah Perda dan Pergub yang dievaluasi, serta meningkatnya jumlah Raperda dan Rapergub hasil evaluasi yang disempurnakan.

b. Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

Indikator yang akan dicapai yaitu Penetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus; tersusunnya kajian ketahanan pangan; tersusunnya laporan koordinasi penataan PKL; tersusunnya kajian transportasi; tersusunnya kajian Ekonomi Makro/Mikro; tersusunnya laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi Pasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya; dan tersusunnya Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta.

c. Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu Tersusunnya dan terlaksananya implementasi kebijakan peningkatan kapasitas kelurahan dan kecamatan; Tersusunnya dan terlaksananya implementasi kebijakan kelembagaan masyarakat kelurahan.

d. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah penanganan perkara di pengadilan; jumlah penanganan sengketa pertanahan dan asset pemda secara internal (terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan); jumlah penyuluhan hukum terpadu; dan meningkatnya pengetahuan hukum aparat dan masyarakat.

e. Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Indikator yang akan dicapai yaitu tersusunnya kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan

f. Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya keanggotaan dan partisipasi daerah dalam organisasi internasional; Meningkatnya kerjasama *sister city*, serta Tersusunnya kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH.

g. Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Sirital

Indikator yang akan dicapai yaitu tersusunnya kebijakan pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan, dan dipertahankannya persentase jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, dan posko kesehatan haji.

h. Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif; tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi; tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan; dan meningkatnya Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit.

i. Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif; tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi; terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan; dan tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

*Semakin cepatnya
penyelesaian tiknet
naskah dinas yang
ditandatangani
Gubernur, Wagub
dan Sekda; serta
menurunnya kasus
tindak kriminal.*

- j. Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah
Indikator yang akan dicapai antara lain berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor; semakin cepatnya penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda; serta menurunnya kasus tindak kriminal.
- k. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
Indikator yang akan dicapai antara lain terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta; terlaksananya penataan kelembagaan pelayanan publik; serta tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan.
- l. Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya aktifitas keprotokolan daerah
- m. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya; terfasilitasinya pelaksanaan Reses DPRD, terfasilitasinya pelaksanaan pansus DPRD, dan Terfasilitasinya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- n. Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya koordinasi penataan lokasi usaha kaki lima
- o. Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan
- p. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai yaitu Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu; Meningkatnya Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat; Meningkatnya Penanganan Perkara di Pengadilan tingkat Kota/Kabupaten; dan meningkatnya sengketa pertanahan dan asset pemda secara internal (terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan) di tingkat Kota/Kabupaten
- q. Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten;
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya koordinasi pelaksanaan kota/kab sehat, dan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota/Kabupaten
- r. Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS
- s. Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana Kota
- t. Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup Kota/Kabupaten.
- u. Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya keprotokolan tamu kota dan penerimaan tamu kota
- v. Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah jenis perizinan yang dilayani dan berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP.
- w. Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah kantor Lurah dan Camat yang memenuhi standar.
- x. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
Indikator yang akan dicapai antara lain terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD, tersalurkannya uang duka dan wafat bagi pensiunan, dan terlayaninya anggota yang memerlukan pelayanan/konsultasi hukum
- y. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
Indikator yang akan dicapai yaitu Terlaksananya kewenangan camat sesuai ketentuan; dan meningkatnya Integritas pelayanan publik.
- z. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
Indikator yang akan dicapai yaitu Terlaksananya kewenangan lurah sesuai ketentuan; dan meningkatnya Integritas pelayanan publik.
- aa. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK); SKPD yang menerapkan 20 indikator WBK; dan terintegrasiya sistem informasi perencanaan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan.
- bb. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.

- | | |
|---|--|
| <p>cc. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya penilaian/predikat LAKIP; dipertahankannya opini keuangan daerah WTP; serta terlaksananya penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>dd. Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / Pemeriksaan</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya tertib administrasi/jumlah rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>ee. Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah peraturan/regulasi yang mendasari pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>ff. Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat; meningkatnya jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikat tanah dan bangunan; meningkatnya jumlah gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang diasuransikan; serta meningkatnya jumlah perolehan dari hasil pengelolaan aset daerah.</p> <p>gg. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase dokumen APBD yang tepat waktu; dipertahankannya opini keuangan daerah WTP; serta meningkatnya penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah.</p> <p>hh. Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang terserap; meningkatnya persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu; serta terlaksananya penyertaan modal pemerintah ke BUMD.</p> <p>ii. Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online, dan jumlah sistem yang beroperasi secara optimal.</p> <p>jj. Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah, dan meningkatnya jumlah Standart Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah, serta dipertahankannya jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal.</p> <p>kk. Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal.</p> | <p>II. Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari pemungutan pajak daerah, meningkatnya jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasikan, jumlah kasus perpajakan daerah yang terselesaikan, dan meningkatnya jumlah penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah.</p> <p>mm. Program Pelayanan Pajak Daerah</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah jenis pajak yang mencapai target; meningkatnya jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia dan jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO, serta meningkatnya jumlah unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan.</p> <p>nn. program penataan sistem manajemen SDM aparatur</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya kuantitas dan kualitas pegawai yang sesuai kebutuhan organisasi, dan tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>oo. Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai</p> <p>Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah pegawai yang menerima penghargaan, terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebijakan TKD, dan meningkatnya jumlah pensiun yang tepat waktu dan tepat bayar.</p> <p>pp. Program Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengolahan keuangan, pengembangan barang dan jasa dan manajerial dan umum; meningkatnya jenjang pendidikan formal aparatur; meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik dan meningkatnya integritas pelayanan publik.</p> <p>qq. Program Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung); meningkatnya akreditas pengelolaan diklat; meningkatnya pengelolaan berbasis ITC.</p> <p>rr. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI</p> <p>Indikator yang akan dicapai yaitu menurunnya persentase pegawai yang terkena hukuman disiplin, terlaksananya penilaian kinerja pegawai secara obyektif, dan terlaksananya Penetapan Kinerja.</p> |
|---|--|

- ss. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah pegawai pemda DKI Jakarta yang mengikuti program tugas belajar; meningkatnya jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi jabatan; tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan meningkatnya persentase jabatan struktural yang memenuhi standar kompetensi (*open bidding*).
- tt. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya rumpun jabatan fungsional yang dibina.
- uu. Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah sistem peringatan dini; tersedianya jumlah kawasan evakuasi bencana minimal berdaya tampung 100 pengungsi dengan luas minimal 1.000 M²; tersedianya gudang *Buffer Stock*; serta meningkatnya taruna siaga bencana (Tagana).
- vv. Program Tindakan Kedaruratan Pada Saat Bencana dan Pasca Bencana
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya kapasitas distribusi logistik.
- ww. Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana
Indikator yang akan dicapai yaitu terintegrasinya sistem peringatan dini banjir, kebakaran, puting beliung, gempa, cuaca ekstrem, dan wabah penyakit
- xx. Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
Indikator yang akan dicapai antara lain menurunnya jumlah rata-rata kejadian kebakaran per tahun; meningkatnya jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran; meningkatnya Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran; serta meningkatnya jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat.
- yy. Program Penanggulangan Kebakaran
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya penanganan kejadian kebakaran kurang dari 15 menit, dan meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran
- zz. Program Penyelamatan
Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan.
- aaa. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Peralatan Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya rasio hidrant kering, alat pemadaman api manual dan tandon air terhadap kawasan kebakaran; meningkatnya rasio pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan;
- meningkatnya rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan; berkurangnya rata-rata waktu pemadaman; meningkatnya kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran; serta meningkatnya jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan.
- bbb. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Integritas pelayanan publik.
- ccc. Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan meningkatnya cakupan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota/Kab.
- ddd. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan
Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar.
- eee. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya jumlah pos kamling yang aktif, meningkatnya jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar serta berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat.
- fff. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP
Indikator yang akan dicapai yaitu berfungsinya sarana dan prasarana penunjang operasional Satpol PP.

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Program yang akan dilakukan untuk urusan Ketahanan Pangan antara lain :

- a. Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/Pemasaran
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya Jumlah ketersediaan pangan dengan Meningkatnya persentase pasokan beras dan daging, serta Meningkatnya persentase pusat distribusi ikan, ayam, telor dan susu, sayur mayur, dan buah-buahan; dan meningkatnya skor pola pangan harapan.
- b. Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya; serta meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan.

c. Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya; serta meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan.

d. Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hewan (kesmavet)

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya persentase bahan pangan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya; meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan; serta meningkatnya jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program yang akan dilakukan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dimasyarakat; meningkatnya masyarakat pengguna teknologi tepat guna (TTG) yang mandiri; dan meningkatnya persentase pemanfaat Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan.

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya cakupan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong royong.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah sarana yang dibangun/direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan PPMK.

23. URUSAN STATISTIK

Program yang akan dilakukan untuk urusan Statistik antara lain :

a. Program Statistik Daerah

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya ketersediaan data statistik daerah.

24. URUSAN KEARSIPAN

Program yang akan dilakukan untuk urusan Kearsipan antara lain :

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan; dan meningkatnya jumlah peristiwa/tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah gedung/depot arsip yang dibangun dan dilengkapi dengan laboratorium kearsipan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar.

d. Program Peningkatan Pelayanan Arsip

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat serta meningkatnya jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (SIKD dan JIKD).

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program untuk urusan Komunikasi dan Informatika antara lain :

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator yang akan dicapai antara lain bertambahnya jumlah titik CCTV yang terbangun di kantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK; meningkatnya integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Pengelolaan Pembangunan dan berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP berbasis teknologi informasi.

b. Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media; Tersedianya saluran pengaduan berbasis teknologi komunikasi dan informasi; serta Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat melalui situs Pemprov.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun; dan meningkatnya Jumlah Titik Lokasi

Meningkatnya cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat serta meningkatnya jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (SIKD dan JIKD).

- Jaringan komunikasi (*Fiber Optic*) yang terbangun dan berfungsi; Terselenggaranya PTSP Berbasis Teknologi Informasi; serta meningkatnya Jumlah *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berfungsi.
- d. Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
Indikator yang akan dicapai yaitu berfungsinya telpon berbasis *Fiber Optic* Pemda DKI Jakarta; dan Tersedianya sarana komunikasi *Radio Trunking*.
 - e. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Indikator yang akan dicapai antara lain terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional; serta meningkatnya jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Program yang akan dilakukan untuk urusan Perpustakaan antara lain :

- a. Program pengembangan Budaya Baca
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik; serta meningkatnya Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina.
- b. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO; dan meningkatnya jumlah titik layanan perpustakaan keliling.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah perpustakaan standar nasional; meningkatnya perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal; serta meningkatnya koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

27. URUSAN PERTANIAN

Program untuk urusan Pertanian antara lain :

- a. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan; meningkatnya volume pemasaran Daun Pelengkap (Ikat), Bunga potong (Ikat), Bunga Rampai (bungkus), bibit tanaman anggrek (pohon), tanaman hias (pohon), bibit tanaman buah (pohon); dan meningkatnya omset pemasaran.

Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina serta meningkatnya jumlah produksi susu.

- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina serta meningkatnya jumlah produksi susu.
- c. Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis
Indikator yang akan dicapai antara lain dipertahankannya Jakarta bebas Rabies; Menurunnya penyebaran Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis); terkendalinya penyakit anthrax; serta meningkatnya jumlah volume hewan / daging yang dipantau kesehatannya.
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah produksi tanaman pangan dan hotikultura, meningkatnya jumlah produksi tanaman holtikultura ramah lingkungan serta meningkatnya jumlah lulusan siswa SPP.

28. URUSAN KEHUTANAN

Program untuk urusan Kehutanan antara lain :

- a. Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan
Indikator yang akan dicapai antara lain mempertahankan jakarta bebas dari pelanggar peredaran hasil hutan serta dipertahankannya jumlah volume pelayanan jasa perkayuan.

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain :

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa; dipertahankannya prosentase terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa; terkoordinasinya pembangunan SPBG; Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik; serta terlaksananya implementasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan ikan hias; serta meningkatnya jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan.

b. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah lampu PJU pada jalan protokol, arteri, kolektor, lingkungan/gang MHT, dan fasilitas umum; serta meningkatnya normalisasi jaringan pju untuk meterisasi.

c. Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan

Indikator yang akan dicapai antara lain tersedianya skenario mitigasi gempa bumi dan meningkatnya jumlah sumur resapan yang terbangun.

30. URUSAN PARIWISATA

Program untuk urusan Pariwisata antara lain :

a. Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah tenaga SDM profesi pariwisata serta meningkatnya jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata Nasional dan Internasional.

b. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah event pariwisata unggulan Nasional dan Internasional serta meningkatnya jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.

c. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah kunjungan wisman dan wisnus serta meningkatnya rata-rata lama tinggal.

d. Program Peningkatan Industri Kepariwisataan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah industri pariwisata yang terdaftar dan meningkatnya jumlah kapasitas dan fasilitas MICE.

e. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata.

31. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program untuk urusan Kelautan dan Perikanan antara lain :

a. Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan ikan hias; serta meningkatnya jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan.

b. Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Berkelanjutan
Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan.

c. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya volume ekspor hasil perikanan dan meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan.

32. URUSAN PERDAGANGAN

Program yang akan dilakukan urusan Perdagangan antara lain :

a. Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan di kawasan Tanah abang, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua, Sentra Primer Barat, dan Sentra Primer Timur; serta Meningkatnya Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP,TDP)

b. Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

Indikator yang akan dicapai antara lain dipertahankannya Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan dan meningkatnya nilai ekspor produk DKI Jakarta.

c. Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani dan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kmetrologian

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah alat ukur yang ditera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT); serta meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami kmetrologian.

33. URUSAN PERINDUSTRIAN

Program yang akan dilakukan urusan Perindustrian antara lain :

a. Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

Indikator yang akan dicapai antara lain meningkatnya jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, jumlah sentra industri dengan infrastruktur dan sesuai peruntukan, dan Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar dan meningkatnya Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan.

c. Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah produk industri yang memenuhi standar.

Adapun program pembangunan daerah, indikator kinerja dan target kinerja secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran II.

Selain program pembangunan diatas, juga terdapat program-program yang bersifat pendukung operasional SKPD sehingga semua SKPD bisa menggunakan program tersebut.

Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI

Program yang akan dilakukan antara lain :

- a. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
- b. Program Pengelolaan Rumah Dinas
- c. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

2. PROGRAM TEKNIS BERSAMA

Program yang akan dilakukan antara lain :

- a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kinerja Aparatur
- b. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pembangunan SKPD
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD
- f. Program Pengembangan Data/Informasi SKPD
- g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
- i. Program Kebijakan Daerah



BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2013-2017 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB 9

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2013-2017 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017 diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9.1.
Penetapan Indikator Kinerja
Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta

| No | ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | |
| Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 6,50% | 6,90% | 7,00% | 7,10% | 7,20% | 7,30% | 7,30% | | | | |
| 2 | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku : | 1.103,70 Triliun Rupiah | 1.410,40 Triliun Rupiah | 1.485,00 Triliun Rupiah | 1.632,00 Triliun Rupiah | 1.768,00 Triliun Rupiah | 1.857,63 Triliun Rupiah | 1.857,63 Triliun Rupiah | | | | |
| 3 | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 : | 449,80 Triliun Rupiah | 501,21 Triliun Rupiah | 505,42 Triliun Rupiah | 535,42 Triliun Rupiah | 563,42 Triliun Rupiah | 593,42 Triliun Rupiah | 593,42 Triliun Rupiah | | | | |
| 4 | Laju inflasi provinsi | 4,52 % | 5,0-6,0 % | 5,5-6,0 % | 6,5-7,5 % | 5,5-6,5 % | 6,0-7,0 % | 6,0-7,0 % | | | | |
| 5 | PDRB per kapita atas harga berlaku | 110,46 Juta Rupiah | 124,2 Juta Rupiah | 135,8 Juta Rupiah | 140,58 Juta Rupiah | 151,20 Juta Rupiah | 160,00 Juta Rupiah | 160,00 Juta Rupiah | | | | |
| 6 | PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 | 45,02 juta Rupiah | 48,00 juta Rupiah | 50,00 juta Rupiah | 54,00 juta Rupiah | 57,00 juta Rupiah | 60,00 juta Rupiah | 60,00 juta Rupiah | | | | |
| 7 | Indeks Gini | 0,385 | 0,381 | 0,377 | 0,373 | 0,366 | 0,360 | 0,360 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8 | Percentase Penduduk Miskin | 3,69% | 3,63-3,65% | 3,57-3,61% | 3,52-3,56% | 3,46-3,51% | 3,40-3,50% | 3,40-3,50% |
| 9 | Indeks Pembangunan Manusia | 77,97 | 78,30 | 78,55 | 78,80 | 79,10 | 79,60 | 79,60 |
| 10 | Proporsi PDRB sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, <i>real estate</i> dan jasa keuangan, serta sektor jasa-jasa atas dasar harga berlaku (%) | 72,48 % | 72,65 % | 72,80 % | 72,95 % | 73,05 % | 73,23 % | 73,23 % |
| Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.1 | Angka melek huruf | 99,35% | 99,50 % | 99,60 % | 99,95 % | 99,97 % | 99,99 % | 99,99 % |
| 1.2 | Angka rata-rata lama sekolah | 10,93 tahun | 11,00 tahun | 11,40 tahun | 11,55 tahun | 11,75 tahun | 12,00 tahun | 12,00 tahun |
| 2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Ibu | 64,33 /100.000 kelahiran hidup | 55 /100.000 kelahiran hidup | 50 /100.000 kelahiran hidup | 40 /100.000 kelahiran hidup | 35 /100.000 kelahiran hidup | 30 /100.000 kelahiran hidup | 30 /100.000 kelahiran hidup |
| 2.2 | Angka Kematian Bayi | 7,53 bayi per 1.000 kelahiran hidup) | 7,5 bayi per 1.000 kelahiran hidup) | 7,4 bayi per 1.000 kelahiran hidup) | 7,3 bayi per 1.000 kelahiran hidup) | 7,2 bayi per 1.000 kelahiran hidup) | 7,1 bayi per 1.000 kelahiran hidup) | 7,1 bayi per 1.000 kelahiran hidup) |
| 2.3 | Angka Usia Harapan Hidup | 76,20 tahun | 76,40 tahun | 76,50 tahun | 76,60 tahun | 76,70 tahun | 76,80 tahun | 76,80 tahun |
| 2.4 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | 85% | 90% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% |
| 3 | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 3.1 | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) | 10,8 % | 10,5 % | 10,2 % | 9,9 % | 9,7 % | 9,3 % | 9,3 % |

| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--|
| Fokus Layanan Urusan Wajib | | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Umum | | | | | | | | |
| 1.1 | Luas jalan yang terbangun | 48.311 .359 ,97 m2 | 48.319 .509 ,97 m2 | 48.428 .709 ,97 m2 | 48.681 .709 ,97 m2 | 49.318 .309 ,97 m2 | 50.050 .809 ,97 m2 | 50.050 .809 ,97 m2 | |
| 1.2 | Jumlah jembatan yang terbangun | 287 jembatan | 287 jembatan | 293 jembatan | 296 jembatan | 296 jembatan | 296 jembatan | 296 jembatan | |
| 1.3 | Persentase luas jalan dalam kondisi baik | 96,78 % | 96,95 % | 97,05 % | 97,20 % | 97,60 % | 98,00 % | 98% | |
| 1.4 | Jumlah lokasi rawan banjir | 62 lokasi | 55 lokasi | 50 lokasi | 48 lokasi | 45 lokasi | 42 lokasi | 42 lokasi | |
| 1.5 | Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor | 13 titik | 13 titik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat | Terse-dianya fasilitas sistem air limbah terpusat Zona 0 (4% dari seluruh DKI) | Penyu-sunan UKL UPL ground breaking Zona 1 dan pembe-basan lahan IPAL Zona 1 | Pembe-basan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan penyu-sunan AMDAL Zona 1 | Pembe-basan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan penyu-sunan AMDAL Zona 6 | Dimu-lainya kon-struksi per-pipaan Zona 1 lanjutan dan dimu-lainya kon-struksi per-pipaan Zona 6 | Kon-truksi per-pipaan Zona 1 lanjutan dan dimu-lainya kon-struksi per-pipaan Zona 6 | Fasilitas terban-gung sistem air limbah terpusat sebesar 8% dari seluruh DKI (Zona 0, Zona 1, dan Zona 6) | |
| 1.7 | Cakupan pelayanan air minum perpipaan | 50 % | 55 % | 58 % | 62 % | 68 % | 75 % | 75 % | |
| 1.8 | Cakupan pelayanan persampahan | 88 % | 90 % | 93 % | 96 % | 98 % | 100 % | 100 % | |
| 1.9 | Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber | 7 % | 14 % | 14 % | 15% | 15% | 15% | 15% | |

| 2 | Perumahan Rakyat | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2.1 | Persentase jumlah kebutuhan tempat tinggal yang terpenuhi | 13% dari 8.000 Unit | 17% dari 8.000 Unit | 20% dari 8.000 Unit | 25% dari 8.000 Unit | 30% dari 8.000 Unit | 40% dari 8.000 Unit | 50% dari 8.000 Unit |
| 2.2 | Lokasi kawasan permukiman kumuh yang ditata | | | | | | | 100 Lokasi |
| 3 Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3.2 | Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 70 % |
| 4 Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | |
| 4.1 | Tingkat perlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang mulai dari pengumpulan data, perumusan masalah sampai perencanaan | Level kota/ kab administratif dan sektor | Level kota/ kab administratif dan sektor | Level Kecamatan dan sektor |
| 5 Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan baseline emisi GRK tahun 2005 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% |
| 5.2 | Percentase status mutu air tercemar berat : | | | | | | | |
| - | sungai | 65% | 64% | 63% | 62% | 61% | 60% | 60% |
| - | situ/waduk | 37,5% | 36,5% | 35,5% | 34,5% | 33,5% | 32,5% | 32,5% |
| - | air tanah | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 7% |
| - | laut/teluk | 18% | 17% | 16% | 15% | 14% | 13% | 13% |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Rasio ruang terbuka hijau | 9,9% | 10,12% | 10,34% | 10,56% | 10,78% | 11% | 11% |
| 5.4 | Rasio ruang terbuka biru | 3% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,4% |
| 5.5 | Jumlah taman yang digunakan sebagai taman kreativitas publik | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 6 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | | |
| 6.1 | Total Fertility Rate | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 7 Koperasi dan UMKM | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah gedung kantor/komersial/apartemen yang menyediakan ruang untuk pedagang informal (tidak permanen) | - | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 20% |
| 8 Kebudayaan | | | | | | | | |
| 8.1 | Penyelenggaraan event budaya berbasis komunitas | 15 Event | 34 Event | 53 Event | 72 Event | 91 Event | 110 Event | 110 Event |
| 8.2 | Jumlah pusat kebudayaan di wilayah kota Jakarta dan kawasan revitalisasi bersejarah | 12 Pusat Seni 12 Museum | 20 Pusat Seni 12 Museum | 30 Pusat Seni 13 Museum | 40 Pusat Seni 13 Museum | 50 Pusat Seni 13 Museum | 60 Pusat Seni 14 Museum | 60 Pusat Seni 14 Museum |
| 8.3 | Jumlah Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya melalui Konservasi | 12 Bangunan 3 Ling-kungan Cagar Budaya | 12 Bangunan 3 Ling-kungan Cagar Budaya | 14 Bangunan 4 Ling-kungan Cagar Budaya | 15 Bangunan 4 Ling-kungan Cagar Budaya | 16 Bangunan 5 Ling-kungan Cagar Budaya | 17 Bangunan 5 Ling-kungan Cagar Budaya | 17 Bangunan 5 Ling-kungan Cagar Budaya |
| 8.4 | Jumlah Pelaku Seni Budaya | 600 Pelaku Seni Budaya | 1.260 Pelaku Seni Budaya | 1.950 Pelaku Seni Budaya | 2.730 Pelaku Seni Budaya | 3.600 Pelaku Seni Budaya | 4.500 Pelaku Seni Budaya | 4.500 Pelaku Seni Budaya |
| 9 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 9.1 | Jumlah konflik sosial | 25 kasus | 22 kasus | 19 kasus | 16 kasus | 13 kasus | 10 kasus | 10 kasus |
| 9.2 | Indeks demokrasi | 77,44 | 78,95 | 80,46 | 81,98 | 83,49 | 85,00 | 85,00 |
| 9.3 | Jumlah lokasi rawan ketertiban umum | 24 lokasi | 23 lokasi | 21 lokasi | 19 lokasi | 17 lokasi | 15 lokasi | 15 lokasi |
| 10 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | |
| 10.1 | Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) | 1.863 orang | 2.050 orang | 2.237 orang | 2.424 orang | 2.611 orang | 2.798 orang | 2.798 orang |
| 10.2 | Jumlah organisasi masyarakat peduli bencana | 5 SKKL | 10 SKKL | 15 SKKL | 20 SKKL | 25 SKKL | 30 SKKL | 30 SKKL |
| 10.3 | Indeks efektifitas pemerintahan | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 10.4 | Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 25% | 35% | 50% | 65% | 75% | 85% | 85% |
| 10.5 | Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 10.6 | Rasio anggaran hasil musrenbang yang tertampung dalam APBD | 2,5% | 4% | 5,5% | 7% | 8,5% | 10% | 10% |
| 10.7 | Integritas pelayanan publik | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 9 | 9 |
| 10.8 | Sistem pelayanan perijinan terpadu secara on-line | 1) Sistem Jaringan Lokal 2) Masih bersifat "kantor pos" | 1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu | 1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu | 1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu |
| | | 3) 3.017 Pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 79,73% | 3) 4.417 Pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 83,78% | 3) 5.809 Pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 87,84% | 3) 7.205 Pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 91,89% | 3) 8.601 Pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 95,95% | 3) 10.005 Pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 100% | 3) > 10.000 pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan masyarakat 100% |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10.9 | Sistem pelayanan pajak on-line (non kendaraan bermotor) | 800 Wajib Pajak | 10.951 Wajib Pajak | 11.718 Wajib Pajak | 12.538 Wajib Pajak | 13.415 Wajib Pajak | 14.355 Wajib Pajak | 14.355 Wajib Pajak |
| 11 | Ketahanan Pangan | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase Pasokan Beras | 88,5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.2 | Persentase Pasokan Daging | 98,15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.3 | Persentase Pusat Distribusi Ikan | 95,55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.4 | Persentase Pusat Distribusi Ayam | 96,37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.5 | Persentase Pusat Distribusi Telor dan Susu | 98,15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.6 | Persentase Pusat Distribusi Sayur Mayur | 85,53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.7 | Persentase Pusat Distribusi Buah-buahan | 119,6% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |
| Fokus Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | |
| 1 | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | |
| 1.1 | Fasilitasi pembangkit listrik baru oleh swasta/BUMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Unit Pembangkit Listrik | 1 Unit Pembangkit Listrik |
| 1.2 | Jumlah SPBG | 11 SPBG | 14 SPBG | 15 SPBG | 16 SPBG | 17 SPBG | 18 SPBG | 18 SPBG |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | |
| Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | 57.208.758 | 58.302.027 | 59.223.127 | 60.009.760 | 60.689.368 | 61.282.402 | 61.282.402 |
| Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Lokasi kawasan TOD | 0 TOD | 1 TOD | 2 TOD | 2 TOD | 3 TOD | 4 TOD | 4 TOD |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Jumlah stasiun kereta api yang sudah mempunyai Rencana pengembangan kawasan | 1/60 | 3/60 | 6/60 | 9/60 | 12/60 | 15/60 | 15/60 |
| 3 | Persentase pengembangan Pantura Jakarta (Reklamasi dan Revitalisasi) yang sesuai rencana tata ruang | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% |
| 4 | Panjang ruas jalan yang dilintasi : | | | | | | | |
| - | Panjang lintasan Busway | 203,5 km | 225,43 km | 247,36 km | 269,29 km | 291,22 km | 313,15 km | 313,15 km |
| - | Panjang lintasan MRT | 0 km | 1,5 km | 3,5 km | 7,5 km | 15,7 km | 15,7 km | 15,7 km |
| - | Panjang lintasan LRT | 0 km | 0 km | 0,8 km | 8,8 km | 16,8 km | 24,82 km | 24,8 km |
| 5 | Jumlah penumpang : | | | | | | | |
| - | Busway | 304.799 pnp/hari | 400.000 pnp/hari | 550.000 pnp/hari | 730.000 pnp/hari | 850.000 pnp/hari | 1 Juta pnp/hari | 1 Juta pnp/hari |
| - | MRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 Juta Orang/tahun | 40 Juta Orang/tahun | 40 Juta Orang/tahun |
| - | LRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.320.000 org/thn | 103.320.000 org/thn | 103.320.000 org/thn |
| 6 | Prosentase prasarana KEK : Jalan Tol, pembangkit listrik, pengolahan air limbah, ITF, mess karyawan, akses masuk, angkutan umum. | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7 | Prosentase sarana KEK : Pelabuhan, <i>container yard</i> , pegudangan, industri <i>Hi-Tech</i> , bea cukai dan imigrasi terpadu. | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% |
| 8 | Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun | 42 titik | 50 titik | 75 titik | 125 titik | 125 titik | 125 titik | 125 titik |
| Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | | |
| 1 | Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) : | - PMDN 9,84 Triliun | - PMDN 10,59 Triliun | - PMDN 11,38 Triliun | - PMDN 12,15 Triliun | - PMDN 13,02 Triliun | - PMDN 13,97 Triliun | - PMDN .13,97 Triliun |
| 2 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA): | - PMDN 89 proyek | - PMDN 91 proyek | - PMDN 94 proyek | - PMDN 96 proyek | - PMDN 98 proyek | - PMDN 100 proyek | - PMDN 100 proyek |
| | | - PMA 45 Triliun | - PMA 48,48 Triliun | - PMA 52,09 Triliun | - PMA 55,62 Triliun | - PMA 59,57 Triliun | - PMA 63,94 Triliun | - PMA 63,94 Triliun |
| | | - PMA 1.148 proyek | - PMA 1.215 proyek | - PMA 1.298 proyek | - PMA 1.350 proyek | - PMA 1.425 proyek | - PMA 1.500 proyek | - PMA 1.500 proyek |



BAB 10

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018, agar berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007–2012. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2013–2017.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2013–2017.

10.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan gubernur provinsi DKI Jakarta periode 2013 – 2017 akan berakhir pada Oktober 2017, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada waktu yang sama. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018, agar berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Provinsi DKI Jakarta dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013–2017 dengan sebaik-baiknya;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017;
4. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta disahkan oleh Gubernur.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD Provinsi DKI Jakarta;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta;
7. Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, Gubernur harus menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Akhir masa jabatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
8. Bawa untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan, dan Program dalam RPJMD diperlukan instrument antara lain organisasi perangkat daerah dan sumber daya manusia (SDM). RPJMD ini menjadi pedoman dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
9. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
10. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.



BAB 11 PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

BAB 11

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur, yang akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2013-2017 yang sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang.

*Jakarta : Ibukota
Negara Kesatuan
Republik*

*Indonesia yang
Aman, Nyaman,
Sejahtera, Produktif,
Berkelanjutan dan
Berdaya Saing
Global*

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Jakarta akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka panjangnya, yaitu "Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global", menjadi sebuah kota yang besar, maju, dan berdaya saing. Kota yang menjadi pusat Asia Tenggara, memegang peranan penting di Asia, serta kota modern yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia.

TABEL 7.1

Program Prioritas Pembangunan Daerah Serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
|----|---|---|---|--|--|---|-----------|--|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | |
| 1 | Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder | Urusan Penataan Ruang, Perkerjayaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah : Mengembangkan intensitas pasar negara primer dan sekunder, yang berwawasan lingkungan melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus Marunda | Kordinasi Kebijakan Perekonomian | 1 Penetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus | Usulan Kelembagaan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Marunda | 1.Revisi UDGL, 300 Masterplan, Sidang Amdal, Komitmen memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi di KEK Marunda (ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD) | 300 | 1.Penunjukan Badan Usaha untuk membangun KEK Marunda | 300 | Pembangunan KEK Marunda | 1.Pembangunan KEK Marunda | 1.Pembangunan KEK Marunda | KEK Marunda Beroperasi |
| | | | | 2 Persentase prasarana KEK : | 0% | prasarana KEK : jalan Tol, pembangkit listrik, pengolahan arilimbah, IT, mes karawan, akses masuk, angkutan umum. | 10% | 10% | 20% | 25% | 25% | 25% | |
| | | | | 3 Prosentase sarana KEK : Pelabuhan, container yard, pegudangan, industri-Hi-Tech, bea cukai dan imigrasi terpadu. | | | | | | | | | |
| 2 | Urusan Perdagangan : Meningkatkan kualitas daya saing dan diversifikasi produk ekspor non migas serta mendorong diversifikasi pasar tujuan ekspor | Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri | 1 Urusan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pedagangan : Memberikan dukungan prasavana, sarana dan utilitas yang memadai antara lain melalui Pengembangan Kawasan Tarah Abang, Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Setiabudi, Pengembangan Kawasan Manggarai, Pengembangan Kawasan Latenggara, Pengembangan Kawasan Bandar Kemayoran, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Atas, Pengembangan Kawasan Pengerang Dua, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Barat, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Timur, Pengembangan Kawasan Putat Tidung | 1 Jumlah surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | LAMPIRAN I - Program Prioritas Pembangunan Daerah Serta Indikator Kebutuhan Pendanaan |
| | | | | 2 Jumlah nilai eksport produk Dki Jakarta | \$ 964 Juta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | \$ 1,2 Miliar |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|--|---|---|-----------------------------|-------------------|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------------|-------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | | |
| 2 | Pengembangan Bantuan Daerah Kegiatan Primer dan Sekunder secara hirarkis | 1 Urusan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pedagangan : Memberikan dukungan prasavana, sarana dan utilitas yang memadai antara lain melalui Pengembangan Kawasan Tarah Abang, Pengembangan Kawasan Segitiga Emas Setiabudi, Pengembangan Kawasan Manggarai, Pengembangan Kawasan Latenggara, Pengembangan Kawasan Bandar Kemayoran, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Atas, Pengembangan Kawasan Pengerang Dua, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Barat, Pengembangan Kawasan Sentra Primer Timur, Pengembangan Kawasan Putat Tidung | 1 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan yang diterbitkan | 0 | 1.000 | 400 | 1.100 | 400 | 1.200 | 400 | 1.300 | 400 | 1.400 | 400 |
| | | 2 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan emas setiabudi yang diterbitkan | 0 | 400 | 300 | 500 | 300 | 600 | 300 | 700 | 300 | 800 | 300 | 3.000 |
| | | 3 Jumlah izin usaha perdagangan manggarai yang diterbitkan | 0 | 300 | 200 | 400 | 200 | 500 | 200 | 600 | 200 | 700 | 200 | 2.500 |
| | | 4 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan | 0 | 1.000 | 400 | 1.100 | 400 | 1.200 | 400 | 1.300 | 400 | 1.400 | 400 | 6.000 |
| | | 5 Jumlah izin usaha perdagangan bandar kemayoran yang diterbitkan | 0 | 350 | 200 | 450 | 200 | 550 | 200 | 650 | 200 | 750 | 200 | 6.000 |
| | | 6 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan | 0 | 400 | 200 | 410 | 200 | 420 | 200 | 430 | 200 | 440 | 200 | 2.750 |
| | | 7 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan | 0 | 1.000 | 400 | 1.100 | 400 | 1.200 | 400 | 1.300 | 400 | 1.400 | 400 | 6.000 |
| | | 8 Jumlah izin usaha perdagangan sentra primer timur yang diterbitkan | 0 | 450 | 300 | 500 | 300 | 550 | 300 | 600 | 300 | 650 | 300 | 2.750 |
| | | 9 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan | 0 | 400 | 200 | 450 | 200 | 500 | 200 | 550 | 200 | 600 | 200 | 2.500 |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | |
|----|--|--|---------|--|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | Target | Rp (Juta) | | |
| 10 | Jumlah pekerja usaha yang dilengkapi aspek legal (SUPP, TDP) (Parch) | 30,500 | 30,500 | 2,000 | 30,500 | 2,000 | 30,500 | 2,000 | 30,500 | 2,000 | 30,500 | 2,000 | 30,500 | 2,000 | 152,500 | |
| 2 | Unsur Perataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup; Memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai antara lain melalui Persiapan pembangunan Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS / National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)) | Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir | 1 | Penyelesaian Masterplan dan PNU Support JCDS / NCICD | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengembangan Transits Oriented Development (TOD) pada jalur sepanjang sistem angkutan massal | Program Peningkatan Angkutan Umum Berbasis Jalan multifungsi dan multi strata masyarakat melalui Pembangunan TOD di sepanjang koridor MRT | 1 | Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dokumen perencanaan | 1,000 | 2 lokasi | |
| 4 | ruang bagi sektor informal pada kawasan perkantoran, perdagangan dan pemukiman | Urusan Penataan Ruang, Koperasi dan UKM : Mengejektifkan turun penyediaan ruang untuk UMKM melalui pembentukan rehan pada kawasan perkantoran, perdagangan dan pemukiman serta memberikan pinjaman modal berulir | 1 | Persemae 200,975 m ² peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m ²) di lokasi binaan sementara | 20% | 803,900 | 20% | 803,900 | 20% | 803,900 | 20% | 803,900 | 20% | 803,900 | 402,000 m ² | |
| 5 | Pembangunan lokasi khusus dan terpadu bagi pedagang kaki lima | Urusan Koperasi dan UKM :Membangun lokasi khusus bagi pedagang kaki lima pada kawasan ekonomi strategis | 1 | Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/ PKL | 0 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 5 lokasi |
| 6 | Revitalisasi pasar tradisional dan tidak mengusur PKL | Urusan Perdagangan pasar tradisional dan menyediakan ruang bagi PKL | 1 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM | 1 | Persemae 200,975 m ² peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m ²) di lokasi binaan sementara | 0,2 | 803,900 | 0,2 | 803,900 | 0,2 | 803,900 | 0,2 | 803,900 | 402,000 m ² | |
| 7 | Pengembangan keleragaan koperasi dan UKM untuk mendukung formalisasi dari ekonomi informal | Urusan Koperasi dan UKM,Otonomi Daerah : meningkatkan peran lembaga koperasi dan UMKM dalam perekonomian regional dan nasional yang mampu bersaing dengan pelatihan dan pengembangan usaha kecil | 1 | Program Pengembangan Kembagaan Koperasi | 1 | Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi | 70 Kop | 25 | 750 | 40 | 1,000 | 40 | 1,000 | 40 | 1,000 | 160 kop |
| 8 | Optimalisasi produktivitas, distribusi dan stock komoditas pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 88,50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 98,15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 95,55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 96,37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 119,60% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |
| 13 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 2 | Skripsi pangan harapan | 85,00% | 87% | 89% | 91% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 14 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Skripsi pangan harapan | 80 % baik / aman | 82 % baik / baik | 84 % baik / aman | 86 % baik / aman | 88 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | |
|----|---|--|---------|--|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | Target | Rp (Juta) | | |
| 15 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 98,15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 85,53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Jumlah ketersediaan pangan: | 119,60% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |
| 18 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 2 | Skripsi pangan harapan | 85,00% | 87% | 89% | 91% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 19 | Optimalisasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi | Urusan Ketahanan Pangan, Penataan Ruang, Perdagangan, Penanaman Modal; Menjamin ketersediaan stock komoditi pangan, mengawasi distribusi dan nutu pangan serta menjaga keamanan pangan | 1 | Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran | 1 | Skripsi pangan harapan | 80 % baik / aman | 82 % baik / baik | 84 % baik / aman | 86 % baik / aman | 88 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman | 90 % baik / aman |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|----------|---|--|---|--|--|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | | |
| | | | 2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman dan hortikultura yang dikeluaran | 1.570 sertifikat | 1.300 sertifikat | 2.905 | 1.400 sertifikat | 17.450 | 1.500 sertifikat | 8.200 | 1.600 sertifikat | 8.400 | 1.700 sertifikat | 6.700 |
| | | Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan | 1 Persentase ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikro-organisme yang berbahaya | 92,88% baik / aman | 93,00% baik / baik | | | | | | | | | 7.500 sertifikat |
| | | | 2 Jumlah sertifikat hasil uji hasil pekanan yang dikeluaran | 13.784 sertifikat | 28.416 sertifikat | 14.000 | 28.730 sertifikat | 17.000 | 29.000 sertifikat | 14.000 | 29.320 sertifikat | 14.000 | 29.600 sertifikat | 15.000 |
| | | Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil hewani (kesnavet) | 1 Persentase daging dan olahan yang tidak mengandung zat kimia atau mikro-organisme yang berbahaya | 90 % baik / aman | 91 % baik / baik | | | | | | | | | 145.066 sertifikat |
| | | | 2 Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang dikeluaran | 10.000 sertifikat | 13.000 sertifikat | 7.000 | 14.000 sertifikat | 10.000 | 15.000 sertifikat | 10.000 | 16.000 sertifikat | 10.000 | 17.000 sertifikat | 10.000 |
| | | | 3 Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan | 79 sertifikat | 85 sertifikat | 2.000 | 90 sertifikat | 2.000 | 95 sertifikat | 3.000 | 100 sertifikat | 3.100 | 110 sertifikat | 3.500 |
| | | | 4 Jumlah sertifikat hasil uji jaringan yang dikeluaran | 42 | 50 | 12.000 | 75 | 12.000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | |
| | | 5 Peningkatan keterhubungan di tingkat kelurahan | 1 Urusan Penataan Ruang, Kerahasiaan Pangan, Perdagangan, dan Penanaman Modal; Menyediakan distribusi dan stok pangan di tingkat kelurahan | Program Peningkatan Kerahasiaan dan Penanaman Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun | | | | | | | | | |
| | | | 6 Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerkirahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum | 1 Urusan Komunikasi dan Ruang, Pelebaran Jalan Umum; Mengelola Smart city antara lain melalui Pengintegrasian jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerkirahan, serta Penataan dan pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) | 2 Jumlah Data Center yang berfungsi | 0 | 1 unit Data Center | 27.000 | | | | | | 1 unit Data Center |
| | | | 7 Peningkatan fungsi lumbang pangan di tingkat kelurahan secara efektif | 3 Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi | 0 | 1 unit DRC | 7.000 | | | | | | | 1 unit DRC |
| | | | 8 Peningkatan jaringan dan teknologi informasi pada kantor pemerkirahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 Peningkatan urusan penataan ruang | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerkirahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 Pengelolaan energi dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 Peningkatan jaringan utilitas perkotaan | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 Peningkatan mekanisme dan peran pengawas keamanan dalam penataan ruang | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|----------|--|---|--|-------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | | |
| | | 1 Urusan Energi dan sumberdaya mineral | Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perkantoran, perdagangan dan jasa | 0 | 0 | - | 5 km | 10.000 | 5 km | 10.000 | 5 km | 25 km | |
| | | 2 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan perusahaan gas negara untuk mengembangkan tarahan di kawasan industri, perkantoran, perdagangan dan jasa | 2 Persentase terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan gas negara untuk mengembangkan tarahan di kawasan industri, perkantoran, perdagangan dan jasa | 100% | 200 | 100% | 300 | 100% | 400 | 100% | 500 | 100% | 600 | |
| | | 3 Urusan Energi dan sumberdaya mineral :Meninjauktanya infrastruktur penyediaan sumber energi antara lain melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) | 1 Terkoordinasi nasinya pembangunan SPBG | minal 11 SPBG | 150 | 4 SPBG | 150 | 4 SPBG | 150 | 4 SPBG | 150 | 4 SPBG | 150 | |
| | | 4 Peningkatan jaringan dan ducting utilitas | 1 Panjang ducting yang terbangun | 0 | 1.350 m' | 16.900 | 6.600 m' | 640.398 | 4.100 m' | 397.823 | 4.000 m' | 388.120 | 6.100 m' | 30 SPBG |
| | | 5 Peningkatan jaringan dan ducting utilitas perkotaan | 1 Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan pemanfaatan ruang | 0 | 44 forum RDTR | 3.500 | 72 forum reguler | 720 | 72 forum reguler | 720 | 72 forum reguler | 720 | 720 | 72 forum reguler |
| | | 6 Peningkatan ruang dan jaringan utilitas | 2 Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat | 7 media informasi | 1.500 | 7 media informasi | 1.500 | 7 media informasi | 1.500 | 7 media informasi | 1.500 | 7 media informasi | 1.500 | 7 media informasi |
| | | 7 Peningkatan jaringan dan utilitas perkotaan | 1 Tersedianya Masterplan pengembangan tata ruang | 1 Program Penataan Ruang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 masterplan |
| | | 8 Peningkatan jaringan dan utilitas perkotaan | 2 Meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar untuk penyusunan Masterplan pengembangan permasahan tata ruang | 1 Program Perencanaan Tata Ruang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 masterplan |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
|----|---|---|---|--|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | |
| 3 | Urusan Perhubungan :Mengembangkan transportasi perairan melalui pembangunan prasarana dan sarana angkutan perairan di daratan/pantai utara Jakarta/Kanal Banir dan Kepulauan Seribu | Program Pembangunan Transportasi Perairan | 1 Jumlah Kapal yang tersedia | 8 Kapal | 5 Kapal | 45,000 | 4 Kapal | 40,000 | 2 Kapal Kecil | 20,000 | 2 Kapal Kecil | 20,000 | 23 Kapal penumpang |
| 4 | Urusan Perhubungan dan Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan angkutan umum Berbasis Jalan | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 2 Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari | 261 penumpang | 336 penumpang | 452 penumpang | 547 penumpang | 547 penumpang | 643 penumpang | 643 penumpang | 739 penumpang | 739 penumpang | 739 penumpang |
| 18 | Penataan Anjungan Umum Regular | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 3 Jumlah dermaga yang terbangun | 5 dermaga | 8 dermaga | 7 dermaga | 4 dermaga | 4 dermaga | 4 dermaga | 4 dermaga | 4 dermaga | 4 dermaga | 26 Dermaga |
| 19 | Pengendalian dan Keselamatan Transportasi | Program Pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 1 Jumlah penumpang busway barayaitu Koridor 13 (Ciledug-Blok M), Koridor 14 (Ut-Manggaan), dan Koridor 15 (Pondok Kelapa - Blok M). Pembangunan Busway koridor integrasi Jabodebek; Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi, Bogor, Pengembangan layanan Feeder Busway, Penambahan armada Bus Busway dan Bus Feeder Busway serta Peningkatan profesionalisme lembaga pengelola Busway | 1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi | 304.799 penumpang | 400.000 | 550.000 | 730.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% |
| 20 | Pembangunan Sarana Perpaduan moda transportasi yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi perlakuan kaki dan penyandang disabilitas / Non Motorized Transportation (NMT) | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah lokasi keramaian yang tersedia | 0 | 1 dokumentasi kajian/ evaluasi | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 127 trayek |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
|----|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | |
| 19 | Pengendalian dan Keselamatan Transportasi | Urusan Perhubungan : Mengembangkan ITS (Intelligent Transport System) antara lain melalui pembangunan ATCS (Area Traffic Control System), BTS (Bus Tracking System) dan TIS (Traffic Information System) pada koridor ekonomi strategis | 1 Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 1 Berfungsiya ITS pada koridor busway | Tahap II | 50,000 | Tahap IV | 200,000 | Tahap V | 200,000 | Tahap VI | 200,000 | TTS Berfungsi pada koridor busway |
| 20 | Urusan Perhubungan : Melakukan keramaian bus angkutan umum reguler melalui pengadaan bus baru untuk mengantik bus lama/bus yang tidak layak jalan. | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 1 Jumlah anduktan umum yang direstukturisasi | 2 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 1 Perda |
| 21 | Urusan Perhubungan : Mendorong percepatan transformasi bentuk kepengusahaan angkutan umum dari perorangan menjadi Bahan Usaha | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi | 0 | 1 Perda | 500 | 10 mentit | 7 mentit | 7 mentit | 5 mentit | 3 mentit | 3 mentit | 3 mentit |
| 22 | Urusan Perhubungan :Meningkatkan kelembagaan pengelolaan Busway | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi | 1 Perda | Raperda PT. Transjakarta | 500 | | | | | | | 1 Perda |
| 23 | Urusan Perhubungan : Melakukan keramaian bus angkutan umum reguler melalui pengadaan bus baru untuk mengantik bus lama/bus yang tidak layak jalan. | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi | 1 Perda | Raperda | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 129 SAB |
| 24 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi | 1 Perda | Raperda | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 25 trayek | 500 | 129 SAB |
| 25 | Urusan Perhubungan :Menerapkan manajemen pembatasan lalu lintas antara lain melalui Urusan Perhubungan :Melakukan manajemen/pembatasan lalu lintas melalui Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) teknik-teknik traffic restraint lainnya, dan Pengendalian penggunaan kendaraan pribadi | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 1 Jumlah lokasi(jalan) pemberlakuan pembatasan lalu lintas | 0 | 1 dokumentasi kajian/ evaluasi | 500 | 2 dokumentasi kajian/ evaluasi | 1,000 | 2 dokumentasi kajian/ evaluasi | 1,000 | 2 dokumentasi kajian/ evaluasi | 1,000 | 9 dokumen kajian/ evaluasi |
| 26 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 1 Perda pengendalian lalu lintas | 1 Raperda | Perda dan Peraturan | 600 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | 1,500.000 | Lokasi 3 in 1 diberlakukan pengendalian lalu lintas |
| 27 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 2 Jumlah lokasi(jalan) yang dibebatkan pembatasan kendaraan ganjil-genap | 2 Raperda | Perda dan Peraturan | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | Lokasi 3 in 1 menjadi pembatasan ganjil-ganjil |
| 28 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 3 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | UU dan PP | Perda dan Peraturan | 500 | SOP Pembatasan Lalu Lintas | 500 | SOP Pembatasan Lalu Lintas | 500 | SOP Pembatasan Lalu Lintas | 500 | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas |
| 29 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 4 Jumlah Kawasan ERP terbangun | 4 Kawasan ERP beroperasi | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 30 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 5 Jumlah Kawasan ERP yang beroperasi | 5 Jumlah Kawasan | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 31 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 6 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 6 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 32 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 7 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 7 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 33 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 8 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 8 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 34 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 9 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 9 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 35 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 10 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 10 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 36 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 11 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 11 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 37 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 12 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 12 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 38 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 13 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 13 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 39 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 14 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 14 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 40 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 15 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 15 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 41 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 16 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 16 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 42 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 17 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 17 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 43 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 18 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 18 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 44 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 19 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 19 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 45 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 20 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 20 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 46 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 21 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 21 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 47 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 22 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 22 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 48 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 23 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 23 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 49 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 24 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 24 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 50 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 25 Terdapatnya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP | 25 Kawasan ERP terbangun | Kawasan ERP | - | - | - | - | - | - | - | 1 Kawasan |
| 51 | Urusan Perhubungan :Menyediakan titik-titik rawan kemacetan | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Berbasis Jalan | 26 Terdapatnya payung h | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANNAAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | Target | Rp (Juta) | 2016 | Target | Rp (Juta) | 2017 | Target | Rp (Juta) | KONDISI AKHIR 2017 |
| 21 | Penataan sistem Perparkiran | 1 Urusan Perhubungan : Mendorong terlaksana sistem parkir online, menerapkan tarif parkir tinggi dan progresif berdasarkan zonasi serta menata parkir on street | Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan | 2 Panjang trotoar terbangun di sepanjang jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan pengal Rasuna said-Gatot Soebroto | - | - | 12.000 m | 27.375 | - | - | 27,6 km | 8,280 | 19,7 km | 5,910 | 16 km | 4,800 | 15,7 km | 4,710 | Total jalur sebangun sepanjang 86,6 km | 12.000 m | |
| 21 | Penataan sistem Perparkiran | 1 Urusan Perhubungan : Mendorong terlaksana sistem parkir online, menerapkan tarif parkir tinggi dan progresif berdasarkan zonasi serta menata parkir on street | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan | 1 Jumlah Lokasi parkir off street | 764 Lokasi parkir off street | - | - | 27,6 km | - | - | 27,6 km | - | - | 75% | - | 100% | - | - | 100% parkir off street sudah menerapkan parkir online | Parkir on street berkurang 20% | |
| 22 | Pengembangan sistem tata air yang terpadu | 1 Urusan Perhubungan : Menata parkir off street dan parkir on street | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan | 1 Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi | 20 Lokasi | 500 | 20 Lokasi | 500 | 20 Lokasi | 500 | 20 Lokasi | 500 | 20 Lokasi | 500 | 20 Lokasi | 500 | 20 Lokasi | 500 | Total jalur sebangun sepanjang 86,6 km | 12.000 m | |
| 22 | Pengembangan sistem tata air yang terpadu | 1 Urusan Perhubungan : Menata parkir off street dan parkir on street | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan | 1 Jumlah lokasi parkir on street | 2 Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet | 248 ruas | 220 ruas (berkurang 28 ruas) | 200 ruas (berkurang 20 ruas) | 180 ruas (berkurang 20 ruas) | 180 ruas (berkurang 20 ruas) | 180 ruas (berkurang 20 ruas) | 180 ruas (berkurang 20 ruas) | 160 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) |
| 23 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : fasilitas park and ride di stasiun dan terminal | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah lokasi parkir yang telah menerapkan tarif parkir tinggi | 2 Lokasi (Ragunan & Pulegebang) | - | - | 2 Lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres) | 20,000 | 2 Lokasi (Pulogadung & Tanjung Priok) | 20,000 | 2 Lokasi (Tanjah Abang & Lebak Bulus) | 25,000 | 2 Lokasi (Blok M & Kemanginan) | 25,000 | 2 Lokasi (Blok M & Kemanginan) | 25,000 | 2 Lokasi (Blok M & Kemanginan) | 25,000 | 10 Lokasi | |
| 23 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : fasilitas park and ride di stasiun dan terminal | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah gedung yang terbangun di pusat kegiatan | 1 gedung (Menteng) | - | - | 1 gedung (Gedek) | 150,000 | 1 gedung (Tanah Abang) | 100,000 | 1 gedung (Kalideres) | 100,000 | 1 gedung (Gedek) | 100,000 | 1 gedung (Gedek) | 100,000 | 1 gedung (Gedek) | 100,000 | 5 gedung | |
| 24 | Pengembangan sistem tata air yang terpadu | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 340,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 37 | |
| 24 | Pengembangan sistem tata air yang terpadu | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Jumlah underpass terbangun | 13 | 0 | 0 | 2 | 300,000 | 3 | 390,000 | 2 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 20 | |
| 25 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | | | | | | | 296 jembatan | |
| 25 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Luas jalan yang terbangun | 48,311,359,97 | 8,150 | 25,500 | 109,200 | 271,877 | 253,000 | 421,877 | 636,600 | 82,1877 | 732,500 | 921,877 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | | |
| 26 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 37 | |
| 26 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Jumlah underpass terbangun | 13 | 0 | 0 | 2 | 300,000 | 3 | 390,000 | 2 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 20 | |
| 27 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | | | | | | | 296 jembatan | |
| 27 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Luas jalan yang terbangun | 48,311,359,97 | 8,150 | 25,500 | 109,200 | 271,877 | 253,000 | 421,877 | 636,600 | 82,1877 | 732,500 | 921,877 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | | |
| 28 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 37 | |
| 28 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Jumlah underpass terbangun | 13 | 0 | 0 | 2 | 300,000 | 3 | 390,000 | 2 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 20 | |
| 29 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | | | | | | | 296 jembatan | |
| 29 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Luas jalan yang terbangun | 48,311,359,97 | 8,150 | 25,500 | 109,200 | 271,877 | 253,000 | 421,877 | 636,600 | 82,1877 | 732,500 | 921,877 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | | |
| 30 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 37 | |
| 30 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Jumlah underpass terbangun | 13 | 0 | 0 | 2 | 300,000 | 3 | 390,000 | 2 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 20 | |
| 31 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | | | | | | | 296 jembatan | |
| 31 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Luas jalan yang terbangun | 48,311,359,97 | 8,150 | 25,500 | 109,200 | 271,877 | 253,000 | 421,877 | 636,600 | 82,1877 | 732,500 | 921,877 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | | |
| 32 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 37 | |
| 32 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Jumlah underpass terbangun | 13 | 0 | 0 | 2 | 300,000 | 3 | 390,000 | 2 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 20 | |
| 33 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | | | | | | | | 296 jembatan | |
| 33 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Luas jalan yang terbangun | 48,311,359,97 | 8,150 | 25,500 | 109,200 | 271,877 | 253,000 | 421,877 | 636,600 | 82,1877 | 732,500 | 921,877 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | 50,050,809,97 | | |
| 34 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 1 | 160,000 | 37 | |
| 34 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Jumlah underpass terbangun | 13 | 0 | 0 | 2 | 300,000 | 3 | 390,000 | 2 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | 20 | |
| 35 | Pengembangan Prasarana jalan dan jembatan | 1 Urusan Perhubungan : Mengembangkan rancangan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 1 Jumlah jembatan yang terbangun | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40, | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | |
|----|---|--|--|-----------------------------|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | Target | Rp (Juta) | 2017 | Target | Rp (Juta) |
| 2 | Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembuatan siedetan sepanjang sungai cilincung sampai kanal barat / timur | Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas situ, waduk dan embung melalui Pembebasan, pembangunan dan pemeliharaan situ,waduk dan embung | Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir | 1 Jumlah waduk yang dibangun 2 Jumlah embung yang terbangun di Wilayah Kota Jakarta | 3 0 0 | 3 jumlah waduk yang dibebaskan untuk Pembangunan dan Sarana ke-PULang Air | 5 56.250 | 5 | 50.750 | 1 | 55.000 | 4 | 41.000 | 2 | 288.800 | 2 | 288.800 | 12 |
| 4 | Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sarana dan prasarana pondokan sistem drainase kota antara lain melalui Peningkatan drainase terutama di pusat kota dan Pengadaan alat berat serta alat angkut | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum | 1 Luaslahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an | 92.848 m ² | 555.016 | 2.348.300 | 1.126.293 | 2.720.000 | 748.430 | 2.010.500 | 508.565 | 1.442.500 | 64.611 | 153.000 | 3.096.000 m ² | | |
| 5 | Urusan Pekerjaan Umum : Melaksanakan pembangunan terowongan bawah tanah multifungsi (drainase) melalui investasi dari pihak swasta murni | Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir | 1 Program Pengembangan Sistem Drainase | 0 | 3.000 m' | 14.750 | 5.000 m' | 2.500 | 5.000 m' | 25.000 | 5.000 m' | 25.000 | 5.000 m' | 25.000 | 5.000 m' | 25.000 | 23.000 m |
| 6 | Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem polder | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Dahanu, dan Sumber Daya Air Lainnya | 1 Program Pengembangan Sistem Drainase | 0 | 0 | 1 | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 26 | Pemeliharaan sarana drainase | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pengurusan sungai dan saluran termasuk pererukan bendungan | Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase | 1 Urusan Pekerjaan Umum : Melakukan Pengurusan sungai dan saluran termasuk pererukan bendungan | 21 | 21 | 15.000 | 21 | 15.000 | 21 | 15.000 | 21 | 15.000 | 21 | 15.000 | 21 | 15.000 | 21 |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|---|-----------|--|---------|--|--------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | Target | Rp (Juta) | 2016 | Target | Rp (Juta) | | |
| 27 | Konservasi sumberdaya air | 1 Urusan Pekerjaan Umum : Menahan air permukaan selain muang di dataran antar laut melalui Pembangunan waduk tangkapair air diulu | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Dahanu, dan Sumber Daya Air Lainnya | 2 terlaksananya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan kelengkapannya | 5 wilayah | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 | 5 wilayah kota adm (6ZJ adm/6ZJ pintu air) | |
| 2 | Urusan Pekerjaan Umum : Meminimalkan run-off air hujan antar laut melalui Pembangunan sumur resapan dan lubang biopori | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Dahanu, dan Sumber Daya Air Lainnya | 1 Urusan Pekerjaan Umum : Meminimalkan upaya adaptasi terhadap air laut pasang antar laut melalui Pembangunan tangkul pengaman pantai dan penahanan air laut pasang | 1 Jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara | 5 wilayah | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 | 5 wilayah kota adm | | | |
| 28 | Pengendalian banjir akibat air laut pasang | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Dahanu, dan Sumber Daya Air Lainnya | 1 Urusan Pekerjaan Umum : Mengoptimalkan upaya adaptasi terhadap air laut pasang antar laut melalui Pembangunan tangkul pengaman pantai dan penahanan air laut pasang | 1 Panjang pantai yang terbangun | 9.718 m | 300 m | 23.500 | 1.200 m | 26.857 | 1.500 m | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.718 m | | |
| 29 | Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Dahanu, dan Sumber Daya Air Lainnya | 1 Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan ukuran layanan air limbah sistem terpusat antar laut melalui pembangunan perpipaan dan PAL sistem terpusat | 1 Persentase fasilitas sistem air limbah terpasat | Persemaian fasilitas sistem air limbah terpasat Zona 1 dan Zona 0 (4% dari seluruh DKI) | 5.300 | Penyusunan URL UPL ground breaking Zona 1 dan pembangunan lahan IPAL Zona 1 | 80.800 | Penyusunan URL UPL lantai dan lanjutan dan penyusunan AMDAL Zona 1 | 80.600 | Penyusunan URL UPL lantai dan lanjutan dan penyusunan AMDAL Zona 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Pengembangan air limbah domestik sistem setempat | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Dahanu, dan Sumber Daya Air Lainnya | 1 Urusan Pekerjaan Umum : Mendorong pengolahan air limbah domestik perumahan antar laut melalui Pembangunan IPAL Komunal, Sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan Pengelolaan IPAL sistem setempat | 2 Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun | Jumlah IPAL komunal yang mulai terpasat | 2 | 100 | 71 | 20.000 | 21 | 6.000 | 3.5 | 1.000 | 3.5 | 1.000 | 3.5 | 1.000 | 0 | |
| | | | | 3 Jumlah IPAL komunal yang mulai terpasat | Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank | 2 | 0 | - | 3 | 9.000 | 3 | 12.000 | 2 | 7.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 |
| | | | | 4 Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank | | 400 m ³ /hari | 500 m ³ /hari | 10.000 | 700 m ³ /hari | 12.000 | 900 m ³ /hari | 36.500 | 1200 m ³ /hari | 15.000 | 1500 m ³ /hari | 17.000 | 1500 m ³ /hari | 11 | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|--|--|--|-----------------------------|---|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--|
| | | | | | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | | |
| 31 | Pengembangan sistem air minum perpipaan | Urusan Pekerjaan Umum : Mengembangkan sistem perpipaan di seluruh DKI Jakarta antara lain melalui : | Program Pedyediaan dan Pengelolaan Air Bersih | 1 | Percentase Cakupan pelayanan air minum perpipaan | 60,59% | 67,06% | 73,53% | | 80,00% | | 82,60% | | 85,10% | |
| | | | | 2 | Pembangunan pipa transisi air minum dari Bekasi ke Muara Karang | 0 | 30% | 200.000 | 60% | 500.000 | 100% | 500.000 | | 85,10% | |
| 32 | Peningkatan kinerja Pengelolaan Persampahan | Urusan Pekerjaan Umum : Menyediakan sarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan antara lain melalui Penyedian lahan untuk fasilitas persampahan dan Peningkatan TPS sesuai standar lingkungan Hidup, peningkatan pemberian sampaht di kalisungai dengan pemantangan otomatis pada batas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lain dan pada setiap batas wilayah kota administrasi serta peremajaan truk angkutan sampah | Program Peningkatan Saama dan Prasrama Pekerjaan Umum | 1 | Jumlah TPS/candi lingkungan yang tersedia | 3 | 30 | 6.000 | 30 | 6.000 | 30 | 6.000 | 30 | 6.000 | |
| | | | | 2 | Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia | 23 unit (17 unit milik Penda DKI, 6 unit milik Kemen PUPR) | 21.000 | 2 unit | 36.000 | 2 unit | 36.000 | 2 unit | 36.000 | 32 unit | |
| 33 | Penerapan Konsep 3R | Urusan Pekerjaan Umum : Meningkatkan efisiensi kerjasama dengan swasta dalam pelayanan persampahan antara lain melalui swastanasi kebersihan, dan antara bin melalui Kerjasama pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan IT dan TPST | Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 1 | Percentase peningkatan persamaan antara lahan untuk fasilitas persampahan | 88% | 90% | 93% | 1.350.000 | 96% | 1.350.000 | 98% | 1.480.000 | 100% | |
| | | | | 2 | Percentase Timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Masyarakat oleh Swasta (Konsep Business to Business) | 0% | 0% | 500 | 3% | 500 | 10% | 500 | 15% | 500 | |
| 34 | Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran udara | Urusan Lingkungan Hidup : Mengandalkan pencemaran udara antara lain melalui Pemanfaatan Kualitas Udara, Pembinaan stakeholder melalui program PROPER dan SUPER, Penerapan hukum terhadap pencemaran udara, dan Peningkatan penerapan Rati Bebas Kendaraan Bermotor, Kawasan Dilarang Merokok dan Uji Emisi | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1 | Terpenuhinya kandaraan emisi sumber bergerak | 1000 | 2000 | 1.350 | 4000 | 1.350 | 6000 | 1.350 | 8000 | 1.350 | |
| | | | | 2 | Terpenuhinya kandaraan emisi sumber tidak bergerak | 100 kegiatan usaha | 300 | 200 kegiatan usaha | 325 | 300 kegiatan usaha | 325 | 400 kegiatan usaha | 350 | 500 kegiatan usaha | |
| 35 | Pengembangan Adaptasi Perubahan Iklim | Urusan Lingkungan Hidup : Merumukkan emisi Gas Rumah Kaca antara lain melalui Penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Industri, Transportasi, dan Pemanfaatan dan pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 1 | Dipahami dan diterapkannya program-pengurangan emisi gas rumah kaca | 149% | 42,50 | 149% | 12.000 | 15% | 13.100 | 15% | 14.310 | 15% | |
| | | | | 2 | Terlaksananya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor industri, transportasi, komersil, rumah tangga, limbah padat, air limbah | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | | |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | | |
| 36 | Penerapan Konsep SUPER | Urusan Lingkungan Hidup : Merumukkan emisi Gas Rumah Kaca antara lain melalui Penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Industri, Transportasi, dan Pemanfaatan dan pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 | Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup | 75 kegiatan usaha peserta SUPER | 350 | 150 kegiatan usaha | 400 | 225 kegiatan usaha | 450 | 300 kegiatan usaha | 500 | 375 kegiatan usaha | |
| | | | | 2 | Aplikasi dan pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | | | | | | | | | | |
| 37 | Pengembangan Adaptasi Perubahan Iklim | Urusan Lingkungan Hidup : Merumukkan emisi Gas Rumah Kaca antara lain melalui Penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Industri, Transportasi, dan Pemanfaatan dan pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 1 | Dipahami dan diterapkannya program-pengurangan emisi gas rumah kaca | 250 | desiminasi | 250 | desiminasi dan draft regulasi | 250 | desiminasi dan regulasi | 250 | desiminasi dan regulasi | desiminasi dan regulasi | |
| | | | | 2 | Terlaksananya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor industri, transportasi, komersil, rumah tangga, limbah padat, air limbah | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | | | |
|----|--|--|--|---|-------------------|--|-----------|-----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | 2014 | Rp (Juta) | Target | 2015 | Rp (Juta) | | | | | |
| 35 | Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran air | Unsian Lingkungan Hidup : Mengendalikan pencemaran air antara lain melalui Pemanfaatan Kualitas Air; Pembinaan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air dan Pengökhan hukum terhadap pencemaran air serta membentuk dan memperkuat komunitas pendita sungai. | Tersusun Raperda RAD Antipasi Dampak Perubahan Iklim | dokumen RAD GRK | 67 titik pantau | 70 titik pantau | 500 | 80 titik pantau | 750 | 80 titik pantau | 900 | 90 titik pantau | 1,000 | 90 titik pantau | 1,000 | 90 titik pantau | 1 dokumen Perda | 1 dokumen Perda |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Menurunkan beban pencemaran udara | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Program Pengikatan Pecan Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 Meningkatkan peran serta masyarakat dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup | 3 kelompok | 3 kelompok | 1,000 | 3 kelompok | 1,000 | 3 kelompok | 1,000 | 3 kelompok | 1,000 | 3 kelompok | 1,000 | 3 kelompok | 1,000 | 3 kelompok |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan bahan sumbernya. | Program Pengikatan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1 Peningkatan kualitas udara secara lain melalui pelaksanaan HBKB | 6 SPKU | 6 SPKU | 5,500 | 6 SPKU | 5,500 | 6 SPKU | 6,000 | 6 SPKU | 6,000 | 6 SPKU | 6,000 | 6 SPKU | 6,000 | 6 SPKU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | 2014 | Rp (Juta) | Target | 2015 | Rp (Juta) | Target | 2016 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | |
| 36 | Menurunkan beban pencemaran udara | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Program Pengikatan Pecan Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 Jumlah dokument lingkungan yang direkomendasikan | 1142 | 80 | 475 | rekomendasi | 75 | 500 | rekomendasi | 475 | 75 | rekomendasi | 450 | 70 | rekomendasi | 450 | rekomendasi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan bahan sumbernya. | Terwujudnya pengelolaan air limbah (PAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja PAL nya | 1 Terwujudnya pengelolaan air limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK) | 0 | 40 USK | 200 | 40 USK | 200 | 40 USK | 200 | 40 USK | 200 | 40 USK | 200 | 40 USK | 200 | 40 USK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 1 Terwujudnya pengelolaan emisi sumber bergerak | 1000 kendaraan | 2000 kendaraan | 1,350 | 4000 kendaraan | 1,350 | 6000 kendaraan | 1,350 | 8000 kendaraan | 1,350 | 10000 kendaraan | 1,350 | 10000 kendaraan | 1,350 | 10000 kendaraan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 1 Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 100 kegiatan usaha | 300 kegiatan usaha | 325 | 300 kegiatan usaha | 325 | 400 kegiatan usaha | 350 | 500 kegiatan usaha | 350 | 500 kegiatan usaha | 350 | 500 kegiatan usaha | 350 | 500 kegiatan usaha | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 1 Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 64 kali | 112 kali | 2,275 | 112 kali | 1,500 | 112 kali | 1,500 | 112 kali | 1,500 | 112 kali | 1,500 | 112 kali | 1,500 | 112 kali | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 1 Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 700 dokumen | 1,225 | 900 dokumen | 1,250 | 1000 dokumen | 1,275 | 1100 dokumen | 1,300 | 1,300 dokumen | 1,300 | 1,300 dokumen | 1,300 | 1,300 dokumen | 1,300 | 1,300 dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 1 Peningkatan kualitas udara secara lain melalui pelaksanaan HBKB | 60 ijin | 60 ijin | 100 | 60 ijin | 100 | 100 ijin | 150 | 100 ijin | 150 | 100 ijin | 150 | 100 ijin | 150 | 100 ijin | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Menurunkan beban pencemaran tanah | Urusan Lingkungan Hidup : Mengaktifkan upaya pencegahan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan pada sumbernya. | Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 1 Terwujudnya pengelolaan emisi sumber tidak bergerak | 100 kegiatan usaha | 120 kegiatan usaha | 300 | 130 kegiatan usaha | 300 | 140 kegiatan usaha | 300 | 150 kegiatan usaha | 300 | 150 kegiatan usaha | 300 | 150 kegiatan usaha | 300 | 150 kegiatan usaha | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | |
|----|---|--|---|--|---|---|--|----------------------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | | |
| 38 | Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana | 1 Urusan Otonomi Daerah : Mengembangkan sistem peringatan dini bencana 2 Urusan Otonomi Daerah : Menyediakan lokasi evakuasi/torban bencana di kawasan rawan bencana | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kejadian Bencana Pra Bencana | 1 Jumlah Sistem Peringatan Dini 13 pintu air 2 Jumlah Penitapan Kawasan bencana minimal berdaya tampung 100 pengungsitan dengan luas minimal 1.000 m ² | 10 Lokasi | 13 pintu air | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | 3 Lokasi | |
| 39 | Penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bahan dan ancaman bencana | 1 Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan perlakuan dan evakuasi/dilirik 2 Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan perlakuan dan prasaranan pemadam kebakaran | Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Pelayanan | 1 Rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan 2 Rata-rata waktu pemadamkan kejadian kebakaran | 1 Lokasi | 0 | 0 | 307 Titik Lokasi | 2 Lokasi | | | | 3 Lokasi | |
| 40 | Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewu | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan pembangunan superblock rumah susun sewu murah yang dilengkapi pasar, sarana kesehatan dan sarana olahraga bagi masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat 2 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan pembangunan instalasi hydrant di kawasan perumahan padat/rawam kebakaran | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat | 1 Terbangunnya unit Rusunawa di lokasi pasar 2 Rasio hidrant terhadap kawasan rawan kebakaran | Kawasan | 1.863 orang 1.863 orang (Tiga Ratus) | 2.050 orang 2.237 orang | 2.424 orang 2.611 orang | 2.424 orang 2.798 orang | 2.424 orang 2.798 orang | 2.424 orang 2.798 orang | 2.424 orang 2.798 orang | 25/44 | |
| 41 | Pengembangan rumah susun sewu | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan pembangunan rumah susun sewu pada lokasi-lokasi strategis lahan milik Penda atau konsolidasi lahan dan bangunan | Program Peningkatan Perumahan Rakyat | 1 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD) 2 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN) | 118.001 unit hunian 2.430 | 0 0 | 0 | 135.000 | 543 unit hunian 600 | 316.000 | 400 unit hunian 2.000 | 118.000 200 | 250.000 250.000 | |
| 42 | Pengembangan rumah susun dan apartemen bersubsidi | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Mengendalikan pembangunan rumah susun bersubsidi antara lain melalui Penyelesaian pembangunan rumah susun dan mempercepat proses penghuniannya rumah susun serta sosialisasi penyuluhan dan bimtek tentang cara dan etika tinggal di hunian vertikal 2 Urusan Perumahan : Melakukan studi dan kajian tentang persepzi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak serta memfasilitasi pembentukan dan pengurusan asosiasi penghuni apartemen | Program Kebijakan Pengembangan Perumahan Program Penyelenggaraan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun | 1 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Pemukiman dan Gedung Penda 2 Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun | 4 wilayah kota administrasi 4 wilayah kota administrasi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 250 250 250 | 4 wilayah kota administrasi 4 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 250 250 | 3 Tower finishing 3 Tower dan 3 tower finishing | 180.000 315.000 | 40/56 Kawasan 5 Lokasi | 1.500 1.500 | 5 Lokasi 5 Lokasi | 2.000 2.000 |
| 43 | Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewu yang dikelola Pemprov DKI Jakarta | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan perbaikan rumah susun sewu yang dibangun pemprov DKI Jakarta | Program Koordinasi Sejarah Terima Rumah Susun APBN | 1 Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kajian | 526 unit | 160.000 | 300 unit | 109.000 | |
| 44 | Penataan Kawasan perumahan kumuh skala kota | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung sepanjang daerah aliran sungai 2 Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung tematik (super kampung) | Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung Program Perbaikan dan Perbaikan Kampung Tematik | 1 Terlaksananya Penataan Kampung sepanjang Daerah aliran Sungai Ciliwung 2 Jumlah Lokasi | Lokasi Ciliwung 0 | 200.000 0 | 200.000 0 | 1.200.000 1.200.000 | Lokasi Ciliwung 70 Lokasi | 150.000 600.000 | Lokasi Ciliwung 10 Lokasi | 100.000 400.000 | 4 Lokasi | 160.000 400.000 |
| 3 | Urusan Perumahan Rakyat : Menata RW-RW Kamuh | 1 Jumlah RW Kamuh yang terata | | | 126 RW | 126.000 | 78 RW | 78.000 | 68 RW | 63 RW | 63.000 | 57 RW | 57.000 | 392 RW kurnuh |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | |
|----|---|--|---|---|---|---|---|------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | | |
| 41 | Pengembangan rumah susun sewu | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Melaksanakan pembangunan rumah susun sewu pada lokasi-lokasi strategis lahan milik Penda atau konsolidasi lahan dan bangunan | Program Penyediaan Perumahan Rakyat | 1 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD) 2 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN) | 118.001 unit hunian 2.430 | 0 0 | 0 | 700 unit hunian 600 | 543 unit hunian 600 | 316.000 | 400 unit hunian 2.000 | 118.000 200 | 250.000 250.000 | |
| 42 | Pengembangan rumah susun dan apartemen bersubsidi | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Mengendalikan pembangunan rumah susun bersubsidi antara lain melalui Penyelesaian pembangunan rumah susun dan mempercepat proses penghuniannya rumah susun serta sosialisasi penyuluhan dan bimtek tentang cara dan etika tinggal di hunian vertikal 2 Urusan Perumahan : Melakukan studi dan kajian tentang persepzi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak serta memfasilitasi pembentukan dan pengurusan asosiasi penghuni apartemen | Program Kebijakan Pengembangan Perumahan Program Penyelenggaraan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun | 1 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Pemukiman dan Gedung Penda 2 Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun | 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 250 | 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 250 | 3 Tower finishing 3 Tower dan 3 tower finishing | 180.000 315.000 | 40/56 Kawasan 5 Lokasi | 1.500 1.500 | 5 Lokasi 5 Lokasi | 2.000 2.000 |
| 43 | Rehabilitasi dan perbaikan rumah susun sewu yang dikelola Pemprov DKI Jakarta | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Melakukan perbaikan rumah susun sewu yang dibangun pemprov DKI Jakarta | Program Koordinasi Sejarah Terima Rumah Susun APBN | 1 Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 kajian | 526 unit | 160.000 | 300 unit | 109.000 | |
| 44 | Penataan Kawasan perumahan kumuh skala kota | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung sepanjang daerah aliran sungai 2 Urusan Perumahan Rakyat : Menata kampung tematik (super kampung) | Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung Program Perbaikan dan Perbaikan Kampung Tematik | 1 Terlaksananya Penataan Kampung sepanjang Daerah aliran Sungai Ciliwung 2 Jumlah Lokasi | Lokasi Ciliwung 0 | 200.000 0 | 200.000 0 | 1.200.000 1.200.000 | Lokasi Ciliwung 70 Lokasi | 150.000 600.000 | Lokasi Ciliwung 10 Lokasi | 100.000 400.000 | 4 Lokasi | 160.000 400.000 |
| 3 | Urusan Perumahan Rakyat : Menata RW-RW Kamuh | 1 Jumlah RW Kamuh yang terata | | | 126 RW | 126.000 | 78 RW | 78.000 | 68 RW | 63 RW | 63.000 | 57 RW | 57.000 | 392 RW kurnuh |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | 2014 | Rp (Juta) | Target | 2015 | Rp (Juta) | Target | 2016 | Rp (Juta) | Target | 2017 | Rp (Juta) | KONDISI AKHIR 2017 |
| 45 | Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat | Urusan Lingkungan Hidup - Mengembangkan RTB publik antara lain melalui penyebarluasan dan Pengembangan perusahaan swasta dalam penyediaan RTB Publik | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertanian dan Pemakanan | 1 Jumlah RTB yang dikembangkan oleh Masyarakat | 10 Lokasi | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | 20 | 1,000 | 110 | | |
| | 2 | Urusan Lingkungan Hidup RTB privatis :Pengembangan RTH privat antar lain melalui penambahan RTB Privat, penyediaan lahan minimal untuk hutan kota dan sentra pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan konservasi flora dan fauna | Program Peningkatan Rung Terbuka Hjau Pertanian dan Keutuhan | 1 Luas Lahan yang dibebaskan | minimal 640,84 Ha | 55 | 8,300 | 55 | 8,300 | 55 | 8,300 | 55 | 8,300 | 55 | 8,300 | 55 | 8,300 | 450 tegakitan | | |
| | 3 | Jumlah kegiatan pengembangan RTB Terpadu oleh masyarakat | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 5 kegiatan | | |
| | 46 | Peningkatan kualitas taman sebagai ruang publik | Urusan Lingkungan Hidup - Mengembangkan dan mengembangkan taman,taman interaktif dan hutan kota sebagai ruang publik yang dapat dijadikan sarana rekreasi budaya betawi, sarana penyuluhan kreativitas atau creative public space serta berfungsi sebagai daerah resapan air | Program Peningkatan Kuantitas RTB Pertanian dan Pemakanan | 1 Luas Lahan yang dibebaskan | 2725,74 Ha | 50 | 1,000,000 | 50 | 1,000,000 | 50 | 1,000,000 | 50 | 1,000,000 | 50 | 1,000,000 | 50 | 1,000,000 | 2975,74 Ha | |
| | 1 | Jumlah kegiatan RTB Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata | Luas RTB pertamanan dan pemakanan yang dikelola (ha) | 41,38 Ha | 40 ha | 800,000 | 40 ha | 800,000 | 40 ha | 800,000 | 40 ha | 800,000 | 40 ha | 800,000 | 40 ha | 800,000 | 40 ha | 800,000 | 241,38 Ha | |
| | 2 | Jumlah lokasi RTB yang dibebaskan | 13,9 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 28,9 ha | |
| | 3 | Jumlah Pohon yang Ditumbuhkan pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Perumahan | 326,736 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 52,736 Pohon | | |
| | 47 | Pengembangan budaya Betawi yang berseri dan budaya multikultural lainnya | Program Peningkatan Rung Terbuka Hjau Pertanian dan Keutuhan | 1 Luas RTB pertamanan dan pemakanan yang dikelola | 2,718,34 | 740 | 289,318 | 50,00 | 486,955 | 50,00 | 522,985 | 50,00 | 564,195 | 50,00 | 602,696 | 50,00 | 602,696 | 2925,74 Ha | | |
| | 1 | Jumlah lokasi RTB yang dibebaskan | 5 Lokasi | 90,000 | 10 Lokasi | 165,000 | 10 Lokasi | 160,000 | 10 Lokasi | 160,000 | 10 Lokasi | 160,000 | 10 Lokasi | 160,000 | 10 Lokasi | 160,000 | 10 Lokasi | 160,000 | 10 Lokasi | |
| | 2 | Jumlah lokasi RTB yang dibebaskan | 13,9 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | 3 Ha | |
| | 3 | Jumlah lokasi RTB yang dibebaskan | 326,736 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 40,000 Pohon | 52,736 Pohon | |
| | 48 | Pengembangan budaya Betawi sebagai pusat kebudayaan nasional | Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan multikultural lainnya antara lain melalui peningkatan keberagaman dan kesatuan bangsa untuk peningkatan budaya nusantara | Program Peningkatan Perlidungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan | 1 Jumlah perlidungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif | 5 | 1,500 | 5 | 1,500 | 5 | 1,500 | 5 | 1,500 | 5 | 1,500 | 5 | 1,500 | 5 | 1,500 | 28 jenis pendokumentasi senibudaya yang hampir punah dan 20 jenis pengembangan seni budaya betawi |
| | 1 | Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan event budaya nasional dan daerah antara lain melalui kerjasama dengan daerah lain melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan budaya nusantara | Program Peningkatan Perlidungan, Promosi dan Informasi Kebudayaan | 1 Jumlah penyelenggaraan kegiatan kebudayaan tingkat nasional di jakarta | 10 event | 27,300 | 11 | 31,395 | 12 | 36,104 | 12 | 41,519 | 13 | 47,740 | 13 | 47,740 | 13 | 47,740 | 58 event festival budaya nasional dan daerah | |
| | 2 | Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan multikultural lainnya antara lain melalui kerjasama dengan daerah lain melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan budaya nusantara | Program Peningkatan Perlidungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan | 1 Jumlah pemanfaatan kebudayaan di 5 (lima) wilayah Seribu | 12 Lokasi Pusat Kebudayaan Seribu | 21 | 52,500 | 30 | 75,000 | 40 | 10,000 | 50 | 12,500 | 61 | 150,000 | 61 | 150,000 | 61 | 150,000 | 61 lokasi pusat kebudayaan |
| | 3 | Urusan Kebudayaan : Mengembangkan rawasan strategis budaya provinsi di Kota Tua, Taman Ismail Marzuki, Jatinegara, dan Situ Babakan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan | 1 Jumlah Kawasan yang dikembangkan | 4 | 29,600 | 4 | 46,100 | 4 | 47,500 | 4 | 71,500 | 4 | 1,126,000 | 4 | 1,126,000 | 4 | 1,126,000 | 1,126,000 | |
| | 4 | Urusan Kebudayaan : Meningkatkan interaksi dan komunikasi budaya dan seniman, dan antara budayawan dan seniman dengan masyarakat | Program Peningkatan Perekonomian Pelaku Kebudayaan dan Keterlibatan | 2 Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan | 2,239,224 | 2,463,146 | 2,709,461 | Pengunjung | 2,980,407 | Pengunjung | 3,278,448 | Pengunjung | 3,606,293 | Pengunjung | 15.037.755 | Pengunjung | 15.037.755 | Pengunjung | 15.037.755 | Pengunjung |
| | 5 | Urusan kebudayaan : Meningkatkan interaksi dan komunikasi budaya dan seniman, dan antara budayawan dan seniman dengan masyarakat | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan | 2 Jumlah temu budaya | 3 | 5 | 1,500 | 10 | 30,000 | 15 | 4,500 | 17 | 5,100 | 20 | 6,000 | 20 | 6,000 | 67 | 6,000 | 4,500 pelaku kebudayaan |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | | | | | |
|----|----------|----------------|---------|-----------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | 2014 | Rp (Juta) | Target | 2015 | Rp (Juta) | Target | 2016 | Rp (Juta) | Target | 2017 | Rp (Juta) | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | Target | Rp (Juta) | Target | 2014 | Rp (Juta) | Target | 2015 | Rp (Juta) | Target | 2016 | Rp (Juta) | Target | 2017 | Rp (Juta) | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 10 | 20,000 | 10 | 20,000 | 10 | 20,000 | 10 | 20,000 | 10 | 20,000 | 10 | 20,000 | 10 | 20,000 | 60 |
| | | | | | | 6 Lokasi | 11 lokasi | 105,000 | 16 lokasi | 150,000 | 21 lokasi | 150,000 | 26 lokasi | 150,000 | 31 lokasi | 150,000 | 31 lokasi | 150,000 | 31 lokasi | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 3 Jenis pendukung dan bantuan seni budaya yang hampir punah dan 3 Jenis penegangan seni budaya betawi | | | | | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 1 Jumlah perlidungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif | | | | | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 1 Jumlah penyelenggaraan kegiatan kebudayaan tingkat nasional di jakarta | | | | | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 12 Lokasi Pusat Kebudayaan Seribu | 21 | 52,500 | 30 | 75,000 | 40 | 10,000 | 50 | 12,500 | 61 | 150,000 | 61 | 150,000 | 61 lokasi pusat kebudayaan | |
| | | | | | | 1 Jumlah pemanfaatan kebudayaan di 5 (lima) wilayah Seribu | | | | | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 4 | 29,600 | 4 | 46,100 | 4 | 47,500 | 4 | 71,500 | 4 | 1,126,000 | 4 | 1,126,000 | 4 | 1,126,000 | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 2,239,224 | 2,463,146 | 2,709,461 | Pengunjung | 2,980,407 | Pengunjung | 3,278,448 | Pengunjung | 3,606,293 | Pengunjung | 15.037.755 | Pengunjung | 15.037.755 | Pengunjung | KONDISI AKHIR 2017 |
| | | | | | | 660 | 3,300 | 690 | 3,450 | 780 | 3,900 | 870 | 4,350 | 900 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | KONDISI AKHIR 2017 |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------|---|-----------|------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | | | | |
| 50 | Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta | 1 Urusan Kebudayaan : Menata fisik lingkungan kawasan Kota lla Jakarta antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan | 1 Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1 | 0 | 1,18% | 29,600 | 8,74% | 266,400 | 24,27% | 740,000 | 27,18% | 828,800 | 38,83% | 1,184,000 | 100% |
| | | | 2 Urusan Kebudayaan : Melakukan kerjasama dengan pemilik bangunan/gedung, dan pemberian dan dalam pelstrian dan pengembangan kota tua sebagai destinasi wisata dan benda cagar budaya | 2 Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,500 | 5 | 2,500 | 8 | 4,000 | 9 | 4,500 |
| 51 | Penataan bangunan dan gedung pemerintah yang bernuansa budaya Betawi | 1 Urusan Perumahan Rakyat : Menata gedung-gedung pemerintah yang bernuansa budaya betawi | Program Pemeliharaan gedung Pemda | 1 Tertata dan terpelihara Gedung Pemda | 2 Lokasi | 15,000 | 2 Lokasi | 200,000 | 2 Lokasi | 200,000 | 2 Lokasi | 200,000 | 1 Lokasi | 50,000 | 50,000 | Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa Betawi |
| | | 2 Urusan Perumahan Rakyat : Membangun Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat | Program Pembangunan gedung Pemda | 1 Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat | DED | 1,500 | 1 Lokasi | 15,000 | 1 Lokasi | 50,000 | 1 Lokasi | 50,000 | 1 Lokasi | 15,000 | 15,000 | 1 Mesjid Raya |
| 52 | Penyelenggaraan event-event kebudayaan | 3 Urusan Perumahan Rakyat : Menerapkan aturan bangunan/gedung bernuansa budaya betawi antara lain melalui penyusunan peraturan perundang- undangan guna mendukung pelestarian bangunan yang bernuansa budaya betawi | Program Penyediaan Informasi Perumahan, Perkumpulan dan Gedung Pemda | 1 Terusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi | Kajian | 500 | Pergub | 200 | Sosialisasi | 100 | | | | | Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi | |
| | | 1 Urusan Kebudayaan & Pariwisata : Menyelenggarakan karnaval dan festival budaya antara lain melalui peningkatan jumlah event karnaval di lima wilayah | Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan | 1 Jumlah Event seni budaya yang diselenggarakan | 20 | 3,850 | 21 | 4,620 | 22 | 5,540 | 23 | 6,650 | 24 | 7,985 | 110 event kegiatan seni budaya nasional | |
| 53 | Peningkatan kapasitas sanggar-sanggar budaya dan kesenian | 2 Urusan Kebudayaan : Menyelenggarakan even-even budaya betawi secara reguler antara lain melalui peningkatan frekuensi event budaya betawi pada ruang publik secara periodik | Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan | 1 Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Jakarta (Wisman / Wismar) | 2,125,513 / 28,880,000 | 2,300,000 / 31,200,000 | | 2,500,000 / 33,600,000 | | 2,750,000 / 36,000,000 | | 3,000,000 / 39,600,000 | | 3,200,000 / 42,000,000 | 13.750.000 / 182.400.000 | |
| | | 1 Urusan Kebudayaan : Melakukan pembinaan aktivitas sanggar budaya antara lain melalui Peningkatan aktivitas dan eksistensi sanggar budaya | Program Peningkatan Pelaku Kebudayaan | 1 Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan | 628 event | 13,000 | 688 | 14,300 | 757 | 15,730 | 832 | 17,300 | 915 | 19,000 | 3820 | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | | |
| 58 | Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam meningkatkan ketertiban dan keterbitan kota | Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri : Meningkatkan kesadaran berperilaku budaya yang tertib, disiplin, ramah, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan keterbitan nota | Program Penguatan Hubungan Kelembagaan | 1 Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan | 50 Sekolah | 50 Sekolah | 50 Sekolah | 50 Sekolah | 50 Sekolah | 50 Sekolah | 50 Sekolah | 50 Sekolah | 300 Sekolah | |
| | | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 1 Meningkatnya partisipasi dalam pemilu dan Pemilu Gub/Wagub | Pemilu legislatif dan pilpres 65,67%, Pemilu Gub/Wagub 66,71% | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | Pemilu legislatif dan pilpres 70,67% | |
| | | | Program Penguatan Hubungan Kelembagaan | 2 Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak pilih memperoleh informasi penyelenggaraan Pemilu | 7.934.061 pemilu | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | 5% dari data Dp4 (fokus pada pemilu pemula) | Pemilu legislatif dan pilpres 70,67% | |
| | | | Program Penguatan Hubungan Kelembagaan | 1 Jumlah Lembaga-kemasya-rakaatan yang terdaftar dan mandiri | 370 Ormas dan 638 LSM | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 30 Ormas dan 125 LSM yang mandiri dari jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar | |
| | | | Program Penguatan Hubungan Kelembagaan | 2 Cakupan fasilitasi partai mendapatkan kuota kursi di legislatif | 10 Partai Politik difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politi yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | |
| | | | Program Penguatan Hubungan Kelembagaan | 3 Potensi konflik di kalangan masyarakat | 25 Konflik | 22 Konflik | 13.650 | 19 Konflik | 13.172 | 16 Konflik | 13.825 | 13 Konflik | 14.511 | 10 Konflik |
| | | | Program Peningkatan Peran Zerta Masyarakat Dalam Bidang Keterlibatan Umum, Kelembagaan dan Perlindungan Masyarakat | 1 Terlaksanaya Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | 60% | 1.100 | 100% | 1.750 | 100% | 2.000 | 100% | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | Program Peningkatan Peran Zerta Masyarakat Dalam Bidang Keterlibatan Umum, Kelembagaan dan Perlindungan Masyarakat | 2 Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terdaftar | 500 orang | 700 orang | 750 orang | 700 orang | 700 orang |
| | | | Urusan Komunikasi dan Informatica : Melaksanakan Penguatan kelembagaan LPSE | 1 Meningkatkan kerjasama dalam menjaga keterbitan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keterbitan dan ketentranan kota | Daerah : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keterbitan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keterbitan dan ketentranan kota | 60% | 100% | 1.100 | 100% | 1.750 | 100% | 2.000 | 100% | 2.000 |
| | | | Urusan Otomomi | 3 Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri : Meningkatkan kerjasama dalam menjaga keterbitan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keterbitan dan ketentranan kota | Peran Zerta Masyarakat Dalam Bidang Keterlibatan Umum, Kelembagaan dan Perlindungan Masyarakat | 60% | 100% | 1.100 | 100% | 1.750 | 100% | 2.000 | 100% | 2.000 |
| 59 | Pengembangan kelengkapan pemerintahan yang efisien dan efektif | | | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANANAN | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|----------|----------------|---|--|--|--|---|---------------|---|---------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | 2013 | Target | Rp (Juta) | 2014 | Target | Rp (Juta) | 2015 | |
| | | | 2 Urusan Komunikasi dan Informatica : Melaksanakan Penguatan kelengkapan dan informasi antara lain melalui CCTV di semua lokasi pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintah | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 Jumlah titik CCTV yang beroperasi di kantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK | 0 | 42 Kecamatan, 42 Puskesmas, 5 kecamatan, 5 RSUD 6 (Bilikota dan kantor walkota) | 261 Kecamatan | 261 Kecamatan | 292 Kecamatan | 292 Kecamatan | 292 Kecamatan | 89 SMU dan SMK negeri, BLK |
| | | | 3 Urusan Otomoni Daerah : Menata kembali bagian pemerintah daerah yang efektif dan efisien | Program Penataan Kelembagaan, Ketrakalaan dan SDM Aparatur | 1 Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta | 1.000 | Perda Organisasi Perangkat Daerah | 1.000 | Perda Organisasi Perangkat Daerah | 1.000 | Perda Organisasi Perangkat Daerah | 1.000 | Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah |
| | | | 1 Urusan Otomoni Daerah : Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan tata aksema yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi | Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 2 Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan SDM Aparatur Publik | 0 | Perda Pelayanan terpadu 1 pintu | 0 | Perda Pelayanan terpadu 1 pintu | 0 | Perda Pelayanan terpadu 1 pintu | 0 | Evaluasi Pelayanan terpadu |
| | | | 2 Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel | 1 Terpenyuluhan SDM melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) jabatan | 3 Tertatainya peringkat jabatan, kelas harga abatan | 0 | Evaluasi Jabatan | 0 | Evaluasi Jabatan | 0 | Evaluasi Jabatan | 0 | |
| | | | 1 Pengembangan keuangan yang transparan dan akuntabel | 1 Terpenyuluhan SDM melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) jabatan | 1 Terpenyuluhan SDM melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) jabatan | 0 | Sistem informasi perencanaan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | 0 | Sistem informasi perencanaan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | 0 | Sistem informasi perencanaan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | 0 | Pengembangan sistem informasi perencanaan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah |
| | | | 2 Unsur Otomoni Daerah : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pemungutan pajak Daerah antara lain melalui penerapan online system pajak daerah | 1 Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah | 1 Jumlah wajib pajak yang transaksi dapat dimonitor secara online | 800 | 3.350 | 800 | 3.350 | 6.250 | 9.400 | 13.150 | 14.355 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
|----|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | |
| 3 | Urusan Penanaman Modal :Meningkatkan kontribusi penerimaan BUMD antara lain melalui Pengelolaan BUMD dengan peningkatan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD dan dan penerapan Reward and Punishment terhadap Manajemen BUMD serta divestasi atau likuidasi terhadap perusahaan daerah yang belum membawa kesehatannya. | Program Peningkatan Kinerja BUMD | 1 Jumlah setoran PAD dari BUMD | 1% dari PAD | 1% dari PAD | 1% dari PAD | 1% dari PAD | 1% dari PAD | 1% dari PAD | 2% dari PAD | 2% dari PAD | 3% dari PAD | 3% dari PAD |
| 4 | Urusan Penanaman Moda : Meningkatkan investasi BUMD yang berkuatkuasa dan sejuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip good governance | Program Peningkatan Investasi | 1 Peningkatan realisasi PMDN dan PMDN | PMA : Rp. 45 Triliun PMDN: Rp. 9,84 Triliun | PMA : Rp. 48,48 Triliun PMDN: Rp. 10,59 Triliun | PMA : Rp. 52,09 Triliun PMDN: Rp. 11,38 Triliun | PMA : Rp. 55,62 Triliun PMDN: Rp. 12,15 Triliun | PMA : Rp. 59,57 Triliun PMDN: Rp. 13,02 Triliun | PMA : Rp. 63,94 Triliun PMDN: Rp. 13,97 Triliun | PMA : Rp. 63,94 Triliun PMDN: Rp. 13,97 Triliun | PMA : Rp. 63,94 Triliun PMDN: Rp. 13,97 Triliun | PMA : Rp. 63,94 Triliun PMDN: Rp. 13,97 Triliun | |
| 5 | Urusan Perindustrian : Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk industri dengan tetap mempertimbangkan aspek pelastarian lingkungan dan Peningkatan pelatihan SDM yang komprehensif dan berkualitas guna mewujudkan industri kreatif dan kompetitif | Program Peningkatan kualitas produk industri | 1 Terfasilitasnya produk industri yang memenuhi standar | 300 Produk berstandar standar | 10.000 | 12 | 7.000 | 20 | 8.000 | 25 | 10.000 | 30 | 14.000 |
| 62 | Peningkatan kapasitas apparatur Pemerintahan yang berkelayutan | 1 Urusan Otonomi Daerah : Meningkatkan kompetensi SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan | 1 Jumlah pegawai | 160 Orang | 200 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 297 Produk |
| 63 | Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengembangan sumberdaya manusia | 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan politis dan demokrasi | Program Peningkatan Politik Masyarakat | 1 Meningkatnya partisipasi dan mutasi pegawai secara seleksi program tugas belajar | Uji coba sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) | Implementasi dan evaluasi sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) | Pemilu legislatif dan pilpres 70,67% | Pemilu Gub/Wagub | Pemilu Gub/Wagub 66,71% | Kepala Puskesmas | Lurah/Camat dan Eselon tertentu | Eselon tertentu | Lurah, Camat dan Eselon tertentu |
| 64 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan peran partai politik dalam pembangunan politik dan demokrasi | 1 Urusan Otonomi Daerah : Melaksanakan lelang jabatan | Program Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatatur | 1 tersedianya sistem promosi dan mutasi pegawai secara open bidding | Pemilu legislatif dan pilpres 65,67%, Pemilu Gub/Wagub | Eselon II tertentu | Pemilu legislatif dan pilpres 70,67% | Pemilu Gub/Wagub 66,71% | Pemilu Gub/Wagub 71,71% | Pemilu Gub/Wagub 71,71% | Pemilu Gub/Wagub 71,71% | Pemilu Gub/Wagub 71,71% | Pemilu Gub/Wagub 71,71% |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | |
| 65 | Peningkatan kapasitas dan peran partai politik kepentingan dalam pekerjaan, pelaksanaan dan pengabdian pembangunan | 1 Melakukan pembinaan terhadap partai politik | Program Penguatan Hubungan Kemitraan | 1 Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif | 10 Partai Politik difasilitasi | 10 Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi | 100% Partai Politik yang memperoleh Kuota Legislatif yang difasilitasi |
| 66 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan peran partai politik dalam pembangunan politik dan demokrasi | 1 Urusan Perencanaan Pembangunan : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan antara lain melalui proses musrenbang dan Pelaksanaan rembug warga. | Program Pengelolaan Politik dan Kinerja Aparatur | 1 Presentasi Aspirasi masyarakat yang direpson dari berbagai saturan media | 17,91% | 18% | 26% | 34% | 42% | 42% | 50% | 50% | 50% |
| 67 | Pengembangan sistem reward and punishment dalam pengembangan sumberdaya manusia | 1 Urusan Komunikasi dan Informasi : menyediakan informasi publik | Program Komunikasi dan Pengembangan Publik | 1 Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direpson dari berbagai saturan media | 3,3% Aspirasi yang terespon | 44% | 1.500 | 50% | 1.500 | 70% | 1.500 | 72% | 1.500 |
| 68 | Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas) | 1 Urusan Otonomi Daerah : Menyelenggarakan pelayanan prima di Kelurahan dan Kecamatan | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan | 1 Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial | |
| 69 | Peningkatan kapasitas apparatur sebagai garda tedi dalam pelayanan | 1 Urusan Otonomi Daerah : melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur pelayanan publik antara lain melalui pendidikan dan pelatihan karakter pelayanan publik | Program Pendidikan dan Pelatihan | 1 Integritas pelayanan publik | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 | 9 |
| 70 | Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik | 1 Urusan Penanaman Modal :Membangun jalinan komunikasi perjalanan investasi secara online | Program Pelayanan Penanaman Modal | 1 Persentase pelayanan perijinan/non perijinan yang tepat waktu | 40% | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | | |
|----|---|--|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | Rp (Juta) | Target | | |
| 2 | Urusan Otonomi Daerah :Menyederhana-kan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Program Penataan dan Pengembangan Keterakasaan Kota/Kabupaten | 1 Jumlah jenis Perizinan yang dilayani | 74 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 74 jenis | 1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu 3) >10.000 pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan 100% | |
| 3 | Urusan Otonomi Daerah :Menerapkan sistem informasi pelayanan publik | | 2 Berfungsi nya sistem informasi pelayanan publik di PTSP | 1) Sistem laringan Lokal 2) Masih bersifat kantor pos 3) 3.017 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 73/73% | | | | | | | | | | |
| 71 | Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi sehurst golongan masyarakat | Urusan Pendidikan : Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat antara lain melalui Pemberian Biaya Operasional Biaya Operasional (BOB) dan Biaya Operasional Buku (BOB) bagi peserta didik di sekolah negeri dan swasta pemberian bantuan personal Siswa Miskin (BPSM) antara lain melalui Pemberian KARTU JAKARTA PINTAR | 1 Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun | Percentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK | SD 109.83% SMP 110.62% SMA dan SMK 87.25% | 110.50% 111.12% 90.00% | 111.20% 112.20% 92.50% | 111.90% 113.30% 95.00% | 112.70% 114.40% 96.00% | 113.4% 115.5% 97.00% | 113.40% 115.50% 0.97 | 113.40% 115.50% 0.97 | | |
| 71 | Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi sehurst golongan masyarakat | Urusan Pendidikan : Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat antara lain melalui Pemberian KARTU JAKARTA PINTAR | 2 Percentase deserta didik putus sekolah | SD SMP SMA dan SMK | 0.03 0.22 0.77 | 0.02 0.16 0.55 | 0.02 0.11 0.41 | 0.02 0.05 0.27 | 0.01 0.01 0.14 | 0.01 0.00 0.05 | 0.00 0.00 0.05 | 0.00 0.00 0.05 | | |
| 3 | Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi sehurst golongan masyarakat | 3 Persentase Peserta didik penerima BOB (negeri dan swasta) | SMA/MA/ SMK Negeri dan Swasta serta SMP/ MTs Negeri | 89.2 | 90.55 | 2,603,000 | 93,25 | 2,910,000 | 95,95 | 3,218,000 | 98,65 | 3,525,000 | 100 | 3,679,000 100 |
| 4 | Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi sehurst golongan masyarakat | 4 Cakupan sekolah peserta didik penerima Bantuan Buku | SMA/MA/ SMK Negeri dan Swasta serta SMP/ MTs Negeri | 3.84 | 100 | 804,635 | 100 | 805,563 | 100 | 805,148 | 100 | 779,818 | 100 | 789,389 100 |
| 5 | Peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi sehurst golongan masyarakat | 5 Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar | | 3.84 | 100 | 804,635 | 100 | 805,563 | 100 | 805,148 | 100 | 779,818 | 100 | 789,389 100 |
| 2 | Urusan Pendidikan : Meningkatkan Penuhanan Hak-Hak Anak di Sekolah | Program Peningkatan Mutu Pendidikan | 1 Presentase Jumlah sekolah ramah anak | 0 | 10% | 300 | 20% | 300 | 30% | 300 | 40% | 300 | 50% | 300 50% |
| 3 | Urusan Pendidikan : Meningkatkan Penuhanan Hak-Hak Anak di Sekolah | | 2 Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejuruan | | 231 | 500 | 1,000 | 5,000 | 1,500 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 2,500 | 5,000 2,500 |
| 4 | Urusan Pendidikan : Meningkatkan Penuhanan Hak-Hak Anak di Sekolah | | 3 Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | | 1,299 | 1,400 | 5,000 | 1,600 | 5,000 | 1,800 | 5,000 | 2,200 | 5,000 | 2,500 2,500 |
| | | | 4 Jumlah kejadian tawuran pelajar | | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|---|--|---|--|-------------------|---|-----------|-----------|------|-----------|--------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | 2014 | Rp (Juta) | Target | 2015 | Rp (Juta) | |
| 73 | Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DKI Jakarta | 1 Urusah Kesehatan : Menerapkan sistem jaminan pembayaran menyeluruh (total coverage) bagi masyarakat antara lain melalui Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga miskin dan rentan atau bina melalui pemberlakuan KARTU JAKARTA SEHAT | Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah | 1 Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber-KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan | 100% | 1,500,000 | 100% | 1,500,000 | 100% | 1,500,000 | 100% | 1,500,000 | 100% | 1,500,000 |
| 2 | Urusan Kesehatan : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional/kumuh susun | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 1 Jumlah Pasar yang menyediakan perayaan kesehatan | 0 | 5 | 4,177 | 10 | 8,110 | 15 | 12,044 | 20 | 15,978 | 25 | 19,912 |
| 3 | Urusan Kesehatan : Mengembangkan Puskesmas Rawat Inap | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 1 Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan | 0 | 2 | 1,671 | 7 | 5,750 | 12 | 9,684 | 18 | 15,240 | 24 | 19,960 |
| 4 | Urusan Kesehatan : Menambah Kapasitas Tempat Tidur kelas Tiga pada RSUD. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 1 Persentase Kapastitas tempat tidur kelas Tiga (3) di RSUD | 72 | 73 | 207,600 | 74 | 566,700 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Urusan Kesehatan : Membentuk dan mengembangkan Kelurahan siaga aktif | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | 1 Persentase Kelurahan yang mencapai STBM | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Urusan Kesehatan : menerapkan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Keturahan | Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan | 1 Jumlah Kelurahan yang memiliki STBM | 2 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Urusan Kesehatan : Meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) | Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan | 1 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | 90% | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |

| NO | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | KONDISI AWAL 2012 | TARGET KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | KONDISI AKHIR 2017 | |
|----|--|--|---|------------------------------|-------------------|---|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------|--------|
| | | | | | | 2013 | Rp (Juta) | Target | 2014 | Rp (Juta) | Target | 2015 | Rp (Juta) | |
| 74 | Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan urbanasi | 1 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : KB Gratis | Program Keluarga Berencana | 1 Total Fertility Rate (TFR) | 2,3 | 2,3 | 10,000 | 2,3 | 10,000 | 2,2 | 10,000 | 2,2 | 10,000 | 2,1 |
| 2 | | | 2 Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru | 364,916 | 366,785 | 12,896 | 403,030 | 15,476 | 439,275 | 18,571 | 475,520 | 22,285 | 511,765 | 26,741 |
| 3 | | | 3 Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB Aktif | 1,041,081 | 1,061,043 | 7,605 | 1,102,686 | 9,004 | 1,144,329 | 10,671 | 1,181,229 | 12,658 | 1,185,972 | 14,996 |
| 2 | Urusan Kependudukan : Membuat kajian pola mobilitas dan migrasi penduduk kedalam dan keluar Jakarta | Program Keharusan dan Pemberdayaan Keluarga | 1 Tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk | 0 | 0 | 1 kajian | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Urusan Sosial : Melakukan studi dan kajian demografi dan sosiologis tentang kelompok PMKS (gelandangan, pengemis, dan tuna wina) | Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial | 1 Jumlah studi dokumentasi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

TABEL 8.1
Indikasi Rencana
Program Provinsi
DKI Jakarta

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 1 | PENDIDIKAN | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1 Persentase APK PAUD | 71% | 76% | 82% | 87% | 92% | 95% | 95% |
| 2 | | Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun | 1 Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK | | | | | | | 95% |
| | | | SD | 109.83% | 110.5% | 111.2% | 111.9% | 112.7% | 113.4% | 113.4% |
| | | | SMP | 110.62% | 111.12% | 112.2% | 113.3% | 114.4% | 115.5% | 115.5% |
| | | | SMA dan SMK | 87.25% | 90.00% | 92.5% | 95.00% | 96.00% | 97.00% | 97.00% |
| | | | 2 Persentase peserta didik putus sekolah | | | | | | | |
| | | | SD | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SMP | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | SMA dan SMK | 0.77 | 0.55 | 0.41 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 3 Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta) | 89,2 | 90,55 | 93,25 | 95,95 | 98,65 | 100 | 100 |
| | | | 4 Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku | SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta serta SMP/MTs Negeri | SMP/MTs Swasta | SD/Mi Negeri | SD/Mi Swasta | SMA/MA/SMK Negeri | SMA/MA/SMK Swasta | Seluruh sekolah pada semua jenjang |
| | | | 5 Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar | 3.84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1 Persentase Angka Buta Akara | 0,65 | 0,50 | 0,40 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| | | | 2 Persentase Lembaga Keterampilan Non Formal dan Informal yang dibina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 1 Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi | 176 | 206 | 236 | 266 | 296 | 326 | 326 |
| | | | TK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | SD | 123 | 150 | 200 | 300 | 400 | 534 | 534 |
| | | | SMP | 34 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 220 |
| | | | SMA/SMK | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | | | 2 Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 1 Persentase Kelulusan | | | | | | | |
| | | | SD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | SMP | 99,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | SMA | 99,65 | 99,7 | 99,85 | 99,95 | 100 | 100 | 100 |
| | | | SMK | 99,92 | 99,94 | 99,98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 2 Rata-rata Nilai UN | | | | | | | |
| | | | SD | 7,43 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8 |
| | | | SMP | 7,65 | 7,7 | 7,8 | 7,95 | 7,95 | 8 | 8 |
| | | | SMA | 7,23 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8 |
| | | | SMK | 7,78 | 7,8 | 7,85 | 7,9 | 7,95 | 8 | 8 |
| | | | 3 Presentase Jumlah sekolah ramah anak | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% |
| | | | 4 Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran | 231 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| | | | 5 Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 1,299 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 2,500 |
| | | | 6 Jumlah kejadian tawuran pelajar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan | | | | | | | |
| | | | SD | | | | | | | |
| | | | SMP | | | | | | | |
| | | | SMA | | | | | | | |
| | | | SMK | | | | | | | |
| | | | 2 Rata-rata Nilai UN | | | | | | | |
| | | | SD | | | | | | | |
| | | | SMP | | | | | | | |
| | | | SMA | | | | | | | |
| | | | SMK | | | | | | | |
| | | | 3 Presentase Jumlah sekolah ramah anak | | | | | | | |
| | | | 4 Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran | | | | | | | |
| | | | 5 Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | | | | | | | |
| | | | 6 Jumlah kejadian tawuran pelajar | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|-----------|---|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 1 | KESEHATAN | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 7 Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang dititikberatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 8 Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI | 0: 90: 5 : 5 | 45: 45: 5 : 5 | 45: 45: 5 : 5 | 45: 45: 5 : 5 | 45: 45: 5 : 5 | 45: 45: 5 : 5 | 45: 45: 5 : 5 |
| 3 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 9 Persentase Guru/ pendidik yang memenuhi standar kompetensi | 80,53 % (27.716 orang) | 87,53% | 94,50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 51 Sertifikasi | 81 % (41.168 orang) | 86,10% | 91,20% | 95,25% | 98,35% | 100% | 100% |
| 5 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 1 Jumlah tenaga pendidikan Swasta Penerima Hibah | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 2 Jumlah sekolah yang dibangun | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | | 3 Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 |
| | | | 7 Program Peningkatan tata kelola layanan pendidikan | 1 Persentase sekolah yang melaksanakan Mahamanen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPBSS) | 90% | 93% | 95% | 97% | 98% | 100% |
| | | | 2 Umur Harapan Hidup (UHH) | 76,20 | 76,40 | 76,50 | 76,60 | 76,70 | 76,80 | 76,80 |
| | | | 3 Angka Kematiian Ibu (AKI) per 100.000 | 64,33 | 55 | 55 | 60% | 65% | 70% | 70% |
| | | | 4 Angka Kematiian Bayi (AKB) (per 1000) | 7,53 | 7,50 | 7,40 | 7,30 | 7,20 | 7,10 | 7,10 |
| | | | 5 Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| | | | 6 Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan | 0 | 2 | 7 | 12 | 18 | 24 | 24 |
| | | | 7 Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin | 19 | 27 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | | | 8 Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 80 | 80% |
| | | | 9 Angka kesaktian penyakit DBD (per 100.000) | 68,47 | 65,00 | 62,00 | 59,00 | 56,00 | 53,00 | 53,00 |
| | | | 10 Persentase Penemuan kasus baru TB paru RTA Positif | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 |
| | | | 11 Persentase Cakupan akses layanan kesehatan | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| | | | 12 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | 21,67% | 90% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% |
| | | | 13 Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 14 Jumlah Puskesmas yang melaksukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) | 0 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 |
| | | | 15 Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 2 | 6 | 12 | 30 | 50 | 80 | 80 |
| | | | 16 Persentase obat Generik yang digunakan oleh puskesmas | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|----------------------|----------------|--|--|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| | | | 2 Persentase Obat Rasional yang digunakan pada layanan Kesehatan Pemerintah | 40 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | | 80 |
| | | | 3 Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran | 0 | 10 item | 15 item | 15 item | 15 item | 15 item | | 15 item |
| 7 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 1 Jumlah SDM Kesehatan non PNNS yang memiliki kompetensi | 0 | 250 orang | 500 orang | 750 orang | 1000 orang | 1250 orang | 1250 orang | | 1250 orang |
| | | 2 Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | | 100 |
| 8 | Program Anisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana | 1 Respon time penanganan kesehatan dalam peranggulangan bencana | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | 15 menit | | 15 menit |
| | Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan | 1 Jumlah flyover yang terbangun | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 37 |
| | | 2 Jumlah underpass terbangun | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | | | | 20 |
| | | 3 Luas jalan tembus dan Missing link yang terbangun | 25.502 m ² | 19.200 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | | 211.200 m ² |
| | | 4 Jumlah jembatan yang terbangun | 287 | - | | | | | | | 296 jembatan |
| | | 5 Luas jalan yang terbangun (m ²) dalam kota | 48.311.359,97 | 8.150 | 109.200 | 253.000 | 636.600 | 732.500 | 72.000 | | 50.050.809,97 |
| | | 6 Luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota | 0 | - | 95.600 | 95.600 | 72.000 | 72.000 | | | 335.800 m ² |
| | | 7 Panjangan trotoar yang terbangun | 540.336 m | 23.994 | 25.293 | 27.823 | 30.605 | 33.666 | | | 680.717 m ² |
| | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1 Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | | | 5 wilayah |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum | 1 Peningkatan drainase di pusat kota | 0 | 3.000 m ³ | 5.000 m ³ | 5.000 m ³ | 5.000 m ³ | 5.000 m ³ | | | 23.000 m |
| | | 2 Jumlah alat berat yang tersedia | 87 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 134 |
| | | 3 Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 30 |
| | | 4 Jumlah TP5 ranah lingkungan yang tersedia | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 153 |
| | | 5 Jumlah sarungan sampah otomatis yang tersedia | 23 unit (17 unit milik Pemda DKI 6 unit milik Kemen PUPR) | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | | | 28 unit |
| | Program Pengembangan Sistem Drainase | 1 Panjang kali/sungai yang dinormalisasi | 3.200 | 0 | 6.438 | 11.533 | 25.206 | 16.843 | | | 63.220 |
| | | 2 Jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang diketuk | 0 | 1 | | | 5 | | | | 6 |
| | | 3 Terlaksanya penggerukan sungai | - | 2750 m' | 9200 m' | 5100 m' | 7880 m' | 6740 m' | | | 31.670 m' |
| | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya | 1 Persentase Cakupan perlayanan air minum perpipaan | 60,59% | 67,06% | 73,53% | 80% | 82,60% | 85% | | | 85% |
| | | 2 Pembangunan pipa transmisi air minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang | 0 | 30% | 60% | 100% | | | | | 100% |
| | | 3 Terlaksanya konservasi air tanah | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 9 |
| | | 4 Jumlah waduk dan situ yang dikeluarkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
| | | 5 Jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota Jakarta | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 17 |
| | | 6 Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan Terowongan Bawah Tanah Multi fungsi | | | | | | | | | 123 |
| | Program Pemeliharaan Sarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase | 1 Jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 21 |
| | | 2 terlaksanya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan kelengkapannya | 5 wilayah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 wilayah kota adm (6/27 pompa, 4/2 pintu air) |
| | | 3 terpeliharaanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak terpedulsi | 5 wilayah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 wilayah kota adm |
| | | 4 Terwujudnya Titik Gengangan Jalan Arteri/Kolektor | 110 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 123 |
| | Program Peningkatan Sarana Jaringan Utilitas | 1 Terlaksanya Inventarisasi Jaringan Utilitas | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | | | 5 wilayah |
| | | 2 Terlaksanya perlayan permohonan MP2, IPPIU, rekomendasi PLB dan data perijinan | 211 ijin | 175 ijin | 175 ijin | 175 ijin | 175 ijin | 175 ijin | | | 1086 ijin |
| | | 3 Perbaikan dan pembaruan jaringan ducting utilitas | 0 | 1.350 m' | 6.600 m' | 4.100 m' | 4.100 m' | 6.100 m' | | | 22.150 m' |
| | Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 1 Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui TTF | 540 ton/hari | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1 | | | 1 |
| | | 2 Persestase sampah dalam kota yang dapat terangani secara tetap waktu | 0.88 | | | | | | | | |
| | | 3 Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUB dan Bidang Jalan | 92.848 m ² | 555.016 | 1.126.293 | 748.430 | 508.565 | 64.611 | | | 3.096.000 m ² |
| | Program Pembelahan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUB dan Bidang Jalan | 1 Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUB dan Bidang Jalan | 17.066 m ² | 7.728 | 75.008 | 59.681 | 47.427 | 44.431 | | | 315.341 m ² |
| | | 2 Lokasi yang dibebaskan untuk TPS | 0 | 2 | 16 | 22 | 15 | 15 | | | 70 |
| | Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber | 1 Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat | 7% | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% | | | 15% |
| | Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah | 1 Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat Zona 0 (4%) dan seluruh Zona 1 | 17.066 m ² | UKL UPL ground breaking Zona 1 dan pembangunan AMDAL Zona 1 | Pembangunan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan perusinan AMDAL Zona 6 | Dilanjutnya pembangunan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan perusinan AMDAL Zona 6 | Konstruksi perpipaan Zona 1 lanjutan dan dimulainya konstruksi perpipaan Zona 6 | | | | |
| | | 2 Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun | 0 | 1 | 1 | 71 | 21 | 3.5 | | | 3.5 |
| | | 3 Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | 11 |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---|---|--|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 8 | PERKERAJAN UMMJ | Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan | 3 Luas bahan untuk pembangunan fisik kali Ciliwung (m ²) | 0 | 97.041 | 177.003 | 254.636 | 127.318 | 0 | | 656.000 m ² |
| | | 4 Panjang sungai di aliran timur yang tertata | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.800 m ² |
| | | 5 Panjang aliran kali Cicendeng yang tertata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% |
| | | 6 Penyelesaian Masterplan dan PNNU Support JCDS/NCID | 0 | 0% | 100% | | | | | | |
| | | 7 Jumlah sistem polder baru yang terbangun | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | | 44 |
| | | 8 Jumlah Sumur Resapan (Injection Well) Waduk yang terbangun | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 21 |
| | | 9 Panjang pengaman pantai yang terbangun | 9.718 m | 300 m | 1.200 m | 1.500 m | 0 | 0 | 0 | | 12.718 m |
| | | 10 Jumlah waduk yang dibangun | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 12 |
| | | 11 Jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota Jakarta | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 17 |
| | | 12 Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan Terowongan Bawah Tanah Multi fungsi | | | | | | | | | |
| | Program Pemeliharaan Sarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase | 1 Jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 21 |
| | | 2 terlaksanya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan kelengkapannya | 5 wilayah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 wilayah kota adm (6/27 pompa, 4/2 pintu air) |
| | | 3 terpeliharaanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak terpedulsi | 5 wilayah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 wilayah kota adm |
| | | 4 Terwujudnya Titik Gengangan Jalan Arteri/Kolektor | 110 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 123 |
| | Program Peningkatan Sarana Jaringan Utilitas | 1 Terlaksanya Inventarisasi Jaringan Utilitas | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | | | 5 wilayah |
| | | 2 Terlaksanya perlayan permohonan MP2, IPPIU, rekomendasi PLB dan data perijinan | 211 ijin | 175 ijin | 175 ijin | 175 ijin | 175 ijin | 175 ijin | | | 1086 ijin |
| | | 3 Perbaikan dan pembaruan jaringan ducting utilitas | 0 | 1.350 m' | 6.600 m'</td | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 14 | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah | 4 Volume penyedotan dan pengolahan limbah, epic tank | 400 m ³ /hari | 500 m ³ /hari | 700 m ³ /hari | 900 m ³ /hari | 1200 m ³ /hari | 1500 m ³ /hari | 1500 m ³ /hari | 1500 m ³ /hari | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 1 | PERUMAHAN RAKYAT | Program Kebijakan Pengembangan Perumahan | 1 Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep Business to Business) | 0% | 0% | 3% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 1 | Tersusunnya prosedur estate management | 1 Terlaksanaanya pembinaaan dan implementasi estate management | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Terlaksanaanya studi dan kajian perumahan, permukiman dan Gedung Penda | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 3 Terlaksanaanya Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Penda | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 4 Terlaksanaanya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Penda | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 5 Terlaksanaanya koordinasi asosiasi usaha perumahan | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 6 Terlaksanaanya pengawasan dan Pengendalian Perumahan, Permukiman dan Gedung Penda | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 7 Terlaksanaanya pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Bidang Perumahan | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 2 | Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman | 1 Terlaksanaanya penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung rumah susun | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 lokasi rusun | 4 lokasi rusun | 1 lokasi rusun | 2 lokasi rusun | 5 lokasi rusun | 6 lokasi rusun | 18 lokasi rusun | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Jumlah unit Rusunawa yang terbangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 3 Tertaranya Kampung Tematik | 0 | 59 Lokasi | 70 Lokasi | 15 Lokasi | 10 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 826 Unit | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 4 Jumlah RW Kumuh yang terata | 126 RW | 78 RW | 68 RW | 63 RW | 57 RW | 57 RW | 57 RW | 392 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung | 1 Terlaksanaanya penataan kampung yang terbangun | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Lokasi Ciliwung | 5 Lokasi | 5 Lokasi | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Tersedaya lahan untuk pembangunan rumah susun | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 lokasi rusun | 4 lokasi rusun | 1 lokasi rusun | 2 lokasi rusun | 5 lokasi rusun | 6 lokasi rusun | 18 lokasi rusun | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 3 Tersedianya Masterplan, DED pembangunan rumah susun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 4 Jumlah unit Rusunawa yang terata | 11801 unit hunian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 4 | Program penyediaan Perumahan Rakyat | 1 Terbangunnya Super Blok Rusunawa | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 lokasi | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Tersedaya lahan untuk pembangunan rumah susun | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 lokasi rusun | 4 lokasi rusun | 1 lokasi rusun | 2 lokasi rusun | 5 lokasi rusun | 6 lokasi rusun | 18 lokasi rusun | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 3 Tersedianya Masterplan, DED pembangunan rumah susun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 4 Jumlah unit Rusunawa yang terata | 2430 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat | 1 Terselisihannya perkerjaan perumahan di PTUN dan PN | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 2 paket dan 1 blok rusun | 12 blok | 22 blok | 11 blok | 12 blok | 12 blok | 12 blok | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Terlaksanaanya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana perumahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 3 Terlaksanaanya peningkatan sarana dan prasarana rumah susun | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 lokasi | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 4 Terlaksanaanya sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 6 | Program Penyelapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun | 1 Terlaksanaanya Pembangunan Perumahan Rakyat | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 2 paket dan 1 blok rusun | 12 blok | 22 blok | 11 blok | 12 blok | 12 blok | 12 blok | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Terlaksanaanya perbaikan dan peningkatan hunian apartemen dan rumah tapak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 3 Terlaksanaanya pembangunan Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 4 Terlaksanaanya keamanan terpadu rumah susun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 5 Tertaranya lantai dasar rumah susun | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| 7 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat | 1 Terselisihannya perkerjaan perumahan di PTUN dan PN | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Terlaksanaanya pemeliharaan dan perawatan rusun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 3 Terlaksanaanya penertiban penghuni rumah susun sewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 4 Terlaksanaanya keamanan terpadu rumah susun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 5 Tertaranya lantai dasar rumah susun | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 4 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 1 | PERUMAHAN RAKYAT | Program Kebijakan Pengembangan Perumahan | 1 Tersusunnya prosedur estate management | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2017 |
| | | 2 Terlaksanaanya pembinaaan dan implementasi estate management | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu | 5 willyah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi Kepul | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 8 | Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN | 1 Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun | 5 lokasi | | | | | | | 5 lokasi% |
| 9 | Program Pembangunan Gedung Penda | 1 Tersediannya Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman, Handal dan Berwawasan Lingkungan | 4 gedung | | | | | | | 10 gedung penda |
| | | 2 Tersediannya DED pembangunan gedung Penda | 3 DED | | | | | | | 11 DED |
| | | 3 Tersediannya Amdal pembangunan gedung Penda | 1 dokumen | | | | | | | 8 dokumen |
| | | 4 Terbangunnya Masjid Raya Bernuansa betawi di Jakarta Barat | 0 | DED | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1 mesjid raya | |
| | | 5 Terlaksananya Pembangunan Gedung Penda | 1 gedung | 2 gedung | 2 gedung | 1 gedung | 2 gedung | 2 gedung | 8 gedung penda | |
| 10 | Program Penelitian dan Gedung Penda | 1 Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | | |
| | | 2 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 3 Terlaksananya Gedung Penda | 2 gedung (jutaan) | | | | | | | Terwujudnya Gedung Penda yang bernuansa Betawi |
| 11 | Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Penda | 1 Terusunya standarisasi teknis bangunan gedung | Kajian | Juklak dan juknis | Pergub | Sosialisasi | | | | dokumen juknis |
| | | 2 Terusunya Standardisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman | | | | | | | | dokumen peraturan |
| | | 3 Terlaksananya penyebutuan informasi program kegiatan perumahan, permukiman dan gedung penda | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 wilayah kota administrasi | |
| | | 4 Tersediannya data perumahan, permukiman dan gedung penda | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | |
| | | 5 Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi | Belum ada pedoman untuk pembangunan Gedung yang bernuansa Betawi | | | | | | | Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi |
| | | 6 Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Penda | Kajian | Juklak Juknis | Pergub | Sosialisasi | | | | dokumen peraturan |
| | | 7 Terpeliharanya sistem perlayanan rumah susun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | 8 Cukupan ketersediaan rumah layak huni. | 5 wilayah kota administrasi | 5 wilayah kota administrasi | 5 wilayah kota administrasi | 5 wilayah kota administrasi | 5 wilayah kota administrasi | 5 wilayah kota administrasi | 5 wilayah kota administrasi | |
| | | 9 Cukupan lingkungan yang sehat dan aman yang ditetapkan dengan 15U. | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 5 Kota Adm dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | |
| | | 5 Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi | Belum ada pedoman untuk pembangunan Gedung yang bernuansa Betawi | | | | | | | |
| 1 | PENATAAN RUANG | 1 Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang | 1 Perda RDTR dan PZ dan 33 Pergub serta 19 Rapergub | 6 Pergub | 5 Pergub | 5 Pergub | 5 Pergub | 5 Pergub | 5 Pergub | 1 Perda dan 78 Pergub |
| | | 2 Jumlah kebijakan pengawas dan penetapan yang ditetapkan | 1 Perda 5 Pergub | 3 Pergub | 2 Pergub | 2 Pergub | 2 Pergub | 2 Pergub | 2 Pergub | 1 Perda, 16 Pergub |
| 2 | Program Perencanaan Ruang | | | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 3 | Program Peningkatan Pelayanan Ketarifanruang | 1 Terselegergaranya pelayanan ketarifanruang sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah utusan penataan ruang | 32 kecamatan, 5 sudin | 0 | 1 Dinas dan 1 Kep. Seribu | 5 kecamatan | 5 kecamatan | 5 kecamatan | 0 | 42 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin |
| | Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan | 1 Persentase pelanggaran bangunan gedung yang diteritik | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | | 2 Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | |
| | | 3 Jumlah bangunan gedung yang dibongkar | 8.684 bangunan | 1060 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 13.744 bangunan |
| | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang | 1 Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan penataan ruang oleh masyarakat. | 0 | 44 Forum RDTR | 72 Forum reguler | 72 Forum reguler | 72 Forum reguler | 72 Forum reguler | 72 | |
| | | 2 Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. | 7 media informasi | 7 media informasi | 7 media informasi | 7 media informasi | 7 media informasi | 7 media informasi | 7 media informasi | |
| | Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang | 1 Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 person |
| | | 2 Cakupan Sistem aplikasi Layanan Keteraktaan Online | 1 wilayah | 0 | 2 wilayah | 3 wilayah | 4 wilayah | 5 wilayah | 5 wilayah | |
| | Program Penberdayaan Komunitas penyelenggara bangunan gedung | 1 Persentase rencana pembangunan gedung yang tulus sidang Tim Ahli | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang | 1 Terlaksananya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini | 44 Kecamatan, 5 Wilayah | | | | | | | 44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin |
| | | 2 Peningkatan sistem online Pengawasan Penerbitan Bangunan | | | | | 1 Dinas | | | |
| 6 | Program Perencanaan Perekonomian | 1 Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 7 | Program Perencanaan Pembangunan | 1 Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tarapaja dan Apatur | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
| 8 | Program Pengembangan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan | 1 Kompetensi SDM perencanaan dan organisasi perencanaan | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | |
| 1 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 1 Persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | 2 Persentase implementasi rencana pembangunan | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 3 | Program Perencanaan Pembangunan Tatapaja dan Apatur | 3 Persentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UkPD | 18% | 18% | 26% | 34% | 42% | 50% | 50% | |
| 4 | Program Pengembangan Kapasitas Perencanaan dan Kualitas Perencanaan | 4 Persentase ketepatan waktu penyampaian dokument LKPJ dan LKJAM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Program Pengembangan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan | 5 Persentase implementasi RPPD, RTRW dan RPJM dalam pembangunan daerah | - | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | |
| 6 | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup | 6 Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup | 80.00% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|-------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 7 | | Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi | 1 Pemanfaatan hasil penelitian daerah | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | | |
| 1 | PERHUBUNGAN | Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan | 1 Jumlah dokumen perencanaan revitalisasi terminal | 0 | 14 dokumen | | | | | 14 dokumen | |
| | | 2 Jumlah Terminal yang direvitalisasi | 0 | 6 Terminal | 9 terminal | | | | | 15 Terminal telah direvitalisasi | |
| | | 3 Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 dokumen perencanaan | 2 lokasi | 2 lokasi | |
| | | 4 Jumlah penumpang busway per hari | 304.799 pnp/hari | 40.000 pnp/hari | 550.000 pnp/hari | 730.000 pnp/hari | 850.000 pnp/hari | 1.000.000 pnp/hari | 1.000.000 pnp/hari | 1.000.000 pnp/hari | |
| | | 5 Persentase Terbangunnya fisik koridor 13 | - | 0.214 | 0.571 | 0.214 | | | | 1 Koridor 13 | |
| | | 6 Persentase Terbangunnya fisik koridor 14 | - | 0 | 0.5 | 0.5 | | | | 1 Koridor 14 | |
| | | 7 Persentase Terbangunnya fisik koridor 15 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | | | 1 Koridor 15 | |
| | | 8 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 13 yang terbangun | - | | 2 dokumen perencanaan | 100% | | | | 100% Koridor 13 | |
| | | 9 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 14 yang terbangun | - | | 2 dokumen perencanaan | | | | | 100% Koridor 14 | |
| | | 10 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 15 yang terbangun | - | | 2 dokumen perencanaan | | | | | 100% Koridor 15 | |
| | | 11 Headway rata-rata | 20 menit | 15 menit | 10 menit | 7 menit | 5 menit | | 3 menit | 3 menit | |
| | | 12 Jumlah Pengadaan Armada Busway | 669 bus (434 SAB) | 275 SAB | 200 AB | 180 AB | | | | 1.289 SAB (Setara Artificial Bus) | |
| | | 13 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta | Raperda PT. Transjakarta | 1 Perda | | | | | | 1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta | |
| | | 14 Jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturasi | 2 trayek | 25 trayek | 25 trayek | 25 trayek | 25 trayek | | 127 trayek | 127 trayek | |
| | | 15 Jumlah angkutan umum yang diimplementakan pembatasan kendaraan ganjil-genap | 0 | 1.000 unit | 1.000 unit | 1.000 unit | 1.000 unit | | 5.000 unit | 5.000 unit | |
| | | 16 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi | 1 Perda | | | | | | 1 Perda | 1 Perda | |
| | | 17 Jumlah rute baru angkutan bus sekolah | 9 rute | 5 rute | 4 rute | 4 rute | 2 rute | | 29 rute | | |
| | | 18 Jumlah armada bus sekolah | 82 bus | 23 bus | 69 bus | 110 bus | 120 bus | | 466 bus | 466 bus | |
| | | 19 Jumlah penumpang angkutan bus sekolah | 10.500 pnp/hari | 14.000 pnp/hari | 20.000 pnp/hari | 35.000 pnp/hari | 50.000 pnp/hari | | 60.000 pnp/hari | 60.000 pnp/hari | |
| | | 20 Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan | 0 | 1 dokumen kajian/ evaluasi | 2 dokumen kajian/ evaluasi | 2 dokumen kajian/ evaluasi | 2 dokumen kajian/ evaluasi | | | 9 dokumen Kajian / Evaluasi | |
| | | 1 Berfungsi-sinyal ITS pada koridor busway | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | Tahap V | Tahap VI | | Tahap VII | ITS Berfungsi pada koridor busway | |
| | | 2 Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online | 764 lokasi parkir off street | | | | | | | 100 % parkir offstreet sudah menerapkan parkir online | |
| | | 3 Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pembatasan pengendalian lalu lintas | Raperda | Perda pemberlakuan pengendalian lalu lintas | Pemasangan alat pemberlakuan pengendalian lalu lintas | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas | Lokasi 3 in 1 diberlakukan pengendalian lalu lintas | |
| | | 4 Jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil-genap | Perda dan Perhub | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas | Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas | Lokasi 3 in 1 menjadi pembatasan genap-ganjil | |
| | | 5 Tersedianya bayangan hukum komprehensif untuk implementasi EHP | UU dan PP | Perda Pembatasan Lalu Lintas/ERP | SOP Pembatasan Lalu Lintas | - | - | - | - | 1 Perda dan 1 SOP | |
| | | 6 Jumlah Kawasan ERP terbangun | - | - | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 3 Kawasan | 3 Kawasan | |
| 2 | | Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan | | | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 3 | | Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan | 7 Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi | - | - | 1 Kawasan | 3 Kawasan |
| 4 | | Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan | 8 Jumlah lokasi jalan yang masih menerapkan parkir on street | 20 Lokasi | 20 Lokasi | 20 Lokasi | 20 Lokasi | 20 Lokasi | 20 Lokasi | 128 Lokasi | |
| 5 | | Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasiskan Rel | 9 Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir on street | 248 ruas | 220 ruas (berkurang 28 ruas) | 200 ruas (berkurang 20 ruas) | 180 ruas (berkurang 20 ruas) | 160 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (berkurang 20 ruas) | 140 ruas (tersisa) | |
| 6 | | Program Peningkatan Transportasi Perjalanan | 10 Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi | - | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | Parkir on street berkurang 20% | |
| 7 | | Program Pembangunan Transportasi Udara | 1 Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-Timur | 0 | 0 | 27.6 KM | 19.7 KM | 16 KM | 15.7 KM | Total jalur Sepeda terbangun sepanjang 86.6 Km | |
| 8 | | Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | 2 Jumlah Kapal penumpang | 5 Kapal | 3 Kapal | 3 Kapal | 2 Kapal | 1 Kapal | 1 Kapal | 24.8 km | |
| 1 | LINGKUNGAN HIDUP | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 3 Jumlah kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta | 261 penumpang | 452 penumpang | 547 penumpang | 643 penumpang | 739 penumpang | 739 penumpang | 739 penumpang | |
| | | 4 Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said dan perigal Rasuna Said - Gatot Soebroto | 1 Jumlah lokasi sarana Perindahan moda yang rencananya akan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas | 5 Lokasi | 8 Lokasi | 7 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 1 Kajian | |
| | | 5 Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan | 2 Jumlah Regulasi Penerbitan Sarana Prasarana Transportasi Udara | - | 1 kajian | - | - | - | - | 1 Kajian | |
| | | 6 | 3 Jumlah gedung parkir yang terbangun di terminal yang terbangun | 2 Lokasi (Ragunan & Pulogebang) | - | 2 Lokasi | 26 Demaga |
| | | 7 | 4 Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Tamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said dan perigal Rasuna Said - Gatot Soebroto | 1 gedung (Menteng) | - | 1 gedung (Gedodok) | 1 gedung (Abang) | 1 gedung (Abang) | 1 gedung (Kalideres) | 1 gedung | 1 Regulasi |
| | | 8 | 5 Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan | 12.000 m | | 12.000 m | | | | | |
| | | 1 | 6 Jumlah titik pantau | 80 titik pantau | 80 titik pantau | 80 titik pantau | 90 titik pantau | 90 titik pantau | 90 titik pantau | 90 titik pantau | |
| | | 7 | 7 Jumlah kasus | 50 kasus | 50 kasus | 50 kasus | 50 kasus | 50 kasus | 50 kasus | 50 kasus | 250 kasus |
| | | 8 | 8 Jumlah kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 1000 kegiatan usaha |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target |
| 4 | Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan | 592 jln IPAL 60 jln TPS B3 | 150 jln 60 jln | 150 jln 60 jln | 150 jln 100 jln | 150 jln 100 jln | 150 jln 100 jln | 200 jln 100 jln | 200 jln 100 jln | 800 jln IPAL 420 jln TPS B3 |
| | 0 jln Cerobong | - | - | 100 jln | 400 jln Cerobong |
| 5 | Berkurangnya tingkat pencemaran udara | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 30, Izin Pantek Baru 30, Izin Pantek Perpanjangan 100 | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 20, Izin Pantek Baru 20, Izin Pantek Perpanjangan 100 | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100 | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100 | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100 | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100 | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100 | Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 10, Izin Pantek Baru 10, Izin Pantek Perpanjangan 100 | 6436 ijin pemantauan air tanah |
| 6 | Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup | 25 kasus Pelanggaran BM | 50 kasus | 50 kasus | 60 kasus | 70 kasus | 80 kasus | 90 kasus | 90 kasus | 420 jln |
| | 4 Kasus Hidana | 10 kasus | 11 kasus | 12 kasus | 13 kasus | 14 kasus |
| | 50 Kasus Sengketa | 50 kasus | 250 kasus |
| | 714 Pengelola KDM | 18 kali/tahun | 24 kali/tahun | 24 kali/tahun | 36 kali/tahun | 48 kali/tahun | 48 kali/tahun | 96 kali/tahun | 96 kali/tahun | 500 kegiatan usaha |
| 7 | Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif | 100 kegiatan usaha | 500 kegiatan usaha |
| 8 | Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi | 6 SPKU | 1000 kendaraan |
| 9 | Tersedayanya informasi kualitas Air Tanah | 100 titik | 100 titik | 150 titik | 200 titik | 267 titik | 267 titik | 267 titik | 267 titik | 112 kali |
| 10 | Tersedayanya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk jakarta | 33 titik pantau laut/muara | 45 titik | 45 titik |
| 11 | Tersedayanya informasi kualitas Situ /Waduk | 40 situ/waduk | 40 situ/waduk |
| 12 | Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak | 1000 kendaraan | 2000 kendaraan | 4000 kendaraan | 6000 kendaraan | 8000 kendaraan | 10000 kendaraan | 10000 kendaraan | 10000 kendaraan | 10000 kendaraan |
| 13 | Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak | 100 kegiatan usaha | 100 kegiatan usaha | 200 kegiatan usaha | 300 kegiatan usaha | 400 kegiatan usaha | 500 kegiatan usaha | 500 kegiatan usaha | 500 kegiatan usaha | 100 kegiatan usaha |
| 14 | Terpenuhinya kualitas udara melalui pelaksanaan HKB | 64 kali | 112 kali | 112 kali | 112 kali | 112 kali | 112 kali | 112 kali | 112 kali | 112 kali |
| 15 | Penataan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3 | 60 jln | 60 jln | 60 jln | 100 jln | 100 jln | 100 jln | 100 jln | 100 jln | 420 jln |
| 16 | Terkenalnya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha | 100 kegiatan usaha | 120 kegiatan usaha | 130 kegiatan usaha | 140 kegiatan usaha | 150 kegiatan usaha | 160 kegiatan usaha | 160 kegiatan usaha | 160 kegiatan usaha | 160 kegiatan usaha |
| 17 | Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan | 1142 rekomenansi | 80 rekomenansi | 80 rekomenansi | 75 rekomenansi | 75 rekomenansi | 75 rekomenansi | 70 rekomenansi | 70 rekomenansi | 1.522 Rekomendasi |
| 18 | Terkenal dan terwainya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan | 700 dokumen kegiatan tahap operasi | 800 dokumen | 900 dokumen | 1.000 dokumen | 1.100 dokumen | 1.147 dokumen | 1.147 dokumen | 1.147 dokumen tahap operasi | 2 Lokasi pengambangan Kawasan Pantura |
| 19 | Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan | 592 jln IPAL | 150 jln | 150 jln | 150 jln | 150 jln | 200 jln | 200 jln | 200 jln | 1392 jln |
| 20 | Terkenalnya jalin instalasi pengolah air limbah (PAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam mengejola kinerja PAL nya | 32 unit | 32 unit | 34 unit | 36 unit | 38 unit | 40 unit | 40 unit | 40 unit | 40 unit |
| 21 | Tersedayanya monitoring pemantauan air tanah | 4274 pelangganan | 4330 pelangganan | 4430 pelangganan | 4520 pelangganan | 4620 pelangganan | 4710 pelangganan | 4710 pelangganan | 4710 pelangganan | 4710 pelangganan |
| | 30 Lokasi pemborongan | 30 Lokasi pemborongan | 30 Lokasi pemborongan | 29 Lokasi pemborongan | 28 Lokasi pemborongan | 27 Lokasi pemborongan | 27 Lokasi pemborongan | 27 Lokasi pemborongan | 27 Lokasi pemborongan | 144 Lokasi pemborongan |
| | 214 Lokasi sumur eksisting | 200 Lokasi sumur eksisting | 225 Lokasi sumur eksisting | 250 Lokasi sumur eksisting | 250 Lokasi sumur eksisting | 300 Lokasi sumur eksisting | 1250 Lokasi sumur eksisting |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|--------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target | Target |
| 2 | Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam | 1 Tersedayanya peraturan declar tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan | Dokumen RPPPLH tahap satu | 1 Dokumen RPPPLH tahap dua | 1 Dokumen RPPPLH tahap tiga | Naskah akademis & Raporda | - | - | - | Raporda |
| 3 | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup | 8 sungai | 1 dokumen (3 sungai) | 1 dokumen (2 sungai) | - | - | - | - | Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung 13 sungai |
| 4 | Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan | 1 Luas lahan Hutan Kota yang dibedakan | 3 Kelompok | 3 Kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 Kelompok |
| 5 | Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim | 1 Jumlah Pohon yang Ditamam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kora, Pesisir dan Perumikman | 89 kegiatan usaha peserta SUPER | 75 Kegiatan usaha SUPER | 150 Kegiatan usaha SUPER | 300 Kegiatan usaha SUPER | 375 Kegiatan usaha SUPER | 375 Kegiatan usaha SUPER | 375 Kegiatan usaha SUPER | 375 Kegiatan usaha SUPER |
| 6 | Program Konservasi flora dan fauna | 1 Jumlah jenis flora dan fauna yang dapat dikonservasi | 6 lokasi | 11 lokasi | 16 lokasi | 21 lokasi | 26 lokasi | 31 lokasi | 31 lokasi | 31 lokasi |
| 7 | Program Rehabilitasi dan pemuliharaan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan | 1 Luas Kawasan yang dapat direhabilitasi dan suatu yang sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007 | 0 | 1 Pergub | 1 kajian akademik | 1 kajian Perda | 1 kajian | 1 kajian | 1 kajian | 1 kajian dan 4 kajian |
| 8 | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup | 1 Terlaksananya konservasi air tanah | 974 unit meter air | 2020 | 1000 | 680 | 300 | 300 | 300 | 4300 unit |
| | | | 10AWLR | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 10 AWLR |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Target | |
| | | 2 Peningkatan sarana laboratorium lingkungan | 27 peralatan laboratorium | 8 peralatan laboratorium | 8 peralatan laboratorium | 8 peralatan laboratorium | 6 peralatan laboratorium | 5 peralatan laboratorium | 5 peralatan laboratorium | 35 peralatan laboratorium | 35 peralatan laboratorium |
| 9 | | 1 Luas lahan RT/H Tamam dan makam yang dibebaskan | 100% jenis | 100 jenis | 100 jenis | 100 jenis | 100 jenis | 100 jenis | 100 jenis | 100 jenis/tahun | 100 jenis/tahun |
| 10 | | 1 Luas RT/H pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha) | 2725,74 Ha | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 297,574 Ha | 297,574 Ha |
| | | 2 Lokasi RT/H yang digunakan sebagai taman kreativitas publik | 266 unit | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 359 | 359 |
| 11 | | Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota | Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola | 10 lokasi | 20 lokasi | 20 lokasi | 20 lokasi | 20 lokasi | 20 lokasi | 110 lokasi | 110 lokasi |
| 12 | | Program Penberdayaan dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman | 1 Jumlah RT/H yang dikembangkan Oleh Masyarakat | 7,4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.925,74 Ha | 2.925,74 Ha |
| | | 2 Jumlah kegiatan pengdalamangan dan pembinaan masyarakat | 175 kegiatan | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 450 Kegiatan | 450 Kegiatan |
| | | 3 Jumlah kegiatan pengembangan RT/H Kampung Terpadu oleh masyarakat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | | Program Pengembangan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman | 1 Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman | 185,05 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 550,405 | 550,405 |
| 1 | PERTANAHAN | Program pendidikan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) | 1 Jumlah Kelurahan yang terdaftar P4T | 176 Kelurahan | 21 Kelurahan | 20 Kelurahan | 20 Kelurahan | 20 Kelurahan | 20 Kelurahan | 267 Kelurahan | 267 Kelurahan |
| 2 | | Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota | 1 Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | | Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan | 1 Terperluinya regulasi / kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sifilis sejua ketentuan. | 1 Perda, 1 Pergub, 9 Sub Apikasi SIAK | 1 SPM | 2 SOP Pelayanan | 2 SOP | 2 SOP | 2 SOP | 1 SOP | 1 SOP |
| 2 | | Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Pusat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sifilis | 1 Persemaian penerbitan kartu keluarga Instansi Vertikal maupun Horizontal | KPU, Pajak, Kepolisian, Perbankan, KPK | 9 instansi | 13 instansi | 17 instansi | 21 instansi | 25 instansi | | |
| 4 | | Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat | 1 Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perintah administrasi kependudukan | 70% | 72% | 75% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| | | 2 Persentase Pemberian dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder di Bidang Administrasi Kependudukan | 2 Persentase penerbitan kartu tanda pendiduk | 89% | 93% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| | | 3 Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran | 3 Persentase penerbitan kutipan akta kelahiran | 92% | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 4 Persentase keterimbangan pengajuan dokumen kependudukan | 4 Persentase keterimbangan pengajuan dokumen kependudukan | 69% | 73% | 76% | 79% | 82% | 85% | 85% | 85% |
| | | 1 Tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk | 1 Tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk | 0 | 28% | 35% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% |
| | | 2 Termafasifikannya Database Penduduk Begi Instansi Vertikal maupun Horizontal | 2 Termafasifikannya Database Penduduk Begi Instansi Vertikal maupun Horizontal | 90% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| | | 3 Persentase peningkatan kesadaran masyarakat bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminkuduk | 3 Persentase peningkatan kesadaran masyarakat bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminkuduk | 10 lokasi | 10 lokasi | 10 lokasi | 10 lokasi | 10 lokasi | 10 lokasi | 60 lokasi | 60 lokasi |
| | | 4 Persentase keterimbangan pengajuan dokumen kependudukan | 4 Persentase keterimbangan pengajuan dokumen kependudukan | 90% | 90% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 1 Program Pengembangan dan Pemantauan Data Kependudukan dan Pencatatan Sifilis | 1 Program Pengembangan dan Pemantauan Data Kependudukan dan Pencatatan Sifilis | 1 kajian | 2 Sub Apikasi SIAK | 2550,405 | 2550,405 |
| | | 2 Program Peningkatan Kepatuhan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 2 Program Peningkatan Kepatuhan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 94% | 96% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 3 Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak | 3 Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak | 92% | 95% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 4 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan | 4 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 (100%) | 68 (100%) |
| | | 1 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 1 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| | | 2 Program Kehidupan Berencana | 2 Program Kehidupan Berencana | 24 | 56 | 120 | 179 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 3 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | 3 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4 Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 4 Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 48,67 | 49,87 | 51,07 | 52,27 | 53,47 | 55,46 | 55,46 | 55,46 |
| | | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 95 | 165 | 235 | 305 | 375 | 445 | 445 | 445 |
| | | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| | | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 364,916 | 366,785 | 403,030 | 439,275 | 475,520 | 511,765 | 511,765 | 511,765 |
| | | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 57,3 | 66,5 | 75 | 76,7 | 77,8 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| | | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 13,2 | 10,10 | 5,00 | 4,96 | 4,94 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| | | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| | | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| | | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 1041,081 | 1051043 | 1102686 | 1144329 | 1181229 | 1185972 | 1185972 | 1185972 |
| | | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| | | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
| | | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 1 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 335 | 375 | 522 | 670 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| | | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 2 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen |
| | | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 3 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen |
| | | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 4 KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen | 100 jen |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---------------------------------|---|--|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Target | |
| 1 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | Program Kesiapsiwaan dan Kelembagaan Perempuan | 1 Presensia SKPD/UKPD) yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) | 12,5 | 28,50 | 42,85 | 42,85 | 67,85 | 85,71 | 100 | 100 |
| 2 | | Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak | 1 Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 (100%) | 68 (100%) |
| 3 | | Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan | 1 Jumlah Kelurahan yang dilibatkan tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 4 | | Program Keterimbangan layak anak | 2 Jumlah kelurahan layak anak | 24 | 56 | 120 | 179 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 3 Persentase Cakupan perempuan dan anak korban tekanan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh perangkat terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. | 3 Persentase cakupan pasangan usia sub yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4 Persentase cakupan pasangan usia sub yang stresnya dibawa usia 20 tahun, | 4 Persentase cakupan pasangan usia sub yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need)</td | | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 1 | SOSIAL | Program Pelayanan Rehabilitas Sosial | 1 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 29 | 43 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 |
| 2 | TENAGA KERJA | 2 Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial | - | 136 | 14:40 | 14:50 | 14:70 | 15:00 | 15:20 | 15:20 |
| | | 3 Persentase PMKS di jalanan | 10.292 orang | 75 | 0 | 1 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| | | 4 Jumlah dokumen studi dan kajian demografi dan sosiologis tentang kelompok PMKS | - | 14:40 | 14:50 | 14:70 | 15:00 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial | 1 Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 (100%) |
| | | 2 Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan | 34 | 60 | 70 | 80 | 100 | 134 | 134 (100%) | |
| | | Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | 1 Jumlah Lembara Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial | 331 | 662 | 1.016 | 1.500 | 2.000 | 2.209 | 2.209 (100%) |
| | | 2 Jumlah tenaga kesejahteraan yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial | 6496 | 7578 | 11.000 | 14.000 | 17.000 | 21.652 | 21.652 (100%) | |
| | | 3 Persentase masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial | 5% | 5,5% | 6% | 6,5% | 7% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| | | 4 Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri | 12.604 | 15.000 | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 96.951 | 96.951 (100%) | |
| | | 2 Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri | 3405 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10.641 | 10.641 (100%) | |
| 3 | KOPERASI DAN UKM | Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 Respon time penanggulangan bencana | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam | 3 jam |
| 4 | PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI | 2 Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 3 Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial | 271 | 400 | 600 | 1.000 | 1.500 | 1.937 | 1.937 (100%) | |
| | | 1 Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% |
| | | 2 Persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja | 68% | 73% | 78% | 83% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| | | Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 Persentase Peningkatan jumlah Koperasi Aktif | 5.117 Kop. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | 2 Persentase Peningkatan jumlah Koperasi Baru | Rp. 6,6 Triliun | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | | 3 Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bimtek | 4.532 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.582 orang |
| | | Program Pengembangan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja | 1 Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan | 70.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | 80.00% |
| | | Program pengembangan sarana prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasi | 1 Persentase jumlah Transmigran yang ditempatkan | 75.00% | 77.00% | 79.00% | 81.00% | 83.00% | 85.00% | 85.00% |
| | | Program Peningkatan usaha Koperasi | 1 Persentase Peningkatan jumlah Koperasi Aktif | 5.117 Kop. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.400 Kop. |
| 5 | KOPERASI DAN UKM | Program Peningkatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 1 Persentase Perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja | 55% | 59% | 63% | 67% | 71% | 75% | 75% |
| 5 | PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | 1 Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan | 70.00% | 72.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% | 80.00% |
| | | Program pengembangan sarana prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasi | 1 Persentase jumlah Transmigran yang ditempatkan | 75.00% | 77.00% | 79.00% | 81.00% | 83.00% | 85.00% | 85.00% |
| | | Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 Persentase Peningkatan jumlah Koperasi Aktif | 5.117 Kop. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5.400 Kop. |
| | | Program Peningkatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 1 Persentase Perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja | 55% | 59% | 63% | 67% | 71% | 75% | 75% |
| | | Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi | 1 Jumlah Koperasi pedagang pisar, koperasi pedagang lokelin dan Koperasi PKL yang berfungsi | 70 Kop | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 Kop |
| | | 2 Persentase Peningkatan jumlah Koperasi Baru | 7.612 Kop. | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 9.515 Kop |
| | | 3 Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bimtek | 4.532 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.582 orang |
| | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 1 Jumlah proyek (PMDN/PMA) | 89 proyek | 91 proyek | 94 proyek | 96 proyek | 98 proyek | 100 proyek | 100 proyek |
| | | - Jumlah proyek PMDN | - | - | 1.215 proyek | 1.238 proyek | 1.350 proyek | 1.425 proyek | 1.500 proyek | 1.500 proyek |
| | | Program Peningkatan Kinerja BUMD | 1 Jumlah setoran PAD dari BUMD | 1% dari PAD | 1% dari PAD | 1% dari PAD | 2% dari PAD | 2% dari PAD | 3% dari PAD | 3% dari PAD |
| 6 | KEBUDAYAAN | Program Pengembangan Penanaman Modal | 1 Persentase pelajaran perjalinan/ non perjalinan yang tepat waktu | 40% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | PENGEMBANGAN PENGETAHUAN | Program Peningkatan Investasi dan UKM | 1 Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN | PMA : Rp. 45 Triliun PMDN : Rp. 9.84 Triliun 10.59 Triliun | PMA : Rp. 48.48 Triliun PMDN : Rp. 12.15 Triliun | PMA : Rp. 52.05 Triliun PMDN : Rp. 11.39 Triliun | PMA : Rp. 59.57 Triliun PMDN : Rp. 13.02 Triliun | PMA : Rp. 63.94 Triliun PMDN : Rp. 13.97 Triliun | PMA : Rp. 63.94 Triliun PMDN : Rp. 13.97 Triliun | PMA : Rp. 63.94 Triliun PMDN : Rp. 13.97 Triliun |
| | | 2 Terimplementasinya Sistem Pelaporan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPSIE) | 1 Jumlah implementasi Sistem Pelaporan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPSIE) | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem |
| | | Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal | 1 Jumlah perusahaan yang ditunjuk penggunaan perjalinannya | 1.000 perusahaan | 1.500 perusahaan | 1.700 perusahaan | 2.000 perusahaan | 2.200 perusahaan | 8.700 perusahaan | 8.700 perusahaan |
| | | Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya | 1 Jumlah perusahaan yang ditunjuk penggunaan perjalinannya | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 |
| | | Program Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan | 1 Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan | 3 jenis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 2 Jumlah pelaku kebudayaan yang ditunjukkan mendapatkan perijinan dan ketrampilan | 12 Lokasi Pusat Kebudayaan | 21 | 30 | 40 | 50 | 61 | 61 | 4.500 pelaku kebudayaan |
| | | 3 Jumlah temu budaya | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 67 |
| | | 4 Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya | 0 | 43 | 43 | 86 | 86 | 129 | 129 | 473 |
| | | 1 Jumlah Kawasan yang dikembangkan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 2 Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya | 2.239.224 Pengunjung | 2.463.146 Pengunjung | 2.709.461 Pengunjung | 3.278.448 Pengunjung | 3.606.293 Pengunjung | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| 8 | KEBUDAYAAN | Program Peningkatan Pengembangan Kebudayaan | 1 Jumlah perusahaan yang ditunjuk penggunaan perjalinannya | 1.000 perusahaan | 1.500 perusahaan | 1.700 perusahaan | 2.000 perusahaan | 2.200 perusahaan | 8.700 perusahaan | 8.700 perusahaan |
| 9 | PENGEMBANGAN PENGETAHUAN | Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya | 1 Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan | 3 jenis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 2 Jumlah pelaku kebudayaan yang ditunjukkan mendapatkan perijinan dan ketrampilan | 12 Lokasi Pusat Kebudayaan | 21 | 30 | 40 | 50 | 61 | 61 | 4.500 pelaku kebudayaan |
| | | 3 Jumlah temu budaya | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 67 |
| | | 4 Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya | 0 | 43 | 86 | 86 | 129 | 129 | 129 | 473 |
| | | 1 Jumlah Kawasan yang dikembangkan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 2 Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya | 2.239.224 Pengunjung | 2.463.146 Pengunjung | 2.709.461 Pengunjung | 3.278.448 Pengunjung | 3.606.293 Pengunjung | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| | | 3 Jumlah perusahaan yang ditunjuk penggunaan perjalinannya | 1.000 perusahaan | 1.500 perusahaan | 1.700 perusahaan | 2.000 perusahaan | 2.200 perusahaan | 8.700 perusahaan | 8.700 perusahaan | 8.700 perusahaan |
| | | 4 Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan | 0 | 43 | 43 | 86 | 86 | 129 | 129 | 129 |
| | | 5 Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya | 0 | 43 | 86 | 86 | 129 | 129 | 129 | 473 |
| | | 6 Lokasi Pusat Kebudayaan | 21 | 30 | 40 | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 10 | KEBUDAYAAN | Program Peningkatan Pengembangan Kebudayaan | 1 Jumlah perusahaan yang ditunjuk penggunaan perjalinannya | 1.000 perusahaan | 1.500 perusahaan | 1.700 perusahaan | 2.000 perusahaan | 2.200 perusahaan | 8.700 perusahaan | 8.700 perusahaan |
| 11 | PENGEMBANGAN PENGETAHUAN | Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya | 1 Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan | 3 jenis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 2 Jumlah pelaku kebudayaan yang ditunjukkan mendapatkan perijinan dan ketrampilan | 12 Lokasi Pusat Kebudayaan | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--|---------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 5 | Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan | 3 | Percentase penataan kawasan kota tua pada zona anti dan zona 1 | 0 | 1,18% | 8,74% | 24,27% | 27,18% | 38,83% | 100% | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
| | | 4 | Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termantapkan | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 25 | 58 event festival budaya nasional dan daerah |
| | | 1 | Jumlah penyeleksian/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta | 10 event/festival budaya nasional dan daerah | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 58 event/festival budaya nasional dan daerah | |
| | | 2 | Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan | 15 event/kegiatan seni budaya nasional | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 110 event/kegiatan seni budaya nasional | |
| 1 | PEMUDA DAN OLAHRAGA | 3 | Jumlah event seni budaya tetapi di ruang publik secara periodik | 628 event | 628 | 688 | 757 | 832 | 915 | 3820 | |
| | | 1 | Percentase seni budaya yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | |
| | | 2 | Jumlah anggota Pramuka yang aktif | 21540 orang | 233.350 orang | 251.300 orang | 269.250 orang | 287.200 orang | 305.150 orang | 305.150 orang | |
| | | 3 | Percentase Gujur Depan Pramuka yang aktif | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | |
| 2 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 1 | Prestasi Olahraga yang diolah DKI Jakarta pada single event dan multi event | Juara Umum PON XVII/2012, Juara Umum PONNAS XII/2011, Juara III PONNAS XII/2011 | Juara Umum PONNAS XII/2012; Juara Umum PONNAS XIII/2011 | Juara Umum PON XIX | Juara Umum PONNAS XIV | Juara Umum PONNAS XV; Juara Umum PONNAS XVI | Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum PONMAS dan PONNAS Tahun 2013, 2015 dan 2017 | | |
| | | 2 | Jumlah anggota Pramuka yang aktif | 215.400 orang | 233.350 orang | 251.300 orang | 269.250 orang | 287.200 orang | 305.150 orang | 305.150 orang | |
| | | 3 | Percentase Gujur Depan Pramuka yang aktif | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | |
| | | 4 | Percentase anggota Pramuka yang aktif | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda | 1 | Jumlah Gelanggang Renaja yang memenuhi standar | 0 | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | |
| | | 2 | Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Renaja Kecamatan | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| | | 3 | Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sexual standar | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| | | 4 | Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Program Pengembangan Olahraga | 5 | Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda | 4.099.632 | 4.304.634 | 4.519.866 | 4.745.859 | 4.983.152 | 5.232.310 | 5.232.310 | |
| | | 1 | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | |
| | | 2 | Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan) | 4 kali | 6 kali | 8 kali | 10 kali | 12 kali | 14 kali | 14 kali | |
| | | 3 | Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan | 48 Ormas Etnis, 10 Ormas Ormas Keagamaan | 48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan | 48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan | 48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan | 48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan | 48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan | 48 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan | |
| 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri | 370 Ormas dan 638 LSM | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 30 Ormas dan 125 LSM yang mandiri dari jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar | |
| | | 2 | Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub | 50 sekolah | 50 sekolah | 50 sekolah | 50 sekolah | 50 sekolah | 50 sekolah | 300 Sekolah | |
| | | 3 | Pemilu Gub/Wagub | 66,71% | 7.034.061 Pemilih | 5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula) | 5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula) | 5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula) | 5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula) | 5% dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula) | |
| | | 4 | Cakupan Penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak pilih memperoleh informasi pemilu | 2 | 10 Evaluasi Perda | 10 Partai Politik difasilitasi | 100% Partai politik yang memperoleh kuota legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politik yang memperoleh kuota legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politik yang memperoleh kuota legislatif yang difasilitasi | 100% Partai politik yang memperoleh kuota legislatif yang difasilitasi | |
| 3 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik | 1 | Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat | 25 Konflik | 22 Konflik | 19 Konflik | 16 Konflik | 13 Konflik | 10 Konflik | 10 Konflik | |
| | | 2 | Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan) | 370 Ormas dan 638 LSM | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar | 2 Raperda | 2 Raperda | 2 Raperda | 2 Raperda | 2 Raperda |
| | | 3 | Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri | 0 | 0 | 0 | 10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 10 Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi |
| | | 4 | Jumlah Rapergub hasil evaluasi yang disempurnakan | 0 | 0 | 0 | 3 Rapergub | 3 Rapergub | 3 Rapergub | 3 Rapergub | 3 Rapergub |
| 4 | Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan | 1 | Pengembangan wawasan kebangsaan | Usulan Kedewan Nasional Kwasan Ekonomi Khusus Marunda | 1. Revisi UDGJ, Masterplan, Sidang Badan Usaha untuk membangun KEK Marunda | 1. Penunjukan Badan Usaha untuk membangun KEK Marunda | 1. Penunjukan Badan Usaha untuk membangun KEK Marunda | 1. Penunjukan Badan Usaha untuk membangun KEK Marunda | 1. Penunjukan Badan Usaha untuk membangun KEK Marunda | KEK Marunda Bercorasi | |
| | | 2 | Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri | 52 | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | |
| | | 3 | Peningkatan Koordinasi dan Konsolidasi | 0 | 3. Pembentukan administrator KEK Marunda | 3. Pembentukan administrator KEK Marunda | 3. Pembentukan administrator KEK Marunda | 3. Pembentukan administrator KEK Marunda | 3. Pembentukan administrator KEK Marunda | KEK Marunda | |
| | | 4 | Peningkatan Koordinasi dan Konsolidasi | 0 | 4. Peningkatan KEK Marunda dengan Peraturan Pemerintah | 4. Peningkatan KEK Marunda dengan Peraturan Pemerintah | 4. Peningkatan KEK Marunda dengan Peraturan Pemerintah | 4. Peningkatan KEK Marunda dengan Peraturan Pemerintah | 4. Peningkatan KEK Marunda dengan Peraturan Pemerintah | 4. Peningkatan KEK Marunda dengan Peraturan Pemerintah | |
| 2 | Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian | 1 | Penetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus | Usulan Kedewan Nasional Kwasan Ekonomi Khusus Marunda | 1 (satu) dokumen Kajian Strategis dan Kebijakan Kerohanian Pangandaran di DKI Jakarta | 1 (satu) dokumen Kajian Strategis dan Kebijakan Kerohanian Pangandaran di DKI Jakarta | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| | | 2 | Jumlah Kajian Keterharahan Pangandaran | 0 | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | 2. Penyempurnaan Rapergub hasil evaluasi | |
| | | 3 | Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL | 1 | 3. Jumlah Kajian Transportasi | 1 Kajian | 1 Kajian | 1 Kajian | 1 Kajian | 1 Kajian | 5 Kajian |
| | | 4 | Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro | 1 | 4. Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro | 1 Kajian | 1 Kajian | 1 Kajian | 1 Kajian | 1 Kajian | 5 Kajian |
| 3 | Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah | 5 | Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi Pasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar-Jaya | 1 | 5. Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi Pasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar-Jaya | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 5 Laporan Koordinasi |
| | | 6 | Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta | 1 | 6. Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 1 Laporan Koordinasi | 5 Laporan Koordinasi |
| | | 7 | Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | Inventory Kewenangan Camat dan Lurah | 7. Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | Pedoman Pelaksanaan Program Pengurusan Kecamatan Kelurahan | Pengendalian Pelaksanaan Program Pengurusan Kecamatan Kelurahan | Rancangan kebijakan pelaksanaan PATEN | Penerapan pelaksanaan PATEN | Evaluasi Pelaksanaan Program Pengurusan Kecamatan Kelurahan | |
| | | 8 | Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | 0 | 8. Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah | 9 | Implemenatai Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | Draft Perda RT/RW/Pengembangannya | 9. Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | Pengurusan RT/RW/Pengembangannya | Pengurusan RT/RW/Pengembangannya | Rancangan kebijakan pelaksanaan PATEN | Penerapan pelaksanaan PATEN | Evaluasi Pelaksanaan Program Pengurusan Kecamatan Kelurahan | |
| | | 10 | Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | 2 | 10. Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | Perda RT/RW/Pengembangannya | Perda RT/RW/Pengembangannya | Perda RT/RW/Pengembangannya | Perda RT/RW/Pengembangannya | Perda RT/RW/Pengembangannya | Perda RT/RW/Pengembangannya |
| | | 11 | Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | 0 | 11. Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12 | Implemenatai Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | 0 | 12. Implemenatai Kebijakan Kelembagaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--------|---------|-------------------------------------|--------------|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|-----|--------|---------|-------------------------------------|--------------|------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 4 | Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1 Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan dan Asset Pendaftaran Sengketa Pertahanan (Terseranggaranya mediais Sengketa Pertahanan dan Asset di Luar Pengadilan | 250 sengketa | 40 perkara | 40 perkara | 40 perkara | 40 perkara | 40 perkara | 40 perkara | 200 perkara |
| 5 | Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial | 2 Jumlah Penanganan Sengketa Pertahanan dan Asset Pendaftaran Sengketa Pertahanan dan Asset di Luar Pengadilan | 250 sengketa | 250 sengketa | 250 sengketa | 250 sengketa | 250 sengketa | 250 sengketa | 250 sengketa | 1500 sengketa |
| 6 | Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri | 3 Jumlah Penyaluhan Hukum Terpadu 4 Peningkatan Pengeluhuan Hukum Aparat dan Masyarakat | 100 Aparatur | 100 Aparatur | 100 Aparatur | 100 Aparatur | 100 Aparatur | 100 Aparatur | 100 Aparatur | 500 Aparatur |
| 7 | Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Sarana Olahraga serta Pembinaan Mental Sosial | 1 Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional | 200 Masyarakat | 200 Masyarakat | 200 Masyarakat | 200 Masyarakat | 200 Masyarakat | 200 Masyarakat | 200 Masyarakat | 1.000 Masyarakat |
| 8 | Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Sarana Olahraga | 1 Jumlah kejamaan Sister City 2 Jumlah kerjasama Sister City | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Jakarta memiliki 24 Sister City |
| 9 | Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup | 3 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH 4 Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perputakan dan Kearifan yang disusun | 0 | MOU | MOU | Perjanjian Kerjasama Daerah | 12 event | 12 event | 15 event | 18 event |
| 10 | Program Administrasi Umum dan Keuramah tanggaan Daerah | 1 Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif 2 Terusunya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi 3 Terseديانya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan 4 Jumlah izin Usaha Jasa Konstruksi (IJUK) | 100% 100 (dari 8200 jamaah haji) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 11 | Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur | 1 Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta 2 Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik 3 Teratanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | 1 Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah 2 Jumlah Raporda yang difasilitasi 3 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
| 13 | Program Peningkatan Kapasitas Lemhaga Perwakilan Rakyat Daerah | 1 Jumlah Raporda yang difasilitasi 2 Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD 3 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD 4 Fasilitasi Peninjolatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 94 orang | 94 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang |
| 14 | Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten | 1 Terlaksananya koordinasi penataan lokasi usaha kaktulima 2 Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Lembaga kemasyarakatan | 48% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% |
| 15 | Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten | 1 Terlaksananya pembinaan Lemba gaga kemitraan | 94 orang | 94 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--|--|-------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 10 | Program Administrasi Umum dan Keuramah tanggaan Daerah | 1 Persentase Berkurangnya kelduhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air lift dan lampu penerangan Kantor. 2 Lama Penyelesaian tiken naskah dinas yang ditandatangani gubernur, Wagub dan Sekda | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 11 | Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur | 1 Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta 2 Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik 3 Teratanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | 1 Terlaksananya Tamu Daerah Keprotokolan Daerah 2 Pelayanan Tamu Daerah Operasional TU Pimpinan (Gub/Wagub/Sekda, Deput Gub, Asisten Sekda/Deputi Deputi) | 1000 acara | 1100 acara | 1200 acara | 1300 acara | 1300 acara | 1300 acara | 1400 acara | 1400 acara |
| 13 | Program Peningkatan Kapasitas Lemhaga Perwakilan Rakyat Daerah | 1 Jumlah Raporda yang difasilitasi 2 Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD 3 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD 4 Fasilitasi Peninjolatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 3 kali Reses | 3 kali Reses | 3 kali Reses | 3 kali Reses | 3 kali Reses | 3 kali Reses | 3 kali Reses | 3 kali Reses |
| 14 | Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten | 1 Terlaksananya koordinasi penataan lokasi usaha kaktulima 2 Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Lembaga kemasyarakatan | 48% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 15 | Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten | 1 Terlaksananya pembinaan Lemba gaga kemitraan | 94 orang | 94 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang | 106 orang |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Target | | |
| 16 | Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten | 1 Penyaluhan Hukum Terpadu 2 Peningkatan Penggetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat 3 Penanganan Perkara di Pengadilan tingkat kota/kab | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | JS 6.094 RT,576 RW,576 LMK,65 Karang Taruna JT7.881 RT,699 RW,699 LMK,65 Karang Taruna P 1000 116 RT,24 RW,24 LMK,6 Karang Taruna | |
| 17 | Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/ Kabupaten | 1 Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat 2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab | 100% 100% | |
| 18 | Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten | 1 Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/ Kabupaten | 1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten | 1 Terlaksananya Kepraktisan Tamu Kota/kab | 0 | 0 | 1.050 acara | 1.050 acara |
| 21 | Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/ Kabupaten | 1 Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar 2 Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar | 206 | minimal 28 | minimal 6 | 267 |
| 22 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kota/Kabupaten | 1 Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan 2 Berfunginya sistem informasi pelayanan publik di PTSP | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 23 | Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan | 1 Integritas pelayanan publik 2 Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan | 74 jenis | 74 |
| 24 | Program Peningkatan Kapasitas Korpri | 1 Terbentuknya DP Korprit Tingkat SKPD/ UKPD dan BUMD | 1 Provinsi dan 5 Wilayah Kota dan 1 Kab (DP terbentuk) | RSUD dan RSKD, BUMD | seluruh SKPD/ UKPD Provinsi dan Kota/kab | 1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Penjamin Terpadu 3) >10.000 pemohon 4) Tingkat keruangan masyarakat 79,73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan | 1 Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan 2 Integritas pelayanan publik | 8 kewenangan | 8 kewenangan |
| 26 | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan | 1 Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan 2 Integritas pelayanan publik | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 | |
|-----|--|---|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Target | | |
| 27 | Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah | 1 Peningkatan Indeks Perspsi Korups (IPK) 2 Terintegrasiya sistem informasi perencanaan, sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan | 3,4 0 | 3,5 0 | 3,8 pengembangan sistem informasi pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan dan sistem informasi pengelolaan keuangan | 3,8 80% | 3,8 80% | 3,8 80% | 3,8 80% | 4,1 85% | 4,1 85% | |
| 28 | Program Peningkatan Pengaduan Masyarakat (Kausus) | 1 Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat | 75,70% | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% |
| 29 | Program Penguruan Akuntabilitas Kinerja | 1 Peningkatan penilaian/predikat LAKIP 2 Opini Keuangan Daerah | CC WTP | CC WTP | B ZJ | B WBK (1 SKPD) | B WBK (1 SKPD) | BB WBK (1 SKPD) | BB WBK (1 SKPD) | A WTP | A WTP | A WTP |
| 30 | Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan | 1 Prosesse Adminitrasi/Jumlah pemerkasaan yang telah selesai ditindaklanjuti | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 83% | 95% | 95% | 95% |
| 31 | Program Kelbijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1 Jumlah peraturan/regulasi yang mendarsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 145 |
| 32 | Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah | 1 Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat | 4.386 Bid.21.671.640 M2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Jumlah bukti kepemilikan set berupa sertifikat tanah dan bangunan 3 Jumlah Gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang disuransikan 4 Persentase pencapaian dari hasil pengelolaan aset daerah | 2.469 Bid.9.803.322 M2 886 KDO,1.000 Gedung 71,50% | 100 Bid 1.000 100% | 100 Bid 1.000 100% | 100 Bid 1.000 100% | 100 Bid 1.000 100% | 100 Bid 1.000 100% | 100 Bid 1.000 100% | 100 Bid 1.000 100% | 2.969 Bid 1.000 100% | 2.969 Bid |
| 34 | Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah | 1 Persentase dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang terserap 2 Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepatwaktu | 105.83 100% | 105.83 100% | 168M WTP | 168M WTP | 168M WTP | 168M WTP | 168M WTP | 168M WTP | 168M WTP | 168M WTP |
| 35 | Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah | 1 Jumlah wajib pajak yang transaksiya dapat dimonitor secara online 2 Jumlah sistem yang beroperasi secara optimal | 3,8T 5,8T | 4,95T 5 | 4,95T 5 | 4,95T 5 | 4,95T 5 | 4,95T 5 | 4,95T 5 | 4,95T 5 | 4,95T 5 | 11,173 T |
| 36 | Program Perencanaaan dan Pengembangan Pajak Daerah | 1 Jumlah penenerimaan asidaerah dari sektor pajak daerah 2 Persentase kesesuaian rencana dengan pencapaian target seluruh jenis pajak | 16,5 Triliun Rupiah 107% | 21,918 Triliun 100% | 28,457 Triliun 100% | 33,708 Triliun 100% | 33,708 Triliun 100% | 33,708 Triliun 100% | 33,708 Triliun 100% | 33,708 Triliun 100% | 33,708 Triliun 100% | 47,750 Triliun 100% |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 37 | | Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah | 3 Jumlah Standart Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah | 50 | 62 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | | Program Perpusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah | 1 Jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 jenis pajak |
| 39 | | Program Pelayanan Pajak Daerah | 2 Jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasikan | 12 Peraturan | 12 Peraturan | 13 Peraturan | 13 Peraturan | 13 Peraturan | 13 Peraturan | 61 peraturan | 13 Peraturan |
| 40 | | Program Penataan Sistem Manajemen SDM Apatur | 3 Persentase kasus perpajakan daerah yang terselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 41 | | Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | 4 Persentase penanganan keberatan, pengurangan, kerugian, penghapusan, dan keberatan pajak daerah yang terselisikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 42 | | Program Pendidikan dan Pelatihan | 1 Jumlah jenis pajak yang mencapai target | 7 dari 11 jenis pajak daerah | 8 dari 12 jenis pajak daerah | 10 dari 13 jenis pajak daerah | 11 dari 13 jenis pajak daerah | 12 dari 13 jenis pajak daerah | 13 dari 13 jenis pajak daerah | 13 dari 13 jenis pajak daerah | 13 jenis pajak daerah |
| 43 | | Program Peningkatan Kapasitas Penyelegaraan Diklat | 2 Jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia | belum mendapat ISO | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 unit pelayanan pajak daerah | 43 gedung UPD Mandiri |
| 44 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 3 Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 unit pelayanan pajak |
| 45 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur | 4 Jumlah Unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan | 0 | 2.000 orang | 2.000 orang | 2.000 orang | 2.000 orang | 2.000 orang | 2.000 orang | 10.000 orang |
| 46 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1 Terpenuhinya SDM aparat melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan Kebijakan TKD | 2 kajian | 1 kajian | 3 kajian | 3 kajian | 3 kajian | 3 kajian | 3 kajian | 3 kajian |
| 47 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 2 Terselesainya sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka | 0 | lurah dan camat eselon II | eselon III | Kepala Puskesmas | lurah, camat dan eselon tertentu | eselon tertentu | lurah, camat dan eselon tertentu | lurah, camat dan eselon tertentu |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 43 | | Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | 1 Terpenuhinya SDM aparat melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan Kebijakan TKD | Pembangunan dan Perencanaan (75 Orang) | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 100 Orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang |
| 44 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 2 Akreditasi Pengelolaan Diklat | 4 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/pelatihan publik | 0 | 100 | 500 | 500 | 300 | 300 | 1.700 |
| 45 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur | 3 Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa Umum | 5 Integritas pelayanan publik | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 |
| 46 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1 Terselesainya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung) | Kelengkapan Diklat sebagai Center of Excellent | struktur organisasi (satuan biaya, pedoman diklat) = 100% | Program diklat (kurikulum dkk) | SDM (pengelola & Wi) | SDM (pengelola & Wi) | Sarana Diklat 75% Sarana Diklat 100% | Sarana Diklat 100% | Sarana Diklat 100% |
| 47 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 2 Pengelolaan berbasis ICT | 1 Pengiriman Pegawai Tugas Belajar DIN dan LNU | 131 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang |
| 48 | | Program Peningkatan Kapasitas Penyelegaraan Diklat | 3 Pengelolaan berbasis ICT | 2 Akreditasi Pengelolaan Diklat | 4 Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/pelatihan publik | 0 | 2 mata ajar | 39 mata ajar | 30 mata ajar | 30 mata ajar | 30 mata ajar |
| 49 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 4 Persentase kapasitas sumber daya apatur yang mencapai target | 5 Integritas pelayanan publik | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9 |
| 50 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 1 Terpenuhinya SDM aparat melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan Kebijakan TKD | Kelengkapan Diklat sebagai Center of Excellent | struktur organisasi (satuan biaya, pedoman diklat) = 100% | Program diklat (kurikulum dkk) | SDM (pengelola & Wi) | SDM (pengelola & Wi) | Sarana Diklat 75% Sarana Diklat 100% | Sarana Diklat 100% | Sarana Diklat 100% |
| 51 | | Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai | 2 Akreditasi Pengelolaan Diklat | 1. Sertifikasi mata ajar WI dan Pengelola Diklat | 2 mata ajar | 2 mata ajar | 30 mata ajar | 30 mata ajar | 30 mata ajar | 30 mata ajar | 30 mata ajar |
| 52 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 3 Pengelolaan berbasis ICT | 2. Sertifikasi Program akreditasi basas | 1 program (re akreditasi basas) | 3 program (Pim 3, 4, Projabat) | 4 program (re acreditasi basas, dan Pim) |
| 53 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur | 4 Persentase kapasitas sumber daya apatur yang mencapai target | 3. Sertifikasi Peserta Diklat | TOT Cavid 30 orang dan TOT Khusus 30 orang (mata ajar) | TOT Cavid 30 orang dan TOT Khusus 30 orang (mata ajar) | TOT Khusus 30 orang (mata ajar) | TOT Khusus 30 orang (mata ajar) | TOT Khusus 30 orang (mata ajar) | TOT Khusus 30 orang (mata ajar) | TOT Khusus 30 orang (mata ajar) |
| 54 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1 Terpenuhinya SDM aparat melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan Kebijakan TKD | 4 E-learning dan Distance Learning | 0 | 1 Program Diklat | 2 Program Diklat | 3 Program Diklat | 5 Program Diklat | 5 Program Diklat | 5 Program Diklat |
| 55 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 2 Pengelolaan berbasis ICT | 4. Computer Assessmen Tes (CAT) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 56 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur | 3 Pengelolaan berbasis ICT | 5. Implementasi dan evaluasi sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) | uji coba sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) | 1 petak kompetensi 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai |
| 57 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 4 Persentase kapasitas sumber daya apatur yang mencapai target | 6. Pendeklarasi Online berbasis web | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 5 Implementasi dan evaluasi sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) | 3. E-learning dan Distance Learning | 0 | 1 Program Diklat | 2 Program Diklat | 3 Program Diklat | 5 Program Diklat | 5 Program Diklat | 5 Program Diklat |
| 59 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 6. Pendeklarasi Online berbasis web | 4. Computer Assessmen Tes (CAT) | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 60 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 7. Pendeklarasi Online berbasis web | 5. Implementasi dan evaluasi sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) | uji coba sistem sasaran kinerja pegawai (SKP) | 1 petak kompetensi 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai | 1 petak kompetensi seluruh pegawai |
| 61 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 8. Pendeklarasi Online berbasis web | 6. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 62 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 9. Pendeklarasi Online berbasis web | 7. Pendeklarasi Online berbasis web | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur | 10. Pendeklarasi Online berbasis web | 8. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 1 Program Diklat | 2 Program Diklat | 3 Program Diklat | 5 Program Diklat | 5 Program Diklat | 5 Program Diklat |
| 64 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 11. Pendeklarasi Online berbasis web | 9. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 65 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 12. Pendeklarasi Online berbasis web | 10. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 66 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 13. Pendeklarasi Online berbasis web | 11. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 67 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 14. Pendeklarasi Online berbasis web | 12. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 68 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 15. Pendeklarasi Online berbasis web | 13. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 69 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 16. Pendeklarasi Online berbasis web | 14. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 70 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 17. Pendeklarasi Online berbasis web | 15. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 71 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 18. Pendeklarasi Online berbasis web | 16. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 72 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 19. Pendeklarasi Online berbasis web | 17. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 73 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 20. Pendeklarasi Online berbasis web | 18. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 74 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 21. Pendeklarasi Online berbasis web | 19. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 75 | | Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana | 22. Pendeklarasi Online berbasis web | 20. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| 76 | | Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Apatur | 23. Pendeklarasi Online berbasis web | 21. Pendeklarasi Online berbasis web | 0 | 250 orang | 300 orang | 400 orang | 500 orang | 500 orang | 500 orang |
| | | | | | | | | | | | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---|--|--|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 48 | Program Peningkatan Pada Saat Bencana dan Pacea Bencana | 1 Meningkatnya kapasitas distribusi logistik kebakaran | 0 | 3 lokasi | | | | | | |
| 49 | Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana | 1 Integrasi Sistem Peringatan dini (banjir, kebakaran, puting beliung, gempa,cuaca ekstrem,wabah penyakit) | sistem peringatan bencana banjir (pintu air) | sistem peringatan dini kebakaran dan cuaca ekstrem | | | | | | |
| 50 | Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran | 1 Jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran | 220 | 242 gedung | 264 gedung | 286 gedung | 308 gedung | 330 gedung | | |
| 51 | Program Peninggulangan Kebakaran | 2 Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| 52 | Program Penyelamatan | 3 Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | |
| 53 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Perlindungan Masyarakat | 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Nasional 2,5km | radius 2 km | radius 1,75 km | radius 1,50 km | radius 1,50 km | radius 1,50 km | radius 1,50 km | 90% | |
| 54 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2 Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 5 menit | 76,87% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 82% | |
| 55 | Program Peningkatan Kinerja Keamanran dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 1 Integritas pelayanan publik | 0,56 Kawasan | 0,56 Kawasan | 0,56 Kawasan | 0,56 Kawasan | 0,56 Kawasan | 0,56 Kawasan | 0,56 Kawasan | |
| 56 | Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkann Peraturan | 2 Tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran k3 (kelembutan, ketentraman,kendahan) | 73/267 | | 74/267 | | 75/267 | | 75/267 | |
| 57 | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Perlindungan Masyarakat | 3 Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,75% | 0,80% | 80% | |
| 58 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP | 1 Cakupan pertugas Perlindungan Masyarakat (Lingga) di Kabupaten/ Kota | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | |
| 59 | Program Peningkatan Keterseedian pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran | 1 Jumlah spartak yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar | 1.625 satpol PP | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| 60 | Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Perlindungan Masyarakat | 2 Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sektar | 111 RW | 247 RW | 383 RW | 519 RW | 655 RW | 791 RW | 791 RW | |
| 61 | Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura | 3 Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat | 25 Konflik | 22 Konflik | 19 Konflik | 16 Konflik | 13 Konflik | 10 Konflik | 10 Konflik | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 58 | KETAHANAN PANGAN | 1 Berfungsiya Sarana dan Prasarana Perangajng Operasional Satpol PP | 0 Barak | | | | | | | |
| 59 | Program Pengamanan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran | 1 Jumlah ketersediaan pangan : | | | | | | | | |
| 60 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Perlindungan Masyarakat | 1 Jumlah pos kamiling aktif | 131 pos kamiling aktif | 176 pos kamiling aktif | 220 pos kamiling aktif | 264 pos kamiling aktif | 308 pos kamiling aktif | 352 pos kamiling aktif | 352 pos kamiling aktif | |
| 61 | Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan | 2 Jumlah sertifikat hasil iji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikelarkan yang di keluarakan | 1570 sertifikat | 1.300 sertifikat | 1.400 sertifikat | 1.500 sertifikat | 1.600 sertifikat | 1.700 sertifikat | 1.700 sertifikat | |
| 62 | Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura | 3 Persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya | 92,88 % baik / aman | 93 % baik / aman | 93,5 % baik / baik | 94,5 % baik / baik | 95 % baik / baik | 95 % baik / baik | 95 % baik / baik | |
| 63 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | 2 Jumlah sertifikat hasil iji hasil perikanan yang di keluarakan | 13.784 sertifikat | 28.416 sertifikat | 28.730 sertifikat | 29.000 sertifikat | 29.320 sertifikat | 29.600 sertifikat | 145.066 sertifikat | |
| 64 | Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet) | 1 Persentase dagang dan olahan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya | 90 % baik / aman | 91 % baik / baik | 92 % baik / aman | 93 % baik / aman | 94 % baik / aman | 95 % baik / aman | 95 % baik / aman | |
| 65 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Perlindungan Masyarakat | 2 Jumlah sertifikat hasil iji produk hewan yang di keluarakan | 10.000 sertifikat | 13.000 Sertifikat | 90 sertifikat | 95 sertifikat | 100 sertifikat | 110 sertifikat | 110 sertifikat | |
| 66 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3 Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan | 79 sertifikat | | | | | | | |
| 67 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 1 Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) Yang dikembangkan dan dimasyarakatkan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
| 68 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat | 2 Persestase masyarakat pengguna teknologi tepat guna (TTG) yang mandiri | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | |
| 69 | Program Statistik Daerah | 3 Persentase Pemanfaatan Bina Sosial PPMK yang sudah beusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan | 5 | 15 | 27 | 41 | 55 | 70 | 70 | |
| 70 | KEARSIPAN | 1 Capaian Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong royong | 890 | 974 | 1.403 | 1.684 | 2.300 | 2.706 | 2.706 (100%) | |
| 71 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat | 1 Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselalutkan | 97.130 | 99.130 | 103.130 | 109.130 | 117.130 | 127.130 | 127.130 | |
| 72 | 1 STATISTIK | 2 Jumlah peristiwa/tokoh/pengkisah yang diliput/ divawancara | 365 | 550 | 735 | 920 | 1.105 | 1.290 | 1.290 | |
| 73 | 1 KEARSIPAN | 3 Persentase Pemanfaatan Bina Sosial PPMK yang sudah beusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 2 | 2 Jumlah gedung/desaip arsip yang dibangun dengan laboratorium karsipan | | | | | | | 2 | |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 | |
|-----|---|---|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Perwimpinan Arsip Daerah | 1 Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar | 397 | 427 | 457 | 487 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan Arsip | 1 Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat 2 Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD dan JKD) | 695 | 1.415 | 2.160 | 2.930 | 3.725 | 4.545 | 4.545 | 51 | |
| 1 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 | 1 Jumlah titik CCTV yang beroperasi di kantor-pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK 2 Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan 3 Berfunginya aplikasi pelaporan publik PTSP berbasis Teknologi informasi | 0 | 42 Kecamatan 42 Puskesmas kecamatan, 5 RSUD 6(Balai)kota dan kantor-wali(kota) | 261 Kelurahan | 292 Puskesmas Keluurahan | 90 SMU dan SMK negeri, BLK | 89 SMU dan SMK negeri, BLK | 89 SMU dan SMK negeri, BLK | |
| 2 | Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik | 1 Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media 2 Tersedayanya sarana informasi kepada masyarakat | 33% Aspirasi yang terespon | 44% | 50% | 70% | 72% | 75% | 75% | 75% | |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun 2 Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksi dengan jaringan komunikasi (Fiber Optic) | 42 | 6(balai)kota dan kantor-wali(kota), 4 cantsat dan 10 dinas tenis | 42 kecamatan dan 42 puskesmas kecamatan, 5 RSUD | 261 Kelurahan | 292 Puskesmas Keluurahan | 90 SMU dan SMK Negeri, BLK | 89 SMU dan SMK Negeri, BLK | 89 SMU dan SMK Negeri, BLK | |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi | 1 Berfungsi nyanya telpon berbasis Fiber Optic Pemda DKI Jakarta 2 Teredia nyanya sarana komunikasi radio trunking | 0 | 2 Kantor Walkikota (Pusat dan Barat) | 3 Kantor Walkikota dan 39 lokasi Kantor Penda DKL Jakarta | 36 lokasi kantor Penda DKI Jakarta | 36 lokasi kantor Penda DKI Jakarta | 1 Unit Data Center | 1 Unit Data Center | 1 Unit Data Center | |
| 5 | Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | 1 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional 2 Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlalu 3 Jumlah koleksi perpusatakan yang disusajikan dengan kebutuhan masyarakat | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | |
| 1 | PERPUSTAKAAN | Program Pengembangan Budaya Baca | 1 Jumlah pengunjung perpusatakan konvensional dan elektronik 2 Jumlah perpusatakan berbasis masyarakat yang dibina | 2.155.526 | 2.371.079 | 2.608.186 | 2.869.005 | 3.131.071 | 4.390.121 | 5.775.076 | 7.298.527 |
| 2 | Program Peningkatan Pelayanan Perpusatakan | 1 Jumlah perpusatakan yang memiliki sertifikat ISO 2 Jumlah titik layanan perpusatakan keliling | 0 | 1 unit DRC | 1 unit Data Center | 1 unit Data Center | 1 unit Data Center | 1 unit Data Center | 1 unit Data Center | 1 unit Data Center | |
| 3 | PERPUSTAKAAN | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Jumlah promosi dan penanaman tanaman pangan dan hortikultura hasil perikanan dan produk hewan 2 Peningkatan Volume Penjualan : | 20 BTTS | 5 BTTS | 5 BTTS (Kep. Seribut) dan 6 BTTS diladerah penyangga | Pembangunan Network Operation Center (NOC) radio trunking | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | PERTANIAN | Program Peningkatan Pangan dan Hortikultura | 1 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional 2 Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlalu 3 Jumlah koleksi perpusatakan yang disusajikan dengan kebutuhan masyarakat | 500 orang | 700 orang | 750 Orang | 700 Orang | 700 Orang | 700 Orang | 4050 orang | 309 |
| 1 | PERTANIAN | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Jumlah perpusatakan berbasis masyarakat 2 Jumlah titik layanan perpusatakan keliling | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 |
| 2 | PERMATA | Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan | 1 Jumlah usaha pengolahan dan pemassaran produk hewan yang dibina 2 Jumlah produksi iusu (liter) | 111 | 113 | 163 | 213 | 263 | 309 | 309 | 309 |
| 3 | PERMATA | Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis | 1 Mempertahankan Jakarta bebas rabies 2 Jumlah volume Hewan/Daging yang dipantau kesehatannya 3 -Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) -Terhindarnya Penyakit AntroX | 945.943 | 1.986.480 | 3.131.071 | 4.390.121 | 5.775.076 | 7.298.527 | 7.298.527 | 7.298.527 |
| 4 | PERMATA | Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura | 1 Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura ramah lingkungan: Sayuran (ton) Buah-buahan (phm) | 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | PERMATA | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan | 1 Jumlah produksi iusu (liter) 2 Jumlah volume Hewan/Daging yang dipantau kesehatannya 3 -Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) -Terhindarnya Penyakit AntroX | 5.344.920 | 5.450.760 | 5.723.298 | 6.009.463 | 6.309.936 | 6.625.433 | 6.625.433 | 6.625.433 |
| 1 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan | 1 Mempertahankan Jakarta bebas dari pembangunan peredaran hasil hutan 2 Jumlah volume pelayanan jasa perkayuan | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus |
| 2 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di Kawasan Industri, Perumahan, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa | 1.200 m ³ | 0 | 5 km | 5 km | 5 km | 10 km | 10 km | 10 km |
| 3 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya pembangunan SPBG 3 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik | minimal 11 SPBG | 3 SPBG | 4 SPBG | 4 SPBG | 4 SPBG | 4 SPBG | 4 SPBG | 4 SPBG |
| 4 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya pembangunan SPBG 3 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|---|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusatakan | 1 Jumlah perpusatakan yang berstandar nasional | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Program Peningkatan Pelayanan Perpusatakan | 1 Jumlah pengunjung perpusatakan yang terlalu 2 Jumlah volume Hewan/Daging yang dipantau kesehatannya 3 -Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) -Terhindarnya Penyakit AntroX | 945.943 | 1.986.480 | 3.131.071 | 4.390.121 | 5.775.076 | 7.298.527 | 7.298.527 | 7.298.527 |
| 1 | PERTANIAN | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Jumlah usaha pengolahan dan pemassaran produk hewan yang dibina 2 Jumlah produksi iusu (liter) | 111 | 113 | 163 | 213 | 263 | 309 | 309 |
| 2 | PERTANIAN | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan | 1 Jumlah produksi iusu (liter) 2 Jumlah volume Hewan/Daging yang dipantau kesehatannya 3 -Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) -Terhindarnya Penyakit AntroX | 5.344.920 | 5.450.760 | 5.723.298 | 6.009.463 | 6.309.936 | 6.625.433 | 6.625.433 |
| 3 | PERMATA | Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis | 1 Mempertahankan Jakarta bebas rabies 2 Jumlah volume Hewan/Daging yang dipantau kesehatannya 3 -Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) -Terhindarnya Penyakit AntroX | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus |
| 4 | PERMATA | Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura | 1 Jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura ramah lingkungan: Sayuran (ton) Buah-buahan (phm) | 1.200 m ³ | 0 | 5 km | 5 km | 5 km | 10 km | 10 km |
| 5 | PERMATA | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan | 1 Jumlah produksi iusu (liter) 2 Jumlah volume pelayanan jasa perkayuan | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.641 | 16.105 | 16.105 |
| 1 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya pembangunan SPBG 3 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik | 6.000 | 6.600 | 7.260 | 7.986 | 8.785 | 9.663 | 9.663 |
| 2 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya pembangunan SPBG 3 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik | 15.000 | 15.000 | 18.150 | 19.965 | 21.962 | 24.158 | 24.158 |
| 3 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya pembangunan SPBG 3 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik | 48.000 | 52.800 | 58.080 | 63.888 | 70.277 | 77.304 | 77.304 |
| 4 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya pembangunan SPBG 3 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik | 12.000 m ³ | 0 | 5 km | 5 km | 5 km | 10 km | 10 km |
| 5 | KELUHANAN | Program Pengolahan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 Jumlah lahan jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, perumahan, Perkantoran, perdagangan dan jasa 2 Persentase terlaksananya pembangunan SPBG 3 Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik | 1.200 m ³ | 1.200 m ³ | 1.200 m ³ | 1.200 m ³ | 1.200 m ³ | 1.200 m ³ | 1.200 m ³ |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | | |
| 2 | PARIWISATA | Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata | 5 Terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energ Baru dan Terbarukan | 15 KWP | 40 KWP | 100 KWP | 100 KWP | 100 KWP | 100 KWP | 455 KWP | |
| 3 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan | 1 Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterasi | 222.348 titik lampu | 15.500 titik lampu | 15.500 titik lampu | 15.500 titik lampu | 15.500 titik lampu | 15.652 titik lampu | 300.000 titik lampu | |
| 1 | PARIWISATA | Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1 Terselesainya skenario mitigasi gempa bumi | peta mikrozonasi level 1 | Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup 50% daerah dengan pemboran dalam di 65 lokasi | Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalam di 65 lokasi | Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalam di 65 lokasi | Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalam di 65 lokasi | Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalam di 65 lokasi | 4000 Kwh Meter | |
| 2 | PARIWISATA | Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata | 2 Jumlah sumur resapan yang terbangun | 1377 Sumur Resapan | 5000 Sumur resapan | 5000 Sumur resapan | 5000 Sumur resapan | 5000 Sumur resapan | 5000 Sumur resapan | 26.377 sumur resapan | |
| 3 | PARIWISATA | Program Peningkatan Industri Kepariwisataan | 1 Jumlah tenaga SDM profesi Pariwisata meningkat | 392 orang | 420 orang | 510 orang | 600 orang | 690 orang | 750 orang | 18 jenis pelatihan | |
| 4 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 2 Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional | 7 Lembaga | 8 Lembaga | 9 Lembaga | 10 Lembaga | 12 Lembaga | 15 Lembaga | 15 Lembaga | |
| 5 | PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 1 Jumlah pergembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata | 0 | 1 Destinasi | 1 Destinasi | 2 Destinasi | 2 Destinasi | 3 Destinasi | 8 Destinasi | |
| 1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap | 1 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus | 2.125.513 / 28.880.000 | 2.300.000 / 31.200.000 | 2.500.000 / 33.600.000 | 2.750.000 / 36.000.000 | 3.000.000 / 39.600.000 | 3.200.000 / 42.000.000 | 13.750.000 / 182.400.000 | |
| 2 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Program Pengembangan Perdagangan Sumber Daya Kelautan yang berkembang | 1 Rata-rata lama tinggal | 5,0 / 5,1 | 5,1 / 5,3 | 5,3 / 5,4 | 5,5 / 5,6 | 5,7 / 5,9 | 5,9 / 6,0 | 5,9 / 6,0 | |
| 3 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Program Pengembangan Perdagangan Sumber Daya Kelautan yang berkembang | 1 Jumlah industri pariwisata yang terdaftar | 7648 Industri | 7800 Industri | 7926 Industri | 8116 Industri | 8278 Industri | 8442 Industri | 8442 Industri | |
| 4 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Program Pengembangan Perdagangan Sumber Daya Kelautan yang berkembang | 2 Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE | 4 lokasi 200 kegiatan | 4 lokasi 250 kegiatan | 4 lokasi 300 kegiatan | 4 lokasi 350 kegiatan | 6 lokasi 500 kegiatan | 7 lokasi 700 kegiatan | 7 lokasi 700 kegiatan | |
| 5 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | Program Pengembangan Perdagangan Sumber Daya Kelautan yang berkembang | 1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata | 0 | 5 unit bus tingkat | 5 unit bus tingkat | 5 unit bus tingkat | 6 lokasi 500 kegiatan | 7 lokasi 700 kegiatan | Pengadaan 5 unit bus | |
| 1 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 1 Jumlah produksi Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Ikan Hasil | 226.004 ton dan 21.054.437 ekor ikan hiias | 232.784 ton dan 22.528.268 ekor ikan hiias | 239.767 ton dan 24.105.248 ekor ikan hiias | 246.960 ton dan 25.792.615 ekor ikan hiias | 254.369 ton dan 27.596.098 ekor ikan hiias | 262.000 ton dan 29.529.965 ekorikan hiias | 262.000 ton dan 29.529.965 ekorikan hiias | |
| 2 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 2 Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan terhadap sumberdaya perikanan | 4.634.450 ekor | 5.500.000 ekor | 6.000.000 ekor | 6.500.000 ekor | 7.000.000 ekor | 7.500.000 ekor | 28 pelanggaran | 28 pelanggaran |
| 3 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 1 Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan | 49 pelanggaran | 40 pelanggaran | 40 pelanggaran | 36 pelanggaran | 32 pelanggaran | 32 pelanggaran | 32 pelanggaran | 32 pelanggaran |
| 4 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 2 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setabu yang diterbitkan | 60.518,7 ton | 66.619 ton | 73.280 ton | 80.608 ton | 88.668 ton | 97.534 ton | 46.277 ton | 46.277 ton |
| 5 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 3 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan | 6.907 ton | 6.976 ton | 7.045 ton | 7.116 ton | 7.187 ton | 7.259 ton | 42.490 ton | 37.100.000 ekor |
| 1 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 4 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan | 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 3000 | 3000 |
| 2 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 5 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 6000 | 6000 |
| 3 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 1 Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha |
| 4 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 2 Jumlah alat ukur yang diterima dan diterbitkan | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 |
| 5 | PERDAGANGAN | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 1 Jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INDUSTRI | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan | 3.331.000 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4.163.750 | 4.163.750 |
| 2 | INDUSTRI | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri | 2 Jumlah alat ukur yang diterima dan diterbitkan | 76 unit | 38 unit | 21 Unit | 23 Unit | 24 Unit | 20 Unit | 202 alat uji | 202 alat uji |
| 3 | INDUSTRI | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Jumlah pelaku usaha yang memenuhi standar | 300 produk berstandar | 310 produk | 322 produk | 342 produk | 367 produk | 397 produk | 397 produk | 397 produk |

| NO. | URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | KONDISI AWAL | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 |
|-----|--------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2013 Target | 2014 Target | 2015 Target | 2016 Target | 2017 Target | |
| 1 | PARIWISATA | Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 6 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dikutuk atau yang diterbitkan | 0 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 2100 |
| 2 | PARIWISATA | Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 7 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 6000 |
| 3 | PARIWISATA | Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 8 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer beracai yang diterbitkan | 0 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 2750 |
| 4 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 9 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan | 0 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 2500 |
| 5 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 10 Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SLUPP TDP) (Persih) | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 152.500 |
| 1 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri | 1 Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan | 247.356 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 | 247.358 |
| 2 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri | 2 Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta | \$ 964 Juta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | \$ 1,2 milyar |
| 3 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri | 1 Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani | 20 Kasus | 30 Kasus | 40 Kasus | 50 Kasus | 70 Kasus | 80 Kasus | 80 Kasus |
| 4 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri | 2 Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha | 20 pelaku usaha |
| 5 | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN GELOGI | Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri | 1 Jumlah alat ukur yang diterima dan diterbitkan | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 | 3.331.000 |
| 1 | INDUSTRI | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan | 3.331.000 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4.163.750 |
| 2 | INDUSTRI | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri | 2 Jumlah peralatan penjualan produk industri yang memenuhi standar | 76 unit | 38 unit | 21 Unit | 23 Unit | 24 Unit | 20 Unit | 202 alat uji |
| 3 | INDUSTRI | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Jumlah pelaku usaha yang memenuhi standar | 300 produk berstandar | 310 produk | 322 produk | 342 produk | 367 produk | 397 produk | 397 produk |

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Joko Widodo



